



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah Penuh)

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan program dan kegiatan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat Kabupaten Sabu Raijua dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2022.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara profesional, transparansi dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 32 yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) Laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut mempunyai tujuan umum untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan juga berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Secara spesifik tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e. Cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; dan
- f. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang wajib disusun pada tiap akhir tahun anggaran dengan mengacu pada regulasi-regulasi pengelolaan keuangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD, Pembangunan Embung, Pembangunan Jalan, Pembangunan Pabrik Karung dan Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 4);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 4);
54. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 Nomor 19 Tahun 2017);
55. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 5);

56. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 6);
57. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 30);
58. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 34);
59. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 32);
60. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 28);
61. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 29);
62. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 32);
63. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 25);
64. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 26);
65. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 32).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan

- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan – LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Akun Luar Biasa

	5.5	Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
	5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
	5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
	5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
	5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
	5.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI		Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
		Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan
Bab VII		Penutup
		Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan
Daftar Lampiran		

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 atau tahun sebelumnya.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar atas makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tabel 2.1 Indikator Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2022

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	30.140	30.600	30.000
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	30.18	30.13	28.73
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	403.846	438.492	480.844
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	5.88	8.12	4.61
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	1.57	2.94	1.26

Sumber Dokumen: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)/BPS-Statistics Indonesia, National Economic Survey

Indikator kemiskinan berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 30.000 jiwa dengan presentase penduduk miskin sebesar 28,73 persen mengalami penurunan sebesar 1,40 persen dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi garis kemiskinan sebesar 480.844, indeks kedalaman kemiskinan 4,61 persen dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 1,26 persen.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Keterangan	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Peningkatan/ Penurunan (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,08	1,25	3,29	2,04
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	53,21	68,82	76,71	7,89

Sumber Dokumen BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada tahun 2022 sebesar 3,29 persen mengalami kenaikan sebesar 2,04 persen dari tahun 2021 dan tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,89 persen.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, artinya distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Untuk Indeks Gini perhitungannya hanya dihitung pada tingkat Provinsi bukan untuk tingkat Kabupaten.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 adalah sebesar 57,90 poin dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	60,64	60,66	60,87	0,21
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,13	13,15	13,17	0,02
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,33	6,66	6,77	0,11
4	Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)	5.354	5.256	5.558	302
5	IPM	56,66	57,03	57,90	0,87

Sumber Dokumen BPS Kab. Sabu Raijua

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sabu Raijua adalah sebesar 57,90 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 57,03 poin mengalami kenaikan sebesar 0,87 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 60,87 tahun pada tahun 2022, lebih cepat 0,21 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 6,77 tahun dengan harapan lama sekolah 13,17 tahun. Sementara Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp5.558 ribu rupiah atau mengalami kenaikan sebesar Rp302 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Sabu Raijua 57,90 poin pada saat ini berada pada urutan 22 dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian

suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

No.	Kategori	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,73	2,95	2,43	1,33	4,97
2	Pertambangan dan Penggalian	4,94	7,14	3,43	5,50	3,62
3	Industri Pengolahan	5,23	6,02	-3,35	-1,73	6,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,34	0,50	8,24	2,51	6,42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,65	5,93	5,34	7,38	3,49
6	Konstruksi	5,94	5,84	-7,96	7,53	-0,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	7,12	-5,78	3,39	3,46
8	Transportasi dan Pergudangan	5,27	4,70	-7,98	0,80	8,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,25	9,37	-22,02	4,15	3,64
10	Informasi dan Komunikasi	4,34	3,77	10,45	6,71	3,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,60	9,38	11,35	5,10	0,91
12	Real Estate	3,27	-0,55	-2,00	1,94	1,50
13	Jasa Perusahaan	4,88	5,56	-32,29	-8,39	2,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	6,22	4,08	-8,32	-2,92
15	Jasa Pendidikan	3,01	5,79	1,48	-1,98	-0,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,71	3,63	4,23	10,19	0,87
17	Jasa Lainnya	7,39	5,81	-16,83	-0,95	2,08
	PDRB	5,13	4,47	-1,11	1,49	3,02

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sabu Raijua

Selama kurun waktu Tahun 2018-2022 perekonomian Kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan rata-rata 2,60%. Pada periode Tahun 2018–2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua sebesar 4,47% dan pada kurun waktu Tahun 2021–2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua sebesar 1,53%.

Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB tahun ke-n dikurangi dengan nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai tambah dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (perkembangan berantai). Produk Domestik Regional Bruto Perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang

menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sabu Raijua

Struktur perekonomian Kabupaten Sabu Raijua dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

(Dalam miliar rupiah)

No	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	329,21	338,92	347,16	351,77	369,27
2	Pertambangan dan Penggalian	2,93	3,14	3,25	3,43	3,55
3	Industri Pengolahan	10,28	10,90	10,54	10,36	11,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-	0,18	0,19	0,20	0,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,11	0,12	0,13	0,13
6	Konstruksi	105,98	112,17	103,25	111,03	110,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	122,66	131,40	123,80	128,00	132,43
8	Transportasi dan Pergudangan	31,10	32,56	29,96	30,20	32,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,05	6,62	5,16	5,38	5,57
10	Informasi dan Komunikasi	6,45	6,70	7,40	7,89	8,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	1,07	1,19	1,25	1,26
12	Real Estate	35,40	35,21	34,50	35,17	35,70
13	Jasa Perusahaan	-	0,18	0,12	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	83,94	89,16	92,80	85,08	82,59
15	Jasa Pendidikan	2,42	2,56	2,60	2,55	2,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,30	9,63	10,04	11,07	11,16
17	Jasa Lainnya	1,24	1,31	1,09	1,08	1,10
PDRB		748,41	781,83	773,18	784,69	808,41

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sabu Raijua

2.1.8 Struktur Ekonomi

Sebagian besar lahan di Sabu Raijua adalah tanah kering dan hanya 4,89% yang merupakan lahan sawah. Kondisi ini disebabkan oleh musim kemarau yang terjadi hampir sepanjang tahun. Namun demikian beberapa usaha dilakukan masyarakat untuk menjadikan lahannya dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian,

diantaranya dengan pembangunan irigasi dan sumur gali. Selain itu, pemanfaatan lahan kering atau lahan tidur juga ditingkatkan dengan melakukan penanaman tanaman palawija, hortikultura dan kehutanan pada lahan yang memiliki sumber daya air sekalipun saat musim kemarau, sehingga panen dapat dilakukan pada musim kemarau dimana hal seperti ini sebelumnya tidak biasa dilakukan oleh petani di Kabupaten Sabu Raijua.

Kondisi alam yang kering dengan curah hujan yang rendah berdampak pada masih rendahnya produksi berbagai tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua. Tercatat, pada tahun 2022, padi merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi yakni 9.212,4 ton, disusul jagung dan kacang hijau yang masing-masing sebanyak 7.363,2 ton dan 821,6 ton.

Sementara itu, hewan ternak besar yang banyak terdapat di kabupaten ini adalah kerbau, kuda dan sapi dan ternak kecil kambing, babi dan domba. Di antara ketiganya, populasi kambing merupakan yang tertinggi. Ternak-ternak tersebut, selain dikonsumsi dan untuk keperluan adat, sebagian juga dijual ke luar wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Disektor perikanan, meskipun dikelilingi lautan, nelayan di Sabu Raijua yang sebagian besar masih melakukan penangkapan ikan secara tradisional yakni menangkap ikan di laut dangkal dengan menggunakan teknologi dan perahu sederhana (tanpa motor) sehingga produksinya masih rendah. Pada tahun 2022, tercatat total produksi ikan tangkap sebanyak 1.080 ton. Masih rendahnya penggunaan kapal bermotor salah satunya disebabkan masih cukup tingginya biaya bahan bakar di kabupaten ini dan disektor perikanan, meskipun dikelilingi lautan, produksi ikan tangkap di Sabu Raijua masih rendah. Namun, hasil rumput laut yang merupakan komoditi andalan di kabupaten ini di tahun yang sama sebanyak 11.985.379 ton.

Secara umum, kabupaten-kabupaten di NTT terletak di satu daratan (satu pulau). Namun, ada empat kabupaten yang wilayahnya terpisah pulau dari kabupaten lainnya yakni Alor, Lembata, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Secara umum, kondisi ini memberikan tantangan pembangunan tersendiri bagi keempat kabupaten tersebut salah satunya disebabkan aksesnya ke wilayah lain tidak selancar di kabupaten daratan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen formal Rencana Keuangan Tahunan Daerah, hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah. Pendapatan yang ditargetkan dipergunakan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam pelaporan keuangan.

Untuk mencapai dan menjabarkan visi, misi serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sabu Raijua tahun 2022-2026, arah dan kebijakan pembangunan tahun 2022 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 sebagai landasan untuk menyusun APBD tahun 2022.

Penetapan target pendapatan dan belanja dalam APBD tahun 2022 telah diarahkan pada pelaksanaan strategi kebijakan APBD berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon dan Prioritas APBD (PPA) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua.

Sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kebijakan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja maka Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan persetujuan DPRD melakukan Perubahan APBD (APBD-P) baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Tabel 2.6 Perbandingan APBD dan APBD-P Tahun 2022

URAIAN	APBD 2022 (Rp)	APBD-P 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Pendapatan	593.411.732.241,00	604.507.472.367,00	11.095.740.126,00
Pendapatan Asli Daerah	52.807.914.678,00	52.343.352.290,00	(454.562.388,00)
Pendapatan Transfer	521.635.689.466,00	527.703.242.097,00	6.067.552.631,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	18.968.128.097,00	24.460.877.980,00	5.492.749.883,00
Belanja	637.950.319.792,00	641.636.086.568,00	3.685.766.776,00
Belanja Operasi	388.854.197.825,00	383.926.677.821,00	(4.927.520.004,00)
Belanja Modal	147.129.202.425,00	149.863.987.142,00	2.734.784.717,00
Belanja Tidak Terduga	5.593.690.942,00	11.026.917.843,00	5.433.226.901,00
Belanja Transfer	96.373.228.600,00	98.818.503.762,00	2.445.275.162,00
Surplus/(Defisit)	(44.538.587.551,00)	(37.128.614.201,00)	7.409.973.350,00
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan pembiayaan daerah	51.538.587.551,00	70.898.614.201,00	19.360.026.650,00
Pengeluaran pembiayaan daerah	7.000.000.000,00	33.770.000.000,00	26.770.000.000,00
Pembiayaan Netto	44.538.587.551,00	37.128.614.201,00	(7.409.973.350,00)

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan sumber pendapatan yang masih terbatas dan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah untuk terus berupaya dari tahun ke tahun menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pada tahun 2021 sebesar Rp48.266.916.159,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.086.436.131,00 atau 1.08% menjadi Rp52.343.352.290,00 di tahun 2022.

Selain dari PAD, pendapatan daerah pun bersumber dari penerimaan Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp8.257.411.000,00; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp337.332.898.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp98.539.121.473,00, Dana Desa sebesar

Rp61.458.836.000,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp22.114.975.624,00 sehingga total anggaran pendapatan transfer sebesar Rp527.703.242.097,00, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp52.343.352.290,00, Pendapatan Hibah Rp1.873.000.000,00 dan Pendapatan lainnya Rp22.587.877.980,00 sehingga secara keseluruhan total Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2022 dianggarkan setelah perubahan APBD sebesar Rp604.507.472.367,00.

Dari gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi belanja daerah tahun anggaran 2022, dari segi struktur APBD yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikenal dengan Belanja Operasi dialokasikan untuk mendanai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sedangkan Belanja Modal dialokasikan untuk mendanai kegiatan perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang member lebih dari 1 (satu) periode akuntansi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan setelah Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp641.636.086.568,00 yang terbagi dalam Belanja Operasi sebesar Rp383.926.677.821,00, Belanja Modal sebesar Rp149.863.987.142,00, Belanja

Tidak Terduga sebesar Rp11.026.917.843,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp96.818.503.762,00.

Jumlah belanja operasi tersebut diatas, secara rinci dialokasi untuk:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp193.378.416.095,00 diperuntukkan gaji dan tunjangan Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, belanja honorarium PNS serta belanja pegawai Dana BOS.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp179.592.496.883,00 diperuntukkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat serta belanja barang dan jasa Dana BOS.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp48.300.000,00 diperuntukkan pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.905.167.843,00 yang dialokasikan untuk:

- 1) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp250.000.000,00;
- 2) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp680.000.000,00;
- 3) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp410.000.000,00;
- 4) Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp483.310.000,00;
- 5) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp345.000.000,00
- 6) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp1.100.000.000,00;
- 7) BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp2.540.300.000,00;
- 8) BOP Pendidikan Kesetaraan Rp147.300.000,00;
- 9) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp466.172.000,00;
- 10) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp655.085.843,00;
- 11) Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD) Keluarga Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp200.000.000,00;
- 12) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp193.000.000,00;

- 13) Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp220.000.000,00;
- 14) Hibah Pembangunan Gedung Serba Guna Dalam Rangka Penyelenggaraan Sinode GMIT XXXV Tahun 2023 di Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp150.000.000,00; dan
- 15) Hibah Buku ke Perpustakaan Desa sebesar Rp65.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.002.297.000,00 yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp1.576.045.000,00, belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp675.000.000,00, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp723.252.000,00 dan belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp28.000.000,00

Sedangkan belanja modal sebesar Rp149.863.987.142,00 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara rinci dialokasikan untuk:

- Belanja modal tanah sebesar Rp13.500.000;
- Belanja modal peralatan mesin sebesar Rp9.677.912.888,00
- Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp35.096.828.617,00;
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp102.017.733.837,00; dan
- Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.058.011.800,00.

Selain belanja operasi dan modal terdapat juga belanja tidak terduga sebesar Rp11.026.917.843 untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan belanja transfer sebesar Rp96.818.503.762,00 yang terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp849.661.762,00 dan Belanja bantuan keuangan sebesar Rp95.968.842.000,00.

Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perindustrian, sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan, komunikasi dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi.

Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan

dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2022.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pada sisi pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan atau pembayaran dimaksud merupakan penerimaan atau pembayaran baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan dalam hal terjadi surplus anggaran dimanfaatkan untuk Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperuntukkan sebagai investasi dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dan penyertaan modal kepada BUMD yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta mengembangkan operasi dan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah.

Tahun anggaran 2022 kondisi APBD setelah perubahan mengalami defisit sebesar Rp37.128.614.201,28 yang merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2022, sehingga dengan kondisi defisit tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.898.614.201,28 yang berasal dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp60.995.254.428,59; dan
- b. Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp9.903.359.772,69

Sedangkan untuk pengalokasian anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp33.770.000.000,00 pemerintah memanfaatkan surplus anggaran dari kelebihan dana penerimaan pembiayaan yang tersedia tahun 2022 untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp26.770.000.000,00 dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp7.000.000.000,00.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, dimana daerah dapat memanfaatkan kelebihan dana yang ada semaksimal mungkin untuk memenuhi segala pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk menunjang jalannya pemerintahan dimasa datang dengan melakukan cadangan dana pada Lembaga Keuangan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kinerja keuangan APBD mengikhtisarkan uraian ringkas Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menggunakan ukuran kuantitatif yang menguraikan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dengan pencapaian target kinerja keuangan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*), sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Laporan kinerja keuangan yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program didasarkan capaian Target Kinerja dan Pagu Indikatif dari masing-masing urusan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Pencapaian target kinerja diukur dari perbandingan realisasi dan anggaran menurut satuan kerja pada masing-masing program yang menjadi tugas dan fungsinya. Perbandingan dan realisasi anggaran tersebut didasarkan atas belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sesuai klasifikasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. Jumlah realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena pelaporan realisasi anggaran dalam LRA tidak didasarkan program dan kegiatan,

sebagaimana klasifikasi anggaran belanja operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022.

2.4 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua meliputi hal-hal sebagai berikut.

a) *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah dan Puskesmas. Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD dan 6 Puskesmas. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi 202 orang tenaga kesehatan 6 orang dokter PNS dan 79 orang perawat, 57 orang bidan, 18 orang apoteker, 2 orang penyuluh kesehatan, serta 40 orang tenaga kesehatan lainnya.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp81.053.221.267,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji Aparatur Sipil Negara senilai Rp483.606.679.017,00 atau sebesar 16,76%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp80.242.999.480,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp526.830.015.243,00 atau sebesar 15,23%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
a. Belanja pada Dinas Kesehatan	58.105.564.290,00	55.224.122.991,00
1) BELANJA OPERASI		
a) Belanja Pegawai	20.350.563.990,00	18.767.748.657,00
b) Belanja Barang dan Jasa	31.013.075.620,00	30.478.699.014,00
c) Belanja Hibah	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00
2) BELANJA MODAL		
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.133.588.635,00	1.646.116.275,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.093.222.045,00	2.820.589.045,00
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	65.970.000,00

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.114.000,00	0,00
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain :	22.947.656.977,00	25.018.876.489,00
1) Program administrasi keuangan perangkat daerah	8.394.918.373,00	7.065.594.825,00
2) Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	325.136.000,00	62.450.000,00
3) Program administrasi umum perangkat daerah	453.905.975,00	457.541.984,00
4) Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.090.465.150,00	3.553.715.150,00
5) Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	562.520.000,00	416.908.000,00
6) Program penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	7.702.469.574,00	8.834.761.738,00
7) Program penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	1.418.241.905,00	4.627.904.792,00
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	81.053.221.267,00	80.242.999.480,00
Total Belanja Daerah	637.950.319.792,00	641.636.086.568,00
Gaji ASN	154.343.640.775,00	114.806.071.325,00
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	483.606.679.017,00	526.830.015.243,00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	16,76%	15,23%

b) Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 1 PAUD Negeri, 49 SD Negeri/Inpres, 24 SMP Negeri dan 2 pendidikan kesetaraan yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp159.882.392.112,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp637.950.319.792,00 atau sebesar 25,05%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp150.066.387.473,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp641.636.086.568,00 atau sebesar 23,39%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
a. Belanja pada Dinas Pendidikan	157.798.847.112,00	148.406.202.473,00
1) BELANJA OPERASI		
a) Belanja Pegawai	115.370.902.000,00	100.291.292.584,00
b) Belanja Barang dan Jasa	23.821.447.895,00	29.095.874.384,00
c) Belanja Hibah	3.713.950.000,00	3.777.600.000,00
2) BELANJA MODAL		
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.078.271.750,00	1.151.588.128,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.225.605.000,00	11.109.835.577,00
c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.588.670.467,00	2.980.011.800,00
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :	2.023.545.000,00	1.660.185.000,00
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	244.792.000,00	14.760.000,00
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	1.778.753.000,00	1.645.425.000,00
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	159.822.392.112,00	150.066.387.473,00
Total Belanja Daerah	637.950.319.792,00	641.636.086.568,00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	25,05%	23,39%

c) Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari Dana DAK, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp263.834.354.705,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp637.950.319.792,00 atau sebesar 38,92%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai

Rp266.634.186.238,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp641.636.086.568,00 atau sebesar 39,33%. Rincian lebih lanjut disajikan di bawah ini:

Tabel 2.9 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur APBD dan APBD-P TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua

Komponen Perhitungan		APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
a)	Belanja Modal:	147.129.202.425,00	149.863.987.142,00
	1) Tanah;	106.000.000,00	13.500.000,00
	2) Peralatan Dan Mesin;	9.188.775.903,00	9.677.912.888,00
	3) Bangunan Dan Gedung;	28.935.379.619,00	35.096.828.617,00
	4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	103.757.018.886,00	102.017.733.837,00
	5) Aset Tetap Lainnya;	5.142.028.017,00	3.058.011.800,00
	6) Aset Lainnya.	0,00	0,00
b)	Belanja Pemeliharaan	9.059.650.917,00	8.894.245.576,00
c)	Belanja Hibah	9.364.733.363,00	8.585.691.520,00
d)	Belanja Bantuan Sosial	2.311.926.000,00	3.321.420.000,00
e)	Belanja Bantuan Keuangan	95.968.842.000,00	95.968.842.000,00
Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah		263.834.354.705,00	266.634.186.238,00
Belanja Infrastruktur Daerah (%)		38,92%	39,33%

d) Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Kabupaten Sabu Raijua, alokasi *mandatory spending* Alokasi Dana Desa membantu kelancaran operasional 58 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Sedangkan Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk dan Perubahan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp34.510.006.000,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp345.100.060.000,00 atau sebesar 10%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	34.510.006.000,00	34.510.006.000,00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	345.100.060.000,00	345.100.060.000,00
	Persentase Alokasi ADD	10%	10%

e) **Mandatory Spending Fungsi Pengawasan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022. Alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua memiliki 1 Inspektur, 2 Inspektur Pembantu dan 4 auditor yang melakukan tugas pengawasan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp3.102.486.979,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp637.950.319.792,00 atau sebesar 0,49%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp3.085.607.893,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp641.636.086.568,00 atau sebesar 0,48%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.376.000,00	0,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	234.859.800,00	336.034.800,00
3	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.970.000,00	112.060.000,00
4	Pendampingan dan Asistensi	195.208.000,00	179.591.000,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.897.579,00	2.040.790.493,00
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.428.000,00	103.743.000,00
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.553.350,00	188.105.000,00
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.262.000,00	24.091.350,00
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.052.250,00	18.202.250,00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.880.000,00	82.990.000,00
	Total Alokasi Pengawasan	3.102.486.979,00	3.085.607.893,00
	Total Belanja Daerah	637.950.319.792,00	641.636.086.568,00
	Persentase Alokasi Pengawasan	0,49%	0,48%

f) Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Alokasi anggaran fungsi penanganan dampak inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah terdapat masyarakat yang menerima Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk UMKM dan Nelayan. Adanya kegiatan operasi pasar untuk menangani inflasi dan adanya subsidi sektor transportasi umum.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi penanganan dampak inflasi Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Sabu Raijua dialokasikan senilai Rp1.775.989.200,00 dari nilai DAU dan DBH Triwulan IV senilai Rp62.002.676.163,00 atau sebesar 2,86%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran (Rp)		Jumlah
			Sumber Pendanaan		
			DAU	DBH	
1	Bantuan Sosial				
	Rencana BLT untuk UMKM dan Nelayan	Bantuan Sosial	718.925.000,00	-	718.925.000,00
2	Penciptaan Lapangan Kerja				
	Peningkatan Jaringan Irigasi	Barang dan Jasa	398.954.200,00	-	398.954.200,00
3	Subsidi Sektor Transportasi				
	Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum	Barang dan Jasa	0,00	53.540.000,00	53.540.000,00
4	Perlindungan Sosial Lainnya				
	Operasi Pasar	Barang dan Jasa	447.725.000,00	-	447.725.000,00
	Bantuan bibit rumput laut untuk kelompok petani rumput laut		121.060.358,00	35.784.642,00	156.845.000,00
	Jumlah belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi		1.686.664.558,00	89.324.642,00	1.775.989.200,00
	DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022				62.002.676.163,00
	Persentase Mandatory Spending				2,86%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Realisasi APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp568.428.975.418,68 atau 94,03% dari anggaran Tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp604.507.472.367,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp583.834.842.657,35 atau 94,39% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp618.563.059.898,00;
- b. Realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp577.424.456.047,70 atau 89,99% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp641.636.086.568,00 sedangkan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp643.381.390.457,62 atau 87,69% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp733.671.102.988,00;
- c. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp71.033.641.416,28 atau 100,19% dari anggaran setelah perubahan Rp70.898.614.201,28 dan realisasi pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp130.467.756.957,88 atau 106,85% dari anggaran setelah perubahan Rp122.108.043.090,00; dan
- d. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 20,73% dari anggaran setelah perubahan Rp33.770.000.000,00 dan realisasi pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp9.925.954.729,02 atau 141,80% dari anggaran setelah perubahan Rp7.000.000.000,00.

Gambar realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2022 dan 2021

Uraian	Pagu APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2022 (Rp)	%	Realisasi APBD 2021 (Rp)
Pendapatan	604.507.472.367,00	568.428.975.418,68	94,03	583.834.842.657,35
Belanja dan transfer	641.636.086.568,00	577.424.456.047,70	89,99	643.381.390.457,62
Surplus (defisit)	(37.128.614.201,00)	(8.995.480.629,02)	24,23	(59.546.547.800,27)
Pembiayaan :				
• Penerimaan Pembiayaan	70.898.614.201,28	71.033.641.416,28	100,19	130.467.756.957,88
• Pengeluaran Pembiayaan	33.770.000.000,00	7.000.000.000,00	20,73	9.925.954.729,02
Pembiayaan Netto	37.128.614.201,28	64.033.641.416,28	172,46	120.541.802.228,86
SILPA Tahun Berjalan	0,28	55.038.160.787,26	0,00	60.995.254.428,59

a. Realisasi Pendapatan Daerah

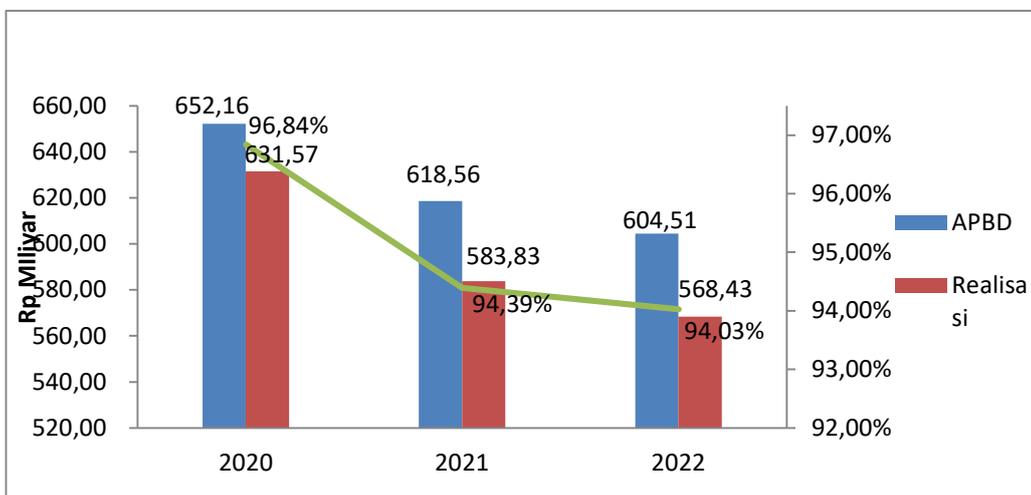
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp568.428.975.418,68 atau mencapai 94,03% dari target Pendapatan Daerah dalam APBD tahun 2022 sebesar Rp604.507.472.367,00. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	604.507.472.367,00	568.428.975.418,68	94,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.343.352.290,00	30.976.942.583,68	59,18
Pendapatan Pajak Daerah	4.494.780.442,00	5.661.974.798,04	125,97
Pendapatan Retribusi Daerah	39.978.081.808,00	18.160.726.740,00	45,43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.329.492.032,00	2.329.492.032,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.540.998.008,00	4.824.749.013,64	87,07
PENDAPATAN TRANSFER	527.703.242.097,00	514.572.199.210,00	97,51
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	444.129.430.473,00	440.083.421.954,00	99,09
Dana Bagi Hasil Pajak	6.073.966.000,00	7.378.901.889,00	121,48
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.183.445.000,00	2.268.456.977,00	103,89
Dana Alokasi Umum	337.332.898.000,00	336.260.812.302,00	99,68
Dana Alokasi Khusus Fisik	67.888.431.473,00	67.791.045.075,00	99,86
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	30.650.690.000,00	26.384.205.711,00	86,08
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06
Dana Desa	61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06
Transfer Pemerintah Provinsi	22.114.975.624,00	13.606.500.228,00	61,53
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.114.975.624,00	13.606.500.228,00	61,53
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	24.460.877.980,00	22.879.833.625,00	93,54
Pendapatan Hibah	1.873.000.000,00	885.825.500,00	47,29
Pendapatan Lainnya	22.587.877.980,00	21.994.008.125,00	97,37

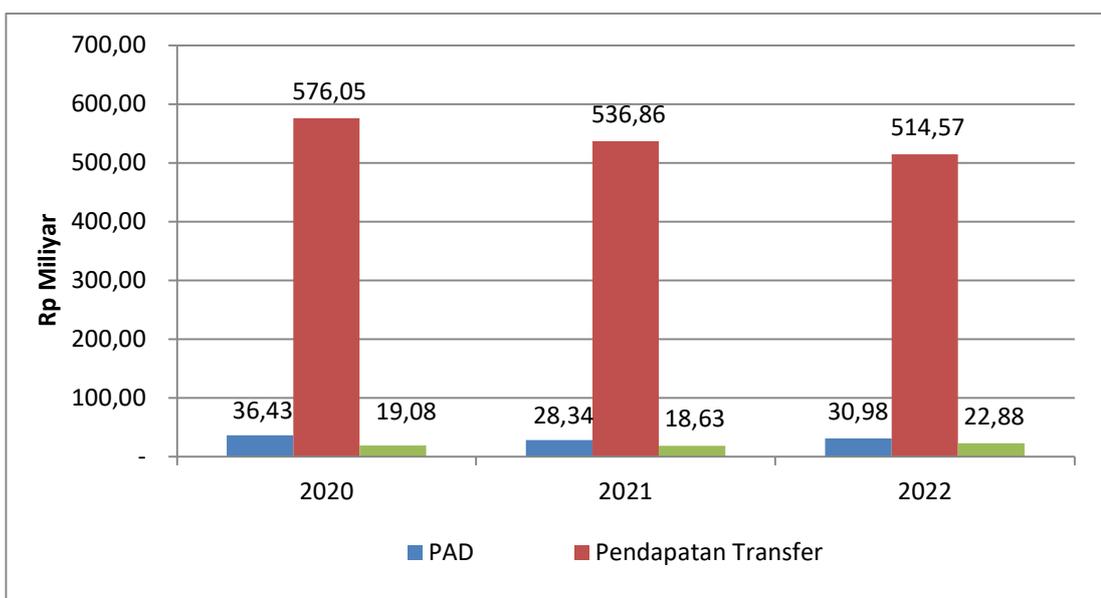
Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020-2022 dapat dilihat bahwa secara umum *trend* realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan terus menurun dari tahun ke tahun.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah.



Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan disebabkan Pendapatan Transfer pada tahun 2022 sebesar Rp514.572.199.210,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp22.292.114.002,00 atau 4,15% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp536.864.313.212,00. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022 meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

Penerimaan PAD pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.637.697.138,33 atau 9,31% yang bersumber dari peningkatan pada Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp1.118.393.178,04 atau 24,61% dibanding tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp16.256.329.840,00 atau 853,62% dibanding realisasi tahun 2021. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah berusaha kembali memulihkan perekonomian daerah pasca Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Penurunan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp22.292.114.002,00 atau 4,15% bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.791.396.818,00 atau 0,86% dibanding pada tahun 2021. Sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang mengalami peningkatan sebesar 23,37% dari semula Rp11.029.275.670,00 di tahun 2021 menjadi Rp13.606.500.228,00 di tahun 2022.

Realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang pada tahun 2021 merupakan komponen dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Menjadi komponen Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana eksternal. Hal ini dapat terlihat dari rasio Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah yang mencapai 90,35%. atau dengan kata lain operasional pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana dari pihak eksternal.

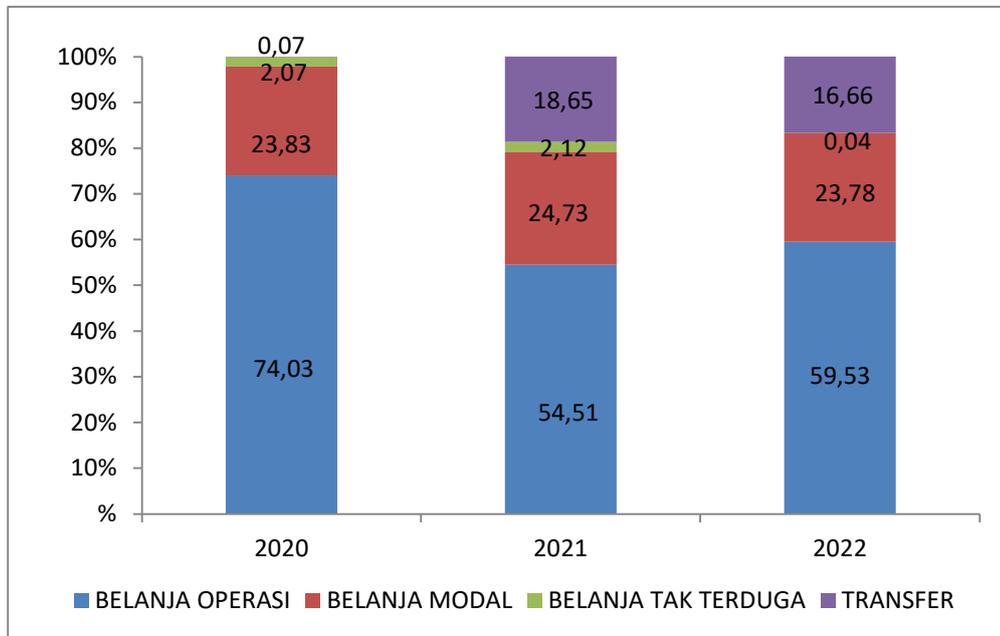
b. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2022 sebesar Rp577.424.456.047,70 atau mencapai 89,99% dari rencana belanja daerah dalam APBD tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran kurang baik karena masih di bawah 90 persen dan secara capaian dan nilai realisasi belanja mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Ringkasan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2022

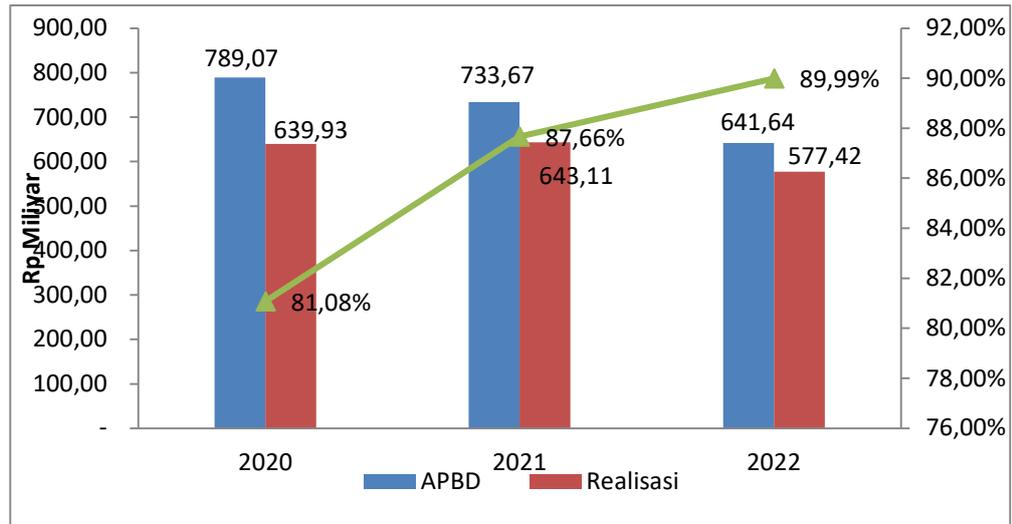
Uraian	2022				2021		2022 : 2021	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/Kurang	Persentase Capaian	Realisasi	Kuranga/ (Peningkatan)	Persentase	
Belanja Operasi	303.008.677.821,00	343.734.501.658,70	(40.192.178.162,30)	89,53	350.685.801.575,00	(6.951.300.316,30)	(1,98)	
Belanja Modal	149.863.987.142,00	137.251.124.197,00	(12.672.862.945,00)	91,61	109.081.130.973,82	(21.800.006.676,62)	(13,70)	
Belanja Tak Terduga	11.028.817.843,00	216.151.500,00	(10.810.786.343,00)	1,96	13.611.188.338,00	(13.395.016.838,00)	(98,41)	
Transfer	96.818.503.762,00	95.182.678.692,00	(835.825.070,00)	99,34	119.983.289.278,00	(23.810.610.578,00)	(18,84)	
Jumlah	641.528.889.568,00	577.424.456.047,70	(116.145.248.620,90)	89,99	643.381.390.467,82	(85.956.934.409,92)	(10,25)	

Jika dilihat pada tabel di atas, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer mengalami penurunan pada tahun 2022 yang disebabkan oleh penurunan Dana Perimbangan, Dana Desa dan Pendapatan Transfer Pusat Lainnya. Pada tahun 2022, proporsi Belanja Operasi masih menjadi komponen belanja yang paling dominan dari total belanja dan transfer dengan rasio mencapai 59,53% sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2019-2021

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua mengalami peningkatan dari 81,10% pada tahun 2020 menjadi 87,66% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 menjadi 89,99%. Dengan realisasi belanja yang optimal, seluruh operasional pemerintah daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa semakin baik sehingga APBD bisa memenuhi seluruh fungsinya terutama perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Perkembangan realisasi belanja dan transfer selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 3.4**.



Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020-2022

c. **Pembiayaan Daerah**

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA. 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	70.898.614.201,28	71.033.641.416,28	130.467.756.957,88
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.995.254.428,59	61.130.281.643,59	97.982.962.339,82
Pencairan Dana Cadangan	9.903.359.772,69	9.903.359.772,69	32.484.794.618,06
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	33.770.000.000,00	7.000.000.000,00	9.925.954.729,02
Pembentukan Dana Cadangan	26.770.000.000,00	0,00	2.925.954.729,02
Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	37.128.614.201,28	64.033.641.416,28	120.541.802.228,86

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2022 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Pemberian Pinjaman Daerah. Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Target Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024. Adapun Penyertaan Modal yang terealisasi 100% dari target yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.

3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa referensi, rasio kemandirian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

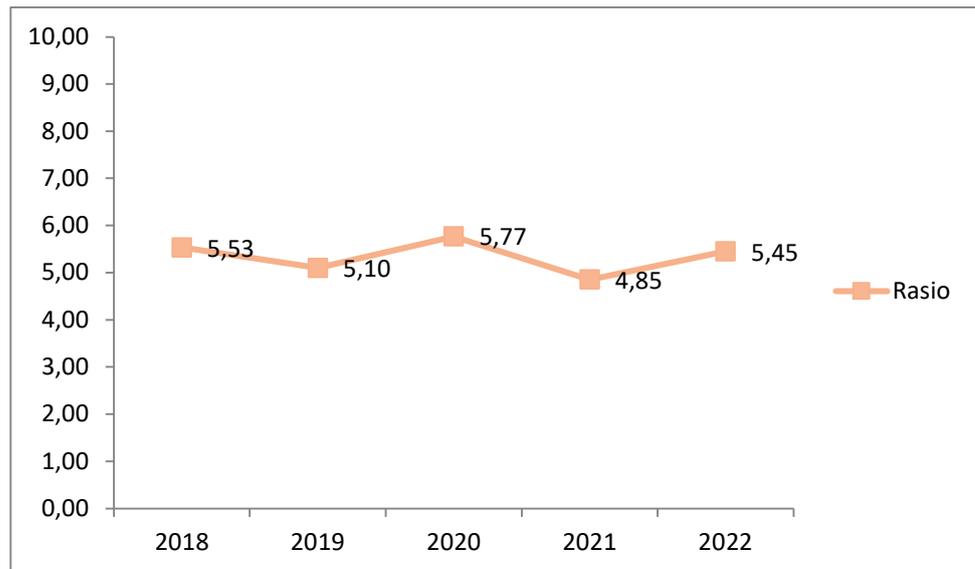
Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018 s/d 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2018	31.139.294.535,86	562.919.129.908,86	5,53
2019	31.937.211.458,10	626.402.705.471,10	5,10
2020	36.433.624.244,95	631.566.035.090,96	5,77
2021	28.339.245.445,35	583.834.842.657,35	4,85
2022	30.976.942.583,68	568.428.975.418,68	5,45
Jumlah	158.826.318.267,94	2.973.151.688.546,95	5,34
Rata-rata	31.765.263.653,59	594.630.337.709,39	5,34

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah. Ini terlihat dari rasio kemandirian pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2018 sebesar 5,53%, tahun 2019 sebesar 5,10%, tahun 2020 sebesar 5,77%, tahun 2021 sebesar 4,85%, dan tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,45% sebagaimana terlihat pada **Grafik 3.5**.



Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Perkembangan rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan Kabupaten Sabu Raijua cenderung masih termasuk kategori rendah sekali. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua belum menunjukkan kemandirian dan masih bergantung pada pihak eksternal, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 0,43% menjadi sehingga menjadi 5,10%. Pada tahun 2020 mengalami Peningkatan sebesar 0,67% sehingga menjadi 5,77%. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 0,91% menjadi 4,85%. Pada tahun 2022 rasio kemandirian mengalami Peningkatan sebesar 0,60% menjadi 5,45%.

Kemandirian keuangan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,43% disebabkan karena menurunnya PAD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Peningkatan kemandirian keuangan pada tahun 2020 sebesar 0,67% yang disebabkan adanya peningkatan pada PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar 21,29% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2021 kemandirian keuangan kembali mengalami penurunan yang disebabkan realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar 48,22%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5,45% yang didukung oleh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 24,61% dan 249,94%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua belum menunjukkan kemandirian dan masih bergantung pada pihak eksternal, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal satu atau 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Rasio Efektivitas

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=3/2
2018	52.053.909.323,00	31.139.294.535,86	59,82
2019	45.452.754.415,00	31.937.211.458,00	70,26
2020	50.357.372.588,00	36.433.624.244,95	72,35
2021	48.266.916.159,00	28.339.245.445,35	58,71
2022	52.343.352.290,00	30.976.942.583,68	59,18
Jumlah	248.474.304.775,00	158.826.318.267,84	63,92
Rata-rata	49.694.860.955,00	31.765.263.653,57	63,92

Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektivitas tahun 2018 mengalami peningkatan dari 59,82% menjadi 70,26% di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena turunnya target PAD dan naik realisasi yang dicapai. Sedangkan tahun 2020 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 72,35% disebabkan terjadi peningkatan tingkat realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Penurunan rasio efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 58,71% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 59,18% yang disebabkan terjadi peningkatan tingkat realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sabu Raijua masih belum efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan.

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 3.7 Rasio Belanja Operasional

Tahun	Realisasi Belanja Operasional (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2018	402.590.910.614,00	556.119.022.268,00	72,39
2019	491.899.397.726,00	648.309.628.375,00	75,87
2020	473.602.050.617,36	639.785.809.385,36	74,03
2021	350.685.801.975,00	643.381.390.457,62	54,51
2022	343.734.501.658,70	577.424.456.047,70	59,53
Jumlah	2.062.512.662.591,06	3.065.020.306.533,68	67,29
Rata-rata	412.502.532.518,21	613.004.061.306,74	67,29

Berdasarkan rasio di atas diketahui bahwa belanja operasional pemerintah masih mendominasi jumlah APBD dari tahun 2018 s/d 2022. Persentase belanja operasional pada tahun 2019 meningkat menjadi 75,87% dari 72,39% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan rasio belanja operasi masing-masing sebesar 74,03% dan 54,51%. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 59,53%.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2018	152.978.911.657,00	556.119.022.268,00	27,51
2019	156.173.945.800,00	648.309.628.375,00	24,09
2020	152.480.443.087,00	639.785.809.385,36	23,83
2021	159.091.130.873,62	643.381.390.457,62	24,73
2022	137.291.124.197,00	577.424.456.047,70	23,78
Jumlah	758.015.555.614,62	3.065.020.306.533,68	24,73
Rata-rata	151.603.111.122,92	613.004.061.306,74	24,73

Rasio belanja modal pada tahun 2018 sebesar 27,51% mengalami penurunan menjadi 24,09% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 23,83%. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 24,73%. Pada tahun 2022 rasio belanja modal mengalami penurunan menjadi 23,78%. Hal ini menunjukkan Kabupaten Sabu Raijua dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Dari data rasio di atas juga dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua masih rendah.

d. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.9 Rasio Pengelolaan Belanja

Tahun	Total Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=2/3
2018	562.919.129.908,86	556.119.022.268,00	101,22
2019	626.402.705.471,10	648.308.628.375,00	96,62
2020	631.781.244.412,46	639.934.784.386,36	98,73
2021	583.834.842.657,35	643.381.390.457,62	90,74
2022	568.428.975.418,68	577.424.456.047,70	98,44
Jumlah	2.973.366.897.868,45	3.065.168.281.534,68	97,01
Rata-rata	594.673.379.573,69	613.033.656.306,94	97,01

Berdasarkan rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah realisasi belanja tahun 2018 jumlah realisasi belanja lebih rendah dari realisasi pendapatan. Namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah realisasi belanja tinggi dari realisasi pendapatan sehingga Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan defisit dan akan ditambah dengan pembiayaan neto untuk menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

1) Persentase Pertumbuhan PAD

$$\text{Presentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } P - \text{PAD tahun } p-1}{\text{Total Pendapatan } p-1} \times 100\%$$

Tabel 3.10 Rasio Persentase Pertumbuhan PAD

Tahun	Realisasi PAD tahun p-1 (Rp)	Realisasi PAD tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/2
2018	47.782.615.776,16	31.139.294.535,86	(34,83)
2019	31.139.294.535,86	31.937.211.458,10	2,56
2020	31.937.211.458,10	36.433.624.244,95	14,08
2021	36.433.624.244,95	28.339.245.445,35	(22,22)
2022	28.339.245.445,35	30.976.942.583,68	9,31
Jumlah	175.631.991.460,42	158.826.318.267,94	(9,57)
Rata-rata	35.126.398.292,08	31.765.263.653,59	(9,57)

Dari perhitungan di atas menunjukkan pertumbuhan PAD yang berfluktuasi. Pertumbuhan PAD Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2018 sebesar -34,84% dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,56% dan 14,08%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar -22,22%. Pada tahun 2022 rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan menjadi 9,31%.

2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\text{Presentase Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } P - \text{Pendapatan tahun } p-1}{\text{Total Pendapatan } p-1} \times 100\%$$

Tabel 3.11 Rasio Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

Tahun	Pendapatan tahun p-1 (Rp)	Pendapatan tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/2
2018	536.631.907.056,73	562.919.129.908,86	4,90
2019	562.919.129.908,86	626.402.705.471,10	11,28
2020	626.402.705.471,10	631.566.035.090,96	0,82
2021	631.566.035.090,96	583.834.842.657,35	(7,56)
2022	583.834.842.657,35	568.428.975.418,68	(2,64)
Jumlah	2.941.354.620.185,00	2.973.151.688.546,95	1,08
Rata-rata	588.270.924.037,00	594.630.337.709,39	1,08

Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2018 sampai dengan 2022 merupakan pertumbuhan pendapatan yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 pertumbuhan realisasi pendapatan 4,90%. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan Dana Alokasi Khusus serta pendapatan transfer Pemerintah Provinsi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 11,28% disebabkan karena meningkatnya realisasi dari pendapatan pajak daerah. Pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2020 rasio pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 0,82%. Hal ini disebabkan terjadi penurunan realisasi pendapatan pajak daerah. Pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penurunan juga terjadi pada tahun 2021 sebesar -

7,56% yang disebabkan semakin menurunnya realisasi pendapatan pada semua sumber penerimaan pendapatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang semakin menyebar. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar -2,64% yang disebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.637.697.138,33 atau 9,31% dibandingkan tahun realiasi tahun 2021.

3) Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

$$\text{Presentase Pertumbuhan Belanja Operasional} = \frac{\text{Belanja Operasional tahun } P - \text{Belanja Operasional tahun } p-1}{\text{Total Belanja Operasional } p-1} \times 100\%$$

Tabel 3.12 Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

Tahun	Belanja operasional tahun p-1 (Rp)	Belanja operasional tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/2
2018	353.935.338.739,00	402.590.110.614,00	13,75
2019	402.590.110.614,00	491.899.397.726,00	22,18
2020	491.899.397.726,00	473.602.050.617,36	(3,72)
2021	473.602.050.617,36	350.685.801.975,00	(25,95)
2022	350.685.801.975,00	343.734.501.658,70	(1,98)
Jumlah	2.072.712.699.671,36	2.062.511.862.591,06	(0,49)
Rata-rata	414.542.539.934,27	412.502.372.518,21	(0,49)

4) Persentase Pertumbuhan Belanja Modal

$$\text{Presentase Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal tahun } P - \text{Belanja Modal tahun } p-1}{\text{Total Belanja Modal } p-1} \times 100\%$$

Tabel 3.13 Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Modal

Tahun	Belanja modal tahun p-1 (Rp)	Belanja modal tahun p (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4=(3-2)/2
2018	94.261.785.071,00	152.978.911.657,00	62,29
2019	152.978.911.657,00	156.173.945.800,00	2,09
2020	156.173.945.800,00	152.480.443.087,00	(2,36)
2021	152.480.443.087,00	159.091.130.873,62	4,34
2022	159.091.130.873,62	137.291.124.197,00	(13,70)
Jumlah	714.986.216.488,62	758.015.555.614,62	6,02
Rata-rata	142.997.243.297,72	151.603.111.122,92	6,02

Belanja operasional pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 13,75%, tahun 2019 belanja operasional mengalami kenaikan yaitu berada pada level 22,18%. Pada tahun 2020 dan 2021, belanja operasional mengalami penurunan masing-masing menjadi (3,72%) dan (25,95%). Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar (1,98%). Adapun pertumbuhan belanja modal yang mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 62,29%. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut

mengalami penurunan masing-masing menjadi 2,09% dan -2,36%. Pada tahun 2021 rasio pertumbuhan belanja modal mengalami peningkatan sebesar 4,34%. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar -13,70%.

Dari analisis rasio pertumbuhan di atas, kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021 cenderung menurun. Penurunan rasio pertumbuhan pada belanja operasional dan belanja modal pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan realokasi anggaran belanja pada belanja tak terduga untuk keperluan pencegahan dan perawatan terhadap pasien yang terinfeksi *COVID-19* sebagai dampak dari adanya pandemi *COVID-19*.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.3.1 Penjelasan terkait capaian target Pendapatan

Terdapat beberapa SKPD yang pencapaian realisasi pendapatannya rendah selama tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Realisasi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar 21,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp258.029.500,00. Hal tersebut disebabkan oleh diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Perikanan yang di mana membatasi penjualan rumput laut hanya dalam wilayah NTT, sehingga secara langsung penurunan penjualan rumput laut di kabupaten Sabu Raijua yang sebelumnya dijual keluar provinsi (Sulawesi Selatan).

2. Dinas Pertanian dan Pangan

Realisasi pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2022 sebesar 66,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp785.750.000,00 terealisasi sebesar Rp525.878.000. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak sehingga diterbitkan Surat Edaran No 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang melarang pengeluaran hewan ternak keluar daerah, sehingga berdampak pada penjualan hewan ternak dan pelayanan kesehatan hewan.

3. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2022 sebesar 29,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.452.805.660,00 terealisasi sebesar Rp31.587.240.000,00. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan produksi hasil usaha daerah kondisi pasar garam dan harga yang baru mulai membaik, tambak garam belum seluruhnya diperbaiki sesuai terdampak badan siklon tropis seroja. Oleh karena itu produksi garam pada tahun 2022 belum maksimal.

3.3.2 Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja

Terdapat beberapa SKPD yang pencapaian realisasi belanjanya rendah selama tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan**
Penyerapan anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 78,24% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp6.559.205.194,00 terealisasi sebesar Rp5.103.858.298,00. Hal tersebut disebabkan oleh serapan anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp1.338.446.262,00 dari total anggaran sebesar Rp1.912.646.000,00 atau hanya 69,97%. Adapun penyerapan belanja jasa kantor sebesar Rp152.211.000,00 dari total anggaran sebesar Rp578.280.000,00 atau hanya 26,32%. Hal ini disebabkan oleh Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak dilaksanakan pada tahun 2022 karena jadwal yang bertabrakan dengan Seleksi Pengadaan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan dan rencana pelaksanaannya digeser ke tahun anggaran 2023.
2. **Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan**
Penyerapan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan sebesar 80,85% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp10.002.014.424,00 terealisasi sebesar Rp8.087.115.973,00. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - Serapan Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp1.686.709.900,00 dari total anggaran Rp2.408.544.983,00 atau hanya 70,03% karena adanya efisiensi belanja habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp889.266.465,00 atau 68,75% dari total anggaran sebesar Rp1.293.371.000,00 karena Perjalanan Dinas yang bersumber dari DAK Non Fisik dialokasikan sesuai Juknis DAK cukup besar dan melebihi kebutuhan Dinas.
3. **Bagian Hukum**
Penyerapan anggaran belanja Bagian Hukum sebesar 82,98% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp744.116.080,00 terealisasi sebesar Rp617.493.760,00. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - Belanja Jasa Kantor yang terealisasi sebesar Rp128.800.000,00 atau 67,78% karena tidak terdapat kasus/persoalan hukum yang harus difasilitasi oleh Bagian Hukum sehingga anggaran yang disediakan untuk tenaga ahli pada kegiatan fasilitasi bantuan hukum tidak terealisasi.
 - Belanja Perjalanan Dinas yang terealisasi sebesar Rp275.748.040,00 atau 81,82% dari anggaran sebesar Rp337.015.000,00 karena biaya transportasi (tiket) dan akomodasi/penginapan disesuaikan dengan kebutuhan biaya pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

4. Inspektorat Daerah

Penyerapan anggaran belanja Inspektorat Daerah sebesar 83,30% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp3.085.607.893,00 terealisasi sebesar Rp2.570.618.404,00. Hal tersebut disebabkan oleh Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp411.209.700,00 atau 60,43% dari anggaran sebesar Rp680.454.000,00. Rendahnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas karena kurangnya tenaga auditor/SDM pada Inspektorat dan adanya peningkatan permintaan pengawasan dari luar yang harus segera dilakukan sehingga ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan.

5. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Penyerapan anggaran belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 83,91% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp2.173.634.382,00 terealisasi sebesar Rp1.823.900.224,00. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS terealisasi sebesar Rp171.938.106,00 atau 55,30% karena terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi pada tahun 2022
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp331.581.619,00 atau 76,37% dari anggaran sebesar Rp434.130.000,00 yang disebabkan oleh Anggota Forkopimda (Dan Lanal Rote Ndao bersama ajudan dan Dandim Kupang bersama ajudan) berhalangan pada kegiatan Forkopimda di Sabu Raijua karena ada urusan kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
 - a) Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam - 380 - SAP
 - b) Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 mengatakan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki 39 (tiga puluh sembilan) entitas akuntansi yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan SKPD untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Entitas akuntansi tersebut terdiri dari:

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi

No	Entitas Akuntansi
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
10	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Dinas Pariwisata
20	Bagian Pemerintahan
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat
22	Bagian Hukum
23	Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam
24	Bagian Administrasi Pembangunan
25	Bagian Umum
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
27	Bagian Organisasi
28	Inspektorat Daerah
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Badan Keuangan Daerah
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
32	Sekretariat DPRD
33	Kecamatan Sabu Barat
34	Kecamatan Sabu Timur
35	Kecamatan Sabu Liae
36	Kecamatan Hawu Mehara
37	Kecamatan Raijua
38	Kecamatan Sabu Tengah
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 berdasarkan pada peraturan yang berlaku dengan mekanisme basis akuntansi yang secara garis besar dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
- Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan secara Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, namun dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik secara umum yang dipilih Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggunakan referensi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali penyajian atas beberapa akun laporan keuangan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan;
2. Periode pembukuan atau periode akuntansi adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember;
3. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Bila terdapat valuta asing disetarakan dengan rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
4. Pendapatan dan belanja diakui dengan basis akruwal, yang berarti dicatat sebagai pendapatan atau belanja tanpa memperhatikan saat sudah diterima/dikeluarkan ke/dari kas daerah. Khusus untuk transaksi akhir tahun terdapat belanja yang telah dicatat pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan, meskipun belum dicairkan (uang belum dikeluarkan dari kas daerah);
5. Pos-pos Neraca (Aset, Kewajiban dan Ekuitas) menggunakan basis Akruwal, yaitu transaksi diakui sebagai aset/kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

6. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
7. Seluruh Laporan Keuangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun pada posisi 31 Desember 2022. Oleh karena itu semua penerimaan yang menjadi hak daerah sebagai penambah aset daerah, demikian pula dengan pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang diterima/dikeluarkan dari kas daerah setelah tanggal 31 Desember 2022 adalah menjadi penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran berikutnya; dan
8. Realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan realisasi angka Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi dan disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) diakui dan disajikan berdasarkan angka pengeluaran kas dari kas daerah.

Sehingga Ikhtisar kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang terpenting dapat disajikan sebagai berikut:

1. Entitas Pelaporan Keuangan

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
- b. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah;
- c. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Entitas pelaporan keuangan daerah ialah pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dinas-dinas dan lembaga teknis daerah.

2. Basis Akuntansi

- a. Transaksi atau kejadian keuangan diakui dengan basis akrual;
- b. Yang dimaksud dengan basis akrual, adalah satu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan; dan
- c. Basis akrual diterapkan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas.

3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;

- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- c. Pendapatan dicatat dan diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan mencatat pengeluaran);
- d. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS; dan
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.

4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan idealisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*). Pengakuan pendapatan di klasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :
 - PAD Melalui Penetapan
 PAD yang masuk kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi;
 - PAD Tanpa Penetapan
 PAD yang masuk kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; dan
 - PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
 Diakui pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, pada saat tersebut Pemerintah Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dan mengakuinya sebagai pendapatan;

2) Pendapatan Transfer

Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat kepastian pendapatan tergantung pada syarat-syarat sesuai perundang-undangan pada penyaluran alokasi tersebut untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan;

4) Pendapatan Non Operasional

Mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset non-lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan ini diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara Kegiatan telah diterima.

- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat destinasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- d. Penyajian pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam Bagan Akun Standar.

5. Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Belanja ialah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- c. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto;
- d. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-lain; dan.

- e. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (Lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

6. Kebijakan Akuntansi Beban

- a. Beban ialah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- b. Pengakuan beban terjadi pada saat :
 - Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
 - Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
 - Terjadinya manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- c. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan dan dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line Item*).

7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal;
- b. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

8. Kebijakan Akuntansi Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh satu entitas pelaporan dari/atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk yaitu penerimaan uang dari entitas pelaporan lain misalnya penerimaan dana perimbangan dari

pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya sedangkan transfer keluar yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan;

- b. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

9. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya;
- c. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca; dan
- d. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

10. Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini;
- b. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas: Pungutan, Perikatan, Transfer antar Pemerintahan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah; atau telah

diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan; atau belum dilunasinya sampai dengan akhir periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat di ukur, telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

- d. Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi; dan
- e. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan diakui: (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi;
- c. Persediaan disajikan sebesar: (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, (b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi dan rampasan; dan
- d. Persediaan dicatat dengan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar dan metode periodik dimana fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.

12. Kebijakan Akuntansi Investasi

- a. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek dalam rangka manajemen kas;
- b. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria: (a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*);
- c. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya
 - Pengukuran investasi jangka pendek: (a) surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehan maka dicatat sebesar biaya peroleh yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya dan apabila tidak terdapat biaya perolehannya maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar (b) investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya;
 - Pengukuran investasi jangka panjang: (a) investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehan, (b) investasi dalam bentuk dana talangan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, (c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga;
 - Investasi yang diperoleh dari aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
 - Investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi.
- d. Metode penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: (a) metode biaya, (b) metode ekuitas dan (c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Jalan, Irigasi dan jaringan
Jalan, irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- g. Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap telah ditetapkan sesuai tabel masa manfaat. Sedangkan aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati;

- h. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa manfaat masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara; dan
 - 7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya.
- i. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi yang menambah masa manfaat yang tidak termasuk pemeliharaan rutin atau renovasi ringan disajikan sesuai tabel tambahan masa manfaat yang telah ditetapkan.

14. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan;
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran;
- c. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap jika memenuhi kriteria: (a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, (b) dapat memberikan manfaat/jasa dengan tujuan perolehan;
- d. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung; dan
- e. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

15. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- a. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; dan
- b. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

16. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan; memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan;
- b. Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas

- Tagihan jangka panjang

Terdiri dari: (a) tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah, (b) tagihan tuntutan kerugian daerah ini diakui ketika keputusan TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);

- Kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan dapat berupa: (a) kemitraan dengan pihak ketiga sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, (b) kerja sama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, (c) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, (d) Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada aset pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;

- Aset tidak berwujud

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika: (a) kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan (b) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal;

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset

tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai masa manfaat 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus; dan

- Aset lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Metode yang digunakan metode garis lurus (*straight line method*).

c. Pengukuran aset tetap lainnya diklasifikasikan sebagai berikut :

- Tagihan jangka panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari: (a) tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, (b) tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa SKTJM;

- Kemitraan dengan pihak ketiga

Terdiri dari: (a) sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, (b) kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, (c) bangun guna serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, (d) guna serah guna-BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut;

- Aset tidak berwujud

Diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh satu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah; dan

- Aset lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

17. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah, atau dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah, atau pada saat kewajiban timbul; dan
- c. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda-beda untuk masing-masing pos kewajiban;

18. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- a. Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam satu akun/pos;
- b. Perlakuan atas koreksi kesalahan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Kesalahan tidak berulang terbagi atas: (a) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, kesalahan jenis ini dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, (b) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, kesalahan ini bisa saja terjadi pada saat yang berbeda yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan;
 - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan; dan
 - Pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan basis kas. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf B poin 4, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan Kabupaten Sabu Raijua bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp568.428.975.418,68 atau 94,03% dari target pendapatan sebesar Rp604.507.472.367,00. Jumlah ini mengalami pengurangan sebesar Rp15.405.867.238,67 atau 2,64% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp583.834.842.657,35.

Pendapatan Daerah tahun 2022 yang disajikan dalam LRA Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencakup pendapatan yang diterima melalui rekening kas umum daerah dan tidak melalui rekening umum daerah. Pendapatan non RKUD terdapat pada sekolah (dana BOS), puskesmas (dana JKN), lembaga PAUD dan Kesetaraan (BOP) dan desa (dana desa). Pendapatan non RKUD tahun 2022 yang tidak diterima melalui kas umum daerah sebesar Rp85.418.859.203,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dana BOS reguler SD sebesar Rp8.223.285.671,00;
2. Pendapatan dana BOS reguler SMP sebesar Rp7.898.781.704,00;
3. Pendapatan dana kapitasi JKN sebesar Rp5.725.372.800,00;
4. Dana desa sebesar Rp60.882.277.028,00;
5. Dana BOP PAUD sebesar Rp2.560.742.000,00; dan
6. Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp128.400.000,00.

Rincian realisasi pendapatan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PENDAPATAN	604.507.472.367,00	568.428.975.418,68	94,03	583.834.842.657,35
Pendapatan Asli Daerah	52.343.352.290,00	30.976.942.583,68	59,18	28.339.245.445,35
Pendapatan Pajak Daerah	4.494.780.442,00	5.661.974.798,04	125,97	4.543.581.620,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.978.081.808,00	18.160.726.740,00	45,43	5.189.605.100,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.329.492.032,00	2.329.492.032,00	100,00	3.471.789.164,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.540.998.008,00	4.824.749.013,64	87,07	15.134.269.561,35
Pendapatan Transfer	527.703.242.097,00	514.572.199.210,00	97,51	536.864.313.212,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	444.129.430.473,00	440.083.421.954,00	99,09	441.274.176.772,00
Dana Bagi Hasil Pajak	6.073.966.000,00	7.378.901.889,00	121,48	9.233.904.096,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.183.445.000,00	2.268.456.977,00	103,89	2.099.526.420,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	337.332.898.000,00	336.260.812.302,00	99,68	336.885.937.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.888.431.473,00	67.791.045.075,00	99,86	67.400.137.692,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	30.650.690.000,00	26.384.205.711,00	86,08	25.654.671.564,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06	84.560.860.770,00
Dana Desa	61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06	84.560.860.770,00
Transfer Pemerintah Provinsi	22.114.975.624,00	13.606.500.228,00	61,53	11.029.275.670,00
Pendapatan Bagi Hasil	22.114.975.624,00	13.606.500.228,00	61,53	11.029.275.670,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	24.460.877.980,00	22.879.833.625,00	93,54	18.631.284.000,00
Pendapatan Hibah	1.873.000.000,00	885.825.500,00	47,29	1.475.127.000,00
Pendapatan Lainnya	22.587.877.980,00	21.994.008.125,00	97,37	17.156.157.000,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.976.942.583,68 dari target anggaran sebesar Rp52.343.352.290,00 atau 59,18%. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar Rp2.637.697.138,33 atau sebesar 9,31% dari realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp28.339.245.445,35.

Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 dan 2021 berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	4.494.780.442,00	5.661.974.798,04	125,97	4.543.581.620,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.726.000.000,00	3.302.722.505,00	121,16	2.701.920.151,00
Badan Keuangan Daerah	1.768.780.442,00	2.359.252.293,04	133,38	1.841.661.469,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.978.081.808,00	18.160.726.740,00	45,43	5.189.605.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah	7.459.619.308,00	7.659.746.280,00	102,68	3.140.625.100,00

Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dinas Pertanian dan Pangan	302.750.000,00	82.802.000,00	27,35	64.234.000,00
Dinas Perhubungan	1.532.500,00	3.400.000,00	221,86	2.319.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	31.587.240.000,00	9.452.805.660,00	29,93	1.862.297.000,00
Badan Keuangan Daerah	626.940.000,00	961.972.800,00	153,44	120.130.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.329.492.032,00	2.329.492.032,00	100,00	3.471.789.164,00
Badan Keuangan Daerah	2.329.492.032,00	2.329.492.032,00	100,00	3.471.789.164,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.540.998.008,00	4.824.749.013,64	87,07	15.134.269.561,35
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	56.841,30	0,00	5.582.929.425,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.000.000,00	180.375.000,00	16,86	32.500.000,00
Badan Keuangan Daerah	4.470.998.008,00	4.644.317.172,34	103,88	9.518.840.136,35
Jumlah	52.343.352.290,00	30.976.942.583,68	59,18	28.339.245.445,35

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah **TA 2022** **TA 2021**
Rp5.661.974.798,04 **Rp4.543.581.620,00**

Realisasi pendapatan pajak daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.661.974.798,04 dari target anggaran Rp4.494.780.442,00 atau 125,97%. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar Rp1.118.393.178,04 atau 24,61% dari realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.543.581.620,00.

Penerimaan pajak tersebut bersumber dari pajak rumah penginapan, pajak rumah makan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dasar pemungutan pajak daerah sesuai uraian di atas adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Rincian realisasi penerimaan pajak tahun 2022 dan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	10.000.000,00	40.340.000,00	403,40	6.805.000,00
Pajak Restoran	290.950.000,00	607.562.382,00	208,82	526.113.990,00
Pajak Reklame	64.517.400,00	95.154.893,00	147,49	62.719.450,00
Pajak Penerangan Jalan	850.000.000,00	1.069.354.552,00	125,81	731.810.248,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.726.000.000,00	3.302.722.505,00	121,16	2.701.920.151,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	543.313.042,00	541.890.466,00	99,74	471.508.935,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00	4.950.000,00	49,50	42.703.846,00
Jumlah	4.494.780.442,00	5.661.974.798,00	125,97	4.543.581.620,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	TA 2022	TA 2021
	Rp18.160.726.740,00	Rp5.189.605.100,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.160.726.740,00 dari target Rp39.978.081.808,00 atau 45,43%. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar Rp12.971.121.640,00 atau 249,94% dari realisasi retribusi daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.189.605.100,00. Penambahan yang signifikan ini berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Pendapatan retribusi daerah bersumber dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dasar pemungutan retribusi daerah sesuai uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 2).

Rincian realisasi penerimaan retribusi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	8.123.331.808,00	8.630.785.580,00	106,25	3.235.409.100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.054.369.308,00	8.564.163.080,00	106,33	3.182.745.100,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.532.500,00	3.400.000,00	221,86	2.319.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	67.430.000,00	63.222.500,00	93,76	50.345.000,00
Retribusi Jasa Usaha	31.834.750.000,00	9.482.424.000,00	29,79	1.904.396.900,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	120.750.000,00	100.600.000,00	83,31	112.600.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	40.000.000,00	26.412.000,00	66,03	20.514.000,00

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	31.673.000.000,00	9.355.412.000,00	29,54	1.771.282.900,00
Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000,00	47.517.160,00	237,59	49.799.100,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	47.517.160,00	237,59	49.799.100,00
Jumlah	39.978.081.808,00	18.160.726.740,00	45,43	5.189.605.100,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

	TA 2022	TA 2021
	Rp2.329.492.032,00	Rp3.471.789.164,00

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.329.492.032,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp2.329.492.032,00. Jumlah ini mengalami pengurangan sebesar Rp1.142.297.132,00 atau 32,90% dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.471.789.164,00.

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut merupakan realisasi penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp42.492.830.000,00.

5.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

	TA 2022	TA 2021
	Rp4.824.749.013,64	Rp15.134.269.561,35

Realisasi lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.824.749.013,64 dari target anggaran Rp5.540.998.008,00 atau 87,07%. Jumlah ini mengalami pengurangan sebesar Rp10.309.520.547,71 atau 68,12% dari realisasi realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2021 sebesar Rp15.134.269.561,35.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4.824.749.013,64 bersumber dari hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rincian lain-lain PAD yang sah tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	5.540.998.008,00	4.824.749.013,64	87,07	15.134.269.561,35
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	737.628.508,00	737.628.508,00	100,00	0
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.070.000.000,00	180.375.000,00	16,86	32.500.000,00
Jasa Giro	2.200.000.000,00	1.335.561.664,24	60,71	4.624.515.969,50
Pendapatan Bunga	750.000.000,00	723.600.309,00	96,48	933.767.608,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	520.000.000,00	628.252.096,40	120,82	86.460.000,00

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	1.069.680.315,00	1.069,68	2.489.057.491,39
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.068.048,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	33.369.500,00	33.369.500,00	100,00	76.496.215,00
Pendapatan dari Pengembalian	130.000.000,00	116.281.621,00	89,45	1.307.474.804,46
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	5.582.929.425,00

Lain-lain PAD yang sah secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp737.628.508,00 merupakan hasil lelang kendaraan sesuai laporan hasil peledangan BMD.
2. Hasil pemanfaatan BMD sebesar Rp180.375.000,00 terdiri atas:
 - a. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *theodolite* Rp3.500.000,00
 - b. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *excavator* Rp131.875.000,00
 - c. Penerimaan dari pemanfaatan sewa *tronton* Rp45.000.000,00
3. Jasa Giro sebesar Rp1.335.561.664,24 terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp1.301.844.094,73;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Rp33.717.569,51
4. Pendapatan Bunga atas penempatan uang Pemda pada Deposito BRI sebesar Rp723.600.309,00
5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp628.252.096,40 merupakan penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp58.314.000,00.
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp569.938.096,40.
6. Pendapatan Denda Keterlambatan sebesar Rp1.069.680.315,00 merupakan pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
7. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebesar Rp33.369.500,00 merupakan pembayaran dari pihak ketiga sebagai kompensasi atas klaim jaminan pelaksanaan yang melebihi batas waktu.
8. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp116.281.621,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan yaitu sebesar Rp7.928.100,00.
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas baik berupa kelebihan biaya tiket, hotel maupun uang harian sebesar Rp5.740.000,00.
 - c. Pendapatan dari pengembalian lainnya sebesar Rp102.613.521,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan dana desa dan juga dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. Realisasi pendapatan transfer tahun 2022 sebesar Rp511.971.557.210,00 dari target Rp527.703.242.097,00 atau 97,02%. Jumlah ini mengalami pengurangan sebesar Rp24.892.756.002,00 atau 4,64% dari realisasi pendapatan transfer tahun 2021 sebesar Rp536.864.313.212,00.

Pendapatan transfer tahun 2022 dan 2021 secara jelas dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN TRANSFER	527.703.242.097,00	514.572.199.210,00	97,51	536.864.313.212,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	444.129.430.473,00	440.083.421.954,00	99,09	441.274.176.772,00
Dana Bagi Hasil Pajak	6.073.966.000,00	7.378.901.889,00	121,48	9.233.904.096,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.183.445.000,00	2.268.456.977,00	103,89	2.099.526.420,00
Dana Alokasi Umum	337.332.898.000,00	336.260.812.302,00	99,68	336.885.937.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	67.888.431.473,00	67.791.045.075,00	99,86	67.400.137.692,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	30.650.690.000,00	26.384.205.711,00	86,08	25.654.671.564,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06	84.560.860.770,00
Dana Desa	61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06	84.560.860.770,00
Transfer Pemerintah Provinsi	22.114.975.624,00	13.606.500.228,00	61,53	11.029.275.670,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.114.975.624,00	13.606.500.228,00	61,53	11.029.275.670,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.

Realisasi Dana Perimbangan tahun 2022 sebesar Rp440.083.421.954,00 dari target anggaran sebesar Rp444.129.430.473,00 atau 99,09%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp1.190.754.818,00 atau 0,27% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp441.274.176.772,00.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak	TA 2022	TA 2021
	Rp7.378.901.889,00	Rp9.233.904.096,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2022 sebesar Rp7.378.901.889,00 dari target anggaran sebesar Rp6.073.966.000,00 atau 121,48%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp1.855.002.207,00 atau 20,08% dari realisasi tahun 2021

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	TA 2022	TA 2021
	Rp67.791.045.075,00	Rp67.400.137.692,00

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan dari penyaluran DAK Fisik antara lain:

- Mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antar wilayah.
- Meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi.
- Meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2022 sebesar Rp67.791.045.075,00 dari target anggaran sebesar Rp67.888.431.473,00 atau 99,86%. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar Rp390.907.383,00 atau 0,58% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp67.400.137.692,00.

Realisasi penerimaan dana alokasi khusus fisik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.9 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	67.888.431.473,00	67.791.045.075,00	99,86	67.400.137.692,00
Bidang Pendidikan	7.517.525.716,00	7.517.525.716,00	100,00	9.880.688.019,00
Bidang Kesehatan	6.828.637.188,00	6.731.250.790,00	98,57	18.653.962.365,00
Bidang Jalan	31.155.200.000,00	31.155.200.000,00	100,00	17.801.426.800,00
Bidang Air Minum	3.313.279.394,00	3.313.279.394,00	100,00	3.762.675.800,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	1.127.562.925,00	1.127.562.925,00	100,00	1.008.915.000,00
Bidang Pertanian	1.008.200.000,00	1.008.200.000,00	100,00	2.669.413.608,00
Bidang Sanitasi	1.449.820.000,00	1.449.820.000,00	100,00	1.680.197.000,00
Bidang Transportasi Perdesaan	12.738.004.000,00	12.738.004.000,00	100,00	8.479.807.300,00
Bidang Perumahan dan Permukiman	1.630.162.250,00	1.630.162.250,00	100,00	1.352.789.800,00
Bidang Irigasi	1.120.040.000,00	1.120.040.000,00	100,00	0,00
Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	2.110.262.000,00

5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	TA 2022	TA 2021
	Rp26.384.205.711,00	Rp25.654.671.564,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Realisasi DAK Non Fisik tahun 2022 sebesar Rp26.384.205.711,00 dari target anggaran sebesar Rp30.650.690.000,00 atau 86,08%. Jumlah tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp729.534.147,00 atau 2,84% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp25.654.671.564,00.

Realisasi penerimaan DAK Non Fisik tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	30.650.690.000,00	26.384.205.711,00	86,08	25.654.671.564,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	12.173.700.000,00	12.173.700.000,00	100,00	13.175.050.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.635.000.000,00	2.580.000.000,00	157,80	819.000.000,00
Tunjangan Khusus Guru	2.255.602.000,00	2.255.602.000,00	100,00	747.885.000,00
BO Penyelenggaraan PAUD	2.636.200.000,00	2.560.742.000,00	97,14	2.098.500.000,00
BO Pendidikan Kesetaraan	167.910.000,00	128.400.000,00	76,47	370.450.000,00
BOKKB-BOK	8.617.257.000,00	5.724.756.711,00	66,43	4.171.475.037,00
BOKKB-BOKB	2.041.967.000,00	0,00	0,00	1.143.995.200,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	2.176.093.327,00
Fasilitasi Penanaman Modal	388.654.000,00	226.605.000,00	58,31	392.223.000,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	0,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	282.600.000,00	282.600.000,00	100,00	560.000.000,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
Dana Desa	Rp60.882.277.028,00	Rp84.560.860.770,00

Transfer pemerintah pusat lainnya merupakan penerimaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang peruntukan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp60.882.277.028,00 dari target anggaran sebesar Rp61.458.836.000,00 atau 99,06%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp23.678.583.742,00 atau 28,00% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp84.560.860.770,00. Rincian dana desa tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Dana Desa

No	Nama Desa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Desa Menia	1.180.687.000,00	1.180.687.000,00	100,00	1.579.431.000,00
2	Desa Raeloro	1.155.662.000,00	1.155.662.000,00	100,00	1.520.417.000,00
3	Desa Nadawawi	1.156.390.000,00	1.156.390.000,00	100,00	1.636.870.000,00
4	Desa Teriwu	1.086.005.000,00	1.086.005.000,00	100,00	1.781.329.000,00
5	Desa Raenalulu	1.220.447.000,00	1.220.447.000,00	100,00	1.840.676.000,00
6	Desa Raedewa	1.229.948.000,00	796.539.200,00	64,76	1.683.620.000,00
7	Desa Ledean	991.750.000,00	991.750.000,00	100,00	1.657.387.000,00
8	Desa Depe	1.240.885.000,00	1.240.885.000,00	100,00	1.485.571.000,00
9	Desa Raemude	1.209.097.000,00	1.209.097.000,00	100,00	1.721.017.000,00
10	Desa Raekore	1.192.474.000,00	1.049.377.120,00	88,00	1.705.221.000,00

No	Nama Desa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
11	Desa Raenyale	1.178.748.000,00	1.178.748.000,00	100,00	1.646.618.000,00
12	Desa Raemadia	1.096.489.000,00	1.096.489.000,00	100,00	1.480.112.000,00
13	Desa Delo	1.089.249.000,00	1.089.249.000,00	100,00	1.679.727.000,00
14	Desa Roboaba	978.234.000,00	978.234.000,00	100,00	1.403.998.000,00
15	Desa Djadu	938.896.000,00	938.896.000,00	100,00	1.226.433.000,00
16	Desa Ledekapaka	1.016.827.000,00	1.016.827.000,00	100,00	1.344.437.000,00
17	Desa Titinalede	904.389.000,00	904.389.000,00	100,00	987.209.000,00
18	Desa Bebae	994.966.000,00	994.966.000,00	100,00	1.346.740.000,00
19	Desa Tada	911.201.000,00	911.201.000,00	100,00	1.086.366.000,00
20	Desa Matei	1.003.142.000,00	1.003.142.000,00	100,00	1.414.307.000,00
21	Desa Loboaju	991.002.000,00	991.002.000,00	100,00	960.867.000,00
22	Desa Eimadake	1.039.036.000,00	1.039.036.000,00	100,00	1.480.569.000,00
23	Desa Jiwuwu	1.030.024.000,00	1.030.024.000,00	100,00	1.461.440.000,00
24	Desa Eilode	1.185.608.000,00	1.185.608.000,00	100,00	1.545.904.000,00
25	Desa Eimau	1.249.011.000,00	1.249.011.000,00	100,00	1.628.179.000,00
26	Desa Lobodei	800.891.000,00	800.891.000,00	100,00	2.314.167.000,00
27	Desa Bodae	1.063.290.000,00	1.063.290.000,00	100,00	1.387.076.000,00
28	Desa Keduru	1.065.585.000,00	1.065.585.000,00	100,00	1.428.361.000,00
29	Desa Kujiratu	1.058.791.000,00	1.058.791.000,00	100,00	1.284.661.000,00
30	Desa Loborai	721.376.000,00	721.376.000,00	100,00	902.310.000,00
31	Desa Huwaga	734.053.000,00	734.053.000,00	100,00	958.792.000,00
32	Desa Eiada	797.400.000,00	797.400.000,00	100,00	1.274.241.000,00
33	Desa Keliha	1.117.476.000,00	1.117.476.000,00	100,00	1.331.731.000,00
34	Desa Raerobo	983.881.000,00	983.881.000,00	100,00	1.333.894.000,00
35	Desa Mehona	968.768.000,00	968.768.000,00	100,00	1.202.918.000,00
36	Desa Waduwalla	971.890.000,00	971.890.000,00	100,00	1.455.297.000,00
37	Desa Ledeke	972.511.000,00	972.511.000,00	100,00	1.242.224.000,00
38	Desa Eilogo	941.576.000,00	941.576.000,00	100,00	1.303.815.000,00
39	Desa Deme	967.495.000,00	967.495.000,00	100,00	1.215.379.000,00
40	Desa Kotahawu	950.483.000,00	950.483.000,00	100,00	1.389.456.000,00
41	Desa Dainao	988.582.000,00	988.582.000,00	100,00	1.248.144.000,00
42	Desa Eikare	745.705.000,00	745.705.000,00	100,00	1.192.348.000,00
43	Desa Loborui	935.117.000,00	935.117.000,00	100,00	1.256.640.000,00
44	Desa Hallapadji	796.321.000,00	796.270.708,00	99,99	1.211.849.000,00
45	Desa Ledetalo	945.677.000,00	945.677.000,00	100,00	1.242.624.000,00
46	Desa Lohohede	1.267.973.000,00	1.267.973.000,00	100,00	1.664.022.000,00
47	Desa Molie	1.236.933.000,00	1.236.933.000,00	100,00	1.663.593.770,00
48	Desa Daieko	1.282.651.000,00	1.282.651.000,00	100,00	1.944.068.000,00
49	Desa Peddarro	1.529.019.000,00	1.529.019.000,00	100,00	2.062.223.000,00
50	Desa Tanajawa	1.140.432.000,00	1.140.432.000,00	100,00	1.516.608.000,00
51	Desa Ledeeae	1.041.637.000,00	1.041.637.000,00	100,00	1.399.571.000,00
52	Desa Wadumaddi	1.052.984.000,00	1.052.984.000,00	100,00	1.452.954.000,00
53	Desa Lederaga	1.211.863.000,00	1.211.860.000,00	100,00	1.582.939.000,00
54	Desa Gurimonearu	1.144.934.000,00	1.144.934.000,00	100,00	1.545.652.000,00
55	Desa Ramedue	1.190.022.000,00	1.190.022.000,00	100,00	1.528.154.000,00
56	Desa Bolua	1.237.389.000,00	1.237.389.000,00	100,00	1.664.657.000,00
57	Desa Kolorae	1.165.982.000,00	1.165.982.000,00	100,00	1.572.058.000,00
58	Desa Ballu	1.159.982.000,00	1.159.982.000,00	100,00	1.483.989.000,00
TOTAL		61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06	84.560.860.770,00

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil	TA 2022	TA 2021
		Rp13.606.500.228,00

Realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2022 sebesar Rp13.606.500.228,00 dari target anggaran sebesar Rp22.114.975.624,00 atau 61,53%. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar Rp2.577.224.558,00 atau 23,37% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp11.029.275.670,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dapat dilihat pada **Tabel 5.12**.

Tabel 5.12 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	4.443.622.908,00	1.956.284.302,00	44,02	1.502.787.850,00
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.266.148.173,00	3.231.184.690,00	142,58	947.283.095,00
DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.131.452.207,00	725.029.564,00	11,82	1.631.582.164,00
DBH Pajak Air Permukaan	6.965.664,00	3.246.283,00	46,60	1.562.024,00
DBH Pajak Rokok	9.266.786.672,00	7.690.755.389,00	82,99	6.946.060.537,00
Jumlah	22.114.975.624,00	13.606.500.228,00	61,53	11.029.275.670,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	TA 2022	TA 2021
	Rp22.879.833.625,00	Rp18.631.284.000,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2022 sebesar Rp22.879.833.625,00 dari target sebesar Rp24.460.877.980,00 atau 93,54%. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar Rp4.248.549.625,00 atau 22,80% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.631.284.000,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan realisasi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan yang sah secara rinci terdiri atas :

a. Pendapatan Hibah	TA 2022	TA 2021
	Rp885.825.500,00	Rp1.475.127.000,00

Pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 berupa sumbangan pihak ketiga. Realisasi pendapatan hibah tahun 2022 sebesar Rp885.825.500,00 dari target anggaran sebesar Rp1.873.000.000,00 atau 47,29%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp589.301.500,00 atau 39,95% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.475.127.000,00.

Sumbangan pihak ketiga sebesar Rp885.825.500,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari:

- 1) Penjualan ternak sebesar Rp443.076.000,00.
- 2) KSU Sandi Mandiri pengelola Bus Transdes sebesar Rp87.800.000,00.
- 3) Penjualan Rumput Laut Kering Rp258.029.500,00.
- 4) Proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp96.920.000,00.

b. Lain-lain Pendapatan	TA 2022	TA 2021
	Rp21.994.008.125,00	Rp17.156.157.000,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pendapatan hibah dana BOS, pendapatan atas pengembalian hibah dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

Realisasi pendapatan lainnya tahun 2022 sebesar Rp21.994.008.125,00 dari target anggaran sebesar Rp22.587.877.980,00 atau 97,37%. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar Rp4.837.851.125,00 atau 28,20% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp17.156.157.000,00.

- 1) Pendapatan atas pengembalian hibah sebesar Rp146.567.950,00 berasal dari pengembalian dana hibah KONI tahun 2021 sebesar Rp79.940.000,00 dan pengembalian hibah Kwarcab Pramuka tahun 2021 sebesar Rp66.627.950,00.
- 2) Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Rincian pendapatan dana kapitasi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Pendapatan Dana Kapitasi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Puskesmas Seba	2.070.853.592,00	2.046.018.300,00	98,80	1.817.938.350,00
2	Puskesmas Bolou	594.805.210,00	601.153.700,00	101,07	471.360.200,00
3	Puskesmas Eilogo	693.193.582,00	692.096.200,00	99,84	589.971.700,00
4	Puskesmas Daieko	1.270.717.513,00	1.244.972.700,00	97,97	1.050.354.700,00
5	Puskesmas Ledunu	623.756.692,00	567.911.700,00	91,05	562.073.700,00
6	Puskesmas Eimadake	577.783.441,00	573.220.200,00	99,21	577.652.200,00
	Jumlah	5.831.110.030,00	5.725.372.800,00	98,19	5.069.350.850,00

- 3) Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Besaran Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14 Dana Hibah BOS

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	SMP Negeri 1 Sabu Barat	492.800.000,00	427.949.667,00	86,84	521.472.000,00
2	SMP Negeri 2 Sabu Barat	582.400.000,00	582.400.000,00	100,00	609.280.000,00
3	SMP Negeri 3 Sabu Barat	168.960.000,00	168.664.917,00	99,83	211.072.000,00
4	SMP Negeri 4 Sabu Barat	209.920.000,00	209.459.009,00	99,78	228.736.000,00
5	SMP Negeri 5 Menia	327.680.000,00	324.710.000,00	99,09	329.472.000,00
6	SMP Negeri 6 Sabu Barat	286.720.000,00	279.884.000,00	97,62	290.304.000,00
7	SMP Negeri 7 Sabu Barat	305.920.000,00	305.920.000,00	100,00	297.856.000,00
8	SMP Negeri 8 Sabu Barat	357.120.000,00	357.120.000,00	100,00	325.760.000,00
9	SMP Satu Atap Teriwu	189.440.000,00	128.587.891,00	67,88	250.048.000,00
10	SMP Negeri 1 Sabu Timur	307.200.000,00	307.200.000,00	100,00	356.480.000,00
11	SMP Satu Atap Kujiratu	263.680.000,00	263.680.000,00	100,00	292.352.000,00
12	SMP Negeri 2 Sabu Timur	172.800.000,00	172.800.000,00	100,00	162.614.000,00
13	SMP Negeri 1 Sabu Tengah	627.200.000,00	618.132.500,00	98,55	625.408.000,00
14	SMP Negeri 2 Sabu Tengah	138.240.000,00	138.240.000,00	100,00	142.720.000,00
15	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	232.960.000,00	232.959.803,00	100,00	234.752.000,00
16	SMP Negeri 1 Hawu Mehara	572.160.000,00	572.160.000,00	100,00	609.792.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
17	SMP Negeri 2 Hawu Mehara	272.640.000,00	260.665.000,00	95,61	275.328.000,00
18	SMP Negeri 3 Hawu Mehara	619.520.000,00	603.901.000,00	97,48	637.110.000,00
19	SMP Satu Atap Lederaga	454.400.000,00	454.265.500,00	99,97	453.504.000,00
20	SMP Negeri 1 Sabu Liae	463.360.000,00	444.466.911,00	95,92	466.048.000,00
21	SMP Negeri 2 Liae	323.840.000,00	323.840.000,00	100,00	313.088.000,00
22	SMP Satu Atap Eirobo	232.960.000,00	232.334.500,00	99,73	239.232.000,00
23	SMP Negeri 1 Rajiua	403.200.000,00	403.064.973,00	99,97	404.992.000,00
24	SMP Negeri 2 Rajiua	410.880.000,00	410.880.000,00	100,00	399.232.000,00
25	SD Negeri 1 Seba	396.900.000,00	396.900.000,00	100,00	387.540.000,00
26	SD Negeri 2 Seba	185.850.000,00	185.849.516,00	100,00	182.910.000,00
27	SD Negeri 3 Seba	407.400.000,00	400.470.000,00	98,30	391.230.000,00
28	SD Negeri Mapipa	117.600.000,00	116.689.600,00	99,23	125.685.000,00
29	SD Negeri Leomadamu	165.900.000,00	165.900.000,00	100,00	158.550.000,00
30	SD Negeri Leoge	212.100.000,00	212.100.000,00	100,00	206.955.000,00
31	SD Negeri 4 Seba	156.450.000,00	156.366.684,00	99,95	163.800.000,00
32	SD Inpres Delo	128.100.000,00	128.100.000,00	100,00	181.330.000,00
33	SD Negeri Maballa	190.050.000,00	133.035.000,00	70,00	181.230.000,00
34	SD Negeri Luipau	119.700.000,00	119.700.000,00	100,00	108.405.000,00
35	SD Negeri Titinalede	189.000.000,00	183.355.369,00	97,01	190.470.000,00
36	SD Negeri Raemude	103.950.000,00	72.765.000,00	70,00	107.820.000,00
37	SD Negeri Teriwu	193.200.000,00	193.200.000,00	100,00	246.430.000,00
38	SD Inpres Ledeanana	156.450.000,00	156.450.000,00	100,00	154.980.000,00
39	SD Negeri Raenalulu	145.950.000,00	143.654.800,00	98,43	148.155.000,00
40	SD Negeri 5 Sabu Barat	174.300.000,00	172.793.100,00	99,14	173.565.000,00
41	SD Negeri Ledekpakaka	147.000.000,00	144.666.576,00	98,41	152.880.000,00
42	SD Negeri Kejoboloko	150.150.000,00	150.150.000,00	100,00	147.210.000,00
43	SD Inpres Kudjiratu	162.750.000,00	162.750.000,00	100,00	158.340.000,00
44	SD Negeri Huwaga	73.500.000,00	72.150.000,00	98,16	74.235.000,00
45	SD Negeri Keliha	143.850.000,00	143.838.709,00	99,99	179.440.000,00
46	SD Negeri Eilode	186.900.000,00	186.900.000,00	100,00	192.045.000,00
47	SD Negeri Padadue	153.300.000,00	139.454.000,00	90,97	162.855.000,00
48	SD Negeri Jiwuwu	178.500.000,00	178.154.950,00	99,81	182.910.000,00
49	SD Negeri Matei	126.000.000,00	88.200.000,00	70,00	137.760.000,00
50	SD Inpres Eimau	239.400.000,00	239.400.000,00	100,00	251.355.000,00
51	SD Negeri Loboaju	105.000.000,00	78.750.000,00	75,00	105.000.000,00
52	SD Negeri Tada	98.700.000,00	69.090.000,00	70,00	142.375.000,00
53	SD Inpres Daieko	202.650.000,00	202.650.000,00	100,00	198.240.000,00
54	SD Negeri Lohohede	222.600.000,00	222.600.000,00	100,00	232.155.000,00
55	SD Negeri Lederaga	242.550.000,00	242.250.000,00	99,88	250.635.000,00
56	SD Inpres Tanajawa	164.850.000,00	156.579.350,00	94,98	163.380.000,00
57	SD Inpres Molie	179.550.000,00	179.550.000,00	100,00	170.730.000,00
58	SD Inpres Pedaro	204.750.000,00	204.750.000,00	100,00	210.630.000,00
59	SD Negeri Lobolauw	147.000.000,00	139.569.600,00	94,95	164.640.000,00
60	SD Negeri Gelenalalu	164.850.000,00	164.850.000,00	100,00	169.995.000,00
61	SD Negeri Gurimonearu	184.800.000,00	184.800.000,00	100,00	180.390.000,00
62	SD Negeri Ledeeae	108.150.000,00	106.034.300,00	98,04	108.150.000,00
63	SD Inpres Daiae	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	63.000.000,00
64	SD Negeri Deme	181.650.000,00	181.650.000,00	100,00	192.675.000,00
65	SD Inpres Ledeke	124.950.000,00	119.490.000,00	95,63	126.420.000,00
66	SD Inpres Eirobo	119.700.000,00	119.340.750,00	99,70	127.785.000,00
67	SD Inpres Ledemera	156.450.000,00	149.874.400,00	95,80	200.860.000,00
68	SD Negeri Dainao	85.050.000,00	85.050.000,00	100,00	90.195.000,00
69	SD Negeri Ledeke 1	157.500.000,00	109.710.000,00	69,66	164.850.000,00
70	SD Negeri Lokojuji	181.650.000,00	181.650.000,00	100,00	176.505.000,00
71	SD Negeri Bolua	178.500.000,00	178.500.000,00	100,00	167.940.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
72	SD Negeri Boko	106.050.000,00	106.050.000,00	100,00	110.460.000,00
73	SD Negeri Ledেকে 2	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	214.410.000,00
TOTAL		16.610.200.000,00	16.122.067.375,00	97,06	17.156.157.000,00

5.1.2 Belanja

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf B poin 5, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp577.424.456.047,70 dari anggaran sebesar Rp641.636.086.568,00 atau 89,99%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp65.956.934.409,92 atau 10,25% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp643.381.390.457,62.

Belanja daerah tahun 2022 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencakup belanja yang dibayarkan dari RKUD dan tidak melalui rekening umum daerah (non RKUD). Belanja non RKUD terdapat pada sekolah (dana BOS), puskesmas (dana JKN), lembaga PAUD dan Kesetaraan (BOP) dan desa (dana desa). Belanja non RKUD tahun 2022 yang tidak dibayarkan melalui kas umum daerah sebesar Rp85.614.092.359,70 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja dana BOS reguler SD sebesar Rp8.407.810.928,00
2. Belanja dana BOS reguler SMP sebesar Rp8.024.743.465,00
3. Belanja dana kapitasi JKN sebesar Rp5.610.118.938,70
4. Dana desa sebesar Rp60.882.277.028,00
5. Dana BOP PAUD sebesar Rp2.560.742.000,00
6. Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp 128.400.000,00

Realisasi belanja tahun anggaran 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.15 Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja	641.636.086.568,00	577.424.456.047,70	89,99	643.381.390.457,62
Belanja Operasi	383.926.677.821,00	343.734.501.658,70	89,53	350.685.801.975,00
Belanja Modal	149.863.987.142,00	137.291.124.197,00	91,61	159.091.130.873,62
Belanja Tak Terduga	11.026.917.843,00	216.151.500,00	1,96	13.611.168.339,00
Belanja Transfer	96.818.503.762,00	96.182.678.692,00	99,34	119.993.289.270,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua yang dapat memberi manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp343.734.501.658,70 dari anggaran sebesar Rp383.926.677.821,00 atau 89,53%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp6.951.300.316,30 atau 1,98% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp350.685.801.975,00.

Belanja operasi non RKUD tahun 2022 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp18.702.826.468,70 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana BOS SD sebesar Rp7.024.820.947,00
2. Dana BOS SMP sebesar Rp6.543.602.071,00
3. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp5.134.403.450,70

Realisasi belanja operasi tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16 Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA OPERASI	383.926.677.821,00	343.734.501.658,70	89,53	350.685.801.975,00
Belanja Pegawai	193.378.416.095,00	172.071.722.075,00	88,98	171.945.977.759,00
Belanja Barang dan Jasa	179.592.496.883,00	161.021.209.297,70	89,66	168.356.423.250,00
Belanja Subsidi	48.300.000,00	47.400.000,00	98,14	0,00
Belanja Hibah	7.905.167.843,00	7.739.068.286,00	97,90	8.158.554.162,00
Belanja Bantuan Sosial	3.002.297.000,00	2.855.102.000,00	95,10	2.224.846.804,00

Rincian jenis belanja operasi tahun 2022 dan tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	TA 2022	TA 2021
	Rp172.071.722.075,00	Rp171.945.977.759,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp172.071.722.075,00 dari anggaran Rp193.378.416.095,00 atau 88,98%. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar Rp125.744.316,00 atau 0,07% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp171.945.977.759,00.

Belanja pegawai non RKUD tahun 2022 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp3.541.509.500,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana BOS SD sebesar Rp1.856.386.500,00
2. Dana BOS SMP sebesar Rp1.650.923.000,00

3. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp34.200.000,00

Realisasi belanja pegawai digunakan untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan belanja pegawai BOS. Secara lebih rinci realisasi belanja pegawai tahun 2022 dan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	193.378.416.095,00	172.071.722.075,00	88,98	171.945.977.759,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	114.806.071.325,00	111.095.565.936,00	96,77	107.429.428.690,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	67.515.572.598,00	49.937.372.529,00	73,96	54.031.505.686,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.948.622.244,00	6.948.246.878,00	99,99	6.744.230.628,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.906.928,00	172.347.232,00	98,54	50.448.775,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	410.880.000,00	100,00	304.377.980,00
Belanja Pegawai BOS	3.522.363.000,00	3.507.309.500,00	99,57	3.385.986.000,00

Rincian realisasi belanja pegawai per SKPD dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.18 Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	100.291.292.584,00	85.970.135.482,00	85,72	88.507.618.221,00
2	RumahSakitUmum Daerah	7.065.594.825,00	6.366.049.271,00	90,10	6.269.203.934,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	18.801.948.657,00	17.117.883.332,00	91,04	15.227.806.029,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.017.007.221,00	3.671.240.589,00	91,39	3.598.953.248,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.428.502.805,00	1.377.984.461,00	96,46	1.430.394.456,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.096.815.879,00	2.041.601.129,00	97,37	1.938.489.885,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	878.974.618,00	814.686.812,00	92,69	847.685.246,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.541.605.286,00	1.453.217.546,00	94,27	1.441.199.644,00
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	2.102.795.909,00	1.963.104.573,00	93,36	1.855.648.179,00
10	Dinas Pertanian Dan Pangan	3.211.290.535,00	2.989.836.212,00	93,10	3.106.358.642,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.516.642.313,00	1.480.240.459,00	97,60	1.332.657.804,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.728.950.807,00	1.558.928.960,00	90,17	1.505.810.159,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.057.169.791,00	1.943.271.164,00	94,46	2.032.756.703,00
14	Dinas Perhubungan	1.548.753.963,00	1.488.035.460,00	96,08	1.534.657.392,00

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.612.403.978,00	1.310.249.813,00	81,26	1.481.250.536,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	2.164.603.691,00	1.876.931.216,00	86,71	1.751.123.128,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.185.161.627,00	1.061.693.926,00	89,58	1.063.494.629,00
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.511.692.560,00	1.308.816.767,00	86,58	1.366.036.462,00
19	Dinas Pariwisata	1.379.916.371,00	1.164.214.247,00	84,37	1.444.231.292,00
20	Bagian Pemerintahan	56.692.000,00	47.452.000,00	83,70	56.050.000,00
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	60.530.000,00	60.530.000,00	100,00	63.104.000,00
22	Bagian Hukum	37.644.000,00	37.644.000,00	100,00	35.820.000,00
23	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	37.404.000,00	37.404.000,00	100,00	35.892.000,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan	333.942.000,00	327.833.000,00	98,17	427.858.000,00
25	Bagian Umum	6.986.100.576,00	6.717.694.509,00	96,16	5.737.932.834,00
26	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	39.926.000,00	37.994.000,00	95,16	35.820.000,00
27	Bagian Organisasi	38.540.000,00	37.340.000,00	96,89	36.732.000,00
28	Sekretariat DPRD	8.691.168.036,00	8.614.042.069,00	99,11	8.297.844.285,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.692.060.135,00	1.655.979.543,00	97,87	1.671.346.220,00
30	Badan Keuangan Daerah	3.939.752.884,00	3.500.113.256,00	88,84	3.440.954.366,00
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	2.172.031.949,00	2.057.752.483,00	94,74	2.215.221.078,00
32	Inspektorat Daerah	2.028.790.493,00	1.825.751.961,00	89,99	1.884.604.630,00
33	Kecamatan Sabu Barat	2.149.075.282,00	2.002.759.614,00	93,19	2.093.861.862,00
34	Kecamatan Sabu Timur	2.454.656.542,00	2.374.354.331,00	96,73	2.397.969.524,00
35	Kecamatan Sabu Liae	1.148.090.906,00	1.019.300.492,00	88,78	1.031.628.963,00
36	Kecamatan Hawu Mehara	1.454.048.136,00	1.255.706.537,00	86,36	1.264.145.572,00
37	Kecamatan Raijua	1.771.955.619,00	1.656.717.297,00	93,50	1.617.031.082,00
38	Kecamatan Sabu Tengah	1.365.266.245,00	1.239.363.104,00	90,78	1.201.570.559,00
39	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	779.617.872,00	607.868.460,00	77,97	665.215.195,00
Total		193.378.416.095,00	172.071.722.075,00	88,98	171.945.977.759,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **TA 2022** **TA 2021**
Rp161.021.209.297,70 **Rp168.356.423.250,00**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp161.021.209.297,70 dari anggaran Rp179.592.496.883,00 atau 89,66%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp7.335.213.952,30 atau 4,36% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp168.356.423.250,00. Belanja barang dan jasa non RKUD tahun 2022 yang disajikan dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp15.157.316.968,70, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana BOS SD sebesar Rp5.373.897.947,00
2. Dana BOS SMP sebesar Rp4.687.215.571,00

3. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp5.096.203.450,70.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mencatat belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan belanja barang dan jasa dana BOS. Secara lebih rinci realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 dan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.19 Realisasi Belanja Barang Jasa

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	179.592.496.883,00	161.021.209.297,00	89,66	168.356.423.250,00
Belanja Barang	35.095.211.368,00	31.492.755.013,00	89,74	36.002.590.316,00
Belanja Jasa	82.842.081.819,00	75.454.044.765,00	91,08	76.059.988.656,00
Belanja Pemeliharaan	8.894.245.576,00	7.880.333.987,00	88,60	15.409.741.378,00
Belanja Perjalanan Dinas	38.921.330.920,00	32.457.059.364,00	83,39	28.732.683.434,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.731.802.000,00	3.675.902.650,00	98,50	1.596.188.450,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	10.107.825.200,00	10.061.113.518,00	99,54	10.555.231.016,00

Tabel 5.20 Realisasi Belanja Barang Jasa per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	29.095.874.384,00	27.386.344.911,00	94,12	29.653.685.868,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	11.902.350.867,00	10.847.027.019,00	91,13	13.087.069.573,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	42.741.797.944,00	36.647.330.568,70	85,74	43.174.712.218,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.647.398.635,00	7.008.948.929,00	81,05	6.270.548.848,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.340.284.285,00	3.330.251.444,00	99,70	2.264.659.305,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.683.566.100,00	2.521.642.475,00	93,97	2.482.312.014,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.210.155.650,00	1.790.512.919,00	81,01	1.785.148.480,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.142.164.167,00	2.763.325.502,00	87,94	2.987.998.545,00
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	1.574.315.627,00	1.476.771.095,00	93,80	1.612.750.345,00
10	Dinas Pertanian Dan Pangan	6.009.633.482,00	5.760.860.371,00	95,86	7.220.081.230,00

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11	Dinas Lingkungan Hidup	472.971.575,00	459.908.960,00	97,24	646.787.306,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.564.290.275,00	1.384.458.150,00	88,50	1.648.170.731,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	802.237.775,00	586.791.352,00	73,14	1.206.227.695,00
14	Dinas Perhubungan	1.296.577.400,00	1.248.130.477,00	96,26	1.087.094.917,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.547.021.690,00	2.418.808.243,00	94,97	1.931.355.802,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	7.657.891.753,00	6.105.855.777,00	79,73	8.304.251.912,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	642.441.613,00	582.020.596,00	90,60	510.721.370,00
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.347.528.881,00	3.191.646.700,00	95,34	2.984.400.401,00
19	Dinas Pariwisata	1.776.322.550,00	1.535.441.758,00	86,44	457.407.220,00
20	Bagian Pemerintahan	948.833.382,00	903.267.933,00	95,20	1.526.606.479,00
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.379.437.550,00	1.326.176.820,00	96,14	977.707.924,00
22	Bagian Hukum	643.274.300,00	516.659.760,00	80,32	344.261.110,00
23	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	633.148.410,00	602.428.547,00	95,15	593.431.590,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan	729.464.150,00	719.368.412,00	98,62	532.985.350,00
25	Bagian Umum	12.837.248.733,00	11.803.490.731,00	91,95	10.747.314.700,00
26	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	680.709.075,00	654.547.595,00	96,16	668.669.480,00
27	Bagian Organisasi	531.117.400,00	482.190.315,00	90,79	563.094.188,00
28	Sekretariat DPRD	12.854.028.949,00	12.607.998.641,00	98,09	10.083.735.459,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.533.535.620,00	2.427.031.904,00	95,80	2.167.235.383,00
30	Badan Keuangan Daerah	3.701.833.892,00	3.408.556.112,00	92,08	2.769.426.721,00
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	4.354.549.475,00	3.046.105.815,00	69,95	3.187.033.296,00
32	Inspektorat Daerah	1.029.798.050,00	720.262.240,00	69,94	654.545.932,00
33	Kecamatan Sabu Barat	625.770.050,00	555.535.640,00	88,78	481.050.310,00
34	Kecamatan Sabu Timur	1.031.687.567,00	1.026.391.340,00	99,49	934.071.142,00
35	Kecamatan Sabu Liae	405.538.945,00	308.182.780,00	75,99	362.514.300,00

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
36	Kecamatan Hawu Mehara	490.553.650,00	413.155.757,00	84,22	470.336.350,00
37	Kecamatan Rajjua	1.447.205.007,00	1.379.100.300,00	95,29	988.819.358,00
38	Kecamatan Sabu Tengah	374.258.225,00	345.059.645,00	92,20	346.229.200,00
39	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	905.679.800,00	729.621.764,00	80,56	641.971.198,00
Total		179.592.496.883,00	161.021.209.297,70	89,66	168.356.423.250,00

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi Realisasi 2022
Rp47.400.000,00 Realisasi 2021
Rp0,00

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Realisasi belanja subsidi tahun 2022 sebesar Rp47.400.000,00 dari anggaran sebesar Rp48.300.000,00 atau 98,14%. Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sabu Rajjua tidak merealisasikan belanja subsidi.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah Realisasi 2022
Rp7.739.068.286,00 Realisasi 2021
Rp8.158.554.162,00

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp7.739.068.286,00 dari anggaran Rp7.905.167.843,00 atau 97,90%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp419.485.876,00 atau 5,14% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp8.158.554.162,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Hibah

Penerima Hibah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Badan Usaha Milik Desa	0,00	0,00	0,00	2.591.500.000,00
BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.540.300.000,00	2.560.742.000,00	100,80	2.212.800.000,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	147.300.000,00	128.400.000,00	87,17	370.000.000,00
Dharma Wanita Persatuan (DWP)	250.000.000,00	223.163.400,00	89,27	351.574.100,00
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	345.000.000,00	336.741.180,00	97,61	321.199.900,00
Komite Olahraga Nasional Indonesia	680.000.000,00	680.000.000,00	100,00	500.000.000,00
Kwarcab Gerakan Pramuka	410.000.000,00	391.948.840,00	95,60	407.842.350,00

Penerima Hibah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Palang Merah Indonesia (PMI)	1.100.000.000,00	1.022.808.995,00	92,98	920.327.812,00
Partai Politik	483.310.000,00	483.310.000,00	100,00	483.310.000,00
Dewan Kerajinan Nasional Daerah	466.172.000,00	466.172.000,00	100,00	0,00
Perpustakaan Desa	65.000.000,00	64.900.000,00	99,85	0,00
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	655.085.843,00	655.085.843,00	100,00	0,00
Panitia Pembangunan Gedung Serba Guna Sinode GMIT XXXV Tahun 2023	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K)	220.000.000,00	219.055.000,00	99,57	0,00
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	193.000.000,00	169.100.000,00	87,62	0,00
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD)	200.000.000,00	187.641.028,00	93,82	0,00
Jumlah	7.905.167.843,00	7.739.068.286,00	97,90	8.158.554.162,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	TA 2022	TA 2021
	Rp2.855.102.000,00	Rp2.224.846.804,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Bantuan sosial berupa transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan agama.

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp2.855.102.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.002.297.000,00 atau 95,10%. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar Rp630.255.196,00 atau 28,33 dari realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 sebesar Rp2.224.846.804,00.

Rincian belanja bantuan sosial tahun 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - a. Bantuan rumah swadaya sesuai SK Nomor 234/KEP/HK/2022 tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp600.000.000,00; dan
 - b. Pembangunan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program di Desa Nadawawi sesuai SK Nomor 158/KEP/HK/2022 tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp210.000.000,00.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - a. Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai SK Nomor 273/KEP/HK/2022 tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp240.000.000,00;
 - b. Bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) sesuai SK Nomor 273/KEP/HK/2022 tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp200.000.000,00; dan

- c. Bantuan Langsung Tunai Kompensasi Kenaikan Bahan Bakar Minyak Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai SK Nomor 347/KEP/HK/2022 tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp674.100.000,00.
3. Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
 - a. Bantuan bagi individu pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp187.000.000,00, terdiri atas SK Nomor 319/KEP/HK/2022 tanggal 10 September 2022 sebesar Rp75.000.000,00 dan SK Nomor 394/KEP/HK/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp112.000.000,00; dan
 - b. Bantuan bagi kelompok pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp463.502.000,00 SK Nomor 319/KEP/HK/2022 tanggal 10 September 2022 sebesar Rp443.502.000,00 dan SK Nomor 394/KEP/HK/2022 tanggal 24 November 2022 sebesar Rp20.000.000,00.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bantuan mahasiswa kedokteran sesuai SK Nomor 48/KEP/HK/2022 tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp200.000.000,00;
 - b. Bantuan bagi individu sesuai SK Nomor 404/KEP/HK/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp52.500.000,00; dan
 - c. Bantuan bagi Lembaga Keagamaan sebesar Rp28.000.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran dalam Belanja Modal sebesar Rp149.863.987.142,00 yang direalisasikan sebesar Rp137.291.124.197,00 atau 91,61%. Realisasi belanja modal tahun 2022 berkurang sebesar Rp21.800.006.676,62 atau 13,70% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp159.091.130.873,62. Belanja Modal Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022 dan 2021 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.22**.

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
BELANJA MODAL	149.863.987.142,00	137.291.124.197,00	91,61	159.091.130.873,62
Belanja Modal Tanah	13.500.000,00	8.411.920,00	62,31	27.472.380,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.677.912.888,00	9.247.832.312,00	95,56	19.736.931.091,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	35.096.828.617,00	31.557.107.226,00	89,91	33.815.385.571,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	102.017.733.837,00	93.612.153.264,00	91,76	98.642.948.466,62
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.058.011.800,00	2.865.619.475,00	93,71	6.868.393.365,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2022	TA 2021
Rp8.411.920,00	Rp27.472.380,00

Belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran Belanja Modal Tanah tahun 2022 sebesar Rp13.500.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp8.411.920,00 atau 62,31%. Realisasi belanja modal tanah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.060.460,00 atau 69,38% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp27.472.380,00. Belanja modal tanah tahun 2022 merupakan biaya pilar dan materai pengurusan sertifikat 17 bidang tanah Pemerintah Daerah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2022	TA 2021
Rp9.247.832.312,00	Rp19.736.931.091,00

Belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin tahun 2022 sebesar Rp9.677.912.888,00 yang direalisasikan sebesar Rp9.247.832.312,00 atau 95,56%. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.489.098.779,00 atau 53,14% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp19.736.931.091,00.

Belanja modal peralatan dan mesin non RKUD tahun 2022 dalam LRA pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yaitu belanja Modal dari Dana JKN sebesar Rp477.215.488,00.

Anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 23 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Alat Besar	11.674.625,00	8.650.000,00	74,09	3.879.221.972,00
Belanja Modal Alat Angkutan	671.434.150,00	618.312.203,00	92,09	2.426.586.000,00

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	41.500.000,00	41.310.000,00	99,54	9.900.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	122.958.000,00	122.810.400,00	99,88	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.283.309.226,00	2.058.826.427,00	90,17	3.993.874.559,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	97.797.475,00	97.241.000,00	99,43	261.950.917,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.074.823.491,00	5.043.130.330,00	99,38	6.554.022.616,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	159.652.900,00
Belanja Modal Komputer	1.306.415.921,00	1.190.148.752,00	91,10	1.820.783.467,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	64.000.000,00	63.403.200,00	99,07	630.938.660,00
Jumlah	9.677.912.888,00	9.247.832.312,00	95,56	19.736.931.091,00

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.151.588.128,00	1.031.865.930,00	89,60	880.196.400,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	3.832.571.273,00	3.799.745.739,00	99,14	6.398.013.640,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.204.270.872,00	2.113.042.206,00	95,86	5.316.688.323,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	312.432.480,00	255.203.040,00	81,68	78.830.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	20.000.648,00	20.000.000,00	100,00	13.200.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	138.073.560,00	91.046.000,00	65,94	52.615.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.123.500,00	13.043.500,00	99,39	51.188.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	51.325.850,00	43.835.000,00	85,41	40.000.000,00
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	33.568.980,00	33.568.980,00	100,00	73.801.717,00
10	Dinas Pertanian Dan Pangan	16.992.670,00	16.500.000,00	97,10	309.488.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	750.500,00	750.000,00	99,93	287.248.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	114.375.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	132.851.190,00	125.523.000,00	94,48	218.513.800,00
14	Dinas Perhubungan	72.069.999,00	68.403.200,00	94,91	672.900.660,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	235.267.984,00	219.204.307,00	93,17	624.409.367,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	104.518.980,00	104.328.980,00	99,82	212.913.700,00

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	26.113.800,00
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	52.119.850,00	37.100.000,00	71,18	30.140.000,00
19	Dinas Pariwisata	473.360.000,00	473.360.000,00	100,00	53.866.000,00
20	Bagian Pemerintahan	25.795.339,00	25.750.000,00	99,82	7.600.000,00
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	14.873.200,00	14.873.200,00	100,00	35.796.300,00
22	Bagian Hukum	63.197.780,00	63.190.000,00	99,99	0,00
23	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	4.440.000,00	4.400.000,00	99,10	46.200.000,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan	29.282.804,00	29.194.000,00	99,70	65.000.000,00
25	Bagian Umum	282.026.175,00	281.008.000,00	99,64	2.840.337.100,00
26	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	22.029.877,00	22.029.877,00	100,00	47.829.500,00
27	Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	6.236.000,00
28	Sekretariat DPRD	12.314.840,00	12.000.000,00	97,44	483.882.334,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.289.514,00	38.000.000,00	68,73	85.550.000,00
30	Badan Keuangan Daerah	101.481.890,00	100.718.770,00	99,25	188.939.500,00
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	32.623.770,00	28.350.000,00	86,90	37.350.000,00
32	Inspektorat Daerah	27.019.350,00	24.604.203,00	91,06	51.120.000,00
33	Kecamatan Sabu Barat	22.335.280,00	22.335.280,00	100,00	0,00
34	Kecamatan Sabu Timur	22.822.670,00	22.822.000,00	100,00	41.995.400,00
35	Kecamatan Sabu Liae	27.077.600,00	27.077.600,00	100,00	50.807.350,00
36	Kecamatan Hawu Mehara	23.922.000,00	23.922.000,00	100,00	119.126.200,00
37	Kecamatan Rajjua	8.314.000,00	4.800.000,00	57,73	87.860.000,00
38	Kecamatan Sabu Tengah	29.713.625,00	29.697.500,00	99,95	66.850.000,00
39	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.026.710,00	3.100.000,00	61,67	19.950.000,00
Total		9.677.912.888,00	9.247.832.312,00	95,56	19.736.931.091,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	TA 2022	TA 2021
	Rp31.557.107.226,00	Rp33.815.385.571,00

Belanja modal gedung dan bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Rajjua mengalokasikan anggaran belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp35.096.828.617,00 yang direalisasikan sebesar Rp31.557.107.226,00 atau 89,91%. Realisasi tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp2.258.278.345,00 atau 6,68% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp33.815.385.571,00.

Rincian belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17.291.921.974,00	15.449.765.435,00	89,35	15.644.387.600,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	75.126.750,00	70.118.300,00	93,33	30.050.700,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.719.917.750,00	2.687.108.004,00	98,79	7.617.626.524,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.924.493.461,00	9.522.631.771,00	87,17	4.833.324.834,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Terbuka	0,00	0,00	0,00	29.890.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	120.000.000,00	0,00	0,00	546.985.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.549.568.100,00	1.549.568.100,00	100,00	2.563.970.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	185.342.116,00	185.342.116,00	100,00	24.950.000,00
Belanja Modal Pagar	2.140.458.466,00	2.002.573.500,00	93,56	2.518.250.913,00
Jumlah	35.096.828.617,00	31.557.107.226,00	89,91	33.815.385.571,00

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	PKKO	11.109.835.577,00	9.707.973.887,00	87,38	4.833.324.834,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.421.727.324,00	1.342.271.585,00	94,41	1.319.736.000,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.820.589.045,00	2.668.757.142,00	94,62	6.372.840.524,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18.072.488.571,00	16.285.916.512,00	90,11	18.192.689.213,00
5	Dinas Pertanian Dan Pangan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
6	Dinas PM PSTP Perindag	0,00	0,00	0,00	35.840.000,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	149.519.000,00
8	Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pariwisata	1.582.188.100,00	1.462.188.100,00	92,42	2.911.436.000,00
	Total	35.096.828.617,00	31.557.107.226,00	89,91	33.815.385.571,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

TA2022 **TA 2021**
Rp93.612.153.264,00 **Rp98.642.948.466,62**

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp102.017.733.837,00 yang direalisasikan sebesar Rp93.612.153.264,00 atau 91,76%. Realisasi tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp5.030.795.202,62 atau 5,10% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp98.642.948.466,62. Rincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Jalan	88.313.349.202,00	80.221.965.331,00	90,84	75.851.690.754,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	8.560.576.200,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.427.393.900,00	7.427.228.900,00	100,00	8.724.318.121,62
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.207.020.735,00	5.892.989.033,00	94,94	3.466.613.708,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	2.039.749.683,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	65.970.000,00	65.970.000,00	100,00	0,00
Jumlah	102.017.733.837,00	93.612.153.264,00	91,76	98.642.948.466,62

Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan per SKPD

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	796.632.200,00	706.158.200,00	88,64
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	65.970.000,00	65.970.000,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	101.151.131.637,00	92.836.025.064,00	91,78
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
Total		102.017.733.837,00	93.612.153.264,00	91,76

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	TA2022	TA 2021
	Rp2.865.619.475,00	Rp6.868.393.365,00

Belanja modal aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp3.058.011.800,00 yang direalisasikan sebesar Rp2.865.619.475,00 atau 93,71%. Realisasi tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp4.002.773.890,00 atau 58,28% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.868.393.365,00.

Rincian belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.29 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.000.000,00	1.488.100,00	49,60	192.093.400,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	181.694.600,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	6.279.756.165,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	0,00	0,00	214.849.200,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.980.011.800,00	2.864.131.375,00	96,11	0,00
Jumlah	3.058.011.800,00	2.865.619.475,00	93,71	6.868.393.365,00

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama Unit Organisasi	Anggaran2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	2.980.011.800,00	2.864.131.375,00	96,11	6.089.413.311,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	214.849.200,00
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00	119.300.000,00
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	189.800.000,00
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.000.000,00	973.100,00	97,31	191.328.854,00
8	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00
9	Sekretariat DPRD	2.000.000,00	515.000,00	25,75	36.302.000,00
10	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Total	3.058.011.800,00	2.865.619.475,00	93,71	6.868.393.365,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	TA2022	TA 2021
	Rp216.151.500,00	Rp13.611.168.339,00

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja tak terduga tahun 2022 sebesar Rp11.026.917.843,00 yang direalisasikan sebesar Rp216.151.500,00 atau 1,96%. Realisasi tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp13.395.016.839,00 atau 98,41% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.611.168.339,00.

Rincian realisasi belanja tak terduga tahun 2022 dibayarkan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dan penyetoran sisa Dana BOS 2011 ke RKUN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pelatihan/Lomba (2 penerima)	14.000.000,00
2	Biaya Pendidikan (7 penerima)	34.400.000,00
3	Biaya Pengobatan (2 penerima)	11.000.000,00
4	Modal Usaha (11 penerima)	94.000.000,00
5	Penyetoran ke RKUN (BOS 2011)	62.751.500,00
	Jumlah	216.151.500,00

5.1.2.4 Belanja Transfer	TA 2022	TA 2021
	Rp96.182.678.692,00	Rp119.993.289.270,00

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja transfer tahun 2022 sebesar Rp96.818.503.762,00 yang direalisasikan sebesar Rp96.182.678.692,00 atau 99,34%. Realisasi tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp23.810.610.578,00 atau 19,84% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp119.993.289.270,00.

Rincian belanja transfer dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa tahun 2022 dialokasikan untuk pembayaran bagi hasil tahun 2021 dan 2022. Transfer/Bagi Hasil ke Desa tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp445.275.136,00 namun tidak dapat terealisasi karena alokasi bagi hasil per Desa yang dianggarkan berbeda dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil tahun 2022 sebesar Rp849.661.762,00 yang direalisasikan sebesar Rp790.395.664,00 atau 93,02%.

Belanja bagi hasil pajak/retribusi kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.32 Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa	801.396.888,00	742.130.790,00	92,60	0,00
Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa	48.264.874,00	48.264.874,00	100,00	0,00
Jumlah	849.661.762,00	790.395.664,00	93,02	0,00

2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

a. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari APBN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa, dilaporkan dalam APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBN tahun 2022 sebesar Rp60.882.277.028,00 atau 99,06% dari anggaran Rp61.458.836.000,00. Realisasi tahun 2021 mengalami pengurangan sebesar Rp23.678.583.742,00 atau 28,00% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp84.560.860.770,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBN tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada **Tabel 5.33**.

Tabel 5.33 Dana Desa APBN

No	Nama Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Desa Menia	1.180.687.000,00	1.180.687.000,00	100,00	1.579.431.000,00
2	Desa Raeloro	1.155.662.000,00	1.155.662.000,00	100,00	1.520.417.000,00
3	Desa Nadawawi	1.156.390.000,00	1.156.390.000,00	100,00	1.636.870.000,00
4	Desa Teriwu	1.086.005.000,00	1.086.005.000,00	100,00	1.781.329.000,00
5	Desa Raenalulu	1.220.447.000,00	1.220.447.000,00	100,00	1.840.676.000,00
6	Desa Raedewa	1.229.948.000,00	796.539.200,00	64,76	1.683.620.000,00
7	Desa Ledean	991.750.000,00	991.750.000,00	100,00	1.657.387.000,00
8	Desa Depe	1.240.885.000,00	1.240.885.000,00	100,00	1.485.571.000,00
9	Desa Raemude	1.209.097.000,00	1.209.097.000,00	100,00	1.721.017.000,00
10	Desa Raekore	1.192.474.000,00	1.049.377.120,00	88,00	1.705.221.000,00
11	Desa Raenyale	1.178.748.000,00	1.178.748.000,00	100,00	1.646.618.000,00
12	Desa Raemadia	1.096.489.000,00	1.096.489.000,00	100,00	1.480.112.000,00
13	Desa Delo	1.089.249.000,00	1.089.249.000,00	100,00	1.679.727.000,00
14	Desa Roboaba	978.234.000,00	978.234.000,00	100,00	1.403.998.000,00
15	Desa Djadu	938.896.000,00	938.896.000,00	100,00	1.226.433.000,00

No	Nama Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
16	Desa Ledekepaka	1.016.827.000,00	1.016.827.000,00	100,00	1.344.437.000,00
17	Desa Titinalede	904.389.000,00	904.389.000,00	100,00	987.209.000,00
18	Desa Bebae	994.966.000,00	994.966.000,00	100,00	1.346.740.000,00
19	Desa Tada	911.201.000,00	911.201.000,00	100,00	1.086.366.000,00
20	Desa Matei	1.003.142.000,00	1.003.142.000,00	100,00	1.414.307.000,00
21	Desa Loboaju	991.002.000,00	991.002.000,00	100,00	960.867.000,00
22	Desa Eimadake	1.039.036.000,00	1.039.036.000,00	100,00	1.480.569.000,00
23	Desa Jiwuwu	1.030.024.000,00	1.030.024.000,00	100,00	1.461.440.000,00
24	Desa Eilode	1.185.608.000,00	1.185.608.000,00	100,00	1.545.904.000,00
25	Desa Eimau	1.249.011.000,00	1.249.011.000,00	100,00	1.628.179.000,00
26	Desa Lobodei	800.891.000,00	800.891.000,00	100,00	2.314.167.000,00
27	Desa Bodae	1.063.290.000,00	1.063.290.000,00	100,00	1.387.076.000,00
28	Desa Keduru	1.065.585.000,00	1.065.585.000,00	100,00	1.428.361.000,00
29	Desa Kujiratu	1.058.791.000,00	1.058.791.000,00	100,00	1.284.661.000,00
30	Desa Lobarai	721.376.000,00	721.376.000,00	100,00	902.310.000,00
31	Desa Huwaga	734.053.000,00	734.053.000,00	100,00	958.792.000,00
32	Desa Eiada	797.400.000,00	797.400.000,00	100,00	1.274.241.000,00
33	Desa Keliha	1.117.476.000,00	1.117.476.000,00	100,00	1.331.731.000,00
34	Desa Raerobo	983.881.000,00	983.881.000,00	100,00	1.333.894.000,00
35	Desa Mehona	968.768.000,00	968.768.000,00	100,00	1.202.918.000,00
36	Desa Waduwalla	971.890.000,00	971.890.000,00	100,00	1.455.297.000,00
37	Desa Ledeke	972.511.000,00	972.511.000,00	100,00	1.242.224.000,00
38	Desa Eilogo	941.576.000,00	941.576.000,00	100,00	1.303.815.000,00
39	Desa Deme	967.495.000,00	967.495.000,00	100,00	1.215.379.000,00
40	Desa Kotahawu	950.483.000,00	950.483.000,00	100,00	1.389.456.000,00
41	Desa Dainao	988.582.000,00	988.582.000,00	100,00	1.248.144.000,00
42	Desa Eikare	745.705.000,00	745.705.000,00	100,00	1.192.348.000,00
43	Desa Lobarui	935.117.000,00	935.117.000,00	100,00	1.256.640.000,00
44	Desa Hallapadji	796.321.000,00	796.270.708,00	99,99	1.211.849.000,00
45	Desa Ledetalo	945.677.000,00	945.677.000,00	100,00	1.242.624.000,00
46	Desa Lohohede	1.267.973.000,00	1.267.973.000,00	100,00	1.664.022.000,00
47	Desa Molie	1.236.933.000,00	1.236.933.000,00	100,00	1.663.593.770,00
48	Desa Daieko	1.282.651.000,00	1.282.651.000,00	100,00	1.944.068.000,00
49	Desa Pedarro	1.529.019.000,00	1.529.019.000,00	100,00	2.062.223.000,00
50	Desa Tanajawa	1.140.432.000,00	1.140.432.000,00	100,00	1.516.608.000,00
51	Desa Ledeeae	1.041.637.000,00	1.041.637.000,00	100,00	1.399.571.000,00
52	Desa Wadumaddi	1.052.984.000,00	1.052.984.000,00	100,00	1.452.954.000,00
53	Desa Lederaga	1.211.863.000,00	1.211.860.000,00	100,00	1.582.939.000,00
54	Desa Gurimonearu	1.144.934.000,00	1.144.934.000,00	100,00	1.545.652.000,00
55	Desa Ramedue	1.190.022.000,00	1.190.022.000,00	100,00	1.528.154.000,00
56	Desa Bolua	1.237.389.000,00	1.237.389.000,00	100,00	1.664.657.000,00
57	Desa Kolorae	1.165.982.000,00	1.165.982.000,00	100,00	1.572.058.000,00
58	Desa Ballu	1.159.982.000,00	1.159.982.000,00	100,00	1.483.989.000,00
TOTAL		61.458.836.000,00	60.882.277.028,00	99,06	84.560.860.770,00

b. Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua kepada Pemerintah Desa, bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa digunakan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan masyarakat desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), tunjangan aparat desa yang khusus diperuntukkan bagi Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga

(RT) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 58 desa seKabupaten Sabu Raijua.

Belanja bantuan keuangan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp34.510.006.004,00 atau 100,00% dari anggaran Rp34.510.006.004,00. Realisasi tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp922.422.496,00 atau 2,60% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp35.432.428.500,00. Rincian belanja bantuan keuangan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.34 Alokasi Dana Desa APBD

No	Nama Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Desa Menia	659.890.931,00	659.890.931,00	100,00	679.450.423,00
2	Desa Raeloro	508.138.931,00	508.138.931,00	100,00	527.698.423,00
3	Desa Nadawawi	643.090.931,00	643.090.931,00	100,00	662.650.423,00
4	Desa Teriwu	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00
5	Desa Raenalulu	659.890.931,00	659.890.931,00	100,00	679.450.423,00
6	Desa Raedewa	659.890.931,00	659.890.931,00	100,00	679.450.423,00
7	Desa Ledean	659.890.933,00	659.890.933,00	100,00	451.822.423,00
8	Desa Depe	659.890.931,00	659.890.931,00	100,00	679.450.423,00
9	Desa Raemude	659.890.931,00	659.890.931,00	100,00	679.450.423,00
10	Desa Raekore	659.890.931,00	659.890.931,00	100,00	679.450.423,00
11	Desa Raenyale	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00
12	Desa Raemadia	531.538.931,00	531.538.931,00	100,00	551.098.423,00
13	Desa Delo	584.014.931,00	584.014.931,00	100,00	603.574.423,00
14	Desa Roboaba	659.890.931,00	659.890.931,00	100,00	679.450.423,00
15	Desa Djadu	432.262.931,00	432.262.931,00	100,00	451.822.423,00
16	Desa Ledekpaka	584.014.931,00	584.014.931,00	100,00	603.574.423,00
17	Desa Titinalede	493.738.931,00	493.738.931,00	100,00	513.298.423,00
18	Desa Bebae	576.814.931,00	576.814.931,00	100,00	596.374.423,00
19	Desa Tada	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
20	Desa Matei	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
21	Desa Loboaju	416.338.931,00	416.338.931,00	100,00	435.898.423,00
22	Desa Eimadake	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
23	Desa Jiwuwu	576.814.931,00	576.814.931,00	100,00	596.374.423,00
24	Desa Eilode	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
25	Desa Eimau	528.538.931,00	528.538.931,00	100,00	548.098.423,00
26	Desa Lobodei	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00
27	Desa Bodae	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
28	Desa Keduru	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
29	Desa Kujiratu	493.738.931,00	493.738.931,00	100,00	513.298.423,00
30	Desa Loborai	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
31	Desa Huwaga	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
32	Desa Eiada	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
33	Desa Keliha	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
34	Desa Raerobo	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
35	Desa Mehona	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00
36	Desa Waduwalla	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00
37	Desa Ledeke	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
38	Desa Eilogo	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00
39	Desa Deme	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00
40	Desa Kotahawu	493.738.931,00	493.738.931,00	100,00	513.298.423,00
41	Desa Dainao	593.890.931,00	593.890.931,00	100,00	564.898.423,00
42	Desa Eikare	469.462.931,00	469.462.931,00	100,00	553.174.423,00
43	Desa Loborui	569.614.931,00	569.614.931,00	100,00	589.174.423,00
44	Desa Hallapadji	645.490.931,00	645.490.931,00	100,00	665.050.423,00

sebesar Rp130.467.756.957,88. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.35 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	60.995.254.428,59	61.130.281.643,59	100,22	97.982.962.339,82
Pencairan Dana Cadangan	9.903.359.772,69	9.903.359.772,69	100,00	32.484.794.618,06
Jumlah	70.898.614.201,28	71.033.641.461,28	100,19	130.467.756.957,88

1. SiLPA tahun anggaran sebelumnya merupakan SiLPA tahun 2021 yang digunakan kembali tahun 2022 sebesar Rp61.130.281.643,59.
2. Realisasi pencairan dana cadangan tahun 2022 sesuai Surat Nomor 900/565/BAKEUDA-SR/XII/2021 sebesar Rp 9.903.359.772,69 terdiri atas:
 - a. Pencairan Dana Cadangan Embung sebesar Rp1.507.924.049,50
 - b. Pencairan Dana Cadangan Skyber sebesar Rp1.534.603.876,01
 - c. Pencairan Dana Cadangan Jalan sebesar Rp3.296.489.062,68
 - d. Pencairan Dana Cadangan DPRD sebesar Rp3.564.342.784,5

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan TA2022 TA 2021
Rp7.000.000.000,00 **Rp9.925.954.729,02**

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp33.770.000.000,00 atau 20,73%. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.925.954.729,02. Pengeluaran pembiayaan TA 2022 merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank NTT sebesar Rp7.000.000.000,00.

5.1.4.3 Pembiayaan Netto TA2022 TA 2021
Rp64.033.641.416,28 **Rp120.541.802.228,86**

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

Pembiayaan netto tahun 2022 sebesar Rp64.033.641.416,28 atau 172,46% dari yang ditargetkan sebesar Rp37.128.614.201,28. Realisasi pembiayaan netto tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp56.508.160.812,58 atau 46,87% dibanding yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp120.541.802.228,86.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA2022 TA 2021
Rp55.038.160.787,26 **Rp60.995.254.428,59**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode

pelaporan. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dari nilai pada pos surplus/defisit ditambah dengan pos pembiayaan netto. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 dan 2021 SiLPA Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp55.038.160.787,26 yang berasal dari defisit sebesar Rp8.995.480.629,02 ditambah pembiayaan netto sebesar Rp64.033.641.416,28. Jika dibanding SiLPA tahun 2021 sebesar Rp60.995.254.428,59, SiLPA tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp5.957.093.641,33 atau 9,76%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp55.038.160.787,26 terdiri atas:

1. Dana Kapitasi JKN	Rp935.942.532,30
2. Dana BOS	Rp30.955.899,64
3. DAK Fisik	Rp5.770.076.767,00
4. DAK Non Fisik	Rp7.165.889.901,00
5. Dana Cadangan	Rp7.526.264.909,00
6. Dana Cadangan Pilkada	Rp26.000.000.000,00
7. Silpa Lainnya	Rp7.609.030.778,32

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih akhir periode. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2022 dan 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Perubahan SAL

Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	60.995.254.428,59	97.982.962.339,82
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	61.130.281.643,59	97.982.962.339,82
Sub Total	(135.027.215,00)	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	55.038.160.787,26	60.995.254.428,59
Sub Total	54.903.133.572,26	60.995.254.428,59
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	135.027.215,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	55.038.160.787,26	60.995.254.428,59

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp60.995.254.428,59	Rp97.982.962.339,82

Saldo Anggaran Lebih merupakan gabungan saldo anggaran lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang diperkenankan. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp60.995.254.428,59 mengalami

pengurangan sebesar Rp36.987.707.911,23 dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2021 sebesar Rp97.982.962.339,82.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2022 Rp61.130.281.643,59	31 Desember 2021 Rp97.982.962.339,82
--	---	---

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp61.130.281.643,59 mengalami pengurangan sebesar Rp36.852.680.696,23 dibandingkan penggunaan SAL tahun 2021 sebesar Rp97.982.962.339,82.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	31 Desember 2022 Rp55.038.160.787,26	31 Desember 2021 Rp60.995.254.428,59
--	---	---

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA Rp568.428.975.418,68 dan belanja Rp577.424.456.047,70 serta pembiayaan netto selama tahun 2022 Rp64.033.641.416,28. SiLPA tahun 2022 sebesar Rp55.038.160.787,26 mengalami pengurangan sebesar Rp5.957.093.641,33 atau 9,77% dibandingkan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp60.995.254.428,59.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2022 Rp135.027.215,00	31 Desember 2021 Rp0,00
---	--	--

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp135.027.215,00 yang merupakan koreksi tambah SiLPA yang merupakan kelebihan pencatatan hutang PFK BUD senilai 135.027.215,00 yang terdiri atas:

- a. Utang taperum tahun 2013 senilai Rp41.000,00. Berdasarkan catatan kami sejak tahun 2013, tidak ada surat tagihan dari Bapetarum atas nilai hutang tersebut. Pada tahun 2018 Bapetarum telah dibubarkan.
- b. Utang PPH Pasal 22 senilai Rp442.000,00 dan PPN senilai Rp1.105.000,00 yang salah dicatat dua kali dalam SP2D Nomor 0860/SP2D-LS/1.21.01.01/2012 (sebagai potongan dan informasi).
- c. Utang potongan retensi 5% atas empat paket pekerjaan senilai Rp133.439.215,00, nilai tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak ketiga saat pencairan retensi 5%.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2022 Rp55.038.160.787,26	31 Desember 2021 Rp60.995.254.428,59
---	---	---

Saldo anggaran lebih adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo anggaran lebih akhir tahun 2022 sebesar Rp55.038.160.787,26 mengalami pengurangan sebesar Rp5.957.093.641,33 atau 9,77% dibandingkan saldo anggaran lebih akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp60.995.254.428,59.

5.3 Neraca

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Data neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan neraca hasil konsolidasi neraca SKPD sebagai entitas pelaporan.

Neraca Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2022 dan 2021 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos yang digambarkan atau dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1 Aset	Rp1.377.083.586.940,02	Rp1.405.899.515.137,28

Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kegiatan usaha. Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.405.899.515.137,28, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp28.815.928.197,26 atau 2,05% menjadi Rp1.377.083.586.940,02.

Perbandingan nilai aset tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Aset

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Aset Lancar	77.265.059.487,26	80.058.135.592,04	(2.793.076.104,78)	(3,49)
Investasi Jangka Panjang	42.747.324.493,82	35.756.022.462,51	6.991.302.031,31	19,55
Aset Tetap	1.163.490.680.145,27	1.189.815.381.834,27	(26.324.701.689,00)	(2,21)
Dana Cadangan	31.213.749.885,95	40.264.391.654,88	(9.050.641.768,93)	(22,48)
Aset Lainnya	62.366.772.927,72	60.005.583.593,58	2.361.189.334,14	3,93
Jumlah	1.377.083.586.940,02	1.405.899.515.137,28	(28.815.928.197,26)	(2,05)

Dengan penjelasan masing-masing rincian aset diungkapkan sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1 Aset Lancar	Rp77.265.059.487,26	Rp80.058.135.592,04

Aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.058.135.592,04, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp2.793.076.104,78 atau 3,49% menjadi Rp77.265.059.487,26. Sesuai standar akuntansi aset lancar diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kas di Kas Daerah	24.094.452.314,02	59.987.396.854,95	(35.892.944.540,93)	(59,83)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	30.000,00	(30.000,00)	(100,00)

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	Kas Di Bendahara BOS	30.955.899,64	416.077.612,64	(385.121.713,00)	(92,56)
5	Kas Di Bendahara FKTP	935.942.532,30	825.186.177,00	110.756.355,30	13,42
6	Kas Lainnya	69.926.022,30	0,00	69.926.022,30	0,00
7	Setara Kas	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00
8	Piutang Pajak Daerah	1.667.579.908,00	1.511.412.625,00	156.167.283,00	10,33
9	Piutang Retribusi	2.916.890.598,00	1.470.381.448,00	1.446.509.150,00	98,38
10	Piutang Lain - lain PAD yang sah	4.462.956.449,30	5.044.287.952,30	(581.331.503,00)	(11,52)
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.544.103.181,00	3.963.998.955,00	580.104.226,00	14,63
13	Penyisihan Piutang	(7.218.710.642,28)	(7.025.428.729,85)	(193.281.912,43)	2,75
14	Persediaan	15.760.963.224,98	13.864.792.697,00	1.896.170.527,98	13,68
Jumlah Aset Lancar		77.265.059.487,26	80.058.135.592,04	(2.793.076.104,78)	(3,49)

Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp24.094.452.314,02	Rp59.987.396.854,95

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.987.396.854,95, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp35.892.944.540,93 atau 59,83% menjadi Rp24.094.452.314,02. Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dikelola oleh Bendahara Umum/Kuasa BUD dan disimpan pada rekening PT Bank NTT Cabang Sabu dan BRI Unit Sabu.

Rincian saldo Kas di Kas Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.39 Rekening Kas di Kas Daerah

Rekening	31-Des-2022	31-Des-2021
	(Rp)	(Rp)
Rekening Pada Bank NTT Sabu :		
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000027-1 RKUD	21.841.569.390,58	28.456.077.709,06
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000039-6 PAD	10.595.511,44	12.902.305,89
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000086-4 PBB P2	0,00	0,00
Rekening Pada BRI Unit Sabu :		
Rekening Tabungan BRI 4673-01-007436-53-2	2.206.016.926,00	1.482.416.617,00
Rekening Deposito BRI 467.301.000.051.404	0,00	20.000.000.000,00
Rekening Deposito BRI 4673-01-000308-40-3	0,00	10.000.000.000,00
Jumlah Kas di Kas Daerah	24.058.181.828,02	59.951.396.631,95

Berdasarkan hasil rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh KBUD, ditemukan perbedaan antara saldo buku kas umum ditemukan selisih lebih sebesar Rp36.270.486,00. Saldo buku kas umum sebesar Rp24.094.452.314,02 dan saldo buku bank Rp24.058.181.828,02, perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku dan belum dicatat oleh bank:
Bank kurang debet SP2D Nomor 24.21/04.0/000006/GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P.03/11/2022, tanggal 25 November 2022 (GU Tahap VI Dinas Komunikasi dan Informatika) sebesar Rp50,00.

2. Pengeluaran yang telah dicatat lebih oleh Bank, belum dicatat oleh Buku:
 - a. Kelebihan posting pajak sebesar Rp22.554.155,00, atas SP2D Nomor 4397/SP2D-LS/1.03.01.01/2016, tanggal 27 Desember 2016 untuk Pembayaran Termin IV (55,79%) Pekerjaan Pembangunan fisik gedung Kantor SKPD (paket III) sesuai Kontrak No.PU.600/SP-Gedung/10/2014 tanggal 19 Mei 2014.
 - b. Kelebihan posting Pajak sebesar Rp13.068.181,00, atas SP2D Nomor 2417/SP2D-LS/4.01.04.01/2019, tanggal 4 Desember 2019 untuk pembayaran Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sesuai SPK No. 900/0010/SPK/SETWAN-SR/IX/2019.
 - c. Kelebihan posting Pajak sebesar Rp648.200,00, atas SP2D Nomor 3537/SP2D-LS/1.01.01.01/2019, tanggal 30 Desember 2019 untuk Pembayaran Uang 100% Atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi SDN Luipau Sesuai SPK No: 017/DPKKO-SR/SPK-PENGW/VII/2019 Tgl 05 Juli 2019.

Khusus untuk kelebihan nilai pajak yang sudah terlanjur masuk ke kas negara dengan total Rp36.270.536,00 KBUD telah berkoordinasi dengan KPP, namun sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan belum penyelesaian atas kelebihan bayar tersebut. Rekonsiliasi saldo kas daerah dengan bank dapat dilihat pada **Lampiran N.1**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2022 tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan. Seluruh penerimaan tahun 2022 telah disetorkan ke Kas Daerah sebelum 31 Desember 2022.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp30.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.000,00, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp30.000,00 atau 100,00% menjadi Rp00.

Kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 merupakan hutang pajak yang masih berada ditangan Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 3 Januari 2022.

Rincian kas di bendahara pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran N.2**

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 30.955.899,64	Rp416.077.612,64

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp416.077.612,64, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp385.121.713,00 atau 92,56% menjadi Rp30.955.899,64. Saldo kas di bendahara BOS tahun 2022 merupakan sisa kas yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Kas di bendahara BOS tahun 2021 terdiri atas sisa kas di bendahara BOS sebesar Rp341.442.917,64 dan hutang pajak sebesar Rp74.634.695,00 yang telah disetorkan ke kas negara tahun 2022.

Dana BOS merupakan dana hibah dari Pemerintah Pusat yang di transfer langsung ke sekolah-sekolah penerima dana BOS. Rincian saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat pada Tabel 5.40.

Tabel 5.40 Rincian Kas Di Bendahara BOS

No	Nama Sekolah	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	SMP Negeri 1 Sabu Barat	0,00	9.295.207,00	(9.295.207,00)	(100,00)
2	SMP Negeri 2 Sabu Barat	79.941,00	352.614,00	(272.673,00)	(77,33)
3	SMP Negeri 3 Sabu Barat	7.629.000,00	14.700.992,00	(7.071.992,00)	(48,11)
4	SMP Negeri 4 Sabu Barat	49.009,00	3.082.406,00	(3.033.397,00)	(98,41)
5	SMP Negeri 5 Menia	371,00	1.180.209,00	(1.179.838,00)	(99,97)
6	SMP Negeri 6 Sabu Barat	0,00	7.162.523,00	(7.162.523,00)	(100,00)
7	SMP Negeri 7 Sabu Barat	0,00	3.456.285,00	(3.456.285,00)	(100,00)
8	SMP Negeri 8 Sabu Barat	100.169,00	33.927.769,00	(33.827.600,00)	(99,70)
9	SMP Satu Atap Teriwu	0,00	4.191.088,00	(4.191.088,00)	(100,00)
10	SMP Negeri 1 Sabu Timur	7.615.900,00	4.822,00	7.611.078,00	157.840,69
11	SMP Satu Atap Kujiratu	0,00	2.399.754,00	(2.399.754,00)	(100,00)
12	SMP Negeri 2 Sabu Timur	0,00	5.301.413,00	(5.301.413,00)	(100,00)
13	SMP Negeri 1 Sabu Tengah	66.199,00	37.112.199,00	(37.046.000,00)	(99,82)
14	SMP Negeri 2 Sabu Tengah	4.500.159,00	4.146.159,00	354.000,00	8,54
15	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	0,00	197,00	(197,00)	(100,00)
16	SMP Negeri 1 Hawu Mehara	0,00	7.127.358,00	(7.127.358,00)	(100,00)
17	SMP Negeri 2 Hawu Mehara	36,00	36,00	0,00	0,00
18	SMP Negeri 3 Hawu Mehara	84.399,64	27.031.353,64	(26.946.954,00)	(99,69)
19	SMP Satu Atap Lederaga	0,00	3.271.056,00	(3.271.056,00)	(100,00)
20	SMP Negeri 1 Sabu Liae	565.554,00	13.700.534,00	(13.134.980,00)	(95,87)
21	SMP Negeri 2 Liae	5.140,00	7.418.840,00	(7.413.700,00)	(99,93)
22	SMP Satu Atap Eirobo	0,00	625.500,00	(625.500,00)	(100,00)
23	SMP Negeri 1 Rajjua	2.759.373,00	23.452.193,00	(20.692.820,00)	(88,23)
24	SMP Negeri 2 Rajjua	1.154.096,00	194.096,00	960.000,00	494,60
25	SD Negeri 2 Seba	0,00	183.174,00	(183.174,00)	(100,00)
26	SD Negeri 3 Seba	371.097,00	7.290.097,00	(6.919.000,00)	(94,91)
27	SD Negeri Mapipa	0,00	1.101.293,00	(1.101.293,00)	(100,00)
28	SD Negeri Leomadamu	0,00	495.890,00	(495.890,00)	(100,00)
29	SD Negeri Leoge	0,00	279.560,00	(279.560,00)	(100,00)
30	SD Inpres Delo	33,00	1.033,00	(1.000,00)	(96,81)
31	SD Negeri Maballa	0,00	268.589,00	(268.589,00)	(100,00)
32	SD Negeri Luipau	0,00	4.710.729,00	(4.710.729,00)	(100,00)
33	SD Negeri Titinalede	30.369,00	5.729.000,00	(5.698.631,00)	(99,47)
34	SD Negeri Teriwu	0,00	287.700,00	(287.700,00)	(100,00)
35	SD Inpres Ledeanana	0,00	4.610,00	(4.610,00)	(100,00)
36	SD Negeri Raenalulu	0,00	2.295.200,00	(2.295.200,00)	(100,00)
37	SD Negeri 5 Sabu Barat	0,00	804.380,00	(804.380,00)	(100,00)
38	SD Negeri Ledekapaka	190.676,00	2.474.100,00	(2.283.424,00)	(92,29)
39	SD Negeri Kejoboloko	0,00	847.000,00	(847.000,00)	(100,00)
40	SD Inpres Kudjiratu	305.316,00	305.316,00	0,00	0,00
41	SD Negeri Huwaga	0,00	254,00	(254,00)	(100,00)
42	SD Negeri Keliha	0,00	332.000,00	(332.000,00)	(100,00)
43	SD Negeri Eilode	66.943,00	641.943,00	(575.000,00)	(89,57)
44	SD Negeri Padadue	2.202,00	2.202,00	0,00	0,00
45	SD Negeri Jiwuwu	54.950,00	253.776,00	(198.826,00)	(78,35)
46	SD Negeri Matei	135.084,00	135.084,00	0,00	0,00
47	SD Inpres Eimau	2.532.000,00	2.656.039,00	(124.039,00)	(4,67)
48	SD Negeri Tada	0,00	72.872,00	(72.872,00)	(100,00)
49	SD Inpres Daieko	0,00	61.823,00	(61.823,00)	(100,00)
50	SD Negeri Lohohede	242,00	3.808.242,00	(3.808.000,00)	(99,99)
51	SD Negeri Lederaga	1.379.912,00	1.659.912,00	(280.000,00)	(16,87)
52	SD Inpres Tanajawa	6.650,00	13.410.006,00	(13.403.356,00)	(99,95)

No	Nama Sekolah	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
53	SD Inpres Molie	0,00	1.438.245,00	(1.438.245,00)	(100,00)
54	SD Inpres Pedaro	0,00	200.210,00	(200.210,00)	(100,00)
55	SD Negeri Lobolauw	0,00	10.336.410,00	(10.336.410,00)	(100,00)
56	SD Negeri Gelenalalu	55,00	55,00	0,00	0,00
57	SD Negeri Gurimonearu	0,00	3.084,00	(3.084,00)	(100,00)
58	SD Negeri Ledee	0,00	5.227.140,00	(5.227.140,00)	(100,00)
59	SD Inpres Daiae	226.006,00	226.006,00	0,00	0,00
60	SD Negeri Deme	0,00	288.368,00	(288.368,00)	(100,00)
61	SD Inpres Eirobo	0,00	100,00	(100,00)	(100,00)
62	SD Inpres Ledemera	0,00	2.377.513,00	(2.377.513,00)	(100,00)
63	SD Negeri Dainao	876,00	310.876,00	(310.000,00)	(99,72)
64	SD Negeri 1 Ledeke	33.389,00	61.768.989,00	(61.735.600,00)	(99,95)
65	SD Negeri Lokoju	0,00	8.741,00	(8.741,00)	(100,00)
66	SD Negeri Boko	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00
67	SD Negeri 2 Ledeke	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Jumlah	30.955.899,64	341.442.917,64	(310.487.018,00)	(90,93)

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp935.942.532,30	Rp825.186.177,00

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp825.186.177,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp110.756.355,30 atau 13,42% menjadi Rp935.942.532,30. Saldo kas di bendahara FKTP tahun 2022 merupakan sisa kas yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Kas di bendahara FKTP tahun 2021 terdiri atas sisa dana kapitasi yang masih berada di bendahara FKTP sebesar Rp824.688.671,00 dan hutang pajak sebesar Rp497.506,00 yang telah disetorkan ke kas negara.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening masing-masing FKTP/puskesmas. Rincian saldo kas di bendahara FKTP dapat dilihat pada **Tabel 5.41**.

Tabel 5.41 Rincian Kas di Bendahara FKTP

No	Nama Puskesmas	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Puskesmas Seba	526.420.939,49	432.128.183,00	94.292.756,49	21,82
2	Puskesmas Bolou	30.416.314,00	16.112.990,00	14.303.324,00	88,77
3	Puskesmas Eilogo	51.953.093,01	52.448.596,00	(495.502,99)	(0,94)
4	Puskesmas Daieko	255.335.698,27	205.424.916,00	49.910.782,27	24,30
5	Puskesmas Ledeeunu	63.816.532,00	107.470.232,00	(43.653.700,00)	(40,62)
6	Puskesmas Eimadake	7.999.955,53	11.601.260,00	(3.601.304,47)	(31,04)
	Jumlah	935.942.532,30	825.186.177,00	110.756.355,30	13,42

5.3.1.1.6 Kas Lainnya	31 Desember 2022 Rp69.926.022,30	31 Desember 2021 Rp0,00
------------------------------	---	--

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp69.926.022,30 menjadi Rp69.926.022,30. Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran tahun 2022 terdiri atas:

1. Sisa jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran puskesmas sebesar Rp56.841,30 dan telah disetorkembali ke Kas Daerah bersamaan dengan penutupan rekening tersebut, karena tidak digunakan lagi.
2. Utang pajak sebesar Rp69.869.181,00 sampai dengan 27 Februari 2023 telah di setorkan seluruhnya ke kas negara dan kas daerah.

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.42 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	Nilai (Rp)
A	Utang pajak yang masih di tangan bendahara	69.869.181,00
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	10.881.250,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.886.021,00
3	Puskesmas Seba	37.024.942,00
4	Puskesmas Eimadake	1.200,00
5	Puskesmas Daieko	116.014,00
6	SMP Satu Atap Teriwu	238.459,00
7	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	667.074,00
8	SMP Negeri 2 Rajjua	7.760.970,00
9	SD Negeri Luipau	7.273,00
10	SD Negeri Raemude	1.319.719,00
11	SD NegeriLedeke 1	5.358.416,00
12	SD Negeri Bolua	3.607.843,00
B	Sisa saldo dalam rekening bendahara (jasa giro)	56.841,30
13	Puskesmas Ledeunu	2.139,29
14	Puskesmas Daieko	2.884,63
15	Puskesmas Eilogo	10.116,59
16	Puskesmas Seba	9.885,56
17	Puskesmas Eimadake	25.046,36
18	Puskesmas Bolou	6.768,87
	Jumlah (A+B)	69.926.022,30

5.3.1.1.7 Setara Kas	31 Desember 2022 Rp30.000.000.000,00	31 Desember 2021 Rp0,00
-----------------------------	---	--

Pada tahun 2022 terjadi reklas saldo deposito yang pada tahun 2021 tercatat dalam Kas di Kas Daerah, sehingga terdapat saldo Setara Kas sebesar Rp30.000.000.000,00. Setara Kas merupakan saldo pada Rekening Deposito berjangka yang terdiri dari Deposito Bank BRI 467.301.000.051.404 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Deposito BRI 4673-01-000308-40-3 sebesar Rp10.000.000.000,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah	Rp1.667.579.908,00	Rp1.511.412.625,00

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.511.412.625,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp156.167.283,00 atau 10,33% menjadi Rp1.667.579.908,00, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo awal	Rp1.511.412.625,00
SKP/Penambahan	Rp4.743.737.449,00
Pelunasan	<u>(Rp4.587.570.166,00)</u>
Saldo akhir	Rp 1.667.579.908,00

Piutang pajak daerah berdasarkan jenis dan SKPD pengelola dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.43 Piutang Pajak Daerah

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.551.919.761,00	1.385.490.141,00	166.429.620,00	12,01
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.551.919.761,00	1.385.490.141,00	166.429.620,00	12,01
Badan Keuangan Daerah	115.660.147,00	125.922.484,00	(10.262.337,00)	(8,15)
Pajak Hotel	255.000,00	485.000,00	(230.000,00)	(47,42)
Pajak Rumah Makan	2.700.000,00	2.794.000,00	(94.000,00)	(3,36)
Pajak Reklame	0,00	11.668.000,00	(11.668.000,00)	(100,00)
Pajak Bumi dan Bangunan	112.705.147,00	110.975.484,00	1.729.663,00	1,56
Jumlah	1.667.579.908,00	1.511.412.625,00	156.167.283,00	10,33

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah	Rp2.916.890.598,00	Rp1.470.381.448,00

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.470.381.448,00, per 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp1.446.509.150,00 atau 98,38% menjadi Rp2.916.890.598,00.

Piutang retribusi daerah terdapat piutang retribusi daerah yang sebagian besar sudah macet dan tidak ada peluang tertagih. Piutang retribusi los pasar dan pelayanan pasar yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan, mengalami kendala ketika banyak pedagang yang meninggalkan Pulau Sabu saat terjadi insiden yang mengarah ke SARA pada tanggal 13 Desember 2016. Piutang Retribusi Pemakaian Jukung dan lampara yang tidak dapat diangsur oleh nelayan karena saai itu hasil yang diperoleh nelayan tidak menguntungkan, disertai kendala dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat.

Piutang garam pada neraca tahun 2021 dicatat dalam piutang lain-lain PAD yang sah, dengan adanya perubahan pada kodifikasi dan nomenklatur perencanaan, piutang garam di reklas ke piutang retribusi penjualan hasil usaha daerah sesuai dengan rekening yang mencatat penerimaan hasil penjualan garam saat ini. Reklas piutang garam tersebut senilai Rp1.344.198.900,00.

Tabel 5.44 Piutang Retribusi

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Rumah Sakit Umum Daerah	96.912.000,00	0,00	96.912.000,00	100,00
Pelayanan kesehatan	96.912.000,00	0,00	96.912.000,00	100,00
Dinas PMPTSP, Perindustrian dan Perdagangan	1.421.594.150,00	71.997.000,00	1.349.597.150,00	1.874,52
Retribusi Los Pasar (Macet)	47.517.000,00	47.517.000,00	0,00	0,00
Retribusi Los Pasar	29.878.250,00	24.480.000,00	5.398.250,00	22,05
Retribusi penjualan hasil usaha daerah	1.344.198.900,00	0,00	1.344.198.900,00	100,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.398.384.448,00	1.398.384.448,00	0,00	0,00
Pemakaian Jukung	217.200.000,00	217.200.000,00	0,00	0,00
Pemakaian Lampara 2011	1.181.184.448,00	1.181.184.448,00	0,00	0,00
TOTAL	2.916.890.598,00	1.470.381.448,00	1.446.509.150,00	98,38

5.3.1.1.9 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp4.462.956.449,30 **Rp5.044.287.952,30**

Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.044.287.952,30, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp581.331.503,00 atau 11,52% menjadi Rp4.462.956.449,30. Piutang lain-lain PAD yang sah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.45.

Tabel 5.45 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.092.047.677,30	1.170.147.677,30	(78.100.000,00)	(6,67)
Piutang Hasil Sewa BMD	20.950.000,00	99.050.000,00	(78.100.000,00)	(78,85)
Piutang denda pajak Galian C	1.071.097.677,30	1.071.097.677,30	0,00	0,00
Dinas PMPTSP, Perindustrian dan Perdagangan	2.116.000.000,00	3.539.198.900,00	(1.423.198.900,00)	(40,21)
Piutang Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.116.000.000,00	3.539.198.900,00	(1.423.198.900,00)	(40,21)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.254.908.772,00	334.941.375,00	919.967.397,00	274,67
Remunerasi TDF	239.486,00	0,00	239.486,00	0,00
Piutang hasil pengelolaan dana bergulir	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
Piutang TP TGR	1.242.469.286,00	322.741.375,00	919.727.911,00	284,97
Jumlah	4.462.956.449,30	5.044.287.952,30	(581.331.503,00)	(11,52)

- Piutang hasil sewa BMD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.950.000,00 bersumber dari piutang hasil sewa *tronton*, *excavator* dan *theodolite*.
- Piutang denda pajak Galian C pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.071.097.677,30 merupakan piutang denda atas piutang pajak galian C;

- c. Piutang lain-lain PAD yang sah lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp2.116.000.000,00 piutang akibat adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan PT Tunas Jaya Lancar tentang Pengelolaan Pabrik Pengolahan Rumput Laut sebesar Rp2.116.000.000,00;
- d. Remunerasi TDF sebesar Rp1.197,43 merupakan bunga penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekeninglain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia;
- e. Piutang hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp12.200.000,00 adalah bunga pinjaman lunak yang belum dibayar;
- f. Piutang TP TGR sebesar Rp1.242.469.286,00, terdiri atas piutang TPTGR. Terdapat koreksi sebesar Rp138.881.725,00 yang terdiri atas koreksi piutang TP tahun 2021 yang belum dicatat sebesar Rp149.002.500,00 dan koreksi kurang catat pelunasan piutang TPTGR dua orang sebesar Rp10.120.775,00. Penambahan piutang TGR tahun 2022 sebesar Rp826.563.121,00 yang terdiri atas:
 - 1) Piutang TGR pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp180.040.808,00, telah disetor sebesar Rp35.358.000,00 per 22 Mei 2023.
 - 2) Piutang TGR atas temuan perjalanan dinas pada satu SKPD atas 29 orang sebesar Rp442.227.313,00, telah disetor sebesar Rp71.908.853,00,00 per 22 Mei 2023.
 - 3) Piutang TGR atas temuan honorarium sebesar Rp204.295.000,00 pada enam SKPD atas 22 orang, telah disetor seluruh Rp204.295.000,00 per 29 Mei 2023.

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2022 Rp4.544.103.181,00	31 Desember 2021 Rp3.963.998.955,00
--	--	--

Piutang transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 sesuai hasil audit sebesar Rp3.963.998.955,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp580.104.226,00 atau 14,63% menjadi Rp4.544.103.181,00. Data ini disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022. Rincian piutang transfer pemerintah daerah lainnya dapat dilihat pada **Tabel 5.46**.

Rp15.760.963.224,98. Nilai persediaan merupakan jumlah persediaan yang masih terdapat di SKPD per 31 Desember 2022. Persediaan tersebut berupa bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit tanaman, bahan lainnya, suku cadang, alat tulis kantor, bahan cetak, benda pos, alat listrik, souvenir/cendera mata, peralatan dan bahan pembersih, obat, persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan pakan sesuai hasil *stock opname* per 31 Desember 2022.

Rincian persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.48 Rincian Persediaan per Jenis

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Bahan Bangunan dan Konstruksi	412.860.050,00	436.067.800,00	(23.207.750,00)	(5,32)
Bahan Kimia	386.255.475,00	289.361.163,00	96.894.312,00	33,49
Bahan Bakar dan Pelumas	116.565.000,00	178.994.500,00	(62.429.500,00)	(34,88)
Bahan/Bibit Tanaman	97.914.240,00	74.064.100,00	23.850.140,00	32,20
Bahan Lainnya	4.323.941.503,81	3.554.214.586,00	769.726.917,81	21,66
Suku Cadang Lainnya	238.931.736,00	283.830.188,00	(44.898.452,00)	(15,82)
Alat Tulis Kantor	95.112.805,00	86.131.000,00	8.981.805,00	10,43
Bahan Cetak	700.313.500,00	414.332.000,00	285.981.500,00	69,02
Benda Pos	1.195.000,00	330.000,00	865.000,00	262,12
Alat Listrik	10.801.000,00	10.094.000,00	707.000,00	7,00
Souvenir/ Cendera Mata	25.323.000,00	27.525.000,00	(2.202.000,00)	(8,00)
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27.189.250,00	45.993.000,00	(18.803.750,00)	(40,88)
Obat	3.594.163.390,17	3.881.517.624,00	(287.354.233,83)	(7,40)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.676.281.240,00	4.557.687.736,00	1.118.593.504,00	24,54
Pakan	54.116.035,00	24.650.000,00	29.466.035,00	119,54
Jumlah	15.760.963.224,98	13.864.792.697,00	1.896.170.527,98	13,68

Nilai persediaan masih termasuk persediaan *expired* yang belum dimusnahkan dan persediaan yang sudah dibayar namun belum diambil yang terdapat pada:

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp389.735.193,00 terdiri atas obat *expired* sebesar Rp342.908.208 dan barang medis habis pakai *expired* sebesar Rp46.826.985,00.
2. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp433.923.302,17 terdiri atas obat *expired* sebesar Rp389.742.114,17 dan barang medis habis pakai *expired* sebesar Rp44.181.188,00.
3. Persediaan garam yang telah dibayar namun belum diangkut sebanyak 2.104.108 kg.

Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran N.5**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022 Rp42.747.324.493,82	31 Desember 2021 Rp35.756.022.462,51
--	---	---

Investasi Jangka Panjang merupakan pos yang berasal dari kegiatan pembiayaan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat bagi masyarakat dandiharapkan dapat dikembalikan kepada pemerintah.

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2021 sesuai hasil audit sebesar Rp35.756.022.462,51, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp6.991.302.031,31 atau 19,55% menjadi Rp42.747.324.493,82. Invenstasi Jangka Panjang diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.2 Investasi Non Permanen	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp0,00
---------------------------------------	--	--

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, tidak terdapat kenaikan/penurunan atau saldo pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Saldo Investasi Non Permanen terdiri dari Investasi Non Permanen Lainnya berupa dan penyisihan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2022 Rp13.423.178.753,00	31 Desember 2021 Rp13.423.178.753,00
---	---	---

Investasi Non Permanen tahun 2021 sesuai hasil audit sebesar Rp13.423.178.753,00, tidak ada nilai bersih investasi non permanen karena investasi non permanen telah disisihkan seluruhnya. Investasi non pemanen secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.49 Investasi Non Permanen Lainnya

Uraian	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Koperasi 2000-2008	328.750.000,00	328.750.000,00	0,00	0,00
Dana Pemberdayaan 2007	4.489.339.000,00	4.489.339.000,00	0,00	0,00
Dana Pemberdayaan 2008	4.815.140.500,00	4.815.140.500,00	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2010	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
KSU SALIKO 2010	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2011	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
PINJAMAN LUNAK	66.791.277,00	66.791.277,00	0,00	0,00
FORUM KEPALA DESA/LURAH	747.058.000,00	747.058.000,00	0,00	0,00
KSU MANNO WADA	213.999.976,00	213.999.976,00	0,00	0,00
KSU KOLO HARRU 2013	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
PENGELOLA PABRIK RL	2.339.600.000,00	2.339.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	13.423.178.753,00	13.423.178.753,00	0,00	0,00

Rincian investasi non permanen lainnya dapat dilihat di **Lampiran N.6**

5.3.1.2.2 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2022 (Rp13.423.178.753,00)	31 Desember 2021 (Rp13.423.178.753,00)
--	---	---

Penyisihan investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp13.423.178.753,00). Tidak terdapat mutasi pada tahun 2022. Penyisihan investasi non pemanen lainnya secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.50**.

Tabel 5.50 Penyisihan Investasi Non Permanen

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Dana Koperasi 2000-2008	(328.750.000,00)	(328.750.000,00)	
Dana Pemberdayaan 2007	(4.489.339.000,00)	(4.489.339.000,00)	0,00	0,00
Dana Pemberdayaan 2008	(4.815.140.500,00)	(4.815.140.500,00)	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2010	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)	0,00	0,00
KSU SALIKO 2010	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)	0,00	0,00
KSU HE WUE ADE 2011	(23.000.000,00)	(23.000.000,00)	0,00	0,00
PINJAMAN LUNAK	(66.791.277,00)	(66.791.277,00)	0,00	0,00
FORUM KEPALA DESA/LURAH	(747.058.000,00)	(747.058.000,00)	0,00	0,00
KSU MANNO WADA	(213.999.976,00)	(213.999.976,00)	0,00	0,00
KSU KOLO HARRU 2013	(385.000.000,00)	(385.000.000,00)	0,00	0,00
PENGLOLA PABRIK RL	(2.339.600.000,00)	(2.339.600.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(13.423.178.753,00)	(13.423.178.753,00)	0,00	0,00

Rincian penyisihan investasi non permanen lainnya dapat dilihat di **Lampiran N.4.2**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp42.747.324.493,82	Rp35.756.022.462,51

Investasi permanen per 31 Desember 2021 sesuai hasil audit sebesar Rp35.756.022.462,51, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp6.991.302.031,31 atau 19,55% menjadi Rp42.747.324.493,82.

Investasi permanen Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas:

- Investasi pada PT Bank Nusa Tenggara Timur dengan nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp35.492.830.000,00, bertambah sebesar Rp7.000.000.000,00 tahun 2022 menjadi Rp42.492.830.000,00. Penyertaan modal pada Bank NTT sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.
- Investasi pada Perusahaan Daerah Rai Hawu dengan nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp263.192.462,51, berkurang sebesar Rp8.697.968,69 yang merupakan rugi bersih tahun 2022, menjadi Rp254.494.493,82.

Rugi bersih Perusahaan Daerah Rai Hawu dicatat berdasarkan Laporan Keuangan yang belum di audit Kantor Akuntan Publik. Alasan tidak diaudit KAP karena tahun 2023 akan dilakukan Audit PD Raihawu per 31 Desember 2022 dalam Likuidasi, untuk selanjutnya proses dipailitkan.

5.5.1.3 Aset Tetap	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.163.490.680.145,27	Rp1.189.815.381.834,27

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2022 bersumber dari hasil penyerahan P3D oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk, pembelian dari APBD, dan ada juga yang berasal dari hibah.

Penambahan dan pengurangan dari nilai aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 secara komparatif disajikan pada **Tabel 5.51**.

Tabel 5.51 Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Tanah	14.200.893.688,00	13.975.971.288,00	224.922.400,00	1,61
Peralatan dan Mesin	333.348.019.790,42	329.212.117.356,42	4.135.902.434,00	1,26
Gedung dan Bangunan	545.280.742.591,47	510.924.197.077,67	34.356.545.513,80	6,72
Jalan, Irigasi, Jaringan	761.575.931.846,51	680.892.614.545,57	80.683.317.300,94	11,85
Aset Tetap Lainnya	27.553.041.364,68	26.616.177.271,68	936.864.093,00	3,52
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.106.670.077,85	77.783.920.048,85	20.322.750.029,00	26,13
Akumulasi Penyusutan	(616.574.619.213,66)	(449.589.615.753,92)	(166.985.003.459,74)	37,14
Jumlah	1.163.490.680.145,27	1.189.815.381.834,27	(26.324.701.689,00)	(2,21)

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dilihat di **Lampiran N.7**.

Komponen-komponen aset tetap secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp14.200.893.688,00	Rp13.975.971.288,00

Tanah per 31 Desember 2021 Rp13.975.971.288,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp224.922.400,00 atau 1,61% menjadi Rp14.200.893.688,00. Tanah per 31 Desember 2022 merupakan nilai aset tetap tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang diperoleh dari hasil penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk sesuai data dokumen P3D, pembelian dan hibah masyarakat pemilik tanah.

Aset tetap tanah yang berasal dari penyerahan P3D Kabupaten Induk (Kupang) telah dicatat pada masing-masing SKPD pengguna. Mutasi nilai tanah P3D sebesar Rp615.707.805,00 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penyerahan P3D sebesar Rp1.530.880.727,00.
2. Verifikasi administrasi sebesar (Rp248.564.502,00).
3. Verifikasi faktual (tidak ditemukan) sebesar (Rp314.467.510,00).
4. Hibah ke sekolah swastasebesar (Rp161.115.401,00).
5. Hibah ke provinsi (SMA/SMK) sebesar (Rp40.500.001,00).
6. Perhitungan kembali 2018 nilai berdasarkan NJOP sebesar Rp2.427.723.997,00.
7. Koreksi Nilai Tanah TA. 2018 sebesar (Rp2.129.832.105,00).
8. Koreksi nilai tanah yang telah dihibahkan ke sekolah swasta namun masih dihitung saat penilaian kembali sebesar (Rp236.050.400,00).
9. Reklas tanah Desa dan Sekolah swasta yang akan dihibahkan dicatat dalam Aset lain-lain sebesar (Rp212.367.000,00)

Mutasi tambah aset tetap tanah secara rinci dapat dihitung sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2022)	13.975.971.288,00
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	8.411.920,00
- Hibah	235.623.500,00
- Mutasi antar SKPD	615.707.805,00
Jumlah Mutasi Tambah	859.743.225,00

Mutasi Kurang:		
- BM Tidak Dikapitalisasi	(8.411.920,00)	
- Hibah/Lelang	(10.701.100,00)	
- Mutasi antar SKPD	(615.707.805,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(634.820.825,00)
Saldo Akhir (31 Des 2022)		14.200.893.688,00

1. Belanja Modal sebesar Rp8.411.920,00 merupakan pengeluaran untuk belanja pilar batas tanah senilai Rp6.000.000,00 dan biaya penggantian sertifikat tanah masyarakat sebesar Rp2.411.920,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Belanja modal tersebut tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai tanah.
2. Hibah masuk sebesar Rp235.623.500,00, merupakan hibah 17 bidang tanah tahun 2022 dan 4 bidang tanah tahun 2021 dari masyarakat.
3. Hibah keluar sebesar Rp10.701.100,00 terdiri atas:
 - a. Hibah tanah kepada Kantor Kementerian Agama sesuai SK Bupati Nomor 236/KEP/HK/2022, tanggal 29 Juni 2022 senilai Rp7.587.500,00.
 - b. Hibah tanah kepada Palang Merah Indonesia sesuai SK Bupati Nomor 317/KEP/HK/2022, tanggal 9 September 2022 senilai Rp3.113.600,00
4. Mutasi antar SKPD senilai Rp615.707.805,00 adalah nilai tanah P3D yang keluar dari neraca Badan Keuangan Daerah dan menambah neraca Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Liae.

Rincian aset tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52 Aset Tetap Tanah per SKPD

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	413.049.500,00	0,00	413.049.500,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	37.040.050,00	0,00	37.040.050,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.536.387.283,00	13.311.464.883,00	224.922.400,00	1,69
Dinas Pertanian dan Pangan	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	23.848.600,00	23.848.600,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	615.707.805,00	(615.707.805,00)	(100,00)
Kecamatan Sabu Barat	120.794.255,00	0,00	120.794.255,00	0,00

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kecamatan Sabu Timur	24.114.000,00	0,00	24.114.000,00	0,00
Kecamatan Hawu Mehara	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Kecamatan Raijua	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00
Kecamatan Sabu Tengah	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
Jumlah	14.200.893.688,00	13.975.971.288,00	224.922.400,00	1,61

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan aset tetap diketahui masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan aset tetap tanah yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yaitu bukti kepemilikan tanah atas SDN Padadue hanya berupa Berita Acara Hibah Tanah Suku, adapun SMPN 2 Sabu Barat yang bersertifikat tanah atas nama Departemen Pendidikan Wilayah Provinsi NTT. Selain itu sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Sabu Raijua yang berlokasi di Kelurahan Lasiana Kota Kupang yang tidak dapat dimanfaatkan karena terjadi sengketa lahan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan akan segera diproses agar penatausahaan aset dapat berjalan dengan baik.

Properti Investasi menurut PSAP Nomor 17 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki properti dalam bentuk tanah seluas 5.130m² yang beralamat di Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, properti tersebut disewakan dalam periode sewa (10 tahun) menurut surat perjanjian kerja sama Nomor 151 TAHUN 2016 dan Nomor 10/UD.PJ/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditujukan/digunakan untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Data penambahan dan pengurangan aset tetap tanah secara rinci digambarkan dalam Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah pada **Lampiran N-7.1**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2022</u> Rp333.348.019.790,42	<u>31 Desember 2021</u> Rp329.212.117.356,42
--------------------------------------	---	---

Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp329.212.117.356,42, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp4.135.902.434,00 atau 1,26% menjadi Rp333.348.019.790,42. Peralatan Mesin per 31 Desember 2022 merupakan akumulasi nilai peralatan dan mesin termasuk kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Terdapat aset tetap peralatan mesin yang berasal dari P3D sebesar Rp2.825.009.666,00 yang telah dicatat dalam neraca masing-masing SKPD pengguna.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2022)	329.212.117.356,42
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	9.247.832.312,00
- Kapitalisasi	285.900.000,00

- Hibah	620.162.270,00	
- Reklasifikasi	3.273.191.757,00	
- Mutasi antar SKPD	41.084.258.136,00	
Total Mutasi Tambah		54.511.344.475,00
Mutasi Kurang:		
-BM yang tidak dikapitalisasi	(1.689.742.609,00)	
- Penjualan/Hibah	(2.387.100.280,00)	
- Reklasifikasi	(2.825.611.250,00)	
- Mutasi antar SKPD	(41.084.258.136,00)	
- Koreksi Ekstrakomptabel	(2.388.729.766,00)	
Total Mutasi Kurang		(50.375.442.041,00)
Saldo Akhir (31 Des 2022)		333.348.019.790,42

1. Belanja Modal sebesar Rp9.247.832.312,00 merupakan akumulasi nilai belanja modal dari seluruh SKPD Rp8.764.116.824,00 dan belanja modal pada puskesmas yang bersumber dari dana JKN Rp483.715.488,00.
2. Kapitalisasi sebesar Rp285.900.000,00 terdiri atas:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan, kapitalisasi dari belanja pemeliharaan berupa mesin pompa air sebesar Rp285.000.000,00.
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kapitalisasi dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor berupa gordena dan vitras sebesar Rp900.000,00
3. Hibah masuk sebesar Rp620.162.270,00 yang terdiri atas :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Rp9.797.000,00, sesuai BAST Nomor 7860/4.2/PLK.03.07/X/2022 tanggal 21/10/2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa rak buku perpustakaan.
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp71.015.270,00, sesuai BAST Nomor 7208/4.2/PLK.03.07/X/2022 tanggal 15/10/2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa hibah printer, server dan laptop.
 - c. Kecamatan Hawu Mehara sebesar Rp539.350.000,00, sesuai BAST Nomor 032/348/BAKEUDA-SR/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 berupa mobil tanki air CSR dari Bank BRI.
4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp3.273.191.757,00, reklasifikasi peralatan mesin disebabkan karena adanya kesalahan penganggaran pada SKPD juga progres dari penelusuran kembali aset yang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.173.366.027,00 dari aset tetap lainnya, tahun 2022 belanja modal peralatan mesin yang bersumber dari dana BOS dianggarkan dalam rekening aset tetap lainnya dana BOS.
 - b. Dari aset lainnya yang merupakan progres penelusuran kembali barang yang tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp1.050.659.575,00. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melakukan jurnal keluar atas barang-barang yang tidak ditemukan hasil inventarisasi, SKPD terus berproses dalam penelusuran barang-barang yang tidak ditemukan tersebut.

Nilai progres barang tidak ditemukan merupakan akumulasi dari barang yang telah ditemukan, koreksi kesalahan rekap nilai, barang yang telah dihapuskan, barang ekstrakom dan barang hilang.

- c. Dari aset lainnya rusak berat berupa koreksi atas kelebihan reklas barang dalam kondisi rusak berat akibat seroja. Barang yang direklas termaksud barang yang sudah dalam kondisi rusak sebesar Rp49.166.155,00.
5. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.689.742.609,00 merupakan belanja modal yang tidak menjadi aset yang terdapat pada:
- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp13.045.450,00 yang merupakan bahan pembersih dan belanja modal yang dibayarkan lebih;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Rp1.482.469.959,00 yang merupakan pelunasan hutang belanja tahun 2021;
 - c. Dinas Kesehatan Rp191.310.600,00 yang terdiri atas pelunasan hutang belanja modal peralatan mesin tahun 2021 sebesar Rp95.450.000,000 dan pelunasan hutang belanja barang dan jasa yang dibayar melalui belanja modal peralatan mesin sebesar Rp95.860.600,00;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp2.850.000,00;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp66.600,00 berupa *conector*.
6. Pejualan kendaraan mengurangi peralatan mesin sebesar Rp2.380.830.280,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Organisasi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	228.250.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	95.127.840,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	39.204.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.800.000,00
5	Dinas Perhubungan	885.220.640,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	25.454.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	161.744.000,00
8	Dinas Pariwisata	70.595.800,00
9	Bagian Hukum	42.700.000,00
10	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	53.789.000,00
11	Bagian Administrasi Pembangunan	45.320.000,00
12	Bagian Umum	535.835.000,00
13	Bagian Organisasi	25.450.000,00
14	Inspektorat Daerah	19.470.000,00
15	Badan Keuangan Daerah	102.560.000,00
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	24.310.000,00
Jumlah		2.380.830.280,00

7. Hibah keluar sesuai SK Nomor 256/KEP/HK/2022 tanggal 12 Juli 2022 ke Yayasan Pendidikan Krinsten Adda Hari sebesar Rp6.270.000,00 berupa personal komputer.

8. Reklasifikasi keluar ke aset lainnya sebesar Rp2.825.611.250,00 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga reklas ke aset lainnya sebesar Rp264.772.633,00, berupa barang yang tidak ditemukan saat inventarisasi.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Rp80.833.700,00, reklas keluar berupa barang medis habis pakai yang dicatat dalam aset tetap peralatan mesin.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.788.774.110,00, terdiri atas barang dalam kondisi rusak berat sebesar Rp1.137.288.352,00 dan barang yang tidak ditemukan saat inventarisasi sebesar Rp651.485.758,00.
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp39.930.000,00, berupa satu unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat.
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp28.484.650,00, berupa satu unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat.
 - f. Bagian Umum sebesar Rp329.720.000,00, berupa dua unit kendaraan roda empat dalam kondisi rusak berat.
 - g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp3.588.000,00.
 - h. Kecamatan Sabu Timur sebesar Rp289.508.157,00 berupa barang P3D yang dimutasi dari Badan Keuangan Daerah yang dalam kondisi rusak berat.
9. Koreksi ekstrakomptabel adalah koreksi yang dilakukan untuk mengeluarkan barang-barang ekstrakomptabel yang masih dicatat dalam neraca, rincian koreksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.53 Koreksi Ekstrakomptabel SKPD

No	Unit Organisasi	2022	s.d 2021	Total
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	0,00	309.720.329,00	309.720.329,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.700.000,00	97.989.150,00	99.689.150,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	0,00	1.326.049.846,00	1.326.049.846,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	0,00	9.594.750,00	9.594.750,00
5	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	0,00	8.412.250,00	8.412.250,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	800.000,00	975.000,00	1.775.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	480.000,00	14.499.850,00	14.979.850,00
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Tenaga Kerja	0,00	3.599.400,00	3.599.400,00
10	Dinas Pertanian & Pangan	0,00	56.468.100,00	56.468.100,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	750.000,00	4.550.000,00	5.300.000,00
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	0,00	6.169.900,00	6.169.900,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	490.000,00	11.528.800,00	12.018.800,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	6.524.468,00	6.524.468,00
16	Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	0,00	53.025.000,00	53.025.000,00
17	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	0,00	8.399.005,00	8.399.005,00
18	Dinas Kelautan & Perikanan	15.750.000,00	34.749.160,00	50.499.160,00
19	Dinas Pariwisata	0,00	60.000,00	60.000,00

No	Unit Organisasi	2022	s.d 2021	Total
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
20	Bagian Pemerintahan	0,00	950.000,00	950.000,00
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	8.449.700,00	8.449.700,00
22	Bagian Hukum	0,00	2.939.000,00	2.939.000,00
23	Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
25	Bagian Umum	0,00	158.550.000,00	158.550.000,00
26	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
27	Bagian Organisasi	0,00	850.000,00	850.000,00
28	Inspektorat Daerah	0,00	4.799.880,00	4.799.880,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
30	Badan Keuangan Daerah	0,00	26.030.000,00	26.030.000,00
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan & Pelatihan	0,00	8.910.080,00	8.910.080,00
32	Sekretariat DPRD	0,00	26.640.200,00	26.640.200,00
33	Kecamatan Sabu Barat	0,00	20.785.600,00	20.785.600,00
34	Kecamatan Sabu Timur	0,00	76.101.550,00	76.101.550,00
35	Kecamatan Sabu Liae	0,00	4.524.018,00	4.524.018,00
36	Kecamatan Hawu Mehara	0,00	16.925.400,00	16.925.400,00
37	Kecamatan Raijua	0,00	26.272.111,00	26.272.111,00
38	Kecamatan Sabu Tengah	0,00	2.909.219,00	2.909.219,00
39	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
	Jumlah	19.970.000,00	2.368.759.766,00	2.388.729.766,00

10. Mutasi antar SKPD tahun 2022 sebesar Rp41.084.258.136,00 terdiri atas:
- Mutasi untuk pemisahan aset dari Dinas Kesehatan ke Rumah sakit Umum sebesar Rp38.259.248.470,00.
 - Mutasi peralatan mesin P3D dari Badan Keuangan Daerah ke masing-masing SKPD pengguna sebesar Rp2.825.009.666,00.

Rincian aset tetap peralatan mesin tahun 2022 dan tahun 2021 pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

Uraian	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	55.992.916.295,48	51.897.882.559,00	4.095.033.736,48	7,89
Rumah Sakit Umum Daerah	61.736.846.957,00	21.331.048.557,00	40.405.798.400,00	189,42
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	45.120.196.194,80	82.575.887.907,80	(37.455.691.713,00)	(45,36)
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	12.388.772.842,00	13.929.837.062,00	(1.541.064.220,00)	(11,06)
Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	755.490.200,00	743.902.450,00	11.587.750,00	1,56
Satuan Polisi Pamong Praja	3.160.064.620,00	3.205.851.460,00	(45.786.840,00)	(1,43)

Uraian	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.269.584.507,00	7.269.241.007,00	343.500,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2.068.245.822,00	2.015.126.397,00	53.119.425,00	2,64
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Tenaga Kerja	656.802.944,00	626.833.364,00	29.969.580,00	4,78
Dinas Pertanian & Pangan	10.524.142.427,10	9.693.171.327,10	830.971.100,00	8,57
Dinas Lingkungan Hidup	1.597.053.723,00	1.640.807.723,00	(43.754.000,00)	(2,67)
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2.301.622.876,00	2.314.592.776,00	(12.969.900,00)	(0,56)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	3.489.114.970,00	3.374.710.770,00	114.404.200,00	3,39
Dinas Perhubungan	17.381.350.635,00	18.191.805.575,00	(810.454.940,00)	(4,46)
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.415.869.861,00	3.099.441.272,00	316.428.589,00	10,21
Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	51.284.167.211,00	50.966.381.381,00	317.785.830,00	0,62
Dinas Perpustakaan & Kearsipan	1.747.182.342,00	1.680.126.077,00	67.056.265,00	3,99
Dinas Kelautan & Perikanan	5.008.433.790,00	5.173.326.950,00	(164.893.160,00)	(3,19)
Dinas Pariwisata	1.382.127.100,00	979.422.900,00	402.704.200,00	41,12
Bagian Pemerintahan	497.537.500,00	471.637.500,00	25.900.000,00	5,49
Bagian Kesejahteraan Rakyat	545.442.150,00	539.018.650,00	6.423.500,00	1,19
Bagian Hukum	496.787.800,00	463.636.800,00	33.151.000,00	7,15
Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	534.088.450,00	584.777.450,00	(50.689.000,00)	(8,67)
Bagian Administrasi Pembangunan	1.149.106.485,00	1.167.032.485,00	(17.926.000,00)	(1,54)
Bagian Umum	18.842.885.449,00	19.585.982.449,00	(743.097.000,00)	(3,79)
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	620.251.627,00	605.009.750,00	15.241.877,00	2,52
Bagian Organisasi	579.245.095,00	604.044.795,00	(24.799.700,00)	(4,11)
Inspektorat Daerah	1.145.384.063,00	1.145.049.740,00	334.323,00	0,03
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.077.724.498,52	2.041.024.498,52	36.700.000,00	1,80
Badan Keuangan Daerah	4.702.784.200,00	7.546.696.491,00	(2.843.912.291,00)	(37,68)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan & Pelatihan	2.384.179.506,02	2.364.739.586,00	19.439.920,02	0,82
Sekretariat DPRD	5.923.601.554,00	5.938.241.754,00	(14.640.200,00)	(0,25)
Kecamatan Sabu Barat	687.757.364,00	521.881.346,00	165.876.018,00	31,78
Kecamatan Sabu Timur	780.531.918,00	843.597.317,00	(63.065.399,00)	(7,48)
Kecamatan Sabu Liae	732.950.226,00	574.733.100,00	158.217.126,00	27,53
Kecamatan Hawu Mehara	1.441.813.304,00	751.399.616,00	690.413.688,00	91,88
Kecamatan Rajjua	1.876.743.984,00	1.727.317.513,00	149.426.471,00	8,65
Kecamatan Sabu Tengah	626.687.798,50	581.399.500,00	45.288.298,50	7,79

Uraian	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	422.531.501,00	445.499.501,00	(22.968.000,00)	(5,16)
Jumlah	333.348.019.790,42	329.212.117.356,42	4.135.902.434,00	1,26

Data penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin digambarkan dalam Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 pada **Lampiran N-7.2**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2022</u> Rp545.280.742.591,47	<u>31 Desember 2021</u> Rp510.924.197.077,67
--------------------------------------	---	---

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp510.924.197.077,67, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp34.356.545.513,80 atau 6,72% menjadi Rp545.280.742.591,47. Gedung Bangunan merupakan akumulasi aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Nilai perolehan gedung/bangunan ini memenuhi klasifikasi aset tetap yang diperoleh dengan maksud tertentu untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan dalam kondisi siap pakai.

Terdapat aset gedung dan bangunan yang berasal dari P3D sebesar Rp18.777.104.009,00 yang telah dicatat dalam neraca masing-masing SKPD pengguna.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal	31.557.107.226,00	
- Hutang Belanja	1.348.136.703,60	
- Kapitalisasi	482.376.899,00	
- Hibah	10.267.743.000,00	
- Reklasifikasi	40.000.000,00	
- Mutasi antar SKPD	20.782.914.010,00	
- KDP yang selesai	8.673.751.156,00	
Jumlah mutasi tambah	<u>73.220.361.994,60</u>	

Mutasi Kurang:

- BM Tidak Dikapitalisasi	(2.709.315.648,00)	
- Reklasifikasi	(174.401.316,80)	
- Mutasi antar SKPD	(20.782.914.010,00)	
- Koreksi Ekstrakomptabel	(800.440.006,00)	
- KDP	(14.328.412.500,00)	
Jumlah mutasi kurang	<u>(38.863.816.480,80)</u>	
Saldo Akhir (31 Des 2022)		<u>545.280.742.591,47</u>

1. Belanja Modal Gedung Bangunan Rp31.557.107.226,00 merupakan belanja modal yang seluruhnya ada pada SKPD.

2. Hutang Belanja Rp1.348.136.703,60, merupakan pekerjaan fisik gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga yang telah selesai dikerjakan, namun belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun 2022.
3. Kapitalisasi Rp482.376.899,00 merupakan kapitalisasi dari jasa perencanaan dan pengawasan gedung bangunan yang ada pada:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp168.422.089,00.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Rp161.017.500,00.
 - c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp104.201.060,00.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Rp48.736.250,00
4. Hibah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.267.743.000,00 dari Kementerian Perdagangan RI yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Nataga sesuai BAST Nomor 457/M-DAG/BAST/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 senilai Rp7.424.368.000,00.
 - b. Pasar Desa Jiwuwu sesuai BAST Nomor 459/M-DAG/BAST/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 senilai Rp2.843.375.000,00.
5. Reklasifikasi masuk dari aset lainnya sebesar Rp40.000.000,00 berupa gedung kantor camat Sabu Barat yang salah direklas ke aset lainnya bersama aset Pemerintah Desa.
6. KDP selesai sebesar Rp8.673.751.156,00 terdapat pada:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp1.072.469.568,00.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Rp4.125.204.160,00.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Rp3.446.109.028,00.
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp29.968.400,00.
7. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Rp2.709.315.648,00 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp2.295.790.848,00 yang merupakan pelunasan hutang belanja tahun 2021 dan belanja gedung bangunan sekolah swasta sebesar Rp308.224.800,00.
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pelunasan hutang belanja tahun 2021 Rp15.300.000,00 yang merupakan rehab ringan toilet balai penyuluh.
 - c. Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp90.000.000,00 yang berupa pembuatan kawasan pangan lestari yang langsung diserahkan pada masyarakat.
8. Reklasifikasi keluar sebesar Rp174.401.316,80 terdiri atas
 - a. Selisih nilai kekurangan volume pekerjaan gedung bangunan yang direklas ke asetlainya sebesar Rp23.783.013,80 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - b. Belanja rehab rumah pompa sebesar Rp70.118.300,00 yang direklas ke aset jalan jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- c. Reklasifikasi bangunan P3D yang rusak berat ke aset lainnya sebesar Rp80.500.003,00 pada Kecamatan Sabu Timur.
9. Mutasi antar SKPD Rp20.782.914.010,00, mutasi aset gedung bangunan P3D dari Badan Keuangan Daerah ke masing-masing SKPD pengguna
10. Koreksi ekstrakomptabel adalah koreksi yang dilakukan untuk mengeluarkan aset gedung bangunan ekstrakomptabel yang masih dicatat dalam neraca sebesar Rp868.773.006,00, rincian koreksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.55 Ekstrakom Gedung dan Bangunan per SKPD

No	Unit Organisasi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	499.174.849,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	46.765.101,00
3	Dinas Pertanian & Pangan	15.000.002,00
4	Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	33.935.500,00
5	Dinas Pariwisata	106.540.000,00
6	Bagian Hukum	14.000.000,00
7	Bagian Umum	36.500.000,00
8	Kecamatan Sabu Barat	36.750.000,00
9	Kecamatan Sabu Liae	17.530.000,00
10	Kecamatan Sabu Tengah	11.774.554,00
	Jumlah	800.440.006,00

11. KDP Gedung Bangunan sebesar Rp14.328.412.500,00 merupakan pekerjaan gedung bangunan yang belum selesai dikerjakan, pekerjaan itu terdapat pada:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp29.692.500,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.298.720.000,00.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.56 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

Unit Organisasi	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	126.720.613.507,80	99.096.884.770,00	27.623.728.737,80	27,88
Rumah Sakit Umum Daerah	30.039.585.344,00	24.440.784.599,00	5.598.800.745,00	22,91
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	76.443.563.633,00	73.217.782.532,00	3.225.781.101,00	4,41
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	97.511.013.010,67	92.099.089.520,67	5.411.923.490,00	5,88
Satuan Polisi Pamong Praja	64.847.000,00	64.847.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.700.000,00	194.700.000,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian Dan Pangan	10.915.484.913,00	10.930.484.913,00	(15.000.000,00)	(0,14)

Unit Organisasi	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	414.859.000,00	414.859.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	147.089.853.963,00	136.856.046.463,00	10.233.807.500,00	7,48
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	149.519.000,00	149.519.000,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.403.018.954,00	2.373.050.554,00	29.968.400,00	1,26
Dinas Pariwisata	37.171.375.300,00	35.815.727.200,00	1.355.648.100,00	3,79
Bagian Pemerintahan	14.106.785.416,00	14.106.785.416,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	(100,00)
Bagian Umum	89.797.000,00	126.297.000,00	(36.500.000,00)	(28,90)
Badan Keuangan Daerah	78.403.050,00	20.861.317.060,00	(20.782.914.010,00)	(99,62)
Sekretariat DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Barat	405.676.000,00	0,00	405.676.000,00	0,00
Kecamatan Sabu Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Liae	657.500.000,00	0,00	657.500.000,00	0,00
Kecamatan Hawu Mehara	445.000.000,00	0,00	445.000.000,00	0,00
Kecamatan Rajjua	260.147.500,00	31.247.500,00	228.900.000,00	732,54
Kecamatan Sabu Tengah	0,00	11.774.550,00	(11.774.550,00)	(100,00)
Jumlah	545.280.742.591,47	510.924.197.077,67	34.356.545.513,80	6,72

Data penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan secara terinci terdapat pada **Lampiran N – 7.3**.

Properti Investasi menurut PSAP Nomor 17 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki properti dalam bentuk gedung dan bangunan seluas 100m² diatas tanah seluas 1.620m² yang beralamat di Jalan Simpang Tiga Kantor Pos Seba, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, properti tersebut disewakan dalam periode sewa (lima tahun) menurut surat perjanjian kerja sama Nomor 032/14/BAKEUDA-SR/IX/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditujukan/digunakan untuk tempat Kantor BRI Unit Sabu.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022 Rp761.575.931.846,51	31 Desember 2021 Rp680.892.614.545,57
--	--	--

Jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp680.892.614.545,57, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp80.683.317.300,94 atau 11,85% menjadi Rp761.575.931.846,51.

Terdapat aset jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari P3D dari Kabupaten Kupang sebesar Rp10.659.313.540,00 yang masih dicatat dalam neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp10.502.559.690,00 dan neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Rp156.753.850,00.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, jaringan dan instalasi dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2022)		680.892.614.545,57
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	93.612.153.264,00	
- Kapitalisasi	262.103.450,00	
- Reklasifikasi	93.103.300,00	
- Mutasi antar SKPD	4.629.921.942,00	
- KDP yang selesai	10.202.063.644,00	
Jumlah mutasi tambah	<u>108.813.685.600,00</u>	108.813.685.600,00
Mutasi Kurang:		
- BM Tidak Dikapitalisasi	(748.533.500,00)	
- Reklasifikasi	(16.192.438,06)	
- Mutasi antar SKPD	(4.629.921.942,00)	
- Koreksi Ekstrakomptabel	(83.297.600,00)	
- KDP	(22.638.082.819,00)	
Jumlah mutasi kurang	<u>(28.130.368.299,06)</u>	(28.130.368.299,06)
Saldo Akhir (31 Des 2022)		<u>761.575.931.846,51</u>

1. Belanja Modal sebesar Rp93.612.153.264,00 merupakan belanja modal yang ada pada SKPD.
2. Kapitalisasi sebesar Rp262.103.450,00 terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Rp23.830.950,00 dari belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur sumur bor.
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp16.372.500,00 dari belanja jasa listrik yang merupakan belanja meteran listrik.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp221.900.000,00 dari belanja pemeliharaan dan belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan.
3. Reklasifikasi masuk Rp93.103.300,00 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp22.985.000,00 dari aset tetap lainnya yang bersumber dari dana BOS.

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp70.118.300,00 dari belanja modal gedung bangunan yang merupakan belanja rehab rumah pompa UPTD Unit Sabu Timur.
4. KDP yang selesai pada tahun 2022 sebesar Rp10.202.063.644,00, terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Rp377.333.200,00, yaitu pekerjaan sumur bor yang telah selesai dikerjakan.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp9.824.730.444,00 terdiri dari jalan, jembatan, irigasi dan embung yang telah selesai dikerjakan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi Rumah Pompa UPTD Unit Sabu Timur Rp30.050.700,00
 - 2) Optimalisasi SPAM Depe Sabu Barat Rp124.800.000,00
 - 3) Peningkatan Jalan Ledunu-Kolorae Rp6.857.925.000,00
 - 4) Pembangunan SPAM Desa Bebae Rp516.785.000,00
 - 5) Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Jiwuwu Rp634.136.500,00
 - 6) Pembangunan SPAM Desa Wadumedi Rp255.000.000,00
 - 7) Pengawasan Peningkatan Jalan Paket II (Raijua) Rp153.600.000,00
 - 8) Peningkatan Jalan Tanajawa-Molie Rp1.252.433.244,00
 5. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi Rp748.533.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas:
 - a. Pembangunan Sarana Air Minum Skala Perdesaan (PAMSIMAS), Rp300.000.000,00.
 - b. Belanja Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan Rp299.533.500,00
 - c. Belanja Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jembatan Rp45.400.000,00
 - d. Pelunasan hutang belanja perencanaan air bersih tahun 2021 sebesar Rp103.600.000,00
 6. Reklasifikasi keluar ke aset lainnya sebesar Rp16.192.438,06, berupa nilai kekurangan volume jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 7. Koreksi ekstrakomptabel sebesar Rp83.297.600,00 yaitu koreksi untuk mengeluarkan nilai ekstrakomptabel yang masih tercatat dalam neraca.
 8. KDP sebesar Rp22.638.082.819,00 merupakan pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan air bersih tercatat 2021 Rp103.600.000,00;
 - b. pengawasan pembangunan jaringan perpipaan 2021 Rp36.040.240,00;
 - c. peningkatan Jalan Trans Ledunu-Bolua Rp2.820.876.770,00;
 - d. pengawasan pekerjaan peningkatan jalan Paket V 2021, Rp89.058.750,00;
 - e. peningkatan Jalan Mesara-Ege Rp4.913.872.679,00;
 - f. pengawasan pekerjaan konstruksi jalan wilayah Sabu Barat Rp322.400.000;
 - g. peningkatan Jalan Bolou-Ege Rp12.807.555.680,00;
 - h. pengawasan pekerjaan konstruksi jalan wilayah Sabu Tengah Rp120.400.000,00;
 - i. penguatan spam Desa Jiwuwu Rp369.457.300,00

- j. pengawasan pekerjaan konstruksi jalan wilayah Raijua Rp168.750.000,00;
 - k. perencanaan pembangunan air bersih Rp145.010.400,00
 - l. pengawasan pekerjaan konstruksi jalan harus (BASE) Rp502.425.000,00
 - m. pengawasan pekerjaan konstruksi jalan wilayah Hawu Mehara Rp238.636.000;
9. Mutasi antar SKPD Rp4.629.921.942,00 terdiri atas mutasi aset P3D dari Badan Keuangan Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.473.168.092,00 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Rp156.753.850,00.

Rincian jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dirinci per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

Uraian	31-Des-202 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	170.387.488,00	147.402.488,00	22.985.000,00	15,59
Rumah Sakit Umum Daerah	6.359.487.382,00	5.252.165.032,00	1.107.322.350,00	21,08
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.341.399.519,00	2.280.717.019,00	60.682.500,00	2,66
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	720.609.243.654,51	636.630.251.111,57	83.978.992.542,94	13,19
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.652.850.900,00	2.652.850.900,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana	841.500,00	841.500,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.980.400,00	14.980.400,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	18.084.537.491,00	18.100.987.491,00	(16.450.000,00)	(0,09)
Dinas Lingkungan Hidup	945.795.950,00	941.795.950,00	4.000.000,00	0,42
Dinas Perhubungan	6.217.407.738,00	6.217.407.738,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	32.916.000,00	32.916.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	2.899.717.000,00	2.899.717.000,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	303.127.324,00	146.373.474,00	156.753.850,00	107,09
Dinas Pariwisata	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
Bagian Umum	34.223.500,00	34.223.500,00	0,00	0,00

Uraian	31-Des-202 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Keuangan Daerah	655.766.000,00	5.285.687.942,00	(4.629.921.942,00)	(87,59)
Sekretariat DPRD	0,00	317.000,00	(317.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sabu Barat	21.250.000,00	21.980.000,00	(730.000,00)	(3,32)
Kecamatan Sabu Timur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Liae	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rajjua	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Tengah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	761.575.931.846,51	680.892.614.545,57	80.683.317.300,94	11,85

Terdapat pencatatan atas pekerjaan perencanaan, pekerjaan pengawasan dan pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan, irigasi, jaringan yang belum dikapitalisasi ke aset induknya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah berproses dalam memperbaiki pencatatan yang masih dipisahkan perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi namun belum dimasukkan dalam aplikasi.

Daftar penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan instalasi tahun 2022 dapat dirinci pada **Lampiran N – 7.4**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022
Rp27.553.041.364,68

31 Desember 2021
Rp26.616.177.271,68

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.616.177.271,68, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp936.864.093,00 atau 3,52% menjadi Rp27.553.041.364,68. Terdapat aset tetap lainnya yang berasal dari P3D dari Kabupaten Kupang sebesar Rp205.717.150,00 yang dicatat dalam neraca Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Aset tetap lainnya berupa buku-buku ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan, barang-barang bercorak kebudayaan, hewan, dan tanaman yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sabu Rajjua per 31 Desember 2022.

Rincian mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya dapat dihitung sebagai berikut :

Saldo Awal (1 Jan 2022)		26.616.177.271,68
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	2.865.619.475,00	
- Kapitalisasi	180.000.000,00	
- Hibah	179.354.893,00	
- Mutasi antar SKPD	205.717.150,00	
Total Mutasi Tambah	3.430.691.518,00	
Mutasi Kurang:		
- BM Tidak Dikapitalisasi	(91.759.248,00)	
- Reklasifikasi	(2.196.351.027,00)	

- Mutasi antar SKPD	(205.717.150,00)	
Total Mutasi Kurang		(2.493.827.425,00)
Saldo Akhir (31 Des 2022)		27.553.041.364,68

1. Belanja Modal sebesar Rp1.488.100,00 merupakan belanja modal yang ada pada SKPD dan belanja modal pada sekolah yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp2.864.131.375,00;
2. Kapitalisasi sebesar Rp180.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan dari belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan berupa indukan ternak babi;
3. Hibah masuk Rp179.354.893,00 terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Rp71.417.350,00 berupa hibah bantuan buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai BAST Nomor 7860/4.2/PLK.03.07/X/2022 tanggal 21/10/2022; dan
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp107.937.543,00, berupa hibah bantuan buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai BAST Nomor 7208/4.2/PLK.03.07/X/2022 tanggal 15/10/2022.
4. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi Rp91.759.248,00 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp91.755.748,00; dan
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3.500,00 yang merupakan belanja *paper bag*.
5. Reklasifikasi keluar Rp2.196.351.027,00 terdiri pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Reklas ke peralatan mesin Rp2.173.366.027,00 dan ke jalan, jaringan dan instalasi Rp22.985.000; dan
6. Mutasi antar SKPD Rp205.717.150,00, adalah mutasi aset P3D ke SKPD pengguna, dari Badan Keuangan Daerah ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dirinci per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58 Aset Tetap Lainnya per SKPD

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	24.781.210.828,00	23.999.469.078,00	781.741.750,00	3,26
Rumah Sakit Umum Daerah	74.152.400,00	2.735.050,00	71.417.350,00	2.611,19
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana	5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.001.500,00	26.001.500,00	0,00	0,00
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.087.700,00	5.087.700,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	1.394.083.885,68	1.214.083.885,68	180.000.000,00	14,83
Dinas Lingkungan Hidup	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.373.100,00	9.373.100,00	0,00	0,00

Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.344.400,00	11.344.400,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	3.943.000,00	3.943.000,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	766.033.291,00	658.095.748,00	107.937.543,00	16,40
Dinas Kelautan dan Perikanan	17.798.210,00	16.828.610,00	969.600,00	5,76
Dinas Pariwisata	156.350.000,00	156.350.000,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	16.825.800,00	16.825.800,00	0,00	0,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	57.450.100,00	57.450.100,00	0,00	0,00
Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	11.500.700,00	11.500.700,00	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00
Bagian Umum	24.214.800,00	24.214.800,00	0,00	0,00
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	15.891.850,00	15.891.850,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	11.133.200,00	11.133.200,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	32.050.400,00	237.767.550,00	(205.717.150,00)	(86,52)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	13.619.400,00	13.619.400,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	14.711.300,00	14.196.300,00	515.000,00	3,63
Kecamatan Rajjua	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	15.903.500,00	15.903.500,00	0,00	0,00
Jumlah	27.553.041.364,68	26.616.177.271,68	936.864.093,00	3,52

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran N –7.5**.

5.5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp98.106.670.077,85	Rp77.783.920.048,85

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2021 sebesar Rp77.783.920.048,85, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp20.322.750.029,00 atau 26,13% menjadi Rp98.106.670.077,85. Nilai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) berupa pengadaan barang dan pekerjaan fisik yang masih dalam proses penyelesaian baik dalam hal pembayaran maupun penyelesaian fisik kegiatan periode 31 Desember 2022.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan secara rinci dapat dihitung sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2022)		77.783.920.048,85
Mutasi Tambah:		
- KDP	37.100.677.669,00	
- Hutang Belanja	170.364.000,00	
- Kapitalisasi	1.943.517.800,00	
Total Mutasi Tambah		39.214.559.469,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi	(15.994.640,00)	
- KDP yang selesai	(18.875.814.800,00)	
Total Mutasi Kurang		(18.891.809.440,00)
Saldo Akhir (31 Des 2022)		98.106.670.077,85

- KDP sebesar Rp36.966.495.319,00 merupakan penambahan KDP murni dari belanja modal tahun berjalan, terdapat pada:
 - Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp29.692.500,00, KDP gedung bangunan; dan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.298.720.000,00, KDP gedung bangunan dan Rp22.638.082.819 KDP jalan, jaringan dan instalasi.
- Hutang belanja sebesar Rp170.364.000,00 merupakan penambahan KDP dari hutang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Kapitalisasi sebesar Rp2.077.700.150,00 merupakan penambahan KDP dari belanja jasa konsultasi perencanaan.
- Reklas sebesar Rp15.994.640,00 merupakan koreksi nilai KDP tahun 2021 yang berasal dari hutang belanja. Di tahun 2022 direalisasikan sebesar nilai yang sudah diakui tahun 2021.
- KDP yang selesai sebesar Rp18.875.814.800,00 merupakan pekerjaan tahun sebelumnya yang telah diselesaikan, yang terdapat pada:
 - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.072.469.568,00;
 - Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 4.502.537.360,00;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.270.839.472,00; dan
 - Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp29.968.400,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dirinci per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Unit Organisasi	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	1.072.469.568,00	(1.072.469.568,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	1.410.084.725,00	5.882.929.585,00	(4.472.844.860,00)	(76,03)

Mutasi Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua secara rinci dapat dihitung sebagai berikut:

Saldo Awal (1 Jan 2022)		40.264.391.654,88
Mutasi Tambah:		
- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
- Hasil pengelolaan Dadan Cadangan	852.718.003,76	
Total Mutasi Tambah		852.718.003,76
Mutasi Kurang:		
- Pencairan Dana Cadangan	(9.903.359.772,69)	
Total Mutasi Kurang		(9.903.359.772,69)
Saldo Akhir (31 Des 2022)		31.213.749.885,95

Rincian Dana cadangan per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.61 Dana Cadangan

Unit Organisasi	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pembangunan Pabrik Karung	31.213.749.885,95	30.361.845.790,07	851.904.095,88	2,81
Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD	0,00	3.296.218.140,64	(3.296.218.140,64)	(100,00)
Pembangunan Embung	0,00	1.534.477.754,55	(1.534.477.754,55)	(100,00)
Pembangunan Jalan	0,00	3.564.049.848,90	(3.564.049.848,90)	(100,00)
Pembangunan Taman Doa Skyber	0,00	1.507.800.120,72	(1.507.800.120,72)	(100,00)
Jumlah	31.213.749.885,95	40.264.391.654,88	(9.050.641.768,93)	(22,48)

Untuk lebih jelasnya Dana Cadangan Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran N-8**

5.3.1.5 Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp62.366.772.927,72	Rp60.005.583.593,58

Aset lainnya merupakan bagian dari non lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah. Aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.005.583.593,58, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp2.361.189.334,14 atau 3,93% menjadi Rp62.366.772.927,72. Rincian aset lainnya sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 11.097.121.041,00	Rp10.837.321.041,00

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.837.321.041,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp259.800.000,00 atau 2,40% menjadi Rp11.097.121.041,00. Aset tidak berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2022 berupa Perangkat Lunak, *Master Plan*, *Website*, *Software*, Dokumen Kajian, *Data Center Web GIS Redesign Website Pemda*

dan Pembangunan Aplikasi Desa. Aset tak berwujud dapat dirinci per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.62 Aset Tidak Berwujud

Unit Organisasi	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Rumah Sakit Umum Daerah	371.451.000,00	371.451.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan PP & KB	390.123.000,00	390.123.000,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	4.934.838.500,00	4.675.038.500,00	259.800.000,00	5,56
Dinas Perumahan Rakyat dan KP	1.809.123.000,00	1.809.123.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	297.570.527,00	297.570.527,00	0,00	0,00
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	767.540.000,00	767.540.000,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	211.614.000,00	211.614.000,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	163.924.014,00	163.924.014,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	851.310.000,00	851.310.000,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	392.885.000,00	392.885.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	543.642.000,00	543.642.000,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.097.121.041,00	10.837.321.041,00	259.800.000,00	2,40

5.2.1.5.2 Amortisasi Aset Tidak Berwujud **31 Desember 2022**
(Rp5.007.331.009,83) **31 Desember 2021**
(Rp3.777.158.523,73)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.777.158.523,73) tahun 2022 bertambah sebesar (Rp1.230.172.486,10) atau 32,57% menjadi (Rp5.007.331.008,83). Amortisasi tak berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Unit Organisasi	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah	(371.451.000,00)	0,00	(371.451.000,00)	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(42.263.325,00)	(340.652.350,00)	298.389.025,00	(87,59)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.760.175.941,67)	(1.245.663.438,00)	(514.512.503,67)	41,30
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(405.615.166,67)	(212.109.533,00)	(193.505.633,67)	91,23
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(91.750.911,49)	(32.236.806,00)	(59.514.105,49)	184,62
Dinas Transmigrasi, Koperasi, UKM	(391.569.834,32)	(314.815.833,33)	(76.754.000,99)	24,38
Dinas Pertanian dan Pangan	(151.656.700,00)	(130.495.300,00)	(21.161.400,00)	16,22
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(163.924.014,00)	(163.924.013,00)	(1,00)	0,00
Dinas Perhubungan	(857.820.916,67)	(695.142.250,00)	(162.678.666,67)	23,40
Dinas Komunikasi dan Informatika	(176.734.166,67)	(138.424.166,00)	(38.310.000,67)	27,68

Unit Organisasi	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	(220.216.666,67)	(184.016.667,40)	(36.199.999,27)	19,67
Dinas Pariwisata	(373.354.866,67)	(318.990.667,00)	(54.364.199,67)	17,04
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	(797.500,00)	(687.500,00)	(110.000,00)	16,00
Jumlah	(5.007.331.009,83)	(3.777.158.523,73)	(1.230.172.486,10)	32,57

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp70.484.569.455,95 **Rp69.355.286.457,71**

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.355.286.457,71, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp1.129.282.998,24 atau 1,63% menjadi Rp70.484.569.455,95. Aset lain-lain berupa barang dalam kondisi rusak berat, aset P3D yang tidak ditemukan saat verifikasi yang menunggu penghapusan, aset yang akan dihibahkan kepada pihak lain dan aset yang tidak ditemukan dan hilang saat inventarisasi dan aset yang masih dalam penelusuran. Aset Lain-Lain per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64 Aset Lain-Lain

Unit Organisasi	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	327.743.849,18	45.000.000,00	282.743.849,18	628,32
Rumah Sakit Umum Daerah	754.340.200,00	755.290.200,00	(950.000,00)	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.403.565,00	89.403.565,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.772.405.515,39	5.969.238.967,33	1.803.166.548,06	30,21
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.321.150,00	19.120.200,00	(1.799.050,00)	(9,41)
Satuan Polisi Pamong Praja	238.600.000,00	233.615.230,00	4.984.770,00	2,13
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.963.500,00	88.963.500,00	(8.000.000,00)	(8,99)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	110.516.400,00	139.530.475,00	(29.014.075,00)	(20,79)
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	59.302.500,00	60.809.100,00	(1.506.600,00)	(2,48)
Dinas Pertanian dan Pangan	1.598.930.012,90	2.497.388.912,90	(898.458.900,00)	(35,98)
Dinas Lingkungan Hidup	26.910.200,00	26.910.200,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	663.599.564,00	666.976.564,00	(3.377.000,00)	(0,51)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	159.597.250,00	164.177.950,00	(4.580.700,00)	(2,79)
Dinas Perhubungan	4.868.203.650,00	5.614.173.150,00	(745.969.500,00)	(13,29)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.153.904.950,00	1.257.720.300,00	(103.815.350,00)	(8,25)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	29.267.277.501,00	29.279.793.351,00	(12.515.850,00)	(0,04)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.200.500,00	15.750.502,00	(550.002,00)	(3,49)
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.392.905.475,00	9.412.099.905,00	(19.194.430,00)	(0,20)

Unit Organisasi	31-Des-2022	31-Des-2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dinas Pariwisata	867.056.000,00	911.431.000,00	(44.375.000,00)	(4,87)
Bagian Pemerintahan	15.604.450,00	15.604.450,00	0,00	0,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	41.590.000,00	(41.590.000,00)	(100,00)
Bagian Hukum	33.251.750,00	52.064.750,00	(18.813.000,00)	(36,13)
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	22.770.000,00	22.770.000,00		
Bagian Administrasi Pembangunan	248.557.500,00	252.341.500,00	(3.784.000,00)	(1,50)
Bagian Umum	617.758.060,00	876.190.060,00	(258.432.000,00)	(29,49)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.588.000,00	3.588.000,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	47.590.880,00	52.291.180,00	(4.700.300,00)	(8,99)
Inspektorat Daerah	173.290.560,00	173.290.560,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102.660.211,48	105.615.701,48	(2.955.490,00)	(2,80)
Badan Keuangan Daerah	9.767.944.190,00	8.851.297.622,00	916.646.568,00	10,36
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	180.239.104,00	183.164.104,00	(2.925.000,00)	(1,60)
Sekretariat DPRD	1.021.411.080,00	1.030.585.730,00	(9.174.650,00)	(0,89)
Kecamatan Sabu Barat	26.679.600,00	26.679.600,00	0,00	0,00
Kecamatan Sabu Timur	384.554.488,00	16.481.328,00	368.073.160,00	0,00
Kecamatan Sabu Liae	8.654.600,00	8.654.600,00	0,00	0,00
Kecamatan Hawu Mehara	82.072.125,00	83.422.125,00	(1.350.000,00)	(1,62)
Kecamatan Rajjua	182.637.375,00	209.938.375,00	(27.301.000,00)	(13,00)
Kecamatan Sabu Tengah	59.620.000,00	59.620.000,00	0,00	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	41.503.700,00	42.703.700,00	(1.200.000,00)	(2,81)
Jumlah	70.484.569.455,95	69.355.286.457,71	1.129.282.998,24	1,63

5.3.1.5.4 Ak. Penyusutan Aset Lain-lain 31 Desember 2022 31 Desember 2021
(Rp14.207.586.559,40) **(Rp16.409.865.381,40)**

Akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.409.865.381,40, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp2.202.278.822,00 atau 13,42% menjadi (Rp14.207.586.559,40). Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan akumulasi penyusutan dari barang rusak berat dan barang yang tidak ditemukan saat inventarisasi.

5.3.2 Kewajiban 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp8.766.896.299,94 **Rp5.710.872.408,00**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sabu Rajjua periode 31 Desember 2021 sebesar Rp5.710.872.408,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp3.056.023.891,94 atau 53,51% menjadi Rp8.766.896.299,94.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 Rp8.766.896.299,94	31 Desember 2021 Rp5.710.872.408,00
--	--	--

Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban Pemerintah Daerah yang dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari hutang PFK, pendapatan diterima dimuka dan hutang belanja.

5.3.2.1.1 Utang PFK	31 Desember 2022 Rp69.869.181,00	31 Desember 2021 Rp233.436.216,00
----------------------------	---	--

Utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp233.436.216,00, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp163.567.035,00 atau 70,07% menjadi Rp69.869.181,00. Rincian Utang PFK ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.65 Utang PFK

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi/Reklas (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
PFK BUD :					
Askes	0,00	0,00	39.039.740,00	39.039.740,00	0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00	232.315.553,00	232.315.553,00	0,00
Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00	594.190.684,00	594.190.684,00	0,00
Iuran Jaminan Kesehatan (4%)	0,00	0,00	4.579.558.801,00	4.579.558.801,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai Total	0,00	0,00	10.692.987,00	10.692.987,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	0,00	1.145.053.720,00	1.145.053.720,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	0,00	6.195.424.810,00	6.195.424.810,00	0,00
Taperum	41.000,00	(41.000,00)	0,00	0,00	0,00
Lainnya	156.686.015,00	(156.686.015,00)	1.069.680.315,00	1.069.680.315,00	0,00
PPh Pasal 21	0,00	0,00	4.660.506.078,00	4.660.506.078,00	0,00
PPh Pasal 22	442.000,00	(442.000,00)	312.931.234,00	312.931.234,00	0,00
PPh Pasal 23	0,00	0,00	29.219.688,00	29.219.688,00	0,00
PPh Pasal 4 (2)	0,00	0,00	2.381.949.970,00	2.381.949.970,00	0,00
PPN	1.105.000,00	(1.105.000,00)	15.207.680.812,00	15.207.680.812,00	0,00
Jumlah I	158.274.015,00	(158.274.015,00)	36.458.244.392,00	36.458.244.392,00	0,00
PFK SKPD :					
PPh Pasal 21	0,00	0,00	45.063.000,00	45.063.000,00	0,00
PPh Pasal 22	0,00	0,00	124.583.919,00	123.188.242,00	1.395.677,00
PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	125.603.658,00	124.043.945,00	1.589.713,00
PPh Pasal 4 (2)	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
PPN	0,00	0,00	916.226.283,00	905.444.402,00	10.781.881,00
Jumlah II	30.000,00	0,00	1.215.376.860,00	1.201.639.589,00	13.767.271,00
PFK Bendahara BOS :					
Pajak Belanja BOS	74.634.695,00	0,00	723.175.816,00	778.850.757,00	18.959.754,00
Jumlah III	74.634.695,00	0,00	723.175.816,00	778.850.757,00	18.959.754,00
PFK Bendahara FKTP :					
PPh Pasal 21	0,00	0,00	15.444.649,00	2.814.490,00	12.630.159,00
PPh Pasal 22	56.327,00	0,00	16.945.958,00	14.227.263,00	2.775.022,00
PPh Pasal 23	24.363,00	0,00	46.104.604,00	45.720.483,00	408.484,00
PPN	416.816,00	0,00	144.395.514,00	123.483.839,00	21.328.491,00
Jumlah IV	497.506,00	0,00	222.890.725,00	186.246.075,00	37.142.156,00
Jumlah(I + II + III + IV)	233.436.216,00	(158.274.015,00)	38.619.687.793,00	38.624.980.813,00	69.869.181,00

Koreksi utang PFK sebesar Rp158.274.015,00 terdiri atas koreksi utang PFK sebesar Rp135.027.215,00 merupakan lebih dicatat utang PFK yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga, yang terdiri atas:

1. Utang taperum tahun 2013 senilai Rp41.000,00, sejak tahun 2013 tidak ada surat tagihan dari Bapetarum atas nilai utang tersebut. Pada tahun 2018 Bapetarum telah dibubarkan.
2. Utang PPH Pasal 22 senilai Rp442.000,00 dan PPN senilai Rp1.105.000,00 yang salah dicatat dua kali dalam SP2D Nomor 0860/SP2D-LS/1.21.01.01/2012 (sebagai potongan dan informasi).
3. Utang potongan retensi 5% atas tiga paket pekerjaan senilai Rp109.599.140,00, nilai tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak ketiga saat pencairan retensi 5%.
4. Utang potongan retensi 5% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Perpipaan Lokoeimada Tahun Anggaran 2017 Sesuai Kontrak Nomor : PU.600/SPK-Air Bersih/06/2017 Tanggal 26 Agustus 2017 senilai Rp26.160.100,00. Atas pekerjaan tersebut tidak ada tagihan dan kewajiban membayar dari Pemerintah Daerah lagi karena telah dilakukan proses pemutusan hubungan kerja.

Utang PFK sebesar Rp23.246.800,00 direklas ke utang belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan berupa nilai retensi Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan Raemude - Eilogo sesuai kontrak Nomor : PU.620/SP-Jalan/98/2017 tanggal 27 November 2017 yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp2.562.780.533,00	Rp67.916.666,00

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.916.666,00, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp2.494.863.867,00 atau 3.673,42% menjadi Rp2.562.780.533,00. Pendapatan diterima dimuka bersumber dari sewa pemakaian tanah dan gedung bangunan pemerintah oleh Bank BRI, sewa ruangan kantor oleh Bank NTT dan sewa tanah untuk SPBU dan uang muka pembelian garam curah. Uang muka pembelian garam dihitung berdasarkan harga saat dilakukan pembayaran, nilai tersebut masih dapat berubah sesuai perkembangan harga garam dan kesepakatan dengan pembeli. Rinciannya pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.66 Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Pembayaran	Akumulasi s.d 2021	Pendapatan 2022	Pendapatan di Terima di Muka
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sewa Tanah Lokasi SPBU (APMS Niti S) 10 Tahun NPS No 151 Tahun 2016/29 Des 2016	100.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
Sewa Gedung & Bangunan (Bank BRI) 5 Tahun SPSP No 032/14/Bakeuda-SR/IX/2017/1 Sept 2017	137.500.000,00	119.166.667,00	18.333.333,00	0,00
Sewa Ruangan Kantor Bupati (Bank NTT) 5 Tahun SPSP No 032/16/Bakeuda-SR/XII/2018/5 Des 2018	25.000.000,00	15.416.667,00	5.000.000,00	4.583.333,00
Sumatraco langgeng Makmur (Garam)	2.000.000.000,00	0,00	740.802.800,00	1.259.197.200,00
Sikriyanto Herewila (Garam)	1.710.500.000,00	0,00	1.611.500.000,00	99.000.000,00
Suyoso (Garam)	2.531.200.000,00	0,00	1.361.200.000,00	1.170.000.000,00
Jumlah	6.504.200.000,00	194.583.334,00	3.746.836.133,00	2.562.780.533,00

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/	(%)
	(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	728.930.539,31	5.597.472.573,17	(4.868.542.033,86)	(86,98)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	48.753.910.492,28	44.284.752.238,61	4.469.158.253,67	10,09
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(62.751.500)	0,00	(62.751.500)	(100,00)
Surplus/Defisit - LO	48.691.158.992,28	44.284.752.238,61	4.406.406.753,67	9,95

5.4.1 Pendapatan - LO **31 Desember 2022**
Rp518.862.580.539,44 **31 Desember 2021**
Rp518.281.428.620,35

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.69 Pendapatan - LO

SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28.870.950.021,44	28.441.573.229,35	429.376.792,09	1,51
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	22.452.575,00	(22.452.575,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan, PP & KB	56.841,30	5.582.929.425,00	(5.582.872.583,70)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	7.756.658.280,00	3.140.625.100,00	4.616.033.180,00	146,98
Dinas Pekerjaan Umum & PR	3.571.427.125,00	2.747.488.246,00	823.938.879,00	29,99
Dinas Pertanian dan Pangan	82.802.000,00	64.234.000,00	18.568.000,00	28,91
Dinas Perhubungan	3.400.000,00	2.319.000,00	1.081.000,00	46,61
Dinas PM PTSP, Perindag	6.930.006.710,00	1.886.777.000,00	5.043.229.710,00	267,29
Badan Keuangan Daerah	10.526.599.065,14	14.994.747.883,35	(4.468.148.818,21)	(29,80)
Pendapatan Transfer	455.257.472.571,00	454.796.195.770,00	461.276.801,00	0,10
Badan Keuangan Daerah	455.257.472.571,00	454.796.195.770,00	461.276.801,00	0,10
Lain-lain Pendapatan yang Sah	34.734.157.947,00	35.043.659.621,00	(309.501.674,00)	(0,88)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	1.874.325.000,00	(1.874.325.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan, PP & KB	557.040.659,00	1.428.012.472,00	(870.971.813,00)	(60,99)
Rumah Sakit Umum Daerah	81.214.350,00	11.200.751.235,00	(11.119.536.885,00)	(99,27)
Dinas Pekerjaan Umum & PR	230.023.500,00	0,00	230.023.500,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	806.862.600,00	(806.862.600,00)	(100,00)
Dinas Pertanian & Pangan	443.076.000,00	337.744.000,00	105.332.000,00	31,19
Dinas Perhubungan	87.800.000,00	37.250.000,00	50.550.000,00	135,70
Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp, Perindustrian Dan Perdagangan	10.267.743.000,00	16.764.314,00	10.250.978.686,00	61.147,62
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	178.952.813,00	645.660.000,00	(466.707.187,00)	(72,28)
Dinas Kelautan Dan Perikanan	258.029.500,00	973.433.000,00	(715.403.500,00)	(73,49)
Badan Keuangan Daerah	22.090.928.125,00	17.282.857.000,00	4.808.071.125,00	27,82
Kecamatan Hawu Mehara	539.350.000,00	0,00	539.350.000,00	100,00
Kecamatan Raijua	0,00	440.000.000,00	(440.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	518.862.580.539,44	518.281.428.620,35	581.151.919,09	0,11

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp28.870.950.021,44 Rp28.441.573.229,35

Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Sabu Raijua untuk per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.870.950.021,44 dapat dirinci berdasarkan SKPD dalam **Tabel 5.70**.

Tabel 5.70 Pendapatan Asli Daerah - LO

SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Daerah	5.818.142.081,04	4.467.646.829,00	1.350.495.252,04	30,23
Dinas Pekerjaan Umum & PR	3.469.152.125,00	2.615.938.246,00	853.213.879,00	32,62
Badan Keuangan Daerah	2.348.989.956,04	1.851.708.583,00	497.281.373,04	26,86
Retribusi Daerah	15.734.839.790,00	5.256.585.100,00	10.478.254.690,00	199,34
Rumah Sakit Umum Daerah	7.763.855.280,00	3.140.625.100,00	4.623.230.180,00	147,21
Dinas Pertanian & Pangan	82.802.000,00	64.234.000,00	18.568.000,00	28,91
Dinas Perhubungan	3.400.000,00	2.319.000,00	1.081.000,00	46,61
Dinas PMPTSP, Perindag	6.922.809.710,00	1.886.777.000,00	5.036.032.710,00	266,91
Badan Keuangan Daerah	961.972.800,00	162.630.000,00	799.342.800,00	491,51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.329.492.032,00	3.471.789.164,00	(1.142.297.132,00)	(32,90)
Badan Keuangan Daerah	2.329.492.032,00	3.471.789.164,00	1.142.297.132,00	(32,90)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.988.476.118,40	15.245.552.136,35	(10.257.076.017,95)	(67,28)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	22.452.575,00	(22.452.575,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan PP & KB	56.841,30	5.582.929.425,00	(5.582.872.583,70)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum & PR	102.275.000,00	131.550.000,00	(29.275.000,00)	(22,25)
Badan Keuangan Daerah	4.886.144.277,10	9.508.620.136,35	(4.622.475.859,25)	(48,61)
Jumlah	28.870.950.021,44	28.441.573.229,35	429.376.792,09	1,51

Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri atas :

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp5.818.142.081,04 Rp4.467.646.829,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2022 Rp5.818.142.081,04 mengalami peningkatan sebesar Rp1.350.495.252,04 atau 30,23% dibanding Pajak Daerah – LO tahun 2021 sebesar Rp4.467.646.829,00. Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.71 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Hotel – LO	40.110.000,00	6.990.000,00	33.120.000,00	473,82
Pajak Restoran – LO	607.468.382,04	526.415.990,00	81.052.392,04	15,40
Pajak Reklame – LO	83.486.893,00	74.387.450,00	9.099.443,00	12,23
Pajak Penerangan Jalan – LO	1.069.354.552,00	731.810.248,00	337.544.304,00	46,12
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	3.469.152.125,00	2.615.938.246,00	853.213.879,00	32,62

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	543.620.129,00	469.401.049,00	74.219.080,00	15,81
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	4.950.000,00	42.703.846,00	(37.753.846,00)	(88,41)
Jumlah	5.818.142.081,04	4.467.646.829,00	1.350.495.252,04	30,23

Selisih Pendapatan Pajak LRA dan Pendapatan Pajak LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA		5.661.974.798,04
Pendapatan Pajak Daerah-LO		5.818.142.081,04
Selisih		(156.167.283,00)
Penambahan		
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022	287.146.950,00	
- Piutang Pajak Rumah Makan TA 2022	2.700.000,00	
- Piutang Pajak Hotel TA 2022	255.000,00	
- Piutang Pajak PBB	1.729.663,00	
Total Penambahan		291.831.613,00
Pengurangan		
- Pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021	120.717.330,00	
- Pelunasan Piutang Pajak Rumah Makan TA 2021	2.794.000,00	
- Pelunasan Piutang Pajak Hotel TA 2021	485.000,00	
- Pelunasan Piutang Pajak Reklame TA 2021	11.668.000,00	
Total Pengurangan		135.664.330,00
Total Mutasi		156.167.283,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp15.734.839.790,00	Rp5.256.585.100,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2022 sebesar Rp15.734.839.790,00 peningkatan sebesar Rp10.478.254.690,00 atau 199,34% dibanding tahun 2021 sebesar Rp5.256.585.100,00. Retribusi Daerah - LO dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.72 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
	(Rp)	(Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	8.661.075.080,00	3.182.745.100,00	5.478.329.980,00	172,13
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.400.000,00	2.319.000,00	1.081.000,00	46,61
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	68.620.750,00	74.825.000,00	(6.204.250,00)	(8,29)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.600.000,00	155.100.000,00	(54.500.000,00)	(35,14)

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
	(Rp)	(Rp)		
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	26.412.000,00	20.514.000,00	5.898.000,00	28,75
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	6.827.214.800,00	1.771.282.900,00	5.055.931.900,00	285,44
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	47.517.160,00	49.799.100,00	(2.281.940,00)	(4,58)
Jumlah	15.734.839.790,00	5.256.585.100,00	10.478.254.690,00	199,34

Selisih Pendapatan Retribusi – LRA dan Pendapatan Retribusi - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah -LRA		18.160.726.740,00
Pendapatan Retribusi Daerah -LO		<u>15.734.839.790,00</u>
Selisih		2.425.886.950,00
Penambahan		
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	96.912.000,00	
- Piutang Retribusi Pasar	<u>5.398.250,00</u>	
Total Penambahan		102.310.250,00
Pengurangan		
- Uang Muka Penjualan Garam	2.528.197.200,00	
Total Pengurangan		2.528.197.200,00
Total Mutasi		(2.425.886.950,00)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp2.329.492.032,00	Rp3.471.789.164,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan pembagian laba atau deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT Tahun 2022. Pembagian deviden yang diterima Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 sebesar Rp2.329.492.032,00 berkurang sebesar Rp1.142.297.132,00 dibandingkan pembagian deviden yang diterima tahun 2021 sebesar Rp3.471.789.164,00.

5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp4.988.476.118,40	Rp15.245.552.136,35

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO tahun 2022 sebesar Rp4.988.476.118,40 mengalami pengurangan sebesar Rp10.257.076.017,95 atau 67,28% dibanding tahun 2021 sebesar Rp15.245.552.136,35. Lain-lain pendapatan asli daerah - LO yang sah dirincikan pada **Tabel 5.73**.

Tabel 5.73 Lain - lain PAD yang Sah - LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	135.608.333,00	131.550.000,00	4.058.333,00	3,09
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.188.279.668,00	4.624.515.969,50	(2.436.236.301,50)	(52,68)
Pendapatan Bunga - LO	723.839.795,00	933.767.608,00	(209.927.813,00)	(22,48)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	721.416.886,40	76.240.000,00	645.176.886,40	846,24
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.069.680.315,00	2.489.057.491,39	(1.419.377.176,39)	(57,02)
Pendapatan Denda Pajak - LO	-	1.068.048,00	(1.068.048,00)	100,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	33.369.500,00	76.496.215,00	(43.126.715,00)	(56,38)
Pendapatan Pengembalian -LO	116.281.621,00	1.329.927.379,46	(1.213.645.758,46)	(91,26)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	-	5.582.929.425,00	(5.582.929.425,00)	(100,00)
Jumlah	4.988.476.118,40	15.245.552.136,35	10.257.076.017,95	(67,28)

Selisih Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)		4.988.476.118,40
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)		4.824.749.013,64
Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(581.331.503,00)
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah		(33.333.333,00)
Selisih		<u>711.725.274,76</u>
Mutasi Penambahan		
- Piutang Garam ke piutang retribusi penjualan hasil usaha daerah	1.344.198.900,00	
- Pelunasan piutang garam tahun 2021 yang belum dicatat	79.000.000,00	
- Jagir dana cadangan yang langsung menambah nilai DC	852.718.003,76	
Total Mutasi Penambahan		<u>2.275.916.903,76</u>
Mutasi Pengurangan		
- Piutang lancar atas temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2022	(737.628.508,00)	
- Penyetoran atas temuan sebelum LHP	(251.228.853,00)	
- Piutang TPTGR (mengurangi beban)	(575.334.268,00)	
Total Mutasi Pengurangan		<u>(1.564.191.629,00)</u>
Total Mutasi		<u>711.725.274,76</u>

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO **31 Desember 2022**
Rp455.257.472.571,00 **31 Desember 2021**
Rp454.796.195.770,00

Pendapatan transfer - LO tahun 2022 sebesar Rp455.257.472.571,00 mengalami peningkatan sebesar Rp461.276.801,00 atau 0,10% dibanding pendapatan transfer-LO tahun 2021 sebesar Rp454.796.195.770,00. Pendapatan transfer - LO dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.74 Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	(Rp)	(Rp)		
Transfer Pemerintah Pusat	441.070.868.117,00	441.274.176.772,00	(203.308.655,00)	(0,05)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.186.604.454,00	13.522.018.998,00	664.585.456,00	4,91
Jumlah	455.257.472.571,00	454.796.195.770,00	461.276.801,00	0,10

Pendapatan Transfer - LO dapat dirinci sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO **31 Desember 2022**
Rp441.070.868.117,00 **31 Desember 2021**
Rp441.274.176.772,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2022 sebesar Rp441.070.868.117,00 mengalami penurunan sebesar Rp203.308.655,00 atau 0,05% dibanding tahun 2021 sebesar Rp441.274.176.772,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada **Tabel 5.75**.

Tabel 5.75 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Bagi Hasil Pajak – LO	8.130.250.984,00	9.233.904.096,00	(1.103.653.112,00)	(11,95)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	2.504.554.045,00	2.099.526.420,00	405.027.625,00	19,29
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	336.260.812.302,00	336.885.937.000,00	(625.124.698,00)	(0,19)
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	94.175.250.786,00	93.054.809.256,00	1.120.441.530,00	1,20
Jumlah	441.070.868.117,00	441.274.176.772,00	(203.308.655,00)	(0,05)

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (LO)	441.070.868.117,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (LRA)	440.083.421.954,00
Koreksi atas DBH-non tunai pada rekening TDF-TKD per 31 Desember 2022 yang belum dicatat	<u>987.446.163,00</u>

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	31 Desember 2022 Rp14.186.604.454,00	31 Desember 2021 Rp13.522.018.998,00
---	---	---

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO tahun 2022 sebesar Rp14.186.604.454,00 mengalami peningkatan sebesar Rp664.585.456,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp13.522.018.998,00. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO berupa alokasi dana bagi hasil pajak dari provinsi yang terdiri atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak pemanfaatan air permukaan.

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	14.186.604.454,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LRA	13.606.500.228,00
Selisih	580.104.226,00
Penambahan	
- Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	14.186.604.454,00
Pengurangan	
- Pelunasan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	13.606.500.228,00
Total Mutasi	580.104.226,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	31 Desember 2022 Rp 34.734.157.947,00	31 Desember 2021 Rp35.043.659.621,00
--	--	---

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2022 sebesar Rp34.734.157.947,00 mengalami penurunan sebesar Rp309.501.674,00 atau 0,88% dibanding tahun 2021 sebesar Rp35.043.659.621,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri atas pendapatan hibah Rp12.740.149.822,00 dan pendapatan lainnya Rp21.994.008.125,00.

Pendapat hibah sebesar Rp12.740.149.822,00 terdiri dari:

- Sumbangan pihak ketiga sebesar Rp885.825.500,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari:
 - a. Perjualan ternak sebesar Rp443.076.000,00.
 - b. KSU Sandi Mandiri pengelola Bus Transdes sebesar Rp87.800.000,00.
 - c. Penjualan Rumput Laut Kering Rp258.029.500,00.
 - d. Proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp96.920.000,00.
- Rumah Sakit Umum Daerah mendapatkan hibah berupa Rak Buku sebesar Rp9.797.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 7872/4.2/PLK.03.01/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Rumah Sakit Umum Daerah mendapatkan hibah berupa Buku Siap Layan Ke Perpustakaan Rumah Sakit sebesar Rp71.417.350,00 sesuai Berita Acara Serah

Terima Nomor 7860/4.2/PLK.03.07/X/2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa bahan makanan sebesar Rp170.386.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.911/444/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa BMHP sebesar Rp5.664.500,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.1130/442/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa BMHP sebesar Rp6.082.800,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.1501b/TBSO/442/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa Obat sebesar Rp294.810.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.269/449/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa Obat sebesar Rp21.602.600,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.1274/444/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa Obat sebesar Rp539.500,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.1274/444/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa Obat sebesar Rp21.878.938,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.1501a/TBSO/442/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa Obat sebesar Rp3.154.176,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor Dinkes.Yankes.1528/KUSTA-FRAMBUSIA/442/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan hibah berupa Obat sebesar Rp32.922.145,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor KN.01.04/VI.2/Alkes/PPK-KESMAS/370/2022 tanggal 29 November 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan hibah berupa 17 bidang tanah berdasarkan surat pelepasan hak dari masyarakat yang dinilai berdasarkan NJOP sebesar Rp230.023.500,00.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan hibah berupa Printer sebesar Rp5.385.440,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 6368/4.2/PLK.03.04/IX/2081 tanggal 26 September 2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan hibah berupa Server sebesar Rp17.386.440,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 6970/4.2/PLK.03.04/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan hibah berupa 3 unit Komputer sebesar Rp48.243.390,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor

8912/4.2/PLK.03.04/XI.2022 tanggal 11 November 2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan hibah berupa Buku Siap Laya Untuk Perpustakaan Kabupaten/Kota sebesar Rp107.937.543,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 7208/4.2/PLK.03.07/X.2022 tanggal 15 Oktober 2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Kecamatan Hawu Mehara mendapatkan hibah berupa Mobil Truk Tangki Air sebesar Rp539.350.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/348/Bakeuda-SR/X/2022 tanggal 23 April 2022 dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan mendapatkan hibah berupa Pasar Rakyat Nataga sebesar Rp7.424.368.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 457/M-DAG/BAST/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
- Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan mendapatkan hibah berupa Pasar Desa Jiwuwu sebesar Rp2.843.375.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 459/M-DAG/BAST/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pendapatan Lainnya sebesar Rp21.994.008.125,00 yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan atas pengembalian hibah sebesar Rp146.567.950,00 berasal dari pengembalian dana hibah KONI tahun 2021 sebesar Rp79.940.000,00 dan pengembalian hibah Kwardcab Pramuka tahun 2021 sebesar Rp66.627.950,00.
- 2) Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Rincian pendapatan dana kapitasi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.76 Pendapatan Dana Kapitasi

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Puskesmas Seba	2.070.853.592,00	2.046.018.300,00	98,80	1.817.938.350,00
2	Puskesmas Bolou	594.805.210,00	601.153.700,00	101,07	471.360.200,00
3	Puskesmas Eilogo	693.193.582,00	692.096.200,00	99,84	589.971.700,00
4	Puskesmas Daieko	1.270.717.513,00	1.244.972.700,00	97,97	1.050.354.700,00
5	Puskesmas Ledeuunu	623.756.692,00	567.911.700,00	91,05	562.073.700,00
6	Puskesmas Eimadake	577.783.441,00	573.220.200,00	99,21	577.652.200,00
	Jumlah	5.831.110.030,00	5.725.372.800,00	98,19	5.069.350.850,00

- 3) Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Besaran Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada **Tabel 5.77**.

Tabel 5.77 Dana Hibah BOS

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	SMP Negeri 1 Sabu Barat	492.800.000,00	427.949.667,00	86,84	521.472.000,00
2	SMP Negeri 2 Sabu Barat	582.400.000,00	582.400.000,00	100,00	609.280.000,00
3	SMP Negeri 3 Sabu Barat	168.960.000,00	168.664.917,00	99,83	211.072.000,00
4	SMP Negeri 4 Sabu Barat	209.920.000,00	209.459.009,00	99,78	228.736.000,00
5	SMP Negeri 5 Menia	327.680.000,00	324.710.000,00	99,09	329.472.000,00
6	SMP Negeri 6 Sabu Barat	286.720.000,00	279.884.000,00	97,62	290.304.000,00
7	SMP Negeri 7 Sabu Barat	305.920.000,00	305.920.000,00	100,00	297.856.000,00
8	SMP Negeri 8 Sabu Barat	357.120.000,00	357.120.000,00	100,00	325.760.000,00
9	SMP Satu Atap Teriwu	189.440.000,00	128.587.891,00	67,88	250.048.000,00
10	SMP Negeri 1 Sabu Timur	307.200.000,00	307.200.000,00	100,00	356.480.000,00
11	SMP Satu Atap Kujiratu	263.680.000,00	263.680.000,00	100,00	292.352.000,00
12	SMP Negeri 2 Sabu Timur	172.800.000,00	172.800.000,00	100,00	162.614.000,00
13	SMP Negeri 1 Sabu Tengah	627.200.000,00	618.132.500,00	98,55	625.408.000,00
14	SMP Negeri 2 Sabu Tengah	138.240.000,00	138.240.000,00	100,00	142.720.000,00
15	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	232.960.000,00	232.959.803,00	100,00	234.752.000,00
16	SMP Negeri 1 Hawu Mehara	572.160.000,00	572.160.000,00	100,00	609.792.000,00
17	SMP Negeri 2 Hawu Mehara	272.640.000,00	260.665.000,00	95,61	275.328.000,00
18	SMP Negeri 3 Hawu Mehara	619.520.000,00	603.901.000,00	97,48	637.110.000,00
19	SMP Satu Atap Lederaga	454.400.000,00	454.265.500,00	99,97	453.504.000,00
20	SMP Negeri 1 Sabu Liae	463.360.000,00	444.466.911,00	95,92	466.048.000,00
21	SMP Negeri 2 Liae	323.840.000,00	323.840.000,00	100,00	313.088.000,00
22	SMP Satu Atap Eirobo	232.960.000,00	232.334.500,00	99,73	239.232.000,00
23	SMP Negeri 1 Rajjua	403.200.000,00	403.064.973,00	99,97	404.992.000,00
24	SMP Negeri 2 Rajjua	410.880.000,00	410.880.000,00	100,00	399.232.000,00
25	SD Negeri 1 Seba	396.900.000,00	396.900.000,00	100,00	387.540.000,00
26	SD Negeri 2 Seba	185.850.000,00	185.849.516,00	100,00	182.910.000,00
27	SD Negeri 3 Seba	407.400.000,00	400.470.000,00	98,30	391.230.000,00
28	SD Negeri Mapipa	117.600.000,00	116.689.600,00	99,23	125.685.000,00
29	SD Negeri Leomadamu	165.900.000,00	165.900.000,00	100,00	158.550.000,00
30	SD Negeri Leoge	212.100.000,00	212.100.000,00	100,00	206.955.000,00
31	SD Negeri 4 Seba	156.450.000,00	156.366.684,00	99,95	163.800.000,00
32	SD Inpres Delo	128.100.000,00	128.100.000,00	100,00	181.330.000,00
33	SD Negeri Maballa	190.050.000,00	133.035.000,00	70,00	181.230.000,00
34	SD Negeri Luipau	119.700.000,00	119.700.000,00	100,00	108.405.000,00
35	SD Negeri Titinalede	189.000.000,00	183.355.369,00	97,01	190.470.000,00
36	SD Negeri Raemude	103.950.000,00	72.765.000,00	70,00	107.820.000,00
37	SD Negeri Teriwu	193.200.000,00	193.200.000,00	100,00	246.430.000,00
38	SD Inpres Ledean	156.450.000,00	156.450.000,00	100,00	154.980.000,00
39	SD Negeri Raenalulu	145.950.000,00	143.654.800,00	98,43	148.155.000,00
40	SD Negeri 5 Sabu Barat	174.300.000,00	172.793.100,00	99,14	173.565.000,00
41	SD Negeri Ledekpak	147.000.000,00	144.666.576,00	98,41	152.880.000,00
42	SD Negeri Kejoboloko	150.150.000,00	150.150.000,00	100,00	147.210.000,00
43	SD Inpres Kudjiratu	162.750.000,00	162.750.000,00	100,00	158.340.000,00
44	SD Negeri Huwaga	73.500.000,00	72.150.000,00	98,16	74.235.000,00
45	SD Negeri Keliha	143.850.000,00	143.838.709,00	99,99	179.440.000,00
46	SD Negeri Eilode	186.900.000,00	186.900.000,00	100,00	192.045.000,00
47	SD Negeri Padadue	153.300.000,00	139.454.000,00	90,97	162.855.000,00
48	SD Negeri Jiwuwu	178.500.000,00	178.154.950,00	99,81	182.910.000,00
49	SD Negeri Matei	126.000.000,00	88.200.000,00	70,00	137.760.000,00
50	SD Inpres Eimau	239.400.000,00	239.400.000,00	100,00	251.355.000,00
51	SD Negeri Loboaju	105.000.000,00	78.750.000,00	75,00	105.000.000,00
52	SD Negeri Tada	98.700.000,00	69.090.000,00	70,00	142.375.000,00
53	SD Inpres Daieko	202.650.000,00	202.650.000,00	100,00	198.240.000,00
54	SD Negeri Lohohede	222.600.000,00	222.600.000,00	100,00	232.155.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
55	SD Negeri Lederaga	242.550.000,00	242.250.000,00	99,88	250.635.000,00
56	SD Inpres Tanajawa	164.850.000,00	156.579.350,00	94,98	163.380.000,00
57	SD Inpres Molie	179.550.000,00	179.550.000,00	100,00	170.730.000,00
58	SD Inpres Pedaro	204.750.000,00	204.750.000,00	100,00	210.630.000,00
59	SD Negeri Lobolauw	147.000.000,00	139.569.600,00	94,95	164.640.000,00
60	SD Negeri Gelenalalu	164.850.000,00	164.850.000,00	100,00	169.995.000,00
61	SD Negeri Gurimonearu	184.800.000,00	184.800.000,00	100,00	180.390.000,00
62	SD Negeri Ledee	108.150.000,00	106.034.300,00	98,04	108.150.000,00
63	SD Inpres Daiae	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	63.000.000,00
64	SD Negeri Deme	181.650.000,00	181.650.000,00	100,00	192.675.000,00
65	SD Inpres Ledeke	124.950.000,00	119.490.000,00	95,63	126.420.000,00
66	SD Inpres Eirobo	119.700.000,00	119.340.750,00	99,70	127.785.000,00
67	SD Inpres Ledemera	156.450.000,00	149.874.400,00	95,80	200.860.000,00
68	SD Negeri Dainao	85.050.000,00	85.050.000,00	100,00	90.195.000,00
69	SD Negeri Ledeke 1	157.500.000,00	109.710.000,00	69,66	164.850.000,00
70	SD Negeri Lokoju	181.650.000,00	181.650.000,00	100,00	176.505.000,00
71	SD Negeri Bolua	178.500.000,00	178.500.000,00	100,00	167.940.000,00
72	SD Negeri Boko	106.050.000,00	106.050.000,00	100,00	110.460.000,00
73	SD Negeri Ledeke 2	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	214.410.000,00
TOTAL		16.610.200.000,00	16.122.067.375,00	97,06	17.156.157.000,00

5.4.2 Beban

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, beban adalah hak pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Beban Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp469.781.682.273,35 mengalami penurunan sebesar Rp9.812.466.681,56 atau 2,05% dibandingkan beban tahun 2021 sebesar Rp479.594.148.954,91 dengan rincian realisasi beban daerah sebagai berikut:

Tabel 5.78 Beban Daerah

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Pegawai - LO	176.439.336.839,00	172.084.965.386,00	4.354.371.453,00	2,53
Beban Persediaan	40.709.792.628,02	60.416.802.990,40	(19.707.010.362,38)	(32,62)
Beban Jasa	75.304.579.605,66	77.261.118.156,00	(1.956.538.550,34)	(2,53)
Beban Pemeliharaan	7.383.335.679,00	6.119.668.279,00	1.263.667.400,00	20,65
Beban Perjalanan Dinas	32.014.832.051,00	29.131.833.434,00	2.882.998.617,00	9,90
Beban Subsidi	47.400.000,00	0,00	47.400.000,00	100,00
Beban Hibah	7.749.769.386,00	14.866.179.943,00	(7.116.410.557,00)	(47,87)
Beban Bantuan Sosial	3.008.502.000,00	2.224.846.804,00	783.655.196,00	35,22
Beban Penyisihan Piutang	240.809.912,43	0,00	240.809.912,43	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	92.638.840.821,36	82.056.305.462,51	10.582.535.358,85	12,90
Beban Transfer	35.300.401.664,00	35.432.428.500,00	(132.026.836,00)	(0,37)
TOTAL	470.837.600.586,47	479.594.148.954,91	(8.756.548.368,44)	(1,83)

Rincian Beban Daerah per SKPD dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5.79 Beban Daerah per SKPD

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	128.533.196.405,60	129.069.073.566,00	(535.877.160,40)	(0,42)
Rumah Sakit Umum Daerah	23.213.384.610,74	17.900.566.050,00	5.312.818.560,74	29,68
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61.477.857.223,98	75.816.461.487,00	(14.338.604.263,02)	(18,91)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.958.498.876,02	55.861.280.553,00	6.097.218.323,02	10,91
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.238.175.264,00	4.445.635.391,00	792.539.873,00	17,83
Satuan Polisi Pamong Praja	4.722.508.315,00	4.502.713.288,00	219.795.027,00	4,88
Badan Penanggulangan Bencana	3.791.697.486,70	4.063.137.758,00	(271.440.271,30)	(6,68)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.361.097.316,00	5.189.628.778,00	171.468.538,00	3,30
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	4.676.415.521,00	4.066.749.361,00	609.666.160,00	14,99
Dinas Pertanian dan Pangan	10.066.360.266,00	11.506.392.844,00	(1.440.032.578,00)	(12,52)
Dinas Lingkungan Hidup	2.164.389.536,00	2.238.935.291,00	(74.545.755,00)	(3,33)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.045.769.075,00	3.353.285.384,00	(307.516.309,00)	(9,17)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.299.189.539,00	3.468.144.470,00	(168.954.931,00)	(4,87)
Dinas Perhubungan	5.037.836.770,00	7.644.112.776,00	(2.606.276.006,00)	(34,10)
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.275.219.475,00	3.852.444.854,00	422.774.621,00	10,97
Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindag	14.490.661.825,00	12.906.751.840,40	1.583.909.984,60	12,27
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.893.701.915,00	1.673.257.142,00	220.444.773,00	13,17
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.910.686.412,00	4.758.015.151,00	152.671.261,00	3,21
Dinas Pariwisata	3.375.335.376,00	2.171.294.254,00	1.204.041.122,00	55,45
Bagian Pemerintahan	1.248.988.740,00	1.447.406.677,00	(198.417.937,00)	(13,71)
Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.649.941.885,00	2.065.173.384,00	584.768.501,00	28,32
Bagian Hukum	564.055.568,00	389.879.350,00	174.176.218,00	44,67
Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam	673.882.564,00	666.501.076,00	7.381.488,00	1,11
Bagian Administrasi Pembangunan	1.127.290.792,00	1.061.762.013,00	65.528.779,00	6,17
Bagian Umum	19.848.197.367,00	18.050.548.453,00	1.797.648.914,00	9,96
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	714.552.347,00	721.024.495,00	(6.472.148,00)	(0,90)
Bagian Organisasi	538.344.550,00	644.590.556,00	(106.246.006,00)	(16,48)
Inspektorat Daerah	2.659.299.133,00	2.639.407.976,00	19.891.157,00	0,75
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.282.524.245,00	4.037.597.274,51	244.926.970,49	6,07
Badan Keuangan Daerah	42.024.393.350,43	53.368.978.920,00	(11.344.585.569,57)	(21,26)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	5.353.552.811,00	5.667.171.676,00	(313.618.865,00)	(5,53)
Sekretariat DPRD	21.695.447.051,00	18.782.483.980,00	2.912.963.071,00	15,51
Kecamatan Sabu Barat	2.587.081.567,00	2.606.736.654,00	(19.655.087,00)	(0,75)
Kecamatan Sabu Timur	3.485.142.734,00	3.408.602.245,00	76.540.489,00	2,25
Kecamatan Sabu Liae	1.396.439.128,00	1.447.610.229,00	(51.171.101,00)	(3,53)
Kecamatan Hawu Mehara	1.795.563.795,00	1.826.010.045,00	(30.446.250,00)	(1,67)
Kecamatan Rajjua	3.154.235.970,00	2.841.717.823,00	312.518.147,00	11,00

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Kecamatan Sabu Tengah	1.663.287.817,00	1.613.698.495,00	49.589.322,00	3,07
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.843.397.964,00	1.819.367.395,00	24.030.569,00	1,32
TOTAL	470.837.600.586,47	479.594.148.954,91	(8.756.548.368,44)	(1,83)

5.4.2.1 Beban Pegawai

31 Desember 2022
Rp176.439.336.839,00

31 Desember 2021
Rp172.084.965.386,00

Beban pegawai untuk tahun 2022 sebesar Rp176.439.336.839,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.354.371.453,00 atau 2,53% dibanding dengan tahun 2021 sebesar Rp172.084.965.386,00. Beban pegawai dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.80 Beban Pegawai - LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	111.095.565.936,00	107.432.081.170,00	3.663.484.766,00	3,41
Beban Tambahan Penghasilan ASN	49.627.163.543,00	49.271.083.233,00	356.080.310,00	0,72
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.677.823.750,00	4.896.757.600,00	(218.933.850,00)	(4,47)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	6.948.246.878,00	6.744.230.628,00	204.016.250,00	3,03
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.347.232,00	50.448.775,00	121.898.457,00	241,63
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	304.377.980,00	106.502.020,00	34,99
Beban Pegawai BOS	3.507.309.500,00	3.385.986.000,00	121.323.500,00	3,58
TOTAL	176.439.336.839	172.084.965.386,00	4.354.371.453,00	2,53

Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Pegawai - LO	176.439.336.839,00
Belanja Pegawai - LRA	172.071.722.075,00
Selisih	4.367.614.764,00
Penambahan	
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja	103.561.939,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Dinas Perhubungan	19.612.500,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Inspektorat Daerah	1.540.000,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	182.281.000,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.119.806.872,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	120.750.000,00
Total Penambahan	4.547.552.311,00
Pengurangan	

- Pelunasan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.371.828,00	
- Pelunasan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Kecamatan Rajjua	88.963.319,00	
- Pelunasan Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	43.602.400,00	
Total Pengurangan	<u>179.937.547,00</u>	
Total Mutasi		4.367.614.764,00

5.4.2.2 Beban Persediaan

31 Desember 2022
Rp40.709.792.628,02

31 Desember 2021
Rp60.416.802.990,40

Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp 40.709.792.628,02 berkurang sebesar Rp19.707.010.362,38 atau 32,62% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp60.416.802.990,40. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.81 Beban Persediaan

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.132.711.275,00	3.443.259.247,00	(2.310.547.972,00)	(67,10)
Beban Bahan-Bahan Kimia	135.479.788,00	191.910.790,00	(56.431.002,00)	(29,40)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	728.631.725,00	518.414.550,00	210.217.175,00	40,55
Beban Bahan-Barang dalam Proses	0,00	173.570.000,00	(173.570.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	452.429.300,00	688.585.000,00	(236.155.700,00)	(34,30)
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	151.515.000,00	97.635.900,00	53.879.100,00	55,18
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	118.718.000,00	136.609.535,00	(17.891.535,00)	(13,10)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.113.495.567,20	4.896.160.049,00	(1.782.664.481,80)	(36,41)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	77.378.652,00	541.896.737,00	(464.518.085,00)	(85,72)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.924.467.487,00	2.596.372.275,00	(671.904.788,00)	(25,88)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	229.995.250,00	219.051.000,00	10.944.250,00	5,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.411.335.600,00	1.244.200.128,00	167.135.472,00	13,43
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.318.000,00	125.834.650,00	(124.516.650,00)	(98,95)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	346.953.900,00	239.082.950,00	107.870.950,00	45,12
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	5.400.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	237,50

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	56.802.000,00	210.485.000,00	(153.683.000,00)	(73,01)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	890.319.630,00	592.762.150,00	297.557.480,00	50,20
Beban Obat-Obatan-Obat	1.004.534.235,82	8.584.623.860,00	(7.580.089.624,18)	(88,30)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.237.269.840,00	1.824.257.048,00	413.012.792,00	22,64
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.003.104.751,00	10.357.889.439,40	(4.354.784.688,40)	(42,04)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	270.485.968,00	3.803.495.284,00	(3.533.009.316,00)	(92,89)
Beban Natura dan Pakan-Natura	0,00	6.720.000,00	(6.720.000,00)	(100,00)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	14.960.802,00	-24.650.000,00	39.610.802,00	(160,69)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.251.204.700,00	3.914.398.500,00	336.806.200,00	8,60
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.477.010.719,00	1.320.531.800,00	1.156.478.919,00	87,58
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	146.231.500,00	529.673.800,00	(383.442.300,00)	(72,39)
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	997.220.458,00	1.442.054.600,00	(444.834.142,00)	(30,85)
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	193.076.000,00	469.521.000,00	(276.445.000,00)	(58,88)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	365.027.644,00	90.960.000,00	274.067.644,00	301,31
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	29.250.000,00	158.000.000,00	(128.750.000,00)	(81,49)
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	103.873.800,00	111.430.000,00	(7.556.200,00)	(6,78)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	6.304.600,00	22.000.000,00	(15.695.400,00)	(71,34)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	790.994.670,00	750.530.000,00	40.464.670,00	5,39
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	214.355.500,00	361.586.982,00	(147.231.482,00)	(40,72)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	5.900.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.250.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	50,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	15.100.000,00	(15.100.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	243.460.000,00	0,00	243.460.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	209.105.000,00	62.747.700,00	146.357.300,00	233,25
Beban Pakaian Paskibraka	195.277.000,00	61.500.000,00	133.777.000,00	217,52
Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	8.688.000,00	(8.688.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa dari BOS	10.152.869.266,00	10.617.815.016,00	(464.945.750,00)	(4,37)
Jumlah	40.709.792.628,02	60.416.802.990,40	(19.707.010.362,38)	(32,62)

Selisih Beban Persediaan dan Belanja Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Persediaan - LO	40.709.792.628,00	
Belanja Persediaan - LRA	41.645.624.279,00	
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	15.760.963.225,00	
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	<u>13.864.792.697,00</u>	
Selisih		960.338.877,00

Penjelasan Selisih

Belanja modal yang tidak dikapitalisasi (eksrakom 2022)	19.970.000,00	
Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	15.965.550,00	
Persediaan dari belanja pemeliharaan (Suku Cadang dan BBM)	31.957.500,00	
Belanja modal yang di bagikan	698.224.800,00	
Persediaan yang berasal dari utang	49.962.000,00	
Hibah barang persediaan pada Dinas Kesehatan	557.040.659,00	
Pelunasan utang Beban Barang	(231.881.632,00)	
Belanja Habis Pakai yang dikapitalisasi ke ATB/Aset Tetap	(180.900.000,00)	
Total		960.338.877,00

5.4.2.3 Beban Jasa

31 Desember 2022
Rp75.304.579.605,66

31 Desember 2021
Rp77.261.118.156,00

Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp75.304.579.605,66 penurunan sebesar Rp1.956.538.550,34 atau 2,53% dibandingkan beban jasa tahun 2021 sebesar Rp77.261.118.156,00. Beban jasa yang dimaksud dapat dilihat pada berikut.

Tabel 5.82 Beban Jasa

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Jasa Kantor	60.895.769.138,69	60.195.221.496,00	700.547.642,69	1,16
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.973.857.450,00	9.435.086.300,00	(3.461.228.850,00)	(36,68)
Beban Sewa Tanah	2.600.000,00	659.761.864,00	(657.161.864,00)	(99,61)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	767.500.000,00	1.145.190.535,00	(377.690.535,00)	(32,98)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	943.000.000,00	690.057.100,00	252.942.900,00	36,66
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0	84.379.666,00	(84.379.666,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	573.362.185,96	873.391.000,00	(300.028.814,04)	(34,35)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	419.747.500,00	537.020.000,00	(117.272.500,00)	(21,84)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	530.942.138,00	154.712.138,00	376.230.000,00	243,18
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	265.108.623,00	149.081.107,00	116.027.516,00	77,83
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.204.378.000,00	1.706.028.500,00	(501.650.500,00)	(29,40)
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.101.808.650,00	1.487.113.450,00	1.614.695.200,00	108,58
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	597.505.920,00	115.075.000,00	482.430.920,00	419,23
TOTAL	75.304.579.605,65	77.261.118.156,00	(1.956.538.550,35)	(2,53)

Selisih Beban Jasa dan Belanja Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Jasa		75.454.044.765,70
Beban Jasa		75.304.579.605,66
Selisih		<u>149.465.160,04</u>
Penjelasan Selisih		
Mencatat piutang lancar atas temuan kelebihan pembayaran honorarium TA 2022	(204.295.000,00)	
Kapitalisasi ke Aset Tetap JIJ (Meteran)	(16.372.500,00)	
Kapitalisasi perencanaan gedung bangunan	(773.992.500,00)	
Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Renov/Bangun Baru Gedung RANAP PKM Seba pd DINKESPPKB TA 2022	(62.001.060,00)	
Kapitalisasi Review Dokumen RISPAM (ATB)	(197.600.000,00)	
Kapitalisasi Belanja Jasa ke ATB, dan KDP JIJ	(448.252.300,00)	
Kapitalisasi perencanaan DED jalan paket 1	(450.000.000,00)	
Kapitalisasi Belanja Perencanaan Jalan Lingkungan TA 2022	(34.887.300,00)	
Kapitalisasi Perencanaan dan Pengawasan ke Gedung Bangunan dan JIJ	(589.277.700,00)	
Pelunasan Utang Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Utama Pengadaan Patung Tuhan Yesus (multiyears) di Eikepaka TA 2022	(185.896.000,00)	
Hutang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDG Menangado	5.398.968,96	
Pelunasan Hutang Belanja Modal	(96.540.700,00)	
Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(168.422.089,00)	
Kapitalisasi belanja pengawasan JIJ	(241.880.000,00)	
Pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	(630.400.000,00)	
belanja jasa yang dikapitalasi di KDP	(99.295.050,00)	
belanja modal jalan dan jembatan yang tidak kapitalisasi	344.933.500,00	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang diatribusi ke Beban Jasa	3.699.314.570,00	
Total		<u>(149.465.160,04)</u>

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2022
Rp7.383.335.679,00

31 Desember 2021
Rp6.119.668.279,00

Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp6.119.668.279,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.263.667.400,00 atau 20,65% dibanding tahun 2021 yang mencapai Rp6.119.668.279,00. Beban pemeliharaan dimaksud terdiri atas :

Tabel 5.83 Beban Pemeliharaan – LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.243.644.399,00	5.033.617.453,00	210.026.946,00	4,17
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.139.691.280,00	1.086.050.826,00	1.053.640.454,00	97,02
TOTAL	7.383.335.679,00	6.119.668.279,00	1.263.667.400,00	20,65

Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	7.383.335.679,00
Belanja Pemeliharaan	7.880.333.987,00
Selisih	496.998.308,00

Penjelasan Selisih

Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap PM (Pompa)	285.000.000,00	
Persediaan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan (Suku Cadang dan BBM)	31.957.500,00	
Koreksi atas pengembalian belanja pemeliharaan TA 2022 sesuai LHP Nomor 700/08/INSPEK-SR/LHP.K/II/2023 tanggal 27 Februari 2023	180.040.808,00	
Total		496.998.308,00

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2022
Rp32.014.832.051,00

31 Desember 2021
Rp29.131.833.434,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp32.014.832.051,00 bertambah sebesar Rp2.882.998.617,00 atau 9,90% dibanding dengan beban perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp29.131.833.434,00. Beban perjalanan dinas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.84 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
	(Rp)	(Rp)		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.011.029.051,00	13.484.957.434,00	3.526.071.617,00	26,14
Beban Perjalanan Dinas Tetap	52.020.000,00	40.460.000,00	11.560.000,00	28,57
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.983.917.000,00	11.495.496.000,00	2.488.421.000,00	21,64
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	936.700.000,00	4.038.500.000,00	(3.101.800.000,00)	(76,80)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.166.000,00	72.420.000,00	(41.254.000,00)	(56,96)
TOTAL	32.014.832.051,00	29.131.833.434,00	2.882.998.617,00	9,89

Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas		32.014.832.051,00
Belanja Perjalanan Dinas		32.457.059.364,00
Selisih		<u>442.227.313,00</u>
Penjelasan Selisih		
Piutang TPTGR atas temuan perjalanan dinas	<u>442.227.313,00</u>	
Total		442.227.313,00

5.4.2.6 Beban Subsidi	<u>31 Desember 2022</u> Rp47.400.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp0,00
------------------------------	---	--

Beban subsidi tahun 2022 sebesar Rp47.400.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp0,00. Beban subsidi tahun 2022 merupakan pembayaran Bantuan Sosial Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bagi Pelaku Usaha Bidang Transportasi Angkutan Laut di Kab. Sabu Raijua TA. 2022 Sesuai SK Nomor: 368/KEP/HK/2022 Tanggal 9 November 2022 Pada Dinas Perhubungan.

5.4.2.7 Beban Hibah	<u>31 Desember 2022</u> Rp7.749.769.386,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp14.866.179.943,00
----------------------------	--	---

Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp7.749.769.386,00 berkurang sebesar Rp7.116.410.557,00 atau 47,87% dibanding tahun 2021 sebesar Rp14.866.179.943,00. Rincian beban hibah tersebut dapat dilihat pada berikut.

Tabel 5.85 Beban Hibah

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	(Rp)	(Rp)		
Badan Usaha Milik Desa	0,00	2.591.500.000,00	(2.591.500.000,00)	(100,00)
BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.560.742.000,00	2.212.800.000,00	347.942.000,00	15,72
BOP Pendidikan Kesetaraan	128.400.000,00	370.000.000,00	(241.600.000,00)	(65,30)
Dharma Wanita Persatuan (DWP)	223.163.400,00	351.574.100,00	(128.410.700,00)	(36,52)
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	336.741.180,00	321.199.900,00	15.541.280,00	4,84
Komite Olahraga Nasional Indonesia	680.000.000,00	500.000.000,00	180.000.000,00	36,00
Kwarcab Gerakan Pramuka	391.948.840,00	407.842.350,00	(15.893.510,00)	(3,90)
Palang Merah Indonesia (PMI)	1.022.808.995,00	920.327.812,00	102.481.183,00	11,14
Partai Politik	483.310.000,00	483.310.000,00	0,00	0,00
Dewan Kerajinan Nasional Daerah	466.172.000,00	0,00	466.172.000,00	0,00
Perpustakaan Desa	64.900.000,00	0,00	64.900.000,00	0,00
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	655.085.843,00	0,00	655.085.843,00	0,00
Panitia Pembangunan Gedung Serba Guna Sinode GMIT XXXV Tahun 2023	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K)	219.055.000,00	0,00	219.055.000,00	0,00
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	169.100.000,00	0,00	169.100.000,00	0,00
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD)	187.641.028,00	0,00	187.641.028,00	0,00

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Hibah untuk PSU Sabu Raijua	0,00	6.659.276.981,00	(6.659.276.981,00)	(100,00)
Kelompok Masyarakat/Pihak Lainnya	0,00	48.348.800,00	(48.348.800,00)	(100,00)
Beban Hibah Kepada Kantor Kementerian Agama	7.587.500,00	0,00	7.587.500,00	0,00
Beban Hibah Kepada PMI	3.113.600,00	0,00	3.113.600,00	0,00
Jumlah	7.749.769.386,00	14.866.179.943,00	(7.116.410.557,00)	(47,87)

Pada tahun 2022, terdapat perbedaan Belanja Hibah dan Beban Hibah, yang disebabkan oleh sebagai berikut:

- Hibah keluar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanah sebesar Rp3.113.600,00 sesuai SK Pengelola Barang Nomor 05/KEP/BAKEUDA-SR/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 kepada Palang Merah Indonesia (PMI).
- Hibah keluar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanah sebesar Rp7.587.500,00 sesuai SK Nomor 257/KEP/BAKEUDA-SR/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 kepada Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua.

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022
Rp3.008.502.000,00 31 Desember 2021
Rp2.224.846.804,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp3.008.502.000,00 berkurang sebesar Rp783.655.196,00 atau 35,52% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.224.846.804,00. Beban bantuan sosial tahun 2022 terdiri atas :

1. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.392.900.000,00
2. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp210.000.000,00
3. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp674.100.000,00
4. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp703.502.000,00
5. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp28.000.000,00

Beban Bantuan Sosial	3.008.502.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.855.102.000,00
Selisih	<u>153.400.000,00</u>
Penjelasan Selisih	
Atribusi Belanja Tidak Terduga berupa Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	153.400.000,00
Total	<u>153.400.000,00</u>

5.4.2.12 Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2022 Rp240.809.912,43	31 Desember 2021 Rp0,00
--	--	--

Beban Penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp240.809.912,43 bertambah sebesar Rp240.809.912,43 atau 100,00% dibanding tahun 2021 sebesar Rp0,00 rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.86 Penyisihan Piutang – LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	235.505.590,00	0	235.505.590,00	100
Penyisihan Piutang Retribusi	5.303.125,00	0	5.303.125,00	100
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.197,43		1.197,43	100
TOTAL	240.809.912,43	0,00	240.809.912,43	100

5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2022 Rp92.638.840.821,36	31 Desember 2021 Rp82.056.305.462,51
--	---	---

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp92.638.840.821,36 bertambah sebesar Rp10.582.535.358,85 atau 12,90% dibanding tahun 2021 sebesar Rp82.056.305.462,51. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.87 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.359.316.694,00	28.165.213.542,51	2.194.103.151,48	7,79
Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.412.492.852,64	7.123.517.099,00	2.288.975.753,63	32,13
Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	51.836.765.172,02	46.016.161.708,00	5.820.603.464,01	12,64
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.030.266.102,70	751.413.113,00	278.852.989,70	37,11
TOTAL	92.638.840.821,36	82.056.305.462,51	10.582.535.358,85	12,90

5.3.2.13 Beban Transfer	31 Desember 2022 Rp35.300.401.664,00	31 Desember 2021 Rp35.432.428.500,00
--------------------------------	---	---

Beban bantuan keuangan untuk tahun 2022 sebesar Rp35.300.401.664,00 berkurang sebesar Rp132.026.836,00 atau 0,37% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp35.432.428.500,00. Beban transfer dimaksud dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.88 Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	790.395.664,00	0,00	790.395.664,00	100,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	34.510.006.000,00	35.432.428.500,00	(922.422.500,00)	(2,60)
Jumlah	35.300.401.664,00	35.432.428.500,00	(132.026.836,00)	(0,37)

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2022 Rp48.024.979.952,97	31 Desember 2021 Rp38.687.279.665,44
---	---	---

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2022 sebesar Rp48.024.979.952,97 mengalami peningkatan sebesar Rp9.337.700.287,53 atau 24,14% dibanding tahun 2021 sebesar Rp38.687.279.665,44. Rincian surplus/defisit dari operasi tersebut dapat kami sajikan secara komparatif sebagai berikut:

Tabel 5.89 Surplus/Defisit LO dari Operasi

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan	51.862.580.539,44	518.281.428.620,35	(761.622.098,92)	(0,15)
Beban	(470.837.600.586,47)	(479.594.148.954,91)	(9.812.466.681,56)	(2,05)
Surplus/Defisit	48.024.979.952,	38.687.279.665,44	9.050.844.582,64	23,39

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

5.3.4.1 Defisit Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2022 Rp728.930.539,31	31 Desember 2021 Rp5.597.472.573,17
---	--	--

Kegiatan non operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencatat defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp728.930.539,31 bertambah sebesar Rp5.588.774.604,48 atau 99,84% dibanding defisit kegiatan non operasional tahun 2021 sebesar (Rp5.597.472.573,17).

Surplus kegiatan non operasional TA 2022 terdiri dari hasil penjualan aset sebesar Rp737.628.508,00 dan rugi bersih PD Raihawa tahun 2022 sebesar Rp8.697.968,69.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Desember 2022 Rp48.753.910.492,28	31 Desember 2021 Rp33.089.807.092,27
---	---	---

Surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp48.753.910.492,28 adalah selisih lebih antara surplus dari operasional sebesar Rp48.024.979.952,97 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp728.930.539,31. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencatat surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp33.089.807.092,27.

5.4.6 Pos Luar Biasa	31 Desember 2022 Rp62.751.500,00	31 Desember 2021 Rp0,00
-----------------------------	---	--

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pada tahun 2022 terdapat beban luar biasa yang merupakan beban tidak terduga yang berasal pengembalian sisa dana BOS tahun 2011 ke rekening Kas Negara sebesar Rp62.751.500,00 berdasarkan Hasil Rekonsiliasi antara BPKP Pusat dan/atau BPKP Perwakilan Provinsi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan pada bulan Februari sampai Maret 2022 sebagai Pelaksanaan atau yang merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 119 Tahun 2021 Pasal 34 Ayat 1), maka sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2011 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan sebesar Rp62.751.500,00. Untuk pengembalian diterbitkan bukti tagihan penerimaan Negara bukan pajak nomor 820220624842874 tanggal 24 Juni 2022.

5.4.7 Surplus/Defisit - LO	<u>31 Desember 2022</u> Rp 48.691.158.992,28	<u>31 Desember 2021</u> Rp33.089.807.092,27
-----------------------------------	---	--

Surplus/defisit- LO adalah selisih antara pendapatan-LO sebesar Rp518.862.580.539,44 dan beban selama satu periode pelaporan Rp470.837.600.586,47, diperhitungkan dengan surplus dari kegiatan non operasional Rp728.930.539,31 dan defisit pos luar biasa sebesar Rp62.751.500,00. Surplus-LO tahun 2022 sebesar Rp48.691.158.992,28 bertambah sebesar Rp15.601.351.900,01 atau 47,15% dibanding tahun 2021 Rp33.089.807.092,27.

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu tahun anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan aliran uang masuk dan keluar melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyajikan semua aliran uang masuk dan keluar RKUD dan Non RKUD dalam Laporan Arus Kas. Aliran uang masuk dan keluar Non RKUD dianggarkan dalam APBD, penerimaan dan pengeluarannya disahkan oleh Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah mengakui sebagai pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyajikannya juga dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aktivitas Operasi	Rp567.691.346.910,68	Rp583.834.842.657,35

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan dari kegiatan operasional yang masuk ke Kas Umum Daerah atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp567.691.346.910,68, berkurang sebesar Rp16.143.495.746,67 atau 2,77% dibanding tahun 2021 sebesar Rp583.834.842.657,35.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	567.691.346.910,68	583.834.842.657,35
Penerimaan Pajak Daerah	5.661.974.798,04	4.543.581.620,00
Penerimaan Retribusi Daerah	18.160.726.740,00	5.189.605.100,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.329.492.032,00	3.471.789.164,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	4.087.120.505,64	15.134.269.561,35
Penerimaan Dana Bagi Hasil	9.647.358.866,00	11.333.430.516,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	336.260.812.302,00	336.885.937.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	67.791.045.075,00	67.400.137.692,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	26.384.205.711,00	25.654.671.564,00
Penerimaan Dana Desa	60.882.277.028,00	84.560.860.770,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	13.606.500.228,00	11.029.275.670,00
Penerimaan Hibah	885.825.500,00	1.475.127.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	21.994.008.125,00	17.156.157.000,00

Penerimaan daerah Non RKUD tahun 2022 sebesar RpRp85.418.859.203,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dana BOS reguler SD sebesar Rp8.223.285.671,00;
2. Pendapatan dana BOS reguler SMP sebesar Rp7.898.781.704,00;
3. Pendapatan dana kapitasi JKN sebesar Rp5.725.372.800,00;
4. Dana desa sebesar Rp60.882.277.028,00;
5. Dana BOP PAUD sebesar Rp2.560.742.000,00; dan
6. Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp128.400.000,00.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aktivitas Operasi	Rp440.133.331.850,70	Rp484.290.259.584,00

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan jumlah arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh operasional Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp440.133.331.850,70 berkurang sebesar Rp44.156.927.733,30 atau 9,12% jika dibanding arus kas keluar tahun 2021 sebesar Rp484.290.259.584,00.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, belanja tak terduga, bagi hasil pajak ke

kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<i>Arus Keluar Kas</i>	440.133.331.850,70	484.290.259.584,00
Pembayaran Pegawai	172.071.722.075,00	171.945.977.759,00
Pembayaran Barang dan Jasa	161.021.209.297,70	168.356.423.250,00
Pembayaran Subsidi	47.400.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	7.739.068.286,00	8.158.554.162,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.855.102.000,00	2.224.846.804,00
Pembayaran Tak Terduga	216.151.500,00	13.611.168.339,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	790.395.664,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	95.392.283.028,00	119.993.289.270,00

Belanja operasi Non RKUD tahun 2022 sebesar Rp18.702.826.469,00 yang terdiri dari atas:

1. Realisasi Belanja operasi dana BOS Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 sebesar Rp7.024.820.947,00;
2. Realisasi Belanja operasi dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 sebesar Rp6.543.602.071,00; dan
3. Realisasi Belanja operasi dana JKN pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 sebesar Rp5.134.403.451,00.

5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp127.558.015.059,98	Rp99.544.583.073,35

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp127.558.015.059,98 berkurang sebesar Rp28.013.431.986,63 atau 28,14% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp99.544.583.073,35.

Arus kas bersih sebesar Rp127.558.015.059,98 dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk kas sebesar Rp567.691.346.910,68 dan arus kas keluar kas Rp440.133.331.850,70.

5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aktivitas Investasi	Rp10.640.988.280,69	Rp32.484.794.618,06

Arus kas masuk dari aktivitas investasi berupa pencairan dana cadangan dan penjualan aset lainnya. Arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp10.640.988.280,69 berkurang sebesar Rp21.843.806.337,37 atau 67,24% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp32.484.794.618,06 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.92 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<i>Arus Kas Masuk</i>	10.640.988.280,69	32.484.794.618,06
Pencairan Dana Cadangan	9.903.359.772,69	32.484.794.618,06
Penjualan Aset Lainnya	737.628.508,00	0,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aktivitas Investasi	Rp144.291.124.197,00	Rp169.017.085.602,64

Arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah kas keluar yang langsung dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Arus kas keluar dari aktivitas investasi dapat berupa pembentukan dana cadangan, perolehan tanah, perolehan peralatan dan mesin, perolehan gedung dan bangunan, perolehan jalan, irigasi dan jaringan, perolehan aset lainnya dan penyertaan modal pemerintah. Arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp144.291.124.197,00 berkurang sebesar Rp24.725.961.405,64 atau 14,63% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp169.017.085.602,64. Arus kas keluar aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.93 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<i>Arus Kas Keluar</i>	144.291.124.197,00	169.017.085.602,64
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	2.925.954.729,02
Perolehan Tanah	8.411.920,00	27.472.380,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	9.247.832.312,00	19.736.931.091,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	31.557.107.226,00	33.815.385.571,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	93.612.153.264,00	98.642.948.466,62
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.865.619.475,00	6.868.393.365,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00

Arus kas keluar investasi Non RKUD tahun 2022 sebesar Rp3.341.346.863,00 terdiri atas:

1. Belanja modal Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp1.382.989.981,00;
2. Belanja modal Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.481.141.394,00; dan
3. Belanja modal JKN sebesar Rp477.215.488,00.

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aktivitas Investasi	(Rp133.650.135.916,31)	(Rp136.532.290.984,58)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2022 berjumlah negatif sebesar Rp133.650.135.916,31 merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar

Rp10.640.988.280,69 dengan arus kas keluar sebesar Rp144.291.124.197,00. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2022 berkurang sebesar Rp2.882.155.068,27 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar (Rp136.532.290.984,58).

5.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian utang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan hutang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022 <hr/> Rp0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp0,00
--	--	--

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dari utang dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki arus kas masuk dari aktivitas pendanaan begitu juga pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki arus kas masuk dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022 <hr/> Rp0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp0,00
---	--	--

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan berasal dari pembayaran pokok utang dan pengeluaran kas untuk dipinjamkan. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki aliran kas keluar dari aktivitas pendanaan pada dua tahun terakhir ini.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022 <hr/> Rp0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp0,00
---	--	--

Tahun 2022 dan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki aktivitas pendanaan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar.

5.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan TASPEN dan BPJS Kesehatan. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

**5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari
Aktivitas Transitoris**

31 Desember 2022
Rp38.619.687.793,00

31 Desember 2021
Rp44.958.888.821,03

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris tahun 2022 sebesar Rp38.619.687.793,00 berkurang sebesar Rp6.339.201.028,03 atau 14,10% dari arus kas masuk tahun 2021 sebesar Rp44.958.888.821,03. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.94 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<i>Arus Kas Masuk</i>	38.619.687.793,00	44.958.888.821,03
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.619.687.793,00	40.913.609.948,39
Setoran Sisa UP TA 2021	0,00	63.949.018,00
Setoran Kas Bendahara Penerimaan 2021	0,00	171.909.000,00
Kas di Bendahara BOS Ta. 2021	0,00	3.214.251.244,64
Kas di Bendahara FKTP Ta. 2021	0,00	595.169.610,00

**5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari
Aktivitas Transitoris**

31 Desember 2022
Rp38.624.980.813,00

31 Desember 2021
Rp42.079.741.537,03

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris tahun 2022 sebesar Rp38.624.980.813,00 berkurang sebesar Rp3.454.760.724,03 atau 8,21% dari tahun 2021 sebesar Rp42.079.741.537,03. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.95 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<i>Arus Kas Keluar</i>	38.624.980.813,00	42.079.741.537,03
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.624.980.813,00	40.913.609.948,39
Kas di Bendahara BOS Ta. 2022	0,00	341.442.917,64
Kas di Bendahara FKTP Ta. 2022	0,00	824.688.671,00

**5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris**

31 Desember 2022
(Rp5.293.020,00)

31 Desember 2021
Rp2.879.147.284,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp38.619.687.793,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp38.624.980.813,00. Tahun 2022 arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp5.293.020,00 berkurang sebesar Rp2.884.440.304,00 atau 100,18% dibandingkan arus kas bersih transitoris tahun 2021 sebesar Rp2.879.147.284,00.

Pada tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan bersih kas sebesar Rp6.097.413.876,33.

Saldo awal kas di BUD tahun 2022 sebesar Rp61.228.690.644,59 penurunan bersih kas sebesar Rp6.097.413.876,33 sehingga saldo akhir kas BUD menjadi Rp55.131.276.768,26.

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 sebesar Rp55.131.276.768,26 terdiri atas:

- 1) Kas di BUD sebesar Rp24.094.452.314,02;
- 2) Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp30.955.899,64;
- 3) Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp935.942.532,30;
- 4) Kas Lainnya sebesar Rp69.926.022,30; dan
- 5) Setara Kas sebesar Rp30.000.000.000,00.

5.7 Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasi tahun 2022 dan tahun 2021. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.6.1 Ekuitas Awal	Rp1.400.188.642.729,28	Rp1.344.002.593.247,34

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp1.344.002.593.247,34, tahun 2022 bertambah sebesar Rp56.186.049.482 atau 4,18% menjadi Rp1.400.188.642.729,28.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)	Rp48.691.158.992,28	Rp33.089.807.092,27

Penambahan Ekuitas bersumber dari Surplus-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.089.807.092,27, per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp15.601.351.900,01 atau 47,15% menjadi Rp48.691.158.992,28. Surplus Laporan Operasional merupakan selisih lebih dari surplus dari operasional sebesar Rp48.024.979.952,97, surplus kegiatan non operasional sebesar Rp728.930.539,31 dan defisit dari pos luar biasa sebesar Rp62.751.500,00.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2021 sebesar Rp23.096.242.389,67, per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp103.659.353.471,15 atau 448,81% menjadi Rp80.563.111.081,48. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.96 Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
	(Rp)	(Rp)
Dampak Perubahan Piutang	(79.000.000,00)	0,00
Dampak Perubahan Penyisihan Piutang	47.528.000,00	0,00
Dampak Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
	(Rp)	(Rp)
Dampak Perubahan Aset Tetap	(3.326.631.072,00)	(2.024.516.960,00)
Dampak Perubahan Penyusutan dan Amortisasi	(78.015.803.358,08)	26.099.912.294,67
Dampak Perubahan Investasi Permanen	0,00	0,00
Dampak Perubahan Aset Lain-Lain	875.674.517,00	(979.152.945,00)
Dampak Perubahan Penyusutan Aset Lain-Lain	(199.906.383,40)	0,00
Dampak Perubahan Hutang	135.027.215,00	0,00
TOTAL	(80.563.111.081,48)	23.096.242.389,67

a. Dampak Perubahan Piutang

Koreksi ekuitas yang berdampak pada piutang sebesar (Rp79.000.000,00) yaitu koreksi atas pelunasan piutang garam tahun 2021 yang kurang catat.

b. Dampak Perubahan Penyisihan Piutang Rp47.528.000,00

Koreksi ekuitas yang berdampak pada penyisihan piutang terdiri dari:

- a. Koreksi atas penyisihan piutang garam yang dilunasi sebesar Rp79.000.000,00.
- b. Koreksi atas penyisihan piutang retribusi los pasar sebesar (Rp19.272.000,00) dan koreksi tambah penyisihan piutang hasil pengelolaan dana bergulir sebesar (Rp12.200.000,00).

c. Dampak Perubahan Aset Tetap

Koreksi ekuitas yang berdampak pada aset tetap tahun 2022 sebesar (Rp3.326.631.072,00) terdiri atas:

- a. Dampak perubahan aset tetap tanah, koreksi tambah nilai tanah sebesar Rp5.600.000,00 berupa hibah empat bidang tanah tahun 2021 yang belum diberi nilai.
- b. Dampak perubahan aset tetap peralatan mesin sebesar (Rp2.448.493.466,00).
- c. Dampak perubahan aset tetap gedung bangunan sebesar (Rp800.440.006,00) berupa koreksi atas nilai ekstrakom gedung bangunan.
- d. Dampak perubahan aset tetap jalan, irigasi, jaringan sebesar (Rp83.297.600,00) berupa koreksi atas nilai ekstrakom jalan, irigasi, jaringan.

d. Dampak Perubahan Penyusutan dan Amortisasi

Koreksi ekuitas yang berdampak pada penyusutan dan amortisasi tahun 2022 sebesar (Rp78.215.709.741,48) berupa selisih nilai akumulasi awal tahun 2022 sesuai hasil perhitungan aplikasi BMD yang terdiri atas:

- a. Dampak perubahan penambahan akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar (Rp46.599.365.205,00).
- b. Dampak perubahan penambahan akumulasi penyusutan gedung bangunan sebesar (Rp18.410.762.669,00).
- c. Dampak perubahan penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, jaringan sebesar (Rp13.005.675.484,00).
- d. Dampak perubahan penambahan amortisasi aset tak berwujud sebesar (Rp199.906.383,00).

e. Dampak Perubahan Aset Lain-lain

Koreksi ekuitas yang berdampak pada perubahan nilai aset lain-lain tahun 2022 sebesar Rp875.674.517,00, koreksi atas lebih catat ekstrakom dan barang rusak berat.

f. Dampak utang PFK

Koreksi ekuitas yang berdampak pada utang PFK merupakan koreksi kurang utang PFK yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp135.027.215,00, yang terdiri atas:

- a. Utang taperum tahun 2013 senilai Rp41.000,00, sejak tahun 2013 tidak ada surat tagihan dari Bapetarum atas nilai hutang tersebut. Pada tahun 2018 Bapetarum telah dibubarkan.
- b. Utang PPH Pasal 22 senilai Rp442.000,00 dan PPN senilai Rp1.105.000,00 yang salah dicatat dua kali dalam SP2D Nomor 0860/SP2D-LS/1.21.01.01/2012 (sebagai potongan dan informasi).
- c. Utang potongan retensi 5% atas tiga paket pekerjaan senilai Rp133.439.215, nilai tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada pihak ketiga saat pencairan retensi 5%.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.6.4 Ekuitas Akhir	Rp1.368.316.690.640,08	Rp1.400.188.642.729,28

Ekuitas akhir merupakan akumulasi dari ekuitas awal di tambah surplus - LO juga koreksi ekuitas lainnya.

Tabel 5.97 Ekuitas Akhir

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Saldo Awal sebesar	1.400.188.642.729,28	1.344.002.593.247,34
2	Surplus – LO	48.691.158.992,28	33.089.807.092,27
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(80.563.111.081,48)	23.096.242.389,67
	TOTAL	1.368.316.690.640,08	1.400.188.642.729,28

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

Pada saat penutupan kas dilakukan oleh Inspektorat diketahui masih ada sisa dana swakelola rehab tambak yang belum disetorkan kembali pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan. Setelah dilakukan pemeriksaan terbit LHP Inspektorat Kabupaten Nomor 700/08/INSPEK-SR/LHP.K/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan nilai temuan sebesar Rp180.040.808,00. Tanggal 27 Februari telah dilakukan penyetoran sebesar Rp20.000.000,00. Tanggal 2 Maret di terbitkan SKTJM dengan nilai Rp160.040.808,00, setelah diterbitkan SKTJM terdapat penyetoran Rp2.000.000,00.

6.1.1 Domisili

Luas wilayah Kabupaten Sabu Raijua ± 460,47 Km² atau 46,04 Ha yang terdiri dari dua pulau yang berpenghuni yaitu pulau Sabu dan pulau Raijua serta dua pulau yang tidak berpenghuni yaitu pulau Wadu Mea dan pulau Dana. Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari enam kecamatan, masing-masing: Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Raijua, dan Kecamatan Sabu Tengah. Pada tahun 2021, rata-rata temperatur udara di Sabu Raijua mencapai 28,7^oC. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November 30,2^oC dan terendah pada bulan Juli 27,2^oC.

Secara geografis Kabupaten Sabu Raijua terletak antara 10^o25' 7,12'' – 10^o49' 45,83'' Lintang Selatan dan antara 121^o16' 10,78'' - 122^o0' 30,26'' Bujur Timur dengan batas-batas Kabupaten Sabu Raijua sebelah Utara, Timur dan Barat dengan Laut Sabu dan Selatan dengan Samudera Hindia serta panjang garis pantai ±1.026,36Km². Dari segi topografi, rata-rata ketinggian wilayah-wilayah di Kabupaten Sabu Raijua berada pada rata-rata antara 0-100 meter di atas permukaan laut dengan permukaan tanahnya berbukit-bukit dengan rata-rata kemiringan 45 dengan beberapa puncak yang menjulang. Jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah Alluvial, Grumosol, Litosol dan Mediteran dengan tekstur tanah halus sampai kasar. Selain itu, terdapat juga gunung-gunung kapur yang terbentang disepanjang kawasan kabupaten ini.

Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021 sebanyak 89.327 jiwa (Data dan Statistik Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021) dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,3 dan kepadatan penduduk rata-rata 194 jiwa/km². Di tahun 2020, terdapat 24.744 kepala keluarga di Kabupaten ini, dengan demikian rata-rata penduduk per keluarga sebanyak empat orang. Berdasarkan kecamatan, jumlah penduduk terbanyak tahun 2020 terdapat di Kecamatan Sabu Barat yakni 37,19%

dari total penduduk Kabupaten Sabu Raijua, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Hawu Mehara yakni 297 jiwa/km².

Kabupaten Sabu Raijua beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan yang pendek. Sedangkan potensi flora sebagian besar terdiri dari padang rumput yang luas, pohon lontar, pohon pinus, pohon gewang, pohon kelapa, hutan mangrove dan lain-lain. Keadaan fauna terdiri dari kerbau, sapi, kuda, hewan kecil seperti kambing, domba, babi dan berbagai aneka unggas. Sebagai daerah agraris maka Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi pertanian dan peternakan, baik potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta peternakan, sedangkan potensi non pertanian seperti pertambangan galian bahan mineral bukan logam dan batuan. Sehingga mata pencaharian utama dari penduduk Kabupaten Sabu Raijua adalah tenaga usaha pertanian dan peternakan.

Kondisi alam yang kering dengan curah hujan yang rendah berdampak pada masih rendahnya produksi berbagai tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua, tercatat pada tahun 2020 jagung merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi yakni 12.806 ton, disusul padi dan sorgum yang masing-masing sebanyak 8.059 ton dan 1.021 ton, sementara itu hewan ternak besar yang banyak terdapat di kabupaten ini adalah kerbau, kuda dan sapi dan ternak kecil kambing, babi dan domba sedangkan produksi perikanan laut dalam hal ini hasil perikanan tangkap sebanyak 1.080 ton dan rumput laut sebesar 11.985.379 ton.

Produksi pertanian Sabu Raijua meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum, hortikultura, buah-buahan, dengan unggulan pada sektor pertanian tanaman jagung. Di bidang peternakan Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi peternakan Sapi, Kuda, Kerbau, Domba, Kambing dan Babi serta berbagai jenis Unggas.

Pada tahun 2021 terdapat 257 industri di Sabu Raijua yang terdiri dari empat industri dan 42 industri kecil serta 211 industri kerajinan rumah tangga. Berdasarkan sub sektornya industri di kabupaten ini didominasi industri makanan, minuman dan tembakau yang sebagian besar berupa gula air dan industri barang dari logam, mesin dan peralatan. Sementara itu jumlah tenaga kerja di industri pengolahan tersebut sebanyak 1.850 orang (68 orang di industri besar dan sedang, 380 orang di industri kecil, dan 1.402 orang di industri kerajinan rumah tangga). Tenaga kerja berasal dari industri garam curah yakni sebanyak 854 orang disusul berasal dari industri makanan, minuman dan tembakau yakni sebanyak 514 orang disusul kemudian industri barang dari logam, mesin dan peralatan sebanyak 268 orang. Dengan jumlah industri tahun 2020 sebanyak 257 industri dan 1.850 orang tenaga kerja, maka rata-rata jumlah tenaga kerja per industri sebanyak tujuh orang.

Wilayah Kabupaten Sabu Raijua memiliki infrastruktur perhubungan darat dengan panjang jalan hingga tahun 2020 adalah 655,27 km yang terdiri dari 45,27 km (6,9%) jalan Negara, 39 km (5,95%) jalan Provinsi dan 571 km (87,13%) jalan Kabupaten. Menurut jenis permukaannya sepanjang 257,47 km merupakan jalan aspal, 156,40 km merupakan jalan kerikil, 241,40 km masih berupa jalan tanah. Sementara itu, berdasarkan kondisi jalan, terdapat sepanjang 394,8 km jalan di

kabupaten ini yang dalam keadaan rusak berat, dan 218,87 km dalam keadaan baik. Sisanya dalam kondisi rusak dan sedang untuk menghubungkan satu kecamatan dan kecamatan lainnya, infrastruktur perhubungan udara dengan satu buah lapangan terbang perintis Tardamu di Seba yang dapat dilayani oleh maskapai penerbangan Dimonim Air dan infrastruktur perhubungan laut yang terdiri dari pelabuhan laut di Seba, Biu dan Raijua sebagai tempat berlabuh/bersandarnya kapal perintis, kapal ferry, kapal motor/perahu layar lainnya yang dapat mengangkut manusia, hewan, barang, dan berbagai komoditi lainnya.

Bidang pariwisata sebagai primadona, Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi pariwisata yang tinggi, baik wisata budaya dengan kebudayaan turun temurun yang masih dipelihara keasliannya yaitu perkampungan adat tradisional, rumah adat, wisata pantai dan taman laut, maupun wisata alam dengan panorama alam pantai dan gunung yang mempesona. Namun potensi pariwisata belum dilakukan penataan secara baik dan fasilitas pendukung seperti alat transportasi, hotel/penginapan, restoran/rumah makan, dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas.

6.1.2 Ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional

- a) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
- b) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 5);
- c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 3).

6.1.3 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dipimpin oleh Bupati Drs. Nikodemus N. RihHeke, M.Si, Wakil Bupati Yohanis Uly Kale A.Md dibantu oleh Sekretaris Daerah Septenius M. Bule Logo, SH., M.Hum, 3 orang Asisten dengan total aparatur PNS tahun 2022 sebanyak 1.884 orang yang terdiri dari 21 pejabat eselon II, 73 pejabat eselon III, 196 orang pejabat eselon IV, 753 orang fungsional dan 841 orang fungsional umum.

Untuk tenaga kesehatan terdiri dari 202 orang tenaga kesehatan enam orang dokter PNS dan 79 orang perawat, 57 orang bidan, 18 orang apoteker, 2 orang penyuluh kesehatan, serta 40 orang tenaga kesehatan lainnya. 539 orang tenaga kependidikan (guru dan pengawas) dan 394 orang tenaga kontrak yang tersebar pada Unit Dinas, Unit Badan, satu Unit Kantor, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Bagian pada Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD), enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 57 Puskesmas Pembantu (Pustu), enam Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 266 unit Kelompok Bermain (Kober/PAUD), 42 unit Satuan PAUD Sejenis (SPS), 15 unit Taman Kanak-kanak (TKK), 77 unit Sekolah Dasar (SD), 24 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), enam unit Kantor Kecamatan, Kelurahan dan dibantu dengan aparatur tingkat desa pada 58 Desa, 244 Dusun, 484 Rukun Warga (RW) dan 975 Rukun Tetangga (RT) dalam memberikan pelayanan dan menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.

Sesuai dengan peraturan di atas maka terdapat beberapa SKPD yang mengalami pemisahan dan penggabungan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang dipisahkan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bagian Administrasi Pengendalian Pertanahan yang digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 40 SKPD yaitu:

Tabel 6.1 Daftar SKPD

No	SKPD
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2	Rumah Sakit Umum Daerah
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
10	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian Dan Perdagangan

No	SKPD
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Dinas Pariwisata
20	Bagian Pemerintahan
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat
22	Bagian Hukum
23	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
24	Bagian Administrasi Pembangunan
25	Bagian Umum
26	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
27	Bagian Organisasi
28	Inspektorat Daerah
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Badan Keuangan Daerah
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan
32	Sekretariat DPRD
33	Kecamatan Sabu Barat
34	Kecamatan Sabu Timur
35	Kecamatan Sabu Liae
36	Kecamatan Hawu Mehara
37	Kecamatan Rajjua
38	Kecamatan Sabu Tengah
39	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian penyajian Catatan atas Laporan Keuangan sebagai penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas yang merupakan satu kesatuan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 dan 2021 untuk melaksanakan dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seba, 31 Mei 2023
BUPATI SABU RAIJUA
Dra. Nilandemus N. Rihi Heke, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

**PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022**



PD. RAI HAWU

JLN. TRANS SEBA - LIAE

Telp: (0380) 861022

Fax : (0380) 861022

Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB	1
LAPORAN KEUANGAN	
1. Neraca Per 31 Desember 2022	3
2. Laporan Laba Rugi Tahun 2022	4
3. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022	5
4. Laporan Arus Kas Tahun 2022	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum	7
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK ETAP	9
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	9
4. Rencana Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terkait keberlanjutan usaha	10
5. Penjelasan Pos-pos Neraca	11
6. Peristiwa Setelah Tanggal Akhir Periode Pelaporan	13
Lampiran Daftar Aset Tetap dan Penyusutan per 31 Desember 2022	14



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
Jln. El Tari - Seba, Telp./Fax. (0380) 861249

SURAT PERNYATAAN
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN SABU RAIJUA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU
PER 31 DESEMBER 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lagabus Pian, S.Sos, M.Si
NIP. : 19740510 199703 1 008
Alamat Kantor : Jln. El Tari - Seba, Telp./Fax. (0380) 861249, Kabupaten Sabu Raijua
Alamat Rumah :
Sesuai KTP : -
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua.

Untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Rai Hawu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Perusahaan Daerah Rai Hawu menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Daerah Rai Hawu adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
2. Dengan persetujuan Bupati, Perusahaan Daerah Rai Hawu telah memutuskan untuk menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik per 31 Desember 2022;
3. Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rai Hawu per 31 Desember 2022 dan Catatan atas Laporan Keuangan terlampir;
4. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rai Hawu per 31 Desember 2022 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik;

5. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rai Hawu telah dimuat secara lengkap dan benar serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
6. Perusahaan Daerah Rai Hawu telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari Laporan Keuangan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rai Hawu, serta sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Daerah Rai Hawu.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Seba, 24 Februari 2023

Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setda Kabupaten Sabu Raijua



Lagus Pian, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 19740510 199703 1 008

PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU
NERACA
Per 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Per 31 Desember 2021
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	2022 Jumlah	2021 Jumlah
Aset lancar			
- Kas dan Setara Kas	5.1	20.911.160,49	21.109.129,18
Jumlah Aset Lancar		20.911.160,49	21.109.129,18
Aset Tidak Lancar			
- Aset tetap (biaya perolehan)	5.2	773.964.071,43	773.964.071,43
- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap		(560.714.071,43)	(553.214.071,43)
- Aset lain-lain (biaya perolehan)	5.3	30.000.000,00	30.000.000,00
- Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain		(9.666.666,67)	(8.666.666,67)
Jumlah Aset Tidak Lancar		233.583.333,33	242.083.333,33
Jumlah Aset		254.494.493,82	263.192.462,51
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
- Utang Usaha		-	-
- Utang Lain-lain		-	-
Jumlah Kewajiban Lancar		-	-
Kewajiban Tidak Lancar			
- Hutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		-	-
Jumlah Kewajiban		-	-
Ekuitas			
- Modal Pemda	5.4	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
- Akumulasi Saldo Laba (Rugi)	5.5	(4.745.504.506,18)	(4.736.807.527,49)
Jumlah Ekuitas		254.495.493,82	263.192.462,51
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		254.495.493,82	263.192.462,51

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Seba, 24 Februari 2023
 Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 Kabupaten Sbau Aijua

Lurahus Pian, S.Sos, M.Si
 NIP. 19740510 199703 1 008

PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU
PERHITUNGAN LABA (RUGI)
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Per 31 Desember 2021
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022 (Jumlah)	2021 (Jumlah)
Pendapatan Usaha-Bersih	4.1	-	-
Beban Pokok Penjualan	4.2	-	-
Laba Kotor		-	-
Beban Usaha	4.3		
Beban Pengiriman			-
Beban Administrasi dan Umum		8.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah		8.500.000,00	8.500.000,00
Rugi Usaha		(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan lain-lain	4.4	52.539,15	53.033,54
Beban lain-lain	4.5	(250.507,84)	(250.606,71)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(197.968,69)	(197.573,17)
Rugi sebelum Pajak		(8.697.968,69)	(8.697.573,17)
Beban Pajak Penghasilan	4.6		
Rugi Bersih		(8.697.968,69)	(8.697.573,17)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Seba, 24 Februari 2023
Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Kabupaten Seba

Lagus Piau, S.Sos, M.Si
NIP. 19740510 199703 1 008

PERUSAHAAN DAERAH RAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Per 31 Desember 2021
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Modal Pemda	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
A.	Saldo per 31 Desember 2020	5.000.000.000,00	(4.728.109.964,32)	271.890.035,68
1	Koreksi saldo laba (rugi)	-	-	-
2	Laba (Rugi) Tahun 2021	-	(8.697.573,17)	(8.697.573,17)
B.	Saldo per 31 Desember 2021	5.000.000.000,00	(4.736.807.537,49)	263.192.462,51
1	Koreksi saldo laba (rugi)	-	-	-
2	Laba (Rugi) Tahun 2022	-	(8.697.968,69)	(8.696.968,69)
C.	Saldo per 31 Desember 2022	5.000.000.000,00	(4.745.505.506,18)	254.495.493,82

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara
keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH RAI
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Per 31 Desember 2021
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31-12-2022 (Jumlah)	31-12-2021 (Jumlah)
I Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(8.697.968,69)	(8.697.573,17)
Penyesuaian untuk transaksi yang tidak menggunakan kas:		
Beban Penyusutan Aset Tetap	7.500.000,00	7.500.000,00
Beban Amortisasi Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00
	<u>(197.968,69)</u>	<u>(197.573,17)</u>
Perubahan arus kas dari aset lancar dan kewajiban lancar	-	-
Kenaikan (penurunan) Persediaan	-	-
Kenaikan (penurunan) Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Kenaikan (penurunan) Hutang Usaha	-	-
Kenaikan (penurunan) Hutang Lain-Lain	-	-
Perubahan Modal Kerja	<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Kas dari Kegiatan Operasi	(197.968,69)	(197.573,17)
II Arus Kas dari Kegiatan Investasi		
Penambahan aset tetap	-	-
Penambahan aset lain-lain	-	-
Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Investasi	<u>-</u>	<u>-</u>
III Arus Kas untuk Kegiatan pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Modal Pemda	-	-
Kenaikan (Penurunan) Saldo Laba	-	-
Jumlah Arus Kas untuk Kegiatan pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas	<u>(197.968,69)</u>	<u>(197.573,17)</u>
Saldo Kas Awal Periode	21.109.129,18	21.306.702,35
Saldo Kas Akhir Periode	<u>20.911.160,49</u>	<u>21.109.129,18</u>
	-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara
 keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH RAI
CATATAN ATAS NERACA
PER 31 DESEMBER 2022**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Rai Hawu berkedudukan dan berkantor di Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua No. 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 25 Agustus 2011 yang diundangkan tanggal 5 September 2011 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 21.

Pada saat ini perusahaan telah memiliki perijinan sebagai berikut:

1. Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak Nomor: PEM-0000023ER/WPJ.31/KP.0403/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan NPWP: 31.656.835.1-922.000, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): 51900-Perdagangan Besar Eceran.
2. Tanda Daftar Surat Ijin Gangguan Nomor 18/KEP/HK/2013 tanggal 09 Januari 2013 dari Bupati Sabu.
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 514/77/SIUP/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Atas nama Bupati Sabu.
4. Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Perusahaan Lain (BPL) Nomor 2412010000077 tanggal 15 Januari 2013 tanggal 15 Januari 2013 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berlaku sampai dengan 17 Januari 2018, belum diperpanjang.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perusahaan Perusahaan Daerah Rai Hawu adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahaan daerah serta memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lapangan Usaha

1. Perusahaan Daerah Rai Hawu dapat menjalankan usaha-usahanya di bidang produksi, perdagangan umum, pertambangan dan energi, jasa transportasi, jasa konstruksi dan aneka jasa usaha lainnya.
2. Dalam rangka menjalankan usahanya Perusahaan Daerah Rai Hawu dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menjalankan usahanya Perusahaan Daerah Rai Hawu harus menentukan *core bussinesnya* yang jelas.

Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, kegiatan usaha pokok perusahaan adalah ATK, Sembilan Bahan Pokok, Bahan Bangunan, Pupuk, Obat-obatan dan Peralatan Pertanian, dan BBM.

Permodalan

1. Modal Perusahaan Daerah Rai Hawu adalah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.

2. Modal dasar perusahaan daerah adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 dan dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi sesuai dengan Pasal 6 Bab V tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua No 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Rai Hawu.

Pembagian Laba Bersih

Berdasarkan Pasal 35 Perda Pendirian, jika terdapat laba bersih, maka penggunaan diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pendapatan asli daerah sebesar : 40%.
- b. Untuk cadangan umum sebesar : 30%.
- c. Untuk jasa produksi sebesar : 15%.
- d. Untuk dana pensiun dan sosial sebesar : 15%.

Pengurus Perusahaan

Pengurus Perusahaan Daerah Rai Hawu terdiri dari:

a. Direksi

Jumlah direksi paling banyak 4 (empat) orang, salah satunya diangkat sebagai direktur utama. Masa jabatan direksi selama 4 tahun dan masa jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

b. Badan Pengawas

Jumlah badan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Salah seorang dari badan pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota.

Susunan Pengurus Perusahaan Daerah Rai Hawu saat ini adalah:

a. Direksi

Pada saat ini masa jabatan Direksi telah berakhir sehubungan pengangkatan Direksi terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 603/KEP/HK/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Rai Hawu periode 2012-2016. Berdasarkan Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 309/KEP/HK/2014 tanggal 30 Desember 2014 telah diangkat Ir. Lay Rohi, M.T., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijuwa untuk masa 3 (tiga) tahun. Pada saat ini masa jabatan Direksi sudah berakhir dan belum ada perpanjangan, sehingga penanggung jawab perusahaan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua.

b. Badan Pengawas

Pada saat ini masa jabatan Badan Pengawas telah berakhir sehubungan pengangkatan Badan Pengawas terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 603/KEP/HK/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rai Hawu Periode 2012-2015. Pada saat ini masa jabatan Badan Pengawas sudah berakhir dan belum ada perpanjangan, sehingga penanggung jawab pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua.

Sehubungan Perusahaan Daerah Rai Hawu tidak aktif sejak Tahun 2015, maka pelaksanaan yang terkait dengan administrasi perusahaan dilaksanakan dan dilanjutkan oleh Sdr. Welem

Kehe Lay, ST yang walaupun belum ada keputusan perpanjangan, namun sehubungan keputusan pemberhentian dan/atau pergantian jabatan belum ada, maka untuk mengisi kekosongan dilaksanakan oleh Direktur Operasional sampai awal tahun 2019.

Selanjutnya pada Tahun 2022 Bupati Sabu Raijua menetapkan Lagabus Pian, S.Sos, M.Si sebagai Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua selaku penanggung jawab dan pengawasan perusahaan.

2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Laporan keuangan Perusahaan Daerah Rai Hawu telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Penilaian Piutang

Piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan, khususnya untuk piutang usaha ketentuan ini menghendaki agar piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak.

- Diatas 3 bulan s.d. 6 bulan : 30%
- Diatas 6 bulan s.d. 12 bulan : 50%
- Diatas 1 tahun s.d. 2 tahun : 75%, dan diajukan ke Badan Pengawas untuk dihapus.
- Diatas 2 tahun : 100%, dan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih dicatat secara *extra comptable*.

Penyisihan piutang tersebut di atas dikecualikan bagi tagihan seluruh instansi pemerintah. Dalam hal terjadi kejadian-kejadian khusus, misalnya pembongkaran daerah pemukiman tertentu untuk tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat disusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan diatas.

Jika terdapat pembayaran atas piutang-piutang yang telah dihapus, pembayaran tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan. Piutang yang telah berumur diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu, sedangkan yang berumur diatas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat dikeluarkan dari pembukuan, tetapi dicatat secara *extra comptable* dan tetap diusahakan penagihannya.

c. Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Pembebanan penjualan ke dalam harga pokok dilakukan dengan metode *first in first out (FIFO)* sesuai pemakaian/penjualan persediaan setelah memperhitungkan nilai persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir tahun yang masih tersedia.

d. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan/harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aktiva tetap tersebut.

Aset tetap disusutkan dengan metode yang dianut di dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Metode perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dipilih Perusahaan Daerah Rai Hawu yaitu garis lurus dengan tarif penyusutan untuk setiap jenis Aset tetap sebagai berikut:

I. Bukan Bangunan

- | | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| a. Kelompok 1 | : | 25% dari harga perolehan |
| b. Kelompok 2 | : | 12,50% dari harga perolehan |
| c. Kelompok 3 | : | 6,250% dari harga perolehan |
| d. Kelompok 4 | : | 5% dari harga perolehan |

II. Bangunan

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| a. Permanen | : | 25% dari harga perolehan |
| b. Tidak Permanen | : | 12,50% dari harga perolehan |

Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari aset tetap yang beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai aset tetap tersebut dinyatakan beroperasi komersial.

e. Perpajakan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Beban pajak penghasilan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

g. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan. Sedangkan biaya dibebankan pada saat terjadinya transaksi atas kewajiban/beban perusahaan.

4. Rencana Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terhadap Perusahaan Daerah Raihawa

PD. Raihawa telah berhenti operasi sejak tahun 2014 karena Direksi PD Raihawa tidak menjalankan kegiatan bisnis sesuai rencana kerja pemanfaatan penyertaan modal tahun 2013. Laporan auditor independen mengungkapkan kerugian pada tahun 2013 sebesar Rp1.992.548.148,00 dan nilai aset kas tidak menggambarkan nilai wajar karena tidak dilakukan penyisihan piutang maupun penurunan atas nilai persediaan. Sehingga PD Raihawa memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) atas LK Tahun Buku 2014. Dan selanjutnya PD Raihawa tidak menyusun Laporan Keuangan tahun buku 2015, 2016 dan 2017. Sejak berhentinya operasi PD Raihawa tahun 2014. Penyertaan modal Pemda dalam bentuk kas terus mengalami penurunan nilai setiap bulannya akibat pemotongan pajak dan biaya administrasi bank yang nilainya lebih besar daripada pendapatan jasa giro yang diterima. Beban ini setiap bulannya memberi kontribusi terhadap rugi bersih tahun berjalan PD Raihawa meskipun perusahaan sudah tidak beroperasi.

Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas PD. Raihawa Tahun 2020 (audited), Tahun 2021 (audited) dan Tahun 2022 (unaudited) menunjukkan bahwa PD Raihawa terus mengalami kerugian sehingga mengurangi nilai penyertaan modal Pemda dalam bentuk kas.

Kondisi ini mengakibatkan PD Raihawa tidak dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, produktivitas perusahaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi ini, di Tahun 2023 Bupati Sabu Raijua memutuskan untuk melikuidasi PD Raihawa yang akan didasarkan pada hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan saldo kas dan bank yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2022 dan 2021, yang terdiri atas:

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
- Kas	-	-
- Bank NTT Sabu	20.911.160,49	21.109.129,18
Jumlah	20.911.160,49	21.109.129,18

Rekening Bank pada Bank NTT Cabang Sabu, No. Rek. 021.01.08.000002-7, An. PD Rai Hawu, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

5.2 Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021, yang terdiri

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
Harga Perolehan		
- Tanah	172.000.000,00	172.000.000,00
- Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00
- Kendaraan	292.920.000,00	292.920.000,00
- Peralatan Kantor	159.044.071,43	159.044.071,43
Jumlah Harga Perolehan	773.964.071,43	773.964.071,43
Akumulasi Penyusutan	(560.714.071,43)	(553.214.071,43)
Nilai Buku	213.250.000,00	220.750.000,00

Nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

	Saldo 2021	2022		Saldo 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
- Tanah	172.000.000,00	-	-	172.000.000,00
- Bangunan	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
- Kendaraan	292.920.000,00	-	-	292.920.000,00
- Peralatan Kantor	159.044.071,43	-	-	159.044.071,43
Jumlah	773.964.071,43	-	-	773.964.071,43

	Saldo 2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai				
- Bangunan	101.250.000,00	7.500.000,00	-	108.750.000,00
- Kendaraan	292.920.000,00	-	-	292.920.000,00
- Peralatan Kantor	159.044.071,43	-	-	159.044.071,43
Jumlah	553.214.071,43	7.500.000,00	-	560.714.071,43
Nilai Buku	228.250.000,00			213.250.000,00

Nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

	Saldo 2021	2022		Saldo 2022
		Mutasi Tahun 2022		
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
- Tanah	172.000.000,00	-	-	172.000.000,00
- Bangunan	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
- Kendaraan	292.920.000,00	-	-	292.920.000,00
- Peralatan Kantor	159.044.071,43	-	-	159.044.071,43
Jumlah	773.964.071,43	-	-	773.964.071,43
	Saldo 2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai				
- Bangunan	101.250.000,00	7.500.000,00	-	108.750.000,00
- Kendaraan	292.920.000,00	-	-	292.920.000,00
- Peralatan Kantor	159.044.071,43	-	-	159.044.071,43
Jumlah	553.214.071,43	7.500.000,00	-	560.714.071,43
Nilai Buku	220.750.000,43			213.250.000,00

5.3 Aset Lain-lain

Saldo tersebut merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan sewa tanah untuk gudang, dengan jangka waktu 30 tahun, mulai bulan Mei 2013 s.d. April 2043, dengan perhitungan:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Sewa Tanah untuk Gudang di Sabu Masa Mei 2013 - April 2043 (30 tahun atau 360 bulan) Nilai Sewa	30.000.000,00	30.000.000,00
Akumulasi amortisasi (tahun 2021: 116 bulan dan tahun 2021: 104 bulan)	(9.666.666,67)	(8.666.666,67)
Nilai Buku	20.333.333,33	21.333.333,33
	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

5.4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua No. 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Rai Hawu ditetapkan alokasi penyertaan modal selama 5 tahun sebesar Rp25.000.000.000,00.

Dari rencana alokasi tersebut, baru disertakan sampai 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.5 Akumulasi Saldo Laba (Rugi)

Saldo laba per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
- Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun	(4.736.807.537,49)	(4.728.109.964,32)
- Laba (rugi) Tahun Berjalan	(8.697.968,69)	(8.697.573,17)
- Saldo Laba (Rugi) Akhir Tahun	(4.745.504.506,18)	(4.736.807.537,49)

4. Pos-Pos Laba Rugi

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4. 1. Pendapatan Usaha	-	-
Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha tahun 2022 dan 2021 adalah nihil.		
4. 2. Harga Pokok Penjualan	-	-
Jumlah tersebut merupakan harga pokok penjualan tahun 2022 dan 2021 adalah nihil.		
4. 3. Beban Usaha	8.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah tersebut merupakan beban usaha tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari beban gaji, honorarium, dan tunjangan karyawan, sewa, pemasaran, pemeliharaan dan perbaikan, air, listrik, telepon, alat tulis kantor, transport, perjalanan dinas, konsumsi, serta beban administrasi dan umum lainnya.		
Beban Pemasaran		
Beban Pengiriman	-	-
Beban Pemasaran Lainnya	-	-
Jumlah Beban Pemasaran	-	-
Beban Administrasi Umum		
Beban Tenaga Kerja	-	-
- Beban Penyusutan Aset Tetap	7.500.000,00	7.500.000,00
- Beban Amortisasi Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah Beban Administrasi Umum	8.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah Beban Usaha	8.500.000,00	8.500.000,00
4. 4. Pendapatan Lain-Lain	52.539,15	53.033,54
Jumlah tersebut merupakan pendapatan non operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian:		
- Jasa Giro	52.539,15	53.033,54
- Pendapatan lain-lain	-	-
Jumlah	52.539,15	53.033,54
4. 5. Beban Lain-Lain	250.507,84	250.606,71
Jumlah tersebut merupakan beban administrasi, pajak bunga bank, dan taksiran kerugian penurunan nilai persediaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.		
- Beban Pajak Jasa Giro	10.507,84	10.606,71
- Beban Adm Bank	240.000,00	240.000,00
Jumlah Beban dan Kerugian Lainnya	250.507,84	250.606,71
4. 6. Beban Pajak	-	-
Tidak terdapat beban pajak penghasilan sehubungan perusahaan menderita kerugian.		
5. Kejadian Setelah Akhir Periode Pelaporan dan Informasi Tambahan		
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2023.		

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Umur Ekson	Kondisi			Tarif Dep (%)	Harga Perolehan 31-12-2021	Mutasi 2022		Harga Perolehan 31-12-2022	Akumulasi Penyusutan 31-12-2021	Penyusutan 2022		Akumulasi Penyusutan & Penurunan 31-12-2022	Nilai Buku 31-12-2022	
				B	RR	RB			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang			
				5	6	7			10	11			12 (9+10-11)	13			14
a.	Tanah 1673 m2	2013		1	-	-	172.000.000	-	-	172.000.000	-	-	-	-	172.000.000		
b.	Bangunan 192 m2	2013	20	-	-	1	150.000.000	-	-	150.000.000	101.250.000	7.500.000	-	108.750.000	41.250.000		
c.	Kendaraan																
1	Truk Colt Diesel TS 125	01/03/2013	8	-	1	-	12,50%	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-	-	250.000.000	-	
2	Motor CB 150 (1 bh)	01/02/2014	8	-	1	-	12,50%	24.860.000	-	-	24.860.000	24.860.000	-	-	24.860.000	-	
3	Motor Supra 125 (1 bh)	01/02/2014	8	-	1	-	12,50%	18.060.000	-	-	18.060.000	18.060.000	-	-	18.060.000	-	
	Jumlah Kendaraan		24	-	3	-		292.920.000	-	-	292.920.000	292.920.000	-	-	292.920.000	-	
d.	Peralatan Kantor																
1	Dinamo Air National (1 bh)	01/03/2013	8	-	-	1	12,50%	750.000	-	-	750.000	750.000	-	-	750.000	-	
2	Papan Nama Perusahaan	19/02/2013	4	-	-	1	25,00%	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	500.000	-	
3	PC Core i3 3220 Gigabyte 1 set	07/01/2013	4	-	-	1	25,00%	7.500.000	-	-	7.500.000	7.500.000	-	-	7.500.000	-	
4	Laptop Acer E1-471 Intel Core i3 1 bh	07/01/2013	4	-	-	1	25,00%	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	-	
5	Laptop Toshiba CB40-1019 Core i3 1 bh	07/01/2013	4	-	-	1	25,00%	7.500.000	-	-	7.500.000	7.500.000	-	-	7.500.000	-	
6	Printer Epson L200 (1 bh)	08/01/2013	4	-	-	1	25,00%	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	
7	Sharp AC AH-05 KCV (2 set)	31/01/2013	8	-	-	2	12,50%	5.500.000	-	-	5.500.000	5.500.000	-	-	5.500.000	-	
8	Printer IP2770 Canon (1 bh)	31/01/2013	4	-	-	1	25,00%	750.000	-	-	750.000	750.000	-	-	750.000	-	
9	Kipas Angin Cosmos Wadenta (2 bh)	31/01/2013	8	-	-	2	12,50%	550.000	-	-	550.000	550.000	-	-	550.000	-	
10	Mesin Fotocopy (1 bh)	13/02/2013	4	-	-	1	25,00%	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
11	Mesin Fax (1 bh)	19/03/2013	4	-	-	1	25,00%	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-	
12	Laptop Toshiba L840 i5 14" (1 set)	19/03/2013	4	-	-	1	25,00%	11.000.000	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-	11.000.000	-	
13	Kipas Angin (1 bh)	22/03/2013	8	-	-	1	12,50%	650.000	-	-	650.000	650.000	-	-	650.000	-	
14	Meja Vanessa 1 Biro (5 bh)	25/01/2013	4	-	-	5	25,00%	3.750.000	-	-	3.750.000	3.750.000	-	-	3.750.000	-	
15	Kursi 804 Tiger 3 bh	31/01/2013	4	-	-	3	25,00%	3.450.000	-	-	3.450.000	3.450.000	-	-	3.450.000	-	
16	Meja Biro 160 Pro Design (3 bh)	31/01/2013	4	-	-	3	25,00%	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-	
17	Cash Box EX 202 Kibisa (1 bh)	31/01/2013	4	-	-	1	25,00%	900.000	-	-	900.000	900.000	-	-	900.000	-	
18	Drum Plastik (100 bh)	31/01/2013	8	98	-	2	12,50%	26.000.000	-	-	26.000.000	26.000.000	-	-	26.000.000	-	
19	Kursi Terendi Stainless + Base (15 bh)	31/01/2013	8	-	-	12	3	12,50%	3.225.000	-	-	3.225.000	3.225.000	-	-	3.225.000	-
20	Soft National 1 set	31/01/2013	8	-	-	1	12,50%	2.750.000	-	-	2.750.000	2.750.000	-	-	2.750.000	-	
21	Meja (2 bh)	05/02/2013	4	-	-	2	25,00%	1.200.000	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	
22	Lemari Arap (1 bh)	05/02/2013	4	-	-	1	25,00%	2.350.000	-	-	2.350.000	2.350.000	-	-	2.350.000	-	
23	Filing Cabinet (2 bh)	05/02/2013	8	-	-	2	12,50%	3.700.000	-	-	3.700.000	3.700.000	-	-	3.700.000	-	
24	Etalase Besar (5 bh)	13/02/2013	8	-	-	5	12,50%	13.928.571	-	-	13.928.571	13.928.571	-	-	13.928.571	-	
25	Rak Keranjang (2 bh)	13/02/2013	8	-	-	2	12,50%	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-	
26	Rak Besi Panjang (2 bh)	13/02/2013	8	-	-	2	12,50%	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	-	
27	Rak Besi Kecil (6 bh)	13/02/2013	8	-	-	6	12,50%	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-	
28	Meja Kasir (1 bh)	13/02/2013	4	-	-	1	25,00%	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	
29	Rak Kasir (1 bh)	13/02/2013	8	-	-	1	12,50%	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	
30	Notebook Asus dan Modem Drops (1 bh)	01/01/2014	4	-	-	1	25,00%	4.900.000	-	-	4.900.000	4.900.000	-	-	4.900.000	-	
31	Laptop Toshiba Kaur Pembukaan (1 bh)	01/02/2014	4	-	-	1	25,00%	10.400.000	-	-	10.400.000	10.400.000	-	-	10.400.000	-	
32	Printer Canon 2770 (1 bh)	01/02/2014	4	-	-	1	25,00%	790.500	-	-	790.500	790.500	-	-	790.500	-	
	Jumlah Peralatan Kantor			98	14	56		159.044.071	-	-	159.044.071	159.044.071	-	-	159.044.071	-	
	Total			99	17	57		773.964.071	-	-	773.964.071	553.214.071	7.500.000	-	560.714.071	213.250.000	

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.01	Pendidikan				
1.01.01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	148.406.202.473,00	130.721.542.425,00	17.684.660.048,00	88,08
1.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	96.768.929.584,00	82.462.825.982,00	14.306.103.602,00	85,22
1.01.01.2.05	Program administrasi Kepegawaian Perangkat	66.250.000,00	66.249.000,00	1.000,00	100,00
1.01.01.2.06	Program administrasi Umum Perangkat Daerah	416.702.625,00	312.548.349,00	104.154.276,00	75,01
1.01.01.2.07	Program pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
1.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	64.215.000,00	56.555.180,00	7.659.820,00	88,07
1.01.01.2.09	Program barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	82.090.000,00	39.550.741,00	42.539.259,00	48,18
1.01.02.2.01	Program pengelolaan pendidikan sekolah dasar	17.058.748.488,00	16.278.946.922,00	779.801.566,00	95,43
1.01.02.2.02	Program pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	19.311.990.986,00	17.432.985.237,00	1.879.005.749,00	90,27
1.01.02.2.03	Program pengelolaan pendidikan anak usia dini (paud)	10.754.920.000,00	10.568.545.500,00	186.374.500,00	98,27
1.01.02.2.04	Program pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	448.282.475,00	412.389.200,00	35.893.275,00	91,99
1.01.03.2.02	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	205.319.250,00	196.540.000,00	8.779.250,00	95,72
1.01.05.2.02	Program penerbitan izin paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	89.800.000,00	14.065.000,00	75.735.000,00	15,66
2.19.02.2.01	Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	1.181.344.565,00	1.035.568.474,00	145.776.091,00	87,66
2.19.03.2.01	Program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada Jenjang pendidikan yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/kota	76.945.000,00	69.370.000,00	7.575.000,00	90,16
2.19.03.2.04	Program pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	689.030.000,00	680.000.000,00	9.030.000,00	98,69
2.19.04.2.01	Program pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	410.000.000,00	391.948.840,00	18.051.160,00	95,60
2.22.02.2.02	Program pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	213.980.000,00	171.254.000,00	42.726.000,00	80,03
2.22.05.2.02	Program pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	554.654.500,00	532.200.000,00	22.454.500,00	95,95
1.02	Kesehatan				
1.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah	25.018.876.489,00	23.061.251.814,00	1.957.624.675,00	9.218,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.02.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	7.065.594.825,00	6.366.049.271,00	699.545.554,00	90,10
1.02.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	62.450.000,00	23.538.000,00	38.912.000,00	37,69
1.02.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	457.541.984,00	394.445.058,00	63.096.926,00	86,21
1.02.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3.553.715.150,00	3.139.479.880,00	414.235.270,00	88,34
1.02.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	416.908.000,00	262.235.024,00	154.672.976,00	62,90
1.02.02.2.01	Program penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	8.834.761.738,00	8.468.436.823,00	366.324.915,00	95,85
1.02.02.2.02	Program penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	4.627.904.792,00	4.407.067.758,00	220.837.034,00	95,23
1.02.02	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68.079.576.518,00	59.972.533.422,70	8.107.043.095,30	88,09
1.02.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	18.831.508.657,00	17.147.443.332,00	1.684.065.325,00	91,06
1.02.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	39.600.000,00	39.400.000,00	200.000,00	99,49
1.02.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	526.724.270,00	512.310.398,00	14.413.872,00	97,26
1.02.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	91.322.100,00	90.816.000,00	506.100,00	99,45
1.02.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	9.185.302.320,00	7.957.391.301,00	1.227.911.019,00	86,63
1.02.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	135.220.000,00	132.551.517,00	2.668.483,00	98,03
1.02.02.2.01	Program penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	7.572.872.407,00	7.003.122.498,00	569.749.909,00	92,48
1.02.02.2.02	Program penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	24.896.276.387,00	21.603.564.232,70	3.292.712.154,30	86,77
1.02.02.2.03	Program penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100.905.000,00	94.085.000,00	6.820.000,00	93,24
1.02.02.2.04	Program penerbitan izin rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	97.863.000,00	92.980.000,00	4.883.000,00	95,01
1.02.03.2.01	Program pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	27.992.647,00	25.799.626,00	2.193.021,00	92,17
1.02.03.2.02	Program perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm di wilayah kabupaten/kota	553.342.230,00	397.072.075,00	155.370.155,00	71,92
1.02.03.2.03	Program pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	25.200.000,00	10.600.000,00	14.600.000,00	42,06



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.02.04.2.01	Program Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	56.900.200,00	53.943.000,00	2.957.200,00	94,80
1.02.04.2.03	Program Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	8.670.000,00	8.670.000,00	-	100,00
1.02.04.2.04	Program Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	25.300.000,00	21.227.500,00	4.072.500,00	83,90
1.02.05.2.01	Program Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	14.549.900,00	9.700.000,00	4.849.900,00	66,67
1.02.05.2.02	Program Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	10.060.000,00	4.940.000,00	5.120.000,00	49,11
1.02.05.2.02	Program Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) tingkat daerah kabupaten/kota	3.193.800.000,00	3.193.800.000,00	-	100,00
1.02.05.2.03	Program Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	15.180.000,00	7.728.000,00	7.452.000,00	50,91
2.14.03.2.01	Program pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal	528.928.800,00	292.962.400,00	235.966.400,00	55,39
2.14.03.2.02	Program pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	362.880.000,00	356.160.000,00	6.720.000,00	98,15
2.14.03.2.03	Program pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupaten/kota	540.113.600,00	358.424.500,00	181.689.100,00	66,36
2.14.03.2.04	Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	293.250.000,00	107.515.000,00	185.735.000,00	36,66
2.14.04.2.01	Program Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	945.815.000,00	449.427.043,00	496.387.957,00	47,52
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.213.958.544,00	120.065.746.054,00	12.148.212.490,00	90,81
1.03.01.2.01	Program perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	19.800.000,00	19.785.000,00	15.000,00	99,92
1.03.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	4.128.491.221,00	3.773.235.089,00	355.256.132,00	91,40

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.03.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	210.170.000,00	57.530.000,00	152.640.000,00	27,37
1.03.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	856.245.425,00	798.874.751,00	57.370.674,00	93,30
1.03.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	40.520.640,00	40.520.640,00	-	100,00
1.03.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	63.443.750,00	31.912.000,00	31.531.750,00	50,30
1.03.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	410.200.000,00	140.995.578,00	269.204.422,00	34,37
1.03.02.2.01	Program pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6.798.363.900,00	6.784.061.200,00	14.302.700,00	99,79
1.03.02.2.02	Program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.768.244.000,00	1.723.511.250,00	44.732.750,00	97,47
1.03.03.2.01	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	6.617.717.585,00	6.122.866.383,00	494.851.202,00	92,52
1.03.05.2.01	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	1.553.760.000,00	1.501.450.000,00	52.310.000,00	96,63
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	482.320.000,00	300.000.000,00	182.320.000,00	62,20
1.03.08.2.01	Program penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten/kota. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	19.344.771.821,00	17.342.059.962,00	2.002.711.859,00	89,65
1.03.09.2.01	Program Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100.000.000,00	99.800.000,00	200.000,00	99,80
1.03.10.2.01	Program Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	89.439.080.202,00	81.096.742.281,00	8.342.337.921,00	90,67
1.03.12.2.02	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	164.810.000,00	98.850.000,00	65.960.000,00	60,58
2.10.05.2.01	Program penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	216.020.000,00	133.551.920,00	82.468.080,00	61,82
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.598.787.738,00	5.538.235.905,00	60.551.833,00	98,92
1.04.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.428.502.805,00	1.377.984.461,00	50.518.344,00	96,46
1.04.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	19.250.000,00	19.250.000,00	-	100,00
1.04.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	228.490.473,00	224.136.944,00	4.353.529,00	98,09

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.04.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	34.778.500,00	34.408.000,00	370.500,00	98,93
1.04.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	65.360.000,00	65.348.300,00	11.700,00	99,98
1.04.02.2.03	Program pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	245.010.000,00	245.010.000,00	-	100,00
1.04.03.2.01	Program penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	630.400.000,00	630.400.000,00	-	100,00
1.04.03.2.02	Program penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70.951.000,00	70.646.000,00	305.000,00	99,57
1.04.03.2.03	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	2.815.544.960,00	2.810.854.900,00	4.690.060,00	99,83
1.04.05.2.01	Program urusan penyelenggaraan PSU perumahan	60.500.000,00	60.197.300,00	302.700,00	99,50
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4.918.455.539,00	4.654.289.604,00	264.165.935,00	94,63
1.05.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.096.815.879,00	2.041.601.129,00	55.214.750,00	97,37
1.05.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	200.000.000,00	199.855.500,00	144.500,00	99,93
1.05.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	249.680.660,00	219.742.580,00	29.938.080,00	88,01
1.05.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	123.000.000,00	76.920.000,00	46.080.000,00	62,54
1.05.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10.709.000,00	5.845.000,00	4.864.000,00	54,58
1.05.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	189.450.000,00	189.395.695,00	54.305,00	99,97
1.05.02.2.01	Program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.879.433.000,00	1.774.061.700,00	105.371.300,00	94,39
1.05.02.2.02	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	36.175.000,00	29.550.000,00	6.625.000,00	81,69
1.05.04.2.01	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	133.192.000,00	117.318.000,00	15.874.000,00	88,08
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.102.253.768,00	2.618.243.231,00	484.010.537,00	84,40
1.05.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	878.974.618,00	814.686.812,00	64.287.806,00	92,69
1.05.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	21.550.000,00	21.550.000,00	-	100,00
1.05.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	107.196.150,00	75.855.700,00	31.340.450,00	70,76



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1.05.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	34.243.500,00	34.243.500,00	-	100,00
1.05.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	9.995.750,00	7.871.000,00	2.124.750,00	78,74
1.05.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	317.580.000,00	214.067.460,00	103.512.540,00	67,41
1.05.03.2.02	Program pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	869.249.750,00	739.419.784,00	129.829.966,00	85,06
1.05.03.2.03	Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	863.464.000,00	710.548.975,00	152.915.025,00	82,29
1.06	Sosial				
1.06.01	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.850.095.303,00	5.374.478.048,00	475.617.255,00	91,87
1.06.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.541.605.286,00	1.453.217.546,00	88.387.740,00	94,27
1.06.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	22.000.000,00	20.900.000,00	1.100.000,00	95,00
1.06.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	157.203.650,00	155.355.640,00	1.848.010,00	98,82
1.06.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	44.526.408,00	42.617.000,00	1.909.408,00	95,71
1.06.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	259.832.504,00	258.468.249,00	1.341.255,00	99,47
1.06.02.2.03	Program pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	471.575.000,00	471.135.000,00	440,00	99,91
1.06.04.2.01	Program rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	175.219.580,00	172.846.000,00	2.373.580,00	98,65
1.06.04.2.02	Program rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	47.810.000,00	35.593.000,00	12.217.000,00	74,45
1.06.05.2.02	Program pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.273.880.000,00	1.264.281.000,00	9.599.000,00	99,25
1.06.06.2.01	Program perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	291.846.000,00	242.196.000,00	49.650.000,00	82,99
1.06.06.2.02	Program penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	321.682.000,00	314.552.500,00	7.129.500,00	97,78
2.08.02.2.01	Program pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	50.807.000,00	48.064.456,00	2.742.544,00	94,60
2.08.03.2.01	Program pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	25.271.000,00	8.808.000,00	16.463.000,00	34,85

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.08.03.2.02	Program penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	320.894.750,00	263.612.950,00	57.281.800,00	82,15
2.08.03.2.03	Program penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	5.550.000,00	5.241.150,00	30.885,00	94,44
2.08.04.2.01	Program peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	89.637.000,00	82.063.733,00	7.573.267,00	91,55
2.08.05.2.01	Program pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	26.206.000,00	19.925.000,00	6.281.000,00	76,03
2.08.06.2.01	Program pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	172.901.000,00	153.792.724,00	19.108.276,00	88,95
2.08.06.2.02	Program penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	102.717.300,00	100.692.300,00	2.025.000,00	98,03
2.08.07.2.01	Program pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	87.593.000,00	67.298.000,00	20.295.000,00	76,63
2.08.07.2.02	Program penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	290.084.100,00	156.249.200,00	133.834.900,00	53,86
2.08.07.2.03	Program penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	71.253.725,00	37.568.600,00	33.685.125,00	52,73
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2.01	Tenaga Kerja				
2.01.01	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	4.850.104.516,00	4.590.118.648,00	259.985.868,00	94,64
2.07.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.102.795.909,00	1.963.104.573,00	139.691.336,00	93,36
2.07.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	28.050.000,00	28.050.000,00	-	100,00
2.07.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	235.137.880,00	220.552.598,00	14.585.282,00	93,80
2.07.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6.312.500,00	5.426.000,00	886.500,00	85,96
2.07.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	61.780.000,00	43.899.100,00	17.880.900,00	71,06
2.07.03.2.01	Program pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	254.790.689,00	242.318.874,00	12.471.815,00	95,11
2.07.04.2.01	Program pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota	398.945.188,00	398.290.000,00	655.188,00	99,84

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.07.04.2.03	Program pengelolaan informasi pasar kerja	10.740.500,00	8.974.500,00	1.766.000,00	83,56
2.07.05.2.02	Program pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	22.126.000,00	20.846.000,00	1.280.000,00	94,21
2.17.03.2.01	Program pemeriksaan dan pengawasan koperasi. koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	17.840.000,00	17.290.000,00	550.000,00	96,92
2.17.04.2.01	Program penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	37.099.000,00	25.438.000,00	11.661.000,00	68,57
2.17.05.2.01	Program pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koprasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	45.472.150,00	44.703.400,00	768.750,00	98,31
2.17.07.2.01	Program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.322.195.000,00	1.275.547.940,00	46.647.060,00	96,47
2.17.08.2.01	Program. pengembangan usaha mikro dengan orintasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	209.450.000,00	199.666.800,00	9.783.200,00	95,33
3.32.02.2.01	Program pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi	63.719.700,00	63.392.150,00	327.550,00	99,49
3.32.03.2.01	Program penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	33.650.000,00	32.618.713,00	1.031.287,00	96,94
2.03.01	Pangan				
2.09.01	Dinas Pertanian dan Pangan	9.327.916.687,00	8.857.196.583,00	470.720.104,00	94,95
2.09.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	3.211.290.535,00	2.989.836.212,00	221.454.323,00	93,10
2.09.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	51.000.000,00	50.945.670,00	54.330,00	99,89
2.09.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	247.251.020,00	217.763.360,00	29.487.660,00	88,07
2.09.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	61.898.750,00	39.306.253,00	22.592.497,00	63,50
2.09.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	84.180.000,00	82.683.212,00	1.496.788,00	98,22
2.09.03.2.01	Program penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	24.349.400,00	24.349.400,00	-	100,00
2.09.03.2.04	Program pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	330.000.000,00	330.000.000,00	-	100,00

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.09.05.2.01	Program penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	39.877.000,00	35.967.000,00	3.910.000,00	90,19
3.27.02.2.01	Program pengawasan penggunaan sarana pertanian	1.625.595.150,00	1.510.532.936,00	115.062.214,00	92,92
3.27.02.2.03	Program peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	942.742.700,00	919.948.790,00	22.793.910,00	97,58
3.27.02.2.06	Program penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	5.018.000,00	3.510.000,00	1.508.000,00	69,95
3.27.03.2.01	Program pengembangan prasarana pertanian	31.780.000,00	28.540.000,00	3.240.000,00	89,80
3.27.03.2.02	Program pembangunan prasarana pertanian	718.700.000,00	715.000.000,00	3.700.000,00	99,49
3.27.04.2.01	Program penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	244.228.032,00	233.028.000,00	11.200.032,00	95,41
3.27.04.2.03	Program pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	194.500.000,00	194.500.000,00	-	100,00
3.27.05.2.01	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	233.041.000,00	232.374.100,00	666.900,00	99,71
3.27.07.2.01	Program pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.282.465.100,00	1.248.911.650,00	33.553.450,00	97,38
2.11	Lingkungan Hidup				
2.11.00	Dinas Lingkungan Hidup	1.994.364.388,00	1.944.899.419,00	49.464.969,00	97,51
2.11.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.516.642.313,00	1.480.240.459,00	36.401.854,00	97,60
2.11.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	41.428.000,00	35.920.000,00	5.508.000,00	86,70
2.11.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	97.557.375,00	91.905.800,00	5.651.575,00	94,21
2.11.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	19.507.700,00	19.289.000,00	218.700,00	98,88
2.11.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	84.570.000,00	84.157.960,00	412.040,00	99,51
2.11.02.2.01	Program rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota	175.160.000,00	175.160.000,00	-	100,00
2.11.03.2.03	Program pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	24.866.000,00	24.730.000,00	136.000,00	99,45
2.11.06.2.01	Program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pph diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	19.736.000,00	19.152.000,00	584.000,00	97,04
2.11.11.2.01	Program pengelolaan sampah	14.897.000,00	14.344.200,00	552.800,00	96,29
2.12	Administrasi Kependudukan dan Sipil				
2.12.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.312.241.082,00	2.962.387.110,00	349.853.972,00	89,44

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.12.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.728.950.807,00	1.558.928.960,00	170.021.847,00	90,17
2.12.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	20.900.000,00	20.900.000,00	-	100,00
2.12.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	34.514.825,00	34.512.732,00	2.093,00	99,99
2.12.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72.682.000,00	72.682.000,00	-	100,00
2.12.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	77.560.000,00	77.555.000,00	5.000,00	99,99
2.12.02.2.01	Program pelayanan pendaftaran penduduk	764.882.450,00	587.909.900,00	176.972.550,00	76,86
2.12.03.2.01	Program pelayanan pencatatan sipil	189.791.000,00	187.328.518,00	2.462.482,00	98,70
2.12.04.2.03	Program penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	422.960.000,00	422.570.000,00	390.000,00	99,91
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.13.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.647.344.599,00	3.310.671.359,00	336.673.240,00	90,77
2.13.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.076.369.791,00	1.962.471.164,00	113.898.627,00	94,51
2.13.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	34.750.000,00	34.750.000,00	-	100,00
2.13.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	260.357.195,00	186.367.580,00	73.989.615,00	71,58
2.13.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	87.686.870,00	80.548.000,00	7.138.870,00	91,86
2.13.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	21.195.900,00	15.010.000,00	6.185.900,00	70,82
2.13.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	102.080.000,00	86.757.252,00	15.322.748,00	84,99
2.13.02.2.01	Program penyelenggaraan penataan desa	38.909.000,00	24.833.000,00	14.076.000,00	63,82
2.13.04.2.01	Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	245.794.000,00	183.776.760,00	62.017.240,00	74,95
2.13.05.2.01	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	780.201.843,00	736.157.603,00	44.044.240,00	94,35
2.15	Perhubungan				
2.15.00	Dinas Perhubungan	2.965.701.362,00	2.851.969.137,00	113.732.225,00	96,17
2.15.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.548.753.963,00	1.488.035.460,00	60.718.503,00	96,08
2.15.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	105.057.000,00	98.104.000,00	6.953.000,00	93,38
2.15.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	442.961.099,00	404.262.339,00	38.698.760,00	91,26
2.15.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3.480.000,00	3.441.500,00	38.500,00	98,89

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.15.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	80.600.000,00	80.522.428,00	77.572,00	99,90
2.15.02.2.02	Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	84.950.000,00	84.118.200,00	831.800,00	99,02
2.15.02.2.05	Program pengujian berkala kendaraan bermotor	45.894.000,00	43.375.360,00	2.518.640,00	94,51
2.15.02.2.06	Program pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	36.365.500,00	36.365.000,00	500,00	100,00
2.15.02.2.07	Program persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	3.890.000,00	3.890.000,00	-	100,00
2.15.02.2.08	Program audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	62.589.800,00	62.479.800,00	110.000,00	99,82
2.15.02.2.09	Program penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	418.340.000,00	415.260.000,00	3.080.000,00	99,26
2.15.03.2.07	Program penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	3.890.000,00	3.890.000,00	-	100,00
2.15.03.2.13	Program pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	65.034.000,00	62.819.060,00	2.214.940,00	96,59
2.16	Komunikasi dan Informatika				
2.16.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.394.693.652,00	3.948.262.363,00	446.431.289,00	89,94
2.16.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.612.403.978,00	1.310.249.813,00	302.154.165,00	81,26
2.16.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00
2.16.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	251.255.125,00	242.352.082,00	8.902.043,00	96,46
2.16.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4.243.500,00	4.243.500,00	-	100,00
2.16.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	83.928.500,00	68.169.000,00	15.579.500,00	81,22
2.16.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	61.780.000,00	61.666.256,00	113.744,00	99,82
2.16.02.2.01	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	438.034.700,00	402.946.638,00	35.088.062,00	91,99
2.16.03.2.01	Program pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.421.030.736,00	1.366.026.032,00	55.004.704,00	96,13
2.16.03.2.02	Program pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	276.806.113,00	221.570.672,00	55.235.441,00	80,05

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
2.20.02.2.01	Program penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	155.427.000,00	153.497.700,00	1.929.300,00	98,76
2.21.02.2.01	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	65.034.000,00	62.819.060,00	2.215.000,00	96,59
2.18	Penanaman Modal				
2.18.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	10.002.014.424,00	8.087.115.973,00	1.914.898.451,00	80,85
2.18.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.164.603.691,00	1.876.931.216,00	287.672.475,00	86,71
2.18.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00
2.18.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	271.392.230,00	253.990.376,00	17.401.854,00	93,59
2.18.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	18.523.000,00	12.478.300,00	6.044.700,00	67,37
2.18.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	205.860.000,00	203.787.660,00	2.072.340,00	98,99
2.18.02.2.01	Program penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	19.650.000,00	15.380.000,00	4.270.000,00	78,27
2.18.03.2.01	Program penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	36.000.000,00	19.147.500,00	16.852.500,00	53,19
2.18.04.2.01	Program pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	31.549.500,00	31.130.000,00	419.500,00	98,67
2.18.05.2.01	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	388.654.000,00	230.518.600,00	158.135.400,00	59,31
2.18.06.2.01	Program pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	65.068.000,00	62.445.292,00	2.622.708,00	95,97
3.30.03.2.01	Program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1.024.150.800,00	791.539.925,00	232.610.875,00	77,29
3.30.04.2.01	Program menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota	41.450.000,00	32.220.000,00	9.230.000,00	77,73
3.30.04.2.02	Program pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	489.084.800,00	457.625.000,00	31.459.800,00	93,57
3.30.04.2.03	Program pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	23.500.000,00	14.590.000,00	8.910.000,00	62,09
3.30.06.2.01	Program pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan	133.099.000,00	70.190.164,00	62.908.836,00	52,74

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
3.31.02.2.01	Program penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	5.064.679.403,00	3.990.391.940,00	1.074.287.463,00	78,79
2.23	Perpustakaan				
2.23.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.897.043.240,00	1.713.054.522,00	183.988.718,00	90,30
2.23.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.185.161.627,00	1.061.693.926,00	123.467.701,00	89,58
2.23.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00
2.23.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	155.165.113,00	149.164.358,00	54.590.355,00	64,82
2.23.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8.346.500,00	8.346.500,00	-	100,00
2.23.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	122.860.000,00	122.855.438,00	4.562,00	100,00
2.23.02.2.01	Program pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	82.920.000,00	82.500.000,00	420.000,00	99,49
2.23.02.2.02	Program pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	126.375.000,00	124.715.000,00	1.660.000,00	98,69
2.24.02.2.02	Program pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	200.265.000,00	147.829.300,00	52.435.700,00	73,82
3	Urusan Pilihan				
3.25	Kelautan dan Perikanan				
3.25.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.912.341.291,00	4.538.536.567,00	373.804.724,00	92,39
3.25.01.2.01	Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.403.650,00	8.556.000,00	847.650,00	90,99
3.25.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.511.692.560,00	1.308.816.767,00	202.875.793,00	86,58
3.25.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	18.150.000,00	18.150.000,00	-	100,00
3.25.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	210.625.020,00	162.108.890,00	48.516.130,00	76,97
3.25.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	8.118.000,00	8.100.000,00	18.000,00	99,78
3.25.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	43.339.000,00	39.263.000,00	4.076.000,00	90,60
3.25.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	61.610.000,00	46.869.208,00	12.838.008,00	84,59
3.25.03.2.02	Program pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	2.575.354.925,00	2.499.481.488,00	75.873.437,00	97,05
3.25.04.2.02	Program pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	464.908.106,00	440.431.214,00	24.476.892,00	94,74
3.25.04.2.04	Program pengelolaan pembudidayaan ikan	9.140.000,00	6.760.000,00	2.380.000,00	73,96
3.02	Pariwisata				
3.02.01	Dinas Pariwisata	5.211.787.021,00	4.635.204.105,00	576.582.916,00	88,93
3.26.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.379.916.371,00	1.164.214.247,00	215.702.124,00	84,37
3.26.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	20.350.000,00	20.350.000,00	-	100,00

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
3.26.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	258.019.525,00	167.205.836,00	83.323.305,00	64,82
3.26.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	473.360.000,00	473.360.000,00	-	100,00
3.26.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6.561.400,00	6.165.000,00	396.400,00	93,96
3.26.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	47.460.000,00	46.522.460,00	937.540,00	98,02
3.26.02.2.01	Program pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	1.783.144.100,00	1.650.804.100,00	132.340.000,00	92,58
3.26.02.2.02	Program pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	297.921.500,00	261.962.622,00	35.958.878,00	87,93
3.26.02.2.04	Program penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	9.180.000,00	8.814.000,00	366.000,00	96,01
3.26.03.2.01	Program pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik. destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	753.466.500,00	691.055.000,00	62.411.500,00	91,72
3.26.04.2.02	Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	49.556.000,00	44.921.500,00	4.634.500,00	90,65
3.26.05.2.01	Program pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	79.768.000,00	55.304.340,00	24.463.660,00	69,33
3.26.05.2.02	Program pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	53.083.625,00	44.525.000,00	8.558.625,00	83,88
4	Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
4.01.01	Bagian Pemerintahan	1.031.320.721,00	976.469.933,00	54.850.788,00	94,68
4.01.01.2.01	Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	318.590.232,00	318.460.412,00	129.820,00	99,96
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	56.692.000,00	47.452.000,00	9.240.000,00	83,70
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	164.115.089,00	158.115.640,00	5.999.449,00	96,34
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	16.892.500,00	16.482.500,00	410.000,00	97,57
4.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	43.278.535,00	601.465,00	98,63
4.01.02.2.01	Program administrasi tata pemerintahan	409.650.900,00	371.180.846,00	38.470.054,00	90,61
4.01.02	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.871.885.750,00	2.631.039.448,00	240.846.302,00	91,61
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	60.530.000,00	60.530.000,00	-	100,00
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	308.335.250,00	261.294.370,00	47.040.880,00	84,74
4.01.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	14.873.200,00	14.873.200,00	-	100,00

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8.204.000,00	8.192.950,00	11.050,00	99,87
4.01.02.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	47.460.000,00	47.092.000,00	368.000,00	99,22
4.01.02.2.02	Program pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	2.424.233.300,00	2.230.806.928,00	193.426.372,00	92,02
4.01.03	Bagian Hukum	744.116.080,00	617.493.760,00	126.622.320,00	82,98
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	37.644.000,00	37.644.000,00	-	100,00
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	29.425.000,00	29.425.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	215.366.080,00	200.894.240,00	14.471.840,00	93,28
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.748.000,00	4.748.000,00	-	100,00
4.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	40.572.520,00	3.307.480,00	92,46
4.01.02.2.03	Program fasilitasi dan koordinasi hukum	413.053.000,00	304.210.000,00	108.843.000,00	73,65
4.01.04	Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam	674.992.410,00	644.232.547,00	30.759.863,00	95,44
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	37.404.000,00	37.404.000,00	-	100,00
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	104.882.810,00	100.049.000,00	4.833.810,00	95,39
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12.778.900,00	12.774.000,00	4.900,00	99,96
4.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	43.873.847,00	6.153,00	99,99
4.01.03.2.01	Program pelaksanaan kebijakan perekonomian	321.141.900,00	304.290.900,00	16.851.000,00	94,75
4.01.03.2.04	Program pemantauan kebijakan sumber daya alam	147.204.800,00	138.140.800,00	9.064.000,00	93,84
4.01.05	Bagian Administrasi Pembangunan	1.092.688.954,00	1.076.395.412,00	16.923.542,00	98,51
4.01.01.2.01	Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18.000.000,00	15.750.000,00	2.250.000,00	87,50
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	49.227.000,00	46.718.000,00	2.509.000,00	94,90
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	136.349.954,00	134.509.700,00	1.840.254,00	98,64
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10.311.000,00	10.131.000,00	180.000,00	98,25
4.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43.880.000,00	41.275.080,00	2.604.920,00	97,69
4.01.03.2.02	Program pelaksanaan administrasi pembangunan	75.760.000,00	75.480.000,00	280.000,00	99,63
4.01.03.2.03	Program pengelolaan pengadaan barang dan jasa	748.711.000,00	742.081.632,00	6.629.368,00	99,11

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
4.01.06	Bagian Umum	20.105.375.484,00	18.802.193.240,00	1.303.182.244,00	93,52
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	6.510.959.648,00	6.245.347.277,00	265.612.371,00	95,92
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	34.050.000,00	32.550.000,00	1.500.000,00	95,59
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	2.067.326.125,00	1.780.577.516,00	286.748.609,00	86,13
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7.114.368.360,00	6.893.822.142,00	220.547.218,00	96,90
4.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.099.809.185,00	929.603.201,00	170.205.984,00	84,52
4.01.01.2.11	Program administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	1.699.272.928,00	1.395.643.434,00	303.629.494,00	82,13
4.01.01.2.12	Program fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	1.579.589.238,00	1.523.949.670,00	55.639.568,00	96,48
4.01.07	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	742.664.952,00	714.571.472,00	28.093.480,00	96,22
4.01.01.2.01	Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	900.000,00	90.000,00	-	100,00
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	39.926.000,00	37.994.000,00	1.932.000,00	95,16
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	9.350.000,00	9.350.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	242.205.202,00	230.373.217,00	11.831.985,00	95,15
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4.523.750,00	4.485.000,00	38.750,00	99,14
4.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40.300.000,00	40.219.255,00	80.745,00	99,80
4.01.01.2.14	Program pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	405.460.000,00	391.250.000,00	14.210.000,00	96,50
4.01.08	Bagian Organisasi	569.657.400,00	519.530.315,00	50.127.085,00	91,20
4.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	38.540.000,00	37.340.000,00	1.200.000,00	96,89
4.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00
4.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	79.232.500,00	78.387.243,00	845.257,00	98,93
4.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3.500.000,00	3.497.000,00	3.000,00	99,91
4.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40.300.000,00	40.215.270,00	84.730,00	99,79
4.01.01.2.13	Program penataan organisasi	401.484.900,00	353.490.802,00	47.994.098,00	88,05
6.01	Pengawasan				
6.01.00	Inspektorat Daerah	3.085.607.893,00	2.570.618.404,00	514.989.489,00	83,31
6.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.040.790.493,00	1.837.751.961,00	203.038.532,00	90,05
6.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	103.743.000,00	76.266.500,00	27.476.500,00	73,51
6.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	188.105.000,00	150.834.500,00	37.270.500,00	80,19

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
6.01.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	24.091.350,00	21.684.203,00	2.407.147,00	90,01
6.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	18.202.250,00	16.073.000,00	2.129.250,00	88,30
6.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	82.990.000,00	81.667.040,00	1.322.960,00	98,41
6.01.02.2.01	Program penyelenggaraan pengawasan internal	336.034.800,00	202.700.000,00	133.334.800,00	60,32
6.01.02.2.02	Program penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	112.060.000,00	47.870.000,00	64.190.000,00	42,72
6.01.03.2.02	Program pendampingan dan asistensi	179.591.000,00	135.771.200,00	43.819.800,00	75,60
5.01	Perencanaan				
5.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.280.885.269,00	4.121.011.447,00	159.873.822,00	96,27
5.01.01.2.01	Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	78.731.800,00	78.264.500,00	467.300,00	99,41
5.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.692.060.135,00	1.655.979.543,00	36.080.592,00	97,87
5.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	195.368.000,00	145.977.055,00	49.390.945,00	74,72
5.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	338.281.934,00	305.512.520,00	32.769.414,00	90,31
5.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	21.019.500,00	20.190.000,00	829.500,00	96,05
5.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	98.500.000,00	92.532.956,00	5.967.044,00	93,94
5.01.02.2.01	Program penyusunan perencanaan dan pendanaan	496.797.900,00	486.623.698,00	10.174.202,00	97,95
5.01.01.2.02	Program analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	68.100.000,00	68.100.000,00	-	100,00
5.01.01.2.03	Program pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	56.800.000,00	56.630.000,00	170.000,00	99,70
5.01.03.2.01	Program koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	585.858.000,00	565.295.480,00	20.562.520,00	96,49
5.01.03.2.02	Program koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam)	174.904.000,00	173.579.029,00	1.324.971,00	99,24
5.01.03.2.03	Program koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	464.056.000,00	461.977.588,00	2.078.412,00	99,55
5.05.02.2.01	Program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	10.438.000,00	10.349.078,00	88.922,00	99,15
5.02	Kuangan				
5.02.00	Badan Keuangan Daerah	115.588.490.271,00	103.408.218.330,00	12.180.271.941,00	89,46
5.02.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	3.952.762.701,00	3.529.784.606,00	422.978.095,00	89,30

**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
5.02.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	148.978.000,00	144.827.929,00	3.650.071,00	97,55
5.02.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	340.610.380,00	320.670.029,00	19.940.351,00	94,15
5.02.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	39.631.750,00	36.014.100,00	3.617.650,00	90,87
5.02.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	142.380.000,00	135.936.044,00	6.443.956,00	95,47
5.02.02.2.01	Program koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.039.521.540,00	969.900.310,00	69.621.230,00	93,30
5.02.02.2.02	Program koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	346.547.450,00	330.586.000,00	15.961.450,00	95,39
5.02.02.2.03	Program koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	464.184.900,00	448.159.769,00	16.025.131,00	96,55
5.02.02.2.04	Program penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	107.845.421.605,00	96.394.092.192,00	11.451.329.413,00	89,38
5.02.03.2.01	Program pengelolaan barang milik daerah	581.837.120,00	501.884.638,00	79.952.482,00	86,26
5.02.04.2.01	Program kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	686.614.825,00	596.362.713,00	90.252.112,00	86,86
5.03	Kepegawaian				
5.03.00	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	6.559.205.194,00	5.132.208.298,00	1.426.996.896,00	78,24
5.03.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.172.031.949,00	2.057.752.483,00	114.279.466,00	94,74
5.03.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	740.380.000,00	706.130.000,00	34.250.000,00	95,37
5.03.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	364.238.245,00	310.201.980,00	54.036.265,00	85,16
5.03.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	20.715.500,00	11.349.000,00	9.366.500,00	54,79
5.03.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	68.940.000,00	63.751.130,00	5.188.870,00	92,47
5.03.02.2.01	Program pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	268.028.000,00	178.740.325,00	89.287.675,00	66,69
5.03.02.2.02	Program mutasi dan promosi ASN	700.827.500,00	257.840.920,00	442.986.580,00	36,79
5.03.02.2.03	Program pengembangan kompetensi ASN	491.342.000,00	341.509.296,00	149.832.704,00	69,51
5.03.02.2.04	Program penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	72.517.000,00	65.208.801,00	7.308.199,00	89,92
5.04.02.2.01	Program pengembangan kompetensi teknis	14.760.000,00	-	14.760.000,00	-
5.04.02.2.02	Program sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1.645.425.000,00	1.139.724.363,00	505.700.637,00	69,27
4.02	Sekretariat DPRD				
4.02.00	Sekretariat DPRD	21.559.511.825,00	21.234.555.710,00	324.956.115,00	98,49
4.02.01.2.01	Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16.108.000,00	15.272.000,00	836.000,00	94,81
4.02.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.709.653.792,00	1.626.946.191,00	82.707.601,00	95,16

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
4.02.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	66.890.600,00	59.921.375,00	6.969.225,00	89,58
4.02.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	325.559.465,00	320.178.390,00	5.381.075,00	98,35
4.02.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	112.076.500,00	100.331.238,00	11.745.262,00	89,52
4.02.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	621.167.500,00	610.514.080,00	10.653.420,00	98,28
4.02.01.2.15	Program layanan keuangan dan kesejahteraan dprd	7.169.502.244,00	7.163.000.678,00	6.501.566,00	99,91
4.02.01.2.16	Program layanan administrasi dprd	1.726.670.724,00	1.643.883.792,00	82.786.932,00	95,21
4.02.02.2.01	Program pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	461.548.000,00	428.269.000,00	33.279.000,00	92,79
4.02.02.2.03	Program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	57.070.000,00	55.440.000,00	1.630.000,00	97,14
4.02.02.2.04	Program peningkatan kapasitas dprd	6.070.102.000,00	6.016.586.759,00	53.515.241,00	99,12
4.02.02.2.05	Program penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	2.914.555.000,00	2.889.130.000,00	25.425.000,00	99,13
4.02.02.2.08	Program fasilitasi tugas dprd	308.608.000,00	305.082.207,00	3.525.793,00	98,86
7.01	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan				
7.01.01	Kecamatan Sabu Barat	2.797.180.612,00	2.580.630.534,00	216.550.078,00	92,26
7.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.149.075.282,00	2.002.759.614,00	146.315.668,00	93,19
7.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	26.750.000,00	26.750.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	85.154.030,00	71.750.880,00	13.403.150,00	84,26
7.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	33.682.300,00	21.363.000,00	12.319.300,00	63,43
7.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	47.460.000,00	46.787.040,00	672.960,00	98,58
7.01.02.2.01	Program koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	388.039.000,00	359.500.000,00	28.539.000,00	92,65
7.01.03.2.01	Program kegiatan pemberdayaan kelurahan	65.280.000,00	49.980.000,00	15.300.000,00	76,56
7.01.03.2.02	Program kegiatan pemberdayaan kelurahan	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00
7.01.02	Kecamatan Sabu Timur	3.509.166.779,00	3.423.567.671,00	85.599.108,00	97,56
7.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	2.454.656.542,00	2.374.354.331,00	80.302.211,00	96,73
7.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	82.966.170,00	82.955.250,00	10.920,00	99,99
7.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	33.298.250,00	33.193.000,00	105.250,00	99,68
7.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	73.617.817,00	73.337.090,00	280.727,00	99,62

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
7.01.02.2.01	Program koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	742.020.000,00	737.120.000,00	4.900.000,00	99,34
7.01.03.2.02	Program kegiatan pemberdayaan kelurahan	33.080.000,00	33.080.000,00	-	100,00
7.01.05.2.01	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	56.528.000,00	56.528.000,00	-	100,00
7.01.03	Kecamatan Sabu Liae	1.580.707.451,00	1.354.560.872,00	226.146.579,00	85,69
7.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.148.090.906,00	1.019.300.492,00	128.790.414,00	88,78
7.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	132.908.545,00	74.120.800,00	58.787.745,00	55,77
7.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	13.488.000,00	8.103.000,00	5.385.000,00	60,08
7.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	74.425.000,00	69.376.580,00	5.048.420,00	93,22
7.01.02.2.01	Program koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	77.650.000,00	54.190.000,00	23.460.000,00	69,79
7.01.03.2.01	Program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	10.880.000,00	10.880.000,00	-	100,00
7.01.05.2.01	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	39.625.000,00	35.290.000,00	4.335.000,00	100,00
7.01.06.2.01	Program fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	45.560.000,00	45.390.000,00	170.000,00	99,63
7.01.04	Kecamatan Hawu Mehara	1.968.523.786,00	1.692.784.294,00	275.739.492,00	85,99
7.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.454.048.136,00	1.255.706.537,00	198.341.599,00	86,36
7.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	52.284.900,00	41.972.100,00	10.312.800,00	80,28
7.01.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4.347.000,00	4.347.000,00	-	100,00
7.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	55.338.750,00	30.709.162,00	24.629.588,00	55,49
7.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	81.355.000,00	59.209.495,00	22.145.505,00	72,78
7.01.01.2.02	Program koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	66.350.000,00	62.350.000,00	4.000.000,00	93,97
7.01.03.2.01	Program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	23.800.000,00	10.220.000,00	13.580.000,00	42,94
7.01.05.2.01	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	139.800.000,00	139.450.000,00	350.000,00	99,75
7.01.06.2.01	Program fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	71.400.000,00	69.020.000,00	2.380.000,00	96,67
7.01.05	Kecamatan Raijua	3.227.474.626,00	3.040.617.597,00	186.857.029,00	94,21
7.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.771.955.619,00	1.656.717.297,00	115.238.322,00	93,50

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
7.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	21.450.000,00	21.450.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	128.212.750,00	122.954.800,00	5.257.950,00	95,90
7.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	131.190.000,00	118.388.000,00	12.802.000,00	90,24
7.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	148.256.257,00	146.435.000,00	1.821.257,00	98,77
7.01.02.2.01	Program koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	856.957.500,00	805.220.000,00	51.737.500,00	93,96
7.01.05.2.01	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	169.452.500,00	169.452.500,00	-	100,00
7.01.06	Kecamatan Sabu Tengah	1.769.238.095,00	1.614.120.249,00	155.117.846,00	91,23
7.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	1.369.666.245,00	1.243.763.104,00	125.903.141,00	90,81
7.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00
7.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	82.903.600,00	54.650.000,00	28.253.600,00	65,92
7.01.01.2.07	Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5.737.500,00	5.737.500,00	-	100,00
7.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	19.532.000,00	19.472.765,00	59.235,00	99,70
7.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	87.791.250,00	87.686.480,00	104.770,00	99,88
7.01.02.2.01	Program koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	41.190.000,00	40.432.900,00	757.100,00	98,12
7.01.05.2.01	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	44.857.500,00	44.857.500,00	-	100,00
7.01.06.2.01	Program fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	99.960.000,00	99.920.000,00	40.000,00	99,96
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
8.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.173.634.382,00	1.823.900.224,00	349.734.158,00	83,91
8.01.01.2.02	Program administrasi keuangan perangkat daerah	777.617.872,00	607.868.460,00	169.749.412,00	78,17
8.01.01.2.05	Program administrasi kepegawaian perangkat daerah	11.912.000,00	9.588.300,00	2.323.700,00	87,45
8.01.01.2.06	Program administrasi umum perangkat daerah	185.940.010,00	160.097.339,00	25.842.671,00	86,10
8.01.01.2.08	Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3.342.500,00	2.185.000,00	1.157.500,00	65,37
8.01.01.2.09	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	51.520.000,00	47.720.045,00	3.799.955,00	92,62
8.01.02.2.01	Program perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	107.146.000,00	97.417.360,00	9.728.640,00	90,92



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENCAPAIAN KINERJA APBD TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan. Organisasi. Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
8.01.03.2.01	Program perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan	568.805.000,00	562.330.000,00	6.475.000,00	98,86
8.01.04.2.01	Program perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	18.440.000,00	6.840.000,00	11.600.000,00	37,09
8.01.05.2.01	Program perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	14.190.000,00	8.010.000,00	6.180.000,00	56,45
8.01.01.2.02	Program perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	426.121.000,00	315.243.720,00	110.877.280,00	73,98

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
REKONSILIASI BANK
Periode 1 Desember s/d 31 Desember 2022

1. Saldo Kas umum daerah Menurut Buku		54.094.452.314,02
2. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank :		
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000027-1 RKUD	21.841.569.390,58	
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000039-6 PAD	10.595.511,44	
Rekening Giro Bank NTT 021-01.05.000086-4 PBB P2	-	
Rekening Tabungan BRI 4673-01-007436-53-2	2.206.016.926,00	
Rekening Deposito BRI 467.301.000.051.404	20.000.000.000,00	
Rekening Deposito BRI 4673-01-000308-40-3	10.000.000.000,00	
		<u>54.058.181.828,02</u>
<i>Selisih</i>		36.270.486,00
Keterangan Selisih		
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku, Belum dicatat oleh Bank :		
- Bukti Lain yang Sah	-	
- Dst	-	
B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku, Belum dicatat oleh Bank :		
Bank Kurang debet SP2D Nomor 24.21/04.0/000006/GU/2.16.2.20.2.21.15.0000/P.03/11/2022, TANGGAL - 25 November 2022 (GU Tahap VI Dinas KOMINFO)	(50,00)	
C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku :		
- Bukti Lain yang Sah	-	
- Dst	-	
D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku :		
- Kesalahan posting pajak SP2D No. 3081/SP2D-LS/1.03.01.01/2015	22.554.155,00	
- Kelebihan posting Pajak SP2D No. 2417/SP2D-LS/4.01.04.01/2019 (Dobel)	13.068.181,00	
- Kelebihan posting Pajak No. 3537/SP2D-LS/1.01.01.01/2019 (Dobel)	648.200,00	
- Bukti Lain yang Sah	-	
- Dst	-	
		36.270.486,00
		(0,00)

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-2



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Per 31 Desember 2022

No	Nama SKPD	Saldo 2021	Penyetoran		UP/GU/TU 2022				Sisa RC	Saldo Kas
			Tanggal	Jumlah	SP2D	SPJ	Penyetoran	Sisa		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	994.246.690,00	994.246.690,00	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	1.904.038.563,00	1.809.552.603,00	94.485.960,00	-	-	-
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	5.116.731.488,00	4.979.529.629,00	137.201.859,00	-	-	-
4	Puskesmas Ledunu	-	-	-	695.018.900,00	616.818.900,00	78.200.000,00	-	2.139,29	2.139,29
5	Puskesmas Daieko	-	-	-	840.758.800,00	840.518.800,00	240.000,00	-	2.884,63	2.884,63
6	Puskesmas Eilogo	-	-	-	849.762.500,00	848.925.000,00	837.500,00	-	10.116,59	10.116,59
7	Puskesmas Seba	-	-	-	1.301.626.000,00	1.246.921.000,00	54.705.000,00	-	9.885,56	9.885,56
8	Puskesmas Eimadake	-	-	-	851.062.900,00	774.462.900,00	76.600.000,00	-	25.046,36	25.046,36
9	Puskesmas Bolou	-	-	-	749.695.300,00	749.645.300,00	50.000,00	-	6.768,87	6.768,87
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	1.627.125.922,00	1.627.084.689,00	41.233,00	-	-	-
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	626.128.744,00	623.664.144,00	2.464.600,00	-	-	-
12	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	847.013.375,00	839.007.275,00	8.006.100,00	-	-	-
13	Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	897.797.444,00	897.797.444,00	-	-	-	-
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	1.633.355.787,00	1.551.348.502,00	82.007.285,00	-	-	-
15	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	-	-	841.642.400,00	822.572.700,00	19.069.700,00	-	-	-
16	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	900.601.068,00	881.210.968,00	19.390.100,00	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	312.708.960,00	289.498.960,00	23.210.000,00	-	-	-
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	1.000.928.000,00	921.420.750,00	79.507.250,00	-	-	-
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	748.701.752,00	625.766.352,00	122.935.400,00	-	-	-
20	Dinas Perhubungan	-	-	-	1.239.254.227,00	1.153.835.427,00	85.418.800,00	-	-	-
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	970.815.385,00	942.070.495,00	28.744.890,00	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	1.564.787.737,00	1.551.719.757,00	13.067.980,00	-	-	-
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	403.339.196,00	387.400.596,00	15.938.600,00	-	-	-
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	462.400.963,00	462.345.063,00	55.900,00	-	-	-
25	Dinas Pariwisata	-	-	-	1.208.424.977,00	1.155.845.758,00	52.579.219,00	-	-	-
26	Bagian Pemerintahan	-	-	-	780.558.921,00	763.554.421,00	17.004.500,00	-	-	-
27	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	702.565.020,00	681.275.020,00	21.290.000,00	-	-	-
28	Bagian Hukum	-	-	-	410.335.260,00	394.859.760,00	15.475.500,00	-	-	-
29	Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-	501.547.547,00	501.054.547,00	493.000,00	-	-	-
30	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	584.525.132,00	579.208.412,00	5.316.720,00	-	-	-
31	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	-	-	-	5.812.990.680,00	5.617.091.731,00	195.898.949,00	-	-	-

No	Nama SKPD	Saldo 2021	Penyetoran		UP/GU/TU 2022				Sisa RC	Saldo Kas
			Tanggal	Jumlah	SP2D	SPJ	Penyetoran	Sisa		
32	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan	-		-	711.079.272,00	676.577.472,00	34.501.800,00	-	-	-
33	Bagian Organisasi	-		-	434.925.315,00	406.940.315,00	27.985.000,00	-	-	-
34	Sekretariat Dewan	-		-	12.371.191.690,00	11.772.486.841,00	598.704.849,00	-	-	-
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	1.890.383.420,00	1.777.781.904,00	112.601.516,00	-	-	-
36	Badan Keuangan Daerah	-		-	2.144.966.382,00	2.144.966.382,00	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1.414.595.306,00	1.391.129.192,00	23.466.114,00	-	-	-
38	Inspektorat Daerah	-		-	700.533.913,00	657.166.443,00	43.367.470,00	-	-	-
39	Kecamatan Sabu Barat	-		-	334.573.090,00	334.570.920,00	2.170,00	-	-	-
40	Kecamatan Sabu Timur	-		-	457.211.990,00	447.341.340,00	9.870.650,00	-	-	-
41	Kecamatan Sabu Liae	-		-	334.395.380,00	330.060.380,00	4.335.000,00	-	-	-
42	Kecamatan Hawu Mehara	-		-	294.702.757,00	294.702.757,00	-	-	-	-
43	Kecamatan Raijua	-		-	614.290.300,00	614.100.300,00	190.000,00	-	-	-
44	Kecamatan Sabu Tengah	-		-	378.155.345,00	359.957.145,00	18.198.200,00	-	-	-
45	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-		-	462.893.004,00	452.071.764,00	10.821.240,00	-	-	-
	JUMLAH	-		-	59.924.386.802,00	57.790.106.748,00	2.134.280.054,00	-	56.841,30	56.841,30

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-3



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	KENAIKAN/PENURUNAN PIUTANG			PIUTANG
				Koreksi	SKP/PIUTANG 2022	PELUNASAN	
PIUTANG PAJAK							
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.385.490.141,00	-	3.469.152.125,00	3.302.722.505,00	1.551.919.761,00
2	Badan Keuangan Daerah	Pajak Rumah Makan	2.794.000,00	-	607.468.382,00	607.562.382,00	2.700.000,00
3	Badan Keuangan Daerah	Pajak Hotel	485.000,00	-	40.110.000,00	40.340.000,00	255.000,00
4	Badan Keuangan Daerah	Pajak Reklame	11.668.000,00	-	83.386.813,00	95.054.813,00	-
5	Badan Keuangan Daerah	Pajak Bumi dan Bangunan	110.975.484,00	-	543.620.129,00	541.890.466,00	112.705.147,00
TOTAL PIUTANG PAJAK			1.511.412.625,00	-	4.743.737.449,00	4.587.570.166,00	1.667.579.908,00
PIUTANG RETRIBUSI							
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Klaim BPJS	-	-	96.912.000,00	-	96.912.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemakaian Jukung	217.200.000,00	-	-	-	217.200.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemakaian Lampara 2011	1.181.184.448,00	-	-	-	1.181.184.448,00
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Garam	-	1.344.198.900,00	-	-	1.344.198.900,00
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Los Pasar	71.997.000,00	-	10.606.250,00	5.208.000,00	77.395.250,00
TOTAL PIUTANG RETRIBUSI			1.470.381.448,00	1.344.198.900,00	107.518.250,00	5.208.000,00	2.916.890.598,00
PIUTANG LAIN - LAIN PAD YANG SAH							
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Denda Pajak Mineral Bukan Logam	1.071.097.677,30	-	-	-	1.071.097.677,30
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Pemanfaatan BMD	99.050.000,00	-	102.275.000,00	180.375.000,00	20.950.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Piutang PAD Pabrik RL	2.116.000.000,00	-	-	-	2.116.000.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Piutang Garam	1.423.198.900,00	(1.423.198.900,00)	-	-	-
5	Badan Keuangan Daerah	Remunerasi TDF	-	-	239.486,00	-	239.486,00
6	Badan Keuangan Daerah	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	12.200.000,00	-	-	-	12.200.000,00
7	Badan Keuangan Daerah	TP - FK	89.540.775,00	(7.120.775,00)	-	19.440.000,00	62.980.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	TP - FR	-	149.002.500,00	-	9.782.807,00	139.219.693,00
9	Badan Keuangan Daerah	TGR - TBK	156.790.000,00	-	-	-	156.790.000,00
10	Badan Keuangan Daerah	TGR - WGB	62.300.100,00	(3.000.000,00)	-	16.494.128,00	42.805.972,00
11	Badan Keuangan Daerah	TGR - VTBD	-	-	180.040.808,00	-	180.040.808,00
12	Badan Keuangan Daerah	TGR - AS	14.110.500,00	-	-	-	14.110.500,00
13	Sekretariat DPRD	TGR 2022 - 29 Orang	-	-	442.227.313,00	-	442.227.313,00
14	Badan Keuangan Daerah	TGR 2022 - 6 Orang	-	-	52.427.500,00	-	52.427.500,00

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-3



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	KENAIKAN/PENURUNAN PIUTANG			PIUTANG
				Koreksi	SKP/PIUTANG 2022	PELUNASAN	
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TGR 2022 - 8 Orang	-	-	40.040.000,00	-	40.040.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TGR 2022 - 1 Orang	-	-	14.645.000,00	-	14.645.000,00
17	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	TGR 2022 - 2 Orang	-	-	15.300.000,00	-	15.300.000,00
18	Sekretariat Daerah	TGR 2022 - 5 Orang	-	-	81.882.500,00	-	81.882.500,00
TOTAL PIUTANG LAIN - LAIN PAD YANG SAH			5.044.287.952,30	(1.284.317.175,00)	929.077.607,00	226.091.935,00	4.462.956.449,30
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT							
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Tunjangan Profesi Guru	-	-	1.887.389.400,00	-	1.887.389.400,00
TOTAL PIUTANG DANA BAGI HASIL			-	-	1.887.389.400,00	-	1.887.389.400,00
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA							
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil PKB	1.055.206.388,00	-	2.333.210.132,00	1.956.284.302,00	1.432.132.218,00
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil BBNKB	725.029.564,00	-	816.089.045,00	725.029.564,00	816.089.045,00
3	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Dana Bagi Hasil PBBKB	2.180.516.720,00	-	1.770.418.767,00	3.231.184.690,00	719.750.797,00
4	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	DBH Pajak Air Permukaan	3.246.283,00	-	99.838,00	3.246.283,00	99.838,00
5	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	DBH Pajak Rokok	-	-	9.266.786.672,00	7.690.755.389,00	1.576.031.283,00
TOTAL PIUTANG DANA BAGI HASIL			3.963.998.955,00	-	14.186.604.454,00	13.606.500.228,00	4.544.103.181,00
GRAND TOTAL PIUTANG PENDAPATAN			11.990.080.980,30	59.881.725,00	21.854.327.160,00	18.425.370.329,00	15.478.919.536,30

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-4.1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dinas PU)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur (Tahun)	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2010-2016	>5	920.561.409,00	-	-	-	920.561.409,00	920.561.409,00	-
2017	5	15.717.664,00	-	-	7.858.832,00	-	7.858.832,00	7.858.832,00
2018	4	190.637.910,00	-	-	95.318.955,00	-	95.318.955,00	95.318.955,00
2019	3	137.855.828,00	-	-	68.927.914,00	-	68.927.914,00	68.927.914,00
2020	2	-	-	-	-	-	-	-
2021	1	-	-	-	-	-	-	-
2022	<1	287.146.950,00	1.435.734,75	-	-	-	1.435.734,75	285.711.215,25
TOTAL		1.551.919.761,00	1.435.734,75	-	172.105.701,00	920.561.409,00	1.094.102.844,75	457.816.916,25

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (BAKEUDA)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2003-2016	>5	110.274.118,00	-	-	-	110.274.118,00	110.274.118,00	-
2017	4	-	-	-	-	-	-	-
2018	3	701.366,00	-	-	350.683,00	-	350.683,00	350.683,00
2019	2	-	-	-	-	-	-	-
2020	2	-	-	-	-	-	-	-
2021	1	-	-	-	-	-	-	-
2022	<1	1.729.663,00	8.648,80	-	-	-	8.648,80	1.721.014,20
TOTAL		112.705.147,00	8.648,80	-	350.683,00	110.274.118,00	110.633.449,80	2.071.697,20

Penyisihan Piutang Sewa Los Pasar & Penjualan Garam (PERINDAG)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2017	> 12 Bulan	20.257.000,00	-	-	-	20.257.000,00	20.257.000,00	-
2018	> 12 Bulan	1.371.458.900,00	-	-	-	1.371.458.900,00	1.371.458.900,00	-
2021	> 12 Bulan	19.272.000,00	-	-	-	19.272.000,00	19.272.000,00	-
2022	3-12 Bulan	10.606.250,00	-	-	5.303.125,00	-	5.303.125,00	5.303.125,00
TOTAL		1.421.594.150,00	-	-	5.303.125,00	1.410.987.900,00	1.416.291.025,00	5.303.125,00

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-4.1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Penyisihan Piutang Lampara & Jukung (DKP)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2011	> 12 Bulan	3.750.000,00	-	-	-	3.750.000,00	3.750.000,00	-
2012	> 12 Bulan	49.950.000,00	-	-	-	49.950.000,00	49.950.000,00	-
2013	> 12 Bulan	579.508.628,00	-	-	-	579.508.628,00	579.508.628,00	-
2014	> 12 Bulan	456.785.180,00	-	-	-	456.785.180,00	456.785.180,00	-
2015	> 12 Bulan	308.390.640,00	-	-	-	308.390.640,00	308.390.640,00	-
TOTAL		1.398.384.448,00	-	-	-	1.398.384.448,00	1.398.384.448,00	-

Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dinas PU)

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2012	6 Tahun	12.538.823,00	-	-	-	12.538.823,00	12.538.823,00	-
2013	5 Tahun	54.874.930,20	-	-	-	54.874.930,20	54.874.930,20	-
2014	4 Tahun	195.982.281,20	-	-	-	195.982.281,20	195.982.281,20	-
2015	3 Tahun	192.350.616,20	-	-	-	192.350.616,20	192.350.616,20	-
2016	2 Tahun	255.708.885,20	-	-	-	255.708.885,20	255.708.885,20	-
2017	1 Tahun	256.315.279,00	-	-	-	256.315.279,00	256.315.279,00	-
2018	< 1 Tahun	103.326.862,50	-	-	-	103.326.862,50	103.326.862,50	-
TOTAL		1.071.097.677,30	-	-	-	1.071.097.677,30	1.071.097.677,30	-

Penyisihan Lain - Lain PAD yang Sah Dinas Perindag

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2017	> 12 Bulan	634.800.000,00	-	-	-	634.800.000,00	634.800.000,00	-
2019		1.481.200.000,00	-	-	-	1.481.200.000,00	1.481.200.000,00	-
TOTAL		2.116.000.000,00	-	-	-	2.116.000.000,00	2.116.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Penyisihan Lain - Lain PAD yang Sah Badan Keuangan Daerah

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Umur	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2013	> 12 Bulan	12.200.000,00	-	-	-	12.200.000,00	12.200.000,00	-
2022		239.486,00	1.197,43	-	-	-	1.197,43	238.288,57
TOTAL		12.439.486,00	1.197,43	-	-	12.200.000,00	12.201.197,43	238.288,57

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-4.2



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

PIUTANG			KRITERIA PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	PIUTANG BERSIH
Tahun	Jenis	Nilai	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
2000-2008	Dana Koperasi 2000-2008	328.750.000,00	-	-	-	328.750.000,00	328.750.000,00	-
2007	Dana Pemberdayaan 2007	4.489.339.000,00	-	-	-	4.489.339.000,00	4.489.339.000,00	-
2008	Dana Pemberdayaan 2008	4.815.140.500,00	-	-	-	4.815.140.500,00	4.815.140.500,00	-
2010	KSU HE WUE ADE 2010	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
2010	KSU SALIKO 2010	5.500.000,00	-	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
2011	KSU HE WUE ADE 2011	23.000.000,00	-	-	-	23.000.000,00	23.000.000,00	-
2013	PINJAMAN LUNAK	66.791.277,00	-	-	-	66.791.277,00	66.791.277,00	-
2013	FORUM KEPALA DESA/LURAH	747.058.000,00	-	-	-	747.058.000,00	747.058.000,00	-
2013	KSU MANNO WADA	213.999.976,00	-	-	-	213.999.976,00	213.999.976,00	-
2013	KSU KOLO HARRU 2013	385.000.000,00	-	-	-	385.000.000,00	385.000.000,00	-
2017	PENGELOLA PABRIK RL	2.339.600.000,00	-	-	-	2.339.600.000,00	2.339.600.000,00	-
		13.423.178.753,00	-	-	-	13.423.178.753,00	13.423.178.753	-

↓



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Organisasi	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Tanaman	Bahan Lainnya	Suku Cadang	Alat Tulis Kantor	Bahan Cetak	Benda Pos	Alat Listrik	Suvenir/ Cendera Mata	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Obat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pakan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	1.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	1.259.006.769,95	-	-	-	-	-	-	6.975.000,00	1.743.489.156,32	-	-	3.009.470.926,27
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	2.151.833.081,00	-	2.465.000,00	-	-	-	-	-	1.522.989.342,00	-	-	3.677.287.423,00
4	Puskesmas Ledumu	-	-	-	-	3.968.250,00	730.000,00	831.000,00	-	-	-	-	44.000,00	10.469.165,00	-	-	16.042.415,00
5	Puskesmas Daleko	-	-	-	-	182.023.366,86	-	260.000,00	-	-	-	-	225.000,00	104.300.716,86	-	-	286.809.083,71
6	Puskesmas Elogo	-	-	-	-	3.823.645,00	-	766.000,00	-	-	-	-	3.314.000,00	22.173.000,00	-	-	30.076.645,00
7	Puskesmas Seba	1.640.000,00	-	2.360.000,00	-	2.295.000,00	20.300.000,00	15.712.500,00	-	-	434.000,00	-	2.683.000,00	30.925.500,00	-	-	76.350.000,00
8	Puskesmas Elmadake	-	-	280.000,00	-	11.717.591,00	-	1.372.675,00	-	-	-	-	277.000,00	9.631.760,00	-	-	23.279.026,00
9	Puskesmas Bolou	-	-	2.505.000,00	-	1.145.000,00	5.782.500,00	16.513.630,00	-	-	-	-	10.648.250,00	16.350.260,00	-	-	52.944.640,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	455.000,00	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	575.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	73.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.730.000,00
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	214.387.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.387.200,00
15	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.666.800,00	-	199.666.800,00
16	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	386.255.475,00	5.680.000,00	97.914.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	133.834.490,00	-	54.116.035,00	677.800.240,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	18.115.000,00	651.383.000,00	-	-	-	-	-	-	-	669.498.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	3.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.520.000,00
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	7.107.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.107.500,00
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pisp, Perindustrian Dan Perdagangan	411.220.050,00	-	70.000.000,00	-	493.741.600,00	129.539.236,00	227.000,00	-	-	-	-	-	-	5.354.679.700,00	-	6.459.407.586,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsifan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.323.000,00	-	-	-	-	25.323.000,00
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	121.934.740,00	-	122.284.740,00
25	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	970.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	970.000,00
29	Bagian Administrasi Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00
31	Bagian Umum	-	-	28.000.000,00	-	-	8.850.000,00	-	-	-	8.422.000,00	-	-	-	-	-	45.272.000,00
32	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan	-	-	-	-	-	-	470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000,00
33	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	8.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.600.000,00
34	Sekretariat Dewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	4.552.500,00	48.930.500,00	325.000,00	1.945.000,00	-	1.030.000,00	-	-	-	56.783.000,00
37	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	-	-	540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.000,00	-	-	-	1.970.000,00
38	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	5.755.000,00	-	360.000,00	-	-	490.000,00	-	-	-	6.605.000,00
39	Kecamatan Sabu Barat	-	-	-	-	-	-	305.000,00	-	-	-	-	73.000,00	-	-	-	378.000,00
40	Kecamatan Sabu Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Sabu Lise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Hawu Mehara	-	-	-	-	-	-	215.000,00	-	390.000,00	-	-	-	-	-	-	605.000,00
43	Kecamatan Raijua	-	-	-	-	-	-	4.720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.720.000,00
44	Kecamatan Sabu Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	412.860.050,00	386.255.475,00	116.565.000,00	97.914.240,00	4.323.941.503,81	238.931.736,00	95.112.805,00	700.313.500,00	1.195.000,00	10.801.000,00	25.323.000,00	27.189.250,00	3.594.163.390,18	5.676.281.240,00	54.116.035,00	15.760.963.224,96

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-6



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN	DATA P3D	SALDO 2021	TAHUN 2022		
			PENAMBAHAN	PELUNASAN	SALDO
DANA PEMBERDAYAAN 2007					
SABU BARAT	1.697.240.000	1.481.980.000	-	-	1.481.980.000
SABU TENGAH	458.520.000	337.995.000	-	-	337.995.000
SABU TIMUR	803.382.000	441.119.000	-	-	441.119.000
SABU LIAE	1.050.065.000	901.465.000	-	-	901.465.000
HAWU MEHARA	1.078.500.000	998.000.000	-	-	998.000.000
RAIJUA	424.500.000	328.780.000	-	-	328.780.000
Total	5.512.207.000	4.489.339.000	-	-	4.489.339.000
DANA PEMBERDAYAAN 2008					
SABU BARAT	1.574.000.000	1.349.420.000	-	-	1.349.420.000
SABU TENGAH	634.340.000	570.760.000	-	-	570.760.000
SABU TIMUR	739.000.000	585.425.500	-	-	585.425.500
SABU LIAE	987.000.000	822.450.000	-	-	822.450.000
HAWU MEHARA	1.127.070.000	1.117.805.000	-	-	1.117.805.000
RAIJUA	425.000.000	369.280.000	-	-	369.280.000
Total	5.486.410.000	4.815.140.500	-	-	4.815.140.500
DANA KOPERASI 2000 - 2008					
SABU BARAT	345.250.000	181.750.000	-	-	181.750.000
SABU TIMUR	146.200.000	88.800.000	-	-	88.800.000
SABU LIAE	44.950.000	25.550.000	-	-	25.550.000
HAWU MEHARA	19.950.000	7.750.000	-	-	7.750.000
RAIJUA	85.400.000	24.900.000	-	-	24.900.000
Total	641.750.000	328.750.000	-	-	328.750.000
PINJAMAN MODAL					
KSU SALIKO 2010	-	5.500.000	-	-	5.500.000
KSU HE WUE ADE 2010	-	9.000.000	-	-	9.000.000
KSU HE WUE ADE 2011	-	23.000.000	-	-	23.000.000
PINJAMAN LUNAK	-	66.791.277	-	-	66.791.277
FORUM KEPALA DESA/LURAH	-	747.058.000	-	-	747.058.000
KSU MANNO WADA	-	213.999.976	-	-	213.999.976
PENGELOLA PABRIK RL	-	2.339.600.000	-	-	2.339.600.000
KSU KOLO HARRU 2013	-	385.000.000	-	-	385.000.000
Total	-	3.789.949.253	-	-	3.789.949.253
Grand Total	11.640.367.000	13.423.178.753	-	-	13.423.178.753



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN						PENGURANGAN						Saldo Akhir		
			Belanja Modal	Hutang Belanja	Kapitalisasi	Hibah	Reclass	Mutasi SKPD	KDP Selesai	BM Tidak Dikapitalisasi	Hibah/Lelang	Reclass	Mutasi SKPD	Ekstrakom		KDP	
1	TANAH	13.975.971.288,00	8.411.920,00	-	-	235.623.500,00	-	615.707.805,00	-	8.411.920,00	10.701.100,00	-	615.707.805,00	-	-	-	14.200.893.688,00
2	PERALATAN MESIN	329.212.117.356,42	9.247.832.312,00	-	285.900.000,00	620.162.270,00	3.273.191.757,00	41.084.258.136,00	-	1.689.742.609,00	2.387.100.280,00	2.825.611.250,00	41.084.258.136,00	2.388.729.766,00	-	-	333.348.019.790,42
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	510.924.197.077,67	31.557.107.226,00	1.348.136.703,60	482.376.899,00	10.267.743.000,00	40.000.000,00	20.782.914.010,00	8.673.751.156,00	2.709.315.648,00	-	174.401.316,80	20.782.914.010,00	800.440.006,00	-	14.328.412.500,00	545.280.742.591,47
4	JALAN, JARINGAN, DAN INSTALASI	680.892.614.545,57	93.612.153.264,00	-	262.103.450,00	-	93.103.300,00	4.629.921.942,00	10.202.063.644,00	748.533.500,00	-	16.192.438,06	4.629.921.942,00	83.297.600,00	22.638.082.819,00	-	761.575.931.846,51
5	ASET TETAP LAINNYA	26.616.177.271,68	2.865.619.475,00	-	180.000.000,00	179.354.893,00	-	205.717.150,00	-	91.759.248,00	-	2.196.351.027,00	205.717.150,00	-	-	-	27.553.041.364,68
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	77.783.920.048,85	-	170.364.000	2.077.700.150	-	-	-	36.966.495.319	-	-	15.994.640	-	-	18.875.814.800	-	98.106.670.077,85
JUMLAH		1.639.404.997.588,19	137.291.124.197,00	1.518.500.703,60	3.288.080.499,00	11.302.883.663,00	3.406.295.057,00	67.318.519.043,00	55.842.310.119,00	5.247.762.925,00	2.397.801.380,00	5.228.550.671,86	67.318.519.043,00	3.272.467.372,00	55.842.310.119,00	-	1.780.065.299.358,93

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-7.1



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP TANAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN			PENGURANGAN			Saldo Akhir
			Belanja Modal	Hibah	Mutasi SKPD	BM Tidak Dikapitalisasi	Hibah/ Lelang	Mutasi SKPD	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	413.049.500,00	-	-	-	413.049.500,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	-	-	-	43.760.050,00	-	-	-	43.760.050,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	13.311.464.883,00	8.411.920,00	235.623.500,00	-	8.411.920,00	10.701.100,00	-	13.536.387.283,00
5	Dinas Pertanian & Pangan	23.450.000,00	-	-	-	-	-	-	23.450.000,00
6	Dinas Perhubungan	23.848.600,00	-	-	-	-	-	-	23.848.600,00
7	Badan Keuangan Daerah	615.707.805,00	-	-	-	-	-	615.707.805,00	-
8	Kecamatan Sabu Barat	-	-	-	120.794.255,00	-	-	-	120.794.255,00
9	Kecamatan Sabu Timur	-	-	-	17.394.000,00	-	-	-	17.394.000,00
10	Kecamatan Sabu Liae	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kecamatan Hawu Mehara	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
12	Kecamatan Raijua	-	-	-	2.910.000,00	-	-	-	2.910.000,00
13	Kecamatan Sabu Tengah	-	-	-	17.500.000,00	-	-	-	17.500.000,00
TOTAL		13.975.971.288,00	8.411.920,00	235.623.500,00	615.707.805,00	8.411.920,00	10.701.100,00	615.707.805,00	14.200.893.688,00



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN						PENGURANGAN					Saldo Akhir
			Belanja Modal	Kapitalisasi	Hibah	Reclass	Mutasi SKPD	BM Tidak Dikapitalisasi	Penjualan & Hibah	Reclass	Mutasi SKPD	Ekstrakom	KDP	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	51.897.882.558,98	1.031.865.930,00	-	-	2.173.366.027,00	1.705.590.191,50	13.045.450,00	228.250.000,00	264.772.633,00	-	309.720.329,00	-	55.992.916.295,48
2	Rumah Sakit Umum Daerah	21.331.048.557,00	3.799.745.739,00	-	9.797.000,00	-	38.259.248.470,00	1.482.469.959,00	-	80.833.700,00	-	99.689.150,00	-	61.736.846.957,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.575.887.907,80	2.113.042.206,00	-	-	-	207.874.997,00	191.310.600,00	-	-	38.259.248.470,00	1.326.049.846,00	-	45.120.196.194,80
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.929.837.062,00	255.203.040,00	-	-	1.800.000,00	301.600,00	-	-	1.788.774.110,00	-	9.594.750,00	-	12.388.772.842,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	743.902.450,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.412.250,00	-	755.490.200,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.205.851.460,00	91.046.000,00	-	-	-	-	-	95.127.840,00	39.930.000,00	-	1.775.000,00	-	3.160.064.620,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.269.241.007,00	13.043.500,00	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	20.700.000,00	-	7.269.584.507,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.015.126.397,00	43.835.000,00	-	-	27.114.275,00	-	2.850.000,00	-	-	-	14.979.850,00	-	2.068.245.822,00
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	626.833.364,00	33.568.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.599.400,00	-	656.802.944,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	9.693.171.327,10	16.500.000,00	-	-	870.939.200,00	-	-	-	-	-	56.468.100,00	-	10.524.142.427,10
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.640.807.723,00	750.000,00	-	-	-	-	-	39.204.000,00	-	-	5.300.000,00	-	1.597.053.723,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.314.592.776,00	19.000.000,00	-	-	-	-	-	25.800.000,00	-	-	6.169.900,00	-	2.301.622.876,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.374.710.770,00	125.523.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.018.800,00	-	3.489.114.970,00
14	Dinas Perhubungan	18.191.805.575,00	68.403.200,00	-	-	6.362.500,00	-	-	885.220.640,00	-	-	-	-	17.381.350.635,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.099.441.272,00	219.204.307,00	-	-	132.300.000,00	-	66.600,00	-	28.484.650,00	-	6.524.468,00	-	3.415.869.861,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	50.966.381.381,00	104.328.980,00	285.000.000,00	-	6.935.850,00	-	-	25.454.000,00	-	-	53.025.000,00	-	51.284.167.211,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.680.126.077,00	4.440.000,00	-	71.015.270,00	-	-	-	-	-	-	8.399.005,00	-	1.747.182.342,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.173.326.950,00	37.100.000,00	-	-	10.250.000,00	-	-	161.744.000,00	-	-	50.499.160,00	-	5.008.433.790,00
19	Dinas Pariwisata	979.422.900,00	473.360.000,00	-	-	-	-	-	70.595.800,00	-	-	60.000,00	-	1.382.127.100,00
20	Bagian Pemerintahan	471.637.500,00	25.750.000,00	-	-	1.100.000,00	-	-	-	-	-	950.000,00	-	497.537.500,00
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	539.018.650,00	14.873.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.449.700,00	-	545.442.150,00
22	Bagian Hukum	463.636.800,00	63.190.000,00	-	-	15.600.000,00	-	-	42.700.000,00	-	-	2.939.000,00	-	496.787.800,00
23	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	584.777.450,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	53.789.000,00	-	-	1.300.000,00	-	534.088.450,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan	1.167.032.485,00	29.194.000,00	-	-	750.000,00	-	-	45.320.000,00	-	-	2.550.000,00	-	1.149.106.485,00
25	Bagian Umum	19.585.982.449,00	281.008.000,00	-	-	-	-	-	535.835.000,00	329.720.000,00	-	158.550.000,00	-	18.842.885.449,00
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	605.009.750,00	22.029.877,00	-	-	-	-	-	-	3.588.000,00	-	3.200.000,00	-	620.251.627,00
27	Bagian Organisasi	604.044.795,00	-	-	-	1.500.300,00	-	-	25.450.000,00	-	-	850.000,00	-	579.245.095,00
28	Inspektoraat Daerah	1.145.049.740,00	24.604.203,00	-	-	-	-	-	19.470.000,00	-	-	4.799.880,00	-	1.145.384.063,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.041.024.498,52	38.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	-	2.077.724.498,52
30	Badan Keuangan Daerah	7.546.696.491,00	100.718.770,00	-	-	15.238.605,00	-	-	108.830.000,00	-	-	2.825.009.666,00	-	4.702.784.200,00
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	2.364.739.586,02	28.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.910.080,00	-	2.384.179.506,02
32	Sekretariat DPRD	5.938.241.754,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.640.200,00	-	5.923.601.554,00
33	Kecamatan Sabu Barat	521.881.346,00	22.335.280,00	-	-	-	164.326.338,00	-	-	-	-	20.785.600,00	-	687.757.364,00
34	Kecamatan Sabu Timur	843.597.317,00	22.822.000,00	-	-	1.935.000,00	277.787.308,00	-	-	-	289.508.157,00	76.101.550,00	-	780.531.918,00
35	Kecamatan Sabu Liae	574.733.100,00	27.077.600,00	-	-	-	135.663.544,00	-	-	-	-	4.524.018,00	-	732.950.226,00
36	Kecamatan Hawu Mehara	751.399.616,00	23.922.000,00	-	539.350.000,00	-	144.067.088,00	-	-	-	-	16.925.400,00	-	1.441.813.304,00
37	Kecamatan Rajua	1.727.317.513,00	4.800.000,00	-	-	-	170.898.582,00	-	-	-	-	26.272.111,00	-	1.876.743.984,00
38	Kecamatan Sabu Tengah	581.399.500,00	29.697.500,00	-	-	-	18.500.017,50	-	-	-	-	2.909.219,00	-	626.687.798,50
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	445.499.501,00	3.100.000,00	-	-	-	-	-	24.310.000,00	-	-	1.758.000,00	-	422.531.501,00
		329.212.117.356,42	9.247.832.312,00	285.900.000,00	620.162.270,00	3.273.191.757,00	41.084.258.136,00	1.689.742.609,00	2.387.100.280,00	2.825.611.250,00	41.084.258.136,00	2.388.729.766,00	-	333.348.019.790,42



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN							PENGURANGAN					Saldo Akhir	
			Belanja Modal	Hutang Belanja	Kapitalisasi	Hibah	Reclass	Mutasi SKPD	KDP Selesai	BM Tidak Dikapitalisasi	Reclass	Mutasi SKPD	Ekstrakom	KDP		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	99.096.884.770,00	9.707.973.887,00	1.348.136.703,60	168.422.089,00	-	-	18.453.700.001,00	1.072.469.568,00	2.604.015.648,00	23.783.013,80	-	499.174.849,00	-	126.720.613.507,80	
2	Rumah Sakit Umum Daerah	24.440.784.599,00	1.342.271.585,00	-	161.017.500,00	-	-	-	4.125.204.160,00	-	-	-	-	29.692.500,00	30.039.585.344,00	
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	73.217.782.532,00	2.668.757.142,00	-	104.201.060,00	-	-	514.888.000,00	-	15.300.000,00	-	-	46.765.101,00	-	76.443.563.633,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	92.099.089.520,67	16.285.916.512,00	-	48.736.250,00	-	-	-	3.446.109.028,00	-	70.118.300,00	-	-	14.298.720.000,00	97.511.013.010,67	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	64.847.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.847.000,00	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.700.000,00	
7	Dinas Perikanan & Pangan	10.930.484.913,00	90.000.000,00	-	-	-	-	2,00	-	90.000.000,00	-	-	15.000.002,00	-	10.915.484.913,00	
8	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000.000,00	
10	Dinas Perhubungan	414.859.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.859.000,00	
11	Dinas Penanaman Modal & PTSP, Perindustrian & Perdagangan	136.856.046.463,00	-	-	-	10.267.743.000,00	-	-	-	-	-	-	33.935.500,00	-	147.089.853.963,00	
12	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	149.519.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.519.000,00	
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.373.050.554,00	-	-	-	-	-	-	29.968.400,00	-	-	-	-	-	2.403.018.954,00	
14	Dinas Pariwisata	35.815.727.200,00	1.462.188.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.540.000,00	-	37.171.375.300,00	
15	Bagian Pemerintahan	14.106.785.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.106.785.416,00	
16	Bagian Hukum	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	
17	Bagian Umum	126.297.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.500.000,00	-	89.797.000,00	
18	Badan Keuangan Daerah	20.861.317.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.782.914.010,00	-	-	78.403.050,00	
19	Sekretariat DPRD	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	
20	Kecamatan Sabu Barat	-	-	-	-	-	40.000.000,00	402.426.000,00	-	-	-	-	36.750.000,00	-	405.676.000,00	
21	Kecamatan Sabu Timur	-	-	-	-	-	-	80.500.003,00	-	-	80.500.003,00	-	-	-	-	
22	Kecamatan Sabu Liae	-	-	-	-	-	-	657.500.000,00	-	-	-	-	-	-	657.500.000,00	
23	Kecamatan Hawu Mehara	-	-	-	-	-	-	445.000.000,00	-	-	-	-	-	-	445.000.000,00	
24	Kecamatan Raijua	31.247.500,00	-	-	-	-	-	228.900.000,00	-	-	-	-	-	-	260.147.500,00	
25	Kecamatan Sabu Tengah	11.774.550,00	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	11.774.554,00	-	-	
JUMLAH			510.924.197.077,67	31.557.107.226,00	1.348.136.703,60	482.376.899,00	10.267.743.000,00	40.000.000,00	20.782.914.010,00	8.673.751.156,00	2.709.315.648,00	174.401.316,80	20.782.914.010,00	800.440.006,00	14.328.412.500,00	545.280.742.591,47



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	Koreksi	PENAMBAHAN					PENGURANGAN					Saldo Akhir
				Belanja Modal	Kapitalisasi	Reclass	Mutasi SKPD	KDP Selesai	BM Tidak Dikapitalisasi	Reclass	Mutasi SKPD	Ekstrakom	KDP	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	147.402.488,00	-	-	-	22.985.000	-	-	-	-	-	-	-	170.387.488,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	5.252.165.032,00	-	706.158.200	23.830.950	-	-	377.333.200	-	-	-	-	-	6.359.487.382,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.280.717.019,00	-	65.970.000	16.372.500	-	-	-	-	-	-	21.660.000	-	2.341.399.519,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	636.630.251.111,57	-	92.836.025.064	221.900.000	70.118.300	4.473.168.092	9.824.730.444	748.533.500	16.192.438	-	44.140.600	22.638.082.819	720.609.243.654,51
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.652.850.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.652.850.900,00
6	Badan Penganggulangan Bencana	841.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841.500,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.980.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.980.400,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	18.100.987.491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.450.000	-	18.084.537.491,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	941.795.950,00	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945.795.950,00
10	Dinas Perhubungan	6.217.407.738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.217.407.738,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.916.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.916.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	2.899.717.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.899.717.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	146.373.474,00	-	-	-	-	156.753.850	-	-	-	-	-	-	303.127.324,00
14	Dinas Pariwisata	145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000,00
15	Bagian Administrasi Pembangunan	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00
16	Bagian Umum	34.223.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.223.500,00
17	Badan Keuangan Daerah	5.285.687.942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.629.921.942	-	-	655.766.000,00
18	Sekretariat DPRD	317.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.000	-	-
19	Kecamatan Sabu Barat	21.980.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.000	-	21.250.000,00
20	Kecamatan Sabu Timur	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
21	Kecamatan Sabu Liae	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00
22	Kecamatan Raijua	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000,00
23	Kecamatan Sabu Tengah	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
JUMLAH		680.892.614.545,57	-	93.612.153.264,00	262.103.450,00	93.103.300,00	4.629.921.942,00	10.202.063.644,00	748.533.500,00	16.192.438,06	4.629.921.942,00	83.297.600,00	22.638.082.819,00	761.575.931.846,51

4

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-7.5



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			Saldo Akhir
			Belanja Modal	Kapitalisasi	Hibah	Mutasi SKPD	BM Tidak Dikapitalisasi	Reclass	Mutasi SKPD	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga	23.999.469.078,00	2.864.131.375	-	-	205.717.150	91.755.748	2.196.351.027	-	24.781.210.828,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.735.050,00	-	-	71.417.350	-	-	-	-	74.152.400,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	37.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	37.800.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana	5.946.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.946.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.001.500,00	-	-	-	-	-	-	-	26.001.500,00
7	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.087.700,00	-	-	-	-	-	-	-	5.087.700,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	1.214.083.885,68	-	180.000.000	-	-	-	-	-	1.394.083.885,68
9	Dinas Lingkungan Hidup	15.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.400.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.373.100,00	-	-	-	-	-	-	-	9.373.100,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.344.400,00	-	-	-	-	-	-	-	11.344.400,00
12	Dinas Perhubungan	3.943.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.943.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.886.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.886.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	658.095.748,00	-	-	107.937.543	-	-	-	-	766.033.291,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.828.610,00	973.100	-	-	-	3.500	-	-	17.798.210,00
17	Dinas Pariwisata	156.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	156.350.000,00
18	Bagian Pemerintahan	16.825.800,00	-	-	-	-	-	-	-	16.825.800,00
19	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.500.000,00
20	Bagian Hukum	57.450.100,00	-	-	-	-	-	-	-	57.450.100,00
21	Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	11.500.700,00	-	-	-	-	-	-	-	11.500.700,00
22	Bagian Administrasi Pembangunan	5.996.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.996.000,00
23	Bagian Umum	24.214.800,00	-	-	-	-	-	-	-	24.214.800,00
24	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
25	Bagian Organisasi	15.891.850,00	-	-	-	-	-	-	-	15.891.850,00
26	Inspektorat Daerah	11.133.200,00	-	-	-	-	-	-	-	11.133.200,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	334.000,00	-	-	-	-	-	-	-	334.000,00
28	Badan Keuangan Daerah	237.767.550,00	-	-	-	-	-	-	205.717.150	32.050.400,00
29	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	13.619.400,00	-	-	-	-	-	-	-	13.619.400,00
30	Sekretariat DPRD	14.196.300,00	515.000	-	-	-	-	-	-	14.711.300,00
31	Kecamatan Raijua	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00
32	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	15.903.500,00	-	-	-	-	-	-	-	15.903.500,00
JUMLAH		26.616.177.271,68	2.865.619.475,00	180.000.000,00	179.354.893,00	205.717.150,00	91.759.248,00	2.196.351.027,00	205.717.150,00	27.553.041.364,68

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAMPIRAN NERACA N-7.6



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN KDP
PER 31 DESEMBER 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		Saldo Akhir
			KDP	Hutang	Kapitalisasi	Reclass	KDP Selesai	
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.072.469.568,00	-	-	-	-	1.072.469.568,00	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	5.882.929.585,00	29.692.500,00	-	-	-	4.502.537.360,00	1.410.084.725,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.366.061.575,00	-	-	-	-	-	1.366.061.575,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.608.337.301,85	36.936.802.819,00	170.364.000,00	1.943.517.800,00	15.994.640,00	13.270.839.472,00	84.372.187.808,85
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.132.225,00	-	-	34.887.300,00	-	-	74.019.525,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	24.400.000,00	-	-	-	-	-	24.400.000,00
7	Dinas Perhubungan	153.230.000,00	-	-	99.295.050,00	-	-	252.525.050,00
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	10.544.391.394,00	-	-	-	-	-	10.544.391.394,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.968.400,00	-	-	-	-	29.968.400,00	-
10	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
11	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	63.000.000,00	-	-	-	-	-	63.000.000,00
JUMLAH		77.783.920.048,85	36.966.495.319,00	170.364.000,00	2.077.700.150,00	15.994.640,00	18.875.814.800,00	98.106.670.077,85



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

No	Unit Organisasi	Saldo Awal	PENAMBAHAN	Mutasi SKPD	PENGURANGAN					Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan					Saldo Bersih 31/12/2022	
					Koreksi Lebih Catat	Reklas	Pindah Ekstrakom	Progress Barang Ditemukan	Penjualan/ Hibah		Awal	Reklas	Seroja	Penjualan/ Hibah	Ekstrakom		Total
27	Bagian Organisasi	52.291.180,00	-	-	1.500.300,00	-	3.200.000,00	-	-	47.590.880,00	(50.213.379,00)	-	-	-	3.200.000,00	(47.013.379)	577.501,00
28	Inspektorat Daerah	173.290.560,00	-	-	-	-	-	-	-	173.290.560,00	(163.189.757,00)	-	(3.008.335,00)	-	-	(166.198.092)	7.092.468,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	105.615.701,48	-	-	-	-	2.955.490,00	-	-	102.660.211,48	(85.920.734,00)	-	-	-	-	(85.920.734)	16.739.477,48
30	Badan Keuangan Daerah	8.851.297.622,00	987.446.163,00	(40.000.000,00)	1.294.995,00	-	9.291.000,00	13.943.600,00	6.270.000,00	9.767.944.190,00	(1.602.488.994,00)	1.294.995,00	-	6.270.000,00	-	(1.594.923.999)	8.173.020.191,00
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	183.164.104,00	-	-	-	-	2.925.000,00	-	-	180.239.104,00	(155.284.574,00)	-	-	-	-	(155.284.574)	24.954.530,00
32	Sekretariat DPRD	1.030.585.730,00	-	-	-	-	9.174.650,00	-	-	1.021.411.080,00	(791.772.298,00)	-	-	-	-	(791.772.298)	229.638.782,00
33	Kecamatan Sabu Barat	26.679.600,00	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	26.679.600,00	(17.824.650,00)	-	(700.000,00)	-	-	(18.524.650)	8.154.950,00
34	Kecamatan Sabu Timur	16.481.328,00	370.008.160,00	-	1.935.000,00	-	-	-	-	384.554.488,00	(7.121.497,00)	-	-	-	-	(7.121.497)	377.432.991,00
35	Kecamatan Sabu Liae	8.654.600,00	-	-	-	-	-	-	-	8.654.600,00	(6.662.000,00)	-	-	-	-	(6.662.000)	1.992.600,00
36	Kecamatan Hawu Mehara	83.422.125,00	-	-	-	-	1.350.000,00	-	-	82.072.125,00	(76.469.349,00)	-	-	1.350.000,00	-	(75.119.349)	6.952.776,00
37	Kecamatan Raijua	209.938.375,00	-	-	-	-	27.301.000,00	-	-	182.637.375,00	(171.780.661,00)	-	-	-	-	(171.780.661)	10.856.714,00
38	Kecamatan Sabu Tengah	59.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	59.620.000,00	(33.187.500,00)	-	-	-	-	(33.187.500)	26.432.500,00
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	42.703.700,00	-	-	-	-	1.200.000,00	-	-	41.503.700,00	-	-	-	-	-	-	41.503.700,00
		69.355.286.457,71	3.843.299.370,24	-	73.785.845,00	40.000.000,00	122.814.722,00	1.050.659.575,00	1.426.756.230,00	70.484.569.455,95	(16.409.865.381,40)	916.284.772,00	(109.384.982,00)	1.385.166.230,00	10.212.802,00	(14.207.586.559,40)	56.276.982.896,55



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAFTAR DANA CADANGAN
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Tujuan Pembentukan	Perda No	Tanggal	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Pembentukan	Pendapatan Bunga	Pencairan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8-9)
1	Dana Cadangan Gedung	Pembangunan Pabrik Karung	Perda Nomor 4 Tahun 2017	20/10/2017	30.361.845.790,07	-	851.904.095,88	-	31.213.749.885,95
2	Dana Cadangan Gedung	Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD	Perda Nomor 4 Tahun 2017	20/10/2017	3.296.218.140,64	-	270.922,04	3.296.489.062,68	-
3	Dana Cadangan Irigasi	Pembangunan Embung	Perda Nomor 4 Tahun 2017	20/10/2017	1.534.477.754,55	-	126.121,46	1.534.603.876,01	-
4	Dana Cadangan Jalan	Pembangunan Jalan	Perda Nomor 4 Tahun 2017	20/10/2017	3.564.049.848,90	-	292.935,60	3.564.342.784,50	-
5	Dana Cadangan Lainnya	Pembangunan Taman Doa Skyber	Perda Nomor 4 Tahun 2017	20/10/2017	1.507.800.120,72	-	123.928,78	1.507.924.049,50	-
					40.264.391.654,88	-	852.718.003,76	9.903.359.772,69	31.213.749.885,95

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
Lampiran N-9



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DATA PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT	35.492.830.000,00	7.000.000.000,00	-	42.492.830.000,00
2	PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU	263.192.462,51	-	8.697.968,69	254.494.493,82
TOTAL		35.756.022.462,51	7.000.000.000,00	8.697.968,69	42.747.324.493,82



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
REKAPITULASI DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan	BELANJA				Saldo Akhir
				Pegawai	Barang Jasa	Modal	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=3+4-8
1	SMP Negeri 1 Sabu Barat	9.295.207,00	427.949.667,00	50.400.000,00	369.344.874,00	17.500.000,00	437.244.874,00	0,00
2	SMP Negeri 2 Sabu Barat	352.614,00	582.400.000,00	185.860.000,00	348.964.673,00	47.848.000,00	582.672.673,00	79.941,00
3	SMP Negeri 3 Sabu Barat	14.700.992,00	168.664.917,00	27.000.000,00	111.302.917,00	37.433.992,00	175.736.909,00	7.629.000,00
4	SMP Negeri 4 Sabu Barat	3.082.406,00	209.459.009,00	34.860.000,00	128.682.406,00	48.950.000,00	212.492.406,00	49.009,00
5	SMP Negeri 5 Menia	1.180.209,00	324.710.000,00	91.800.000,00	175.689.838,00	58.400.000,00	325.889.838,00	371,00
6	SMP Negeri 6 Sabu Barat	7.162.523,00	279.884.000,00	36.600.000,00	185.954.023,00	64.492.500,00	287.046.523,00	0,00
7	SMP Negeri 7 Sabu Barat	3.456.285,00	305.920.000,00	83.000.000,00	175.305.285,00	51.071.000,00	309.376.285,00	0,00
8	SMP Negeri 8 Sabu Barat	33.927.769,00	357.120.000,00	53.340.000,00	239.507.600,00	98.100.000,00	390.947.600,00	100.169,00
9	SMP Satu Atap Teriwu	4.191.088,00	128.587.891,00	22.500.000,00	100.978.979,00	9.300.000,00	132.778.979,00	0,00
10	SMP Negeri 1 Sabu Timur	4.822,00	307.200.000,00	77.700.000,00	187.020.922,00	34.868.000,00	299.588.922,00	7.615.900,00
11	SMP Satu Atap Kujiratu	2.399.754,00		56.200.000,00	168.087.154,00	41.792.600,00	266.079.754,00	-263.680.000,00
12	SMP Negeri 2 Sabu Timur	5.301.413,00	172.800.000,00	41.700.000,00	78.339.413,00	58.062.000,00	178.101.413,00	0,00
13	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	37.112.199,00	618.132.500,00	104.800.000,00	411.413.500,00	138.965.000,00	655.178.500,00	66.199,00
14	SMP Negeri 2 Sabu Tengah	4.146.159,00	138.240.000,00	26.200.000,00	86.986.000,00	24.700.000,00	137.886.000,00	4.500.159,00
15	SMP Negeri 3 Sabu Tengah	197,00	232.959.803,00	30.350.000,00	134.106.300,00	68.503.700,00	232.960.000,00	0,00
16	SMP Negeri 1 Hawu Mehara	7.127.358,00	572.160.000,00	128.700.000,00	362.761.123,00	87.826.235,00	579.287.358,00	0,00
17	SMP Negeri 2 Hawu Mehara	36,00	280.665.000,00	48.290.000,00	163.803.000,00	48.572.000,00	280.665.000,00	36,00
18	SMP Negeri 3 Hawu Mehara	27.031.353,64	603.901.000,00	126.978.000,00	423.766.000,00	80.103.954,00	630.847.954,00	84.399,64
19	SMP Satu Atap Lederaga	3.271.056,00	454.265.500,00	101.700.000,00	277.840.556,00	77.996.000,00	457.536.556,00	0,00
20	SMP Negeri 1 Sabu Liae	13.700.534,00	444.466.911,00	77.470.000,00	307.731.891,00	72.400.000,00	457.601.891,00	565.554,00
21	SMP Negeri 2 Liae	7.418.840,00	323.840.000,00	40.050.000,00	259.353.700,00	31.850.000,00	331.253.700,00	5.140,00
22	SMP Satu Atap Eirobo	625.500,00	232.334.500,00	29.200.000,00	176.444.000,00	27.316.000,00	232.960.000,00	0,00
23	SMP Negeri 1 Raijua	23.452.193,00	403.064.973,00	108.425.000,00	194.393.793,00	120.939.000,00	423.757.793,00	2.759.373,00
24	SMP Negeri 2 Raijua	194.096,00	410.880.000,00	67.800.000,00	306.120.000,00	36.000.000,00	409.920.000,00	1.154.096,00
	Total SMP	209.134.603,64	7.959.605.671,00	1.650.923.000,00	5.373.897.947,00	1.382.989.981,00	8.407.810.928,00	-239.070.653,36
25	SD Negeri 1 Seba	0,00	396.900.000,00	99.150.000,00	210.462.600,00	87.287.400,00	396.900.000,00	0,00
26	SD Negeri 2 Seba	183.174,00	185.849.516,00	61.050.000,00	105.432.690,00	19.550.000,00	186.032.690,00	0,00
27	SD Negeri 3 Seba	7.290.097,00	400.470.000,00	55.300.000,00	231.509.000,00	120.580.000,00	407.389.000,00	371.097,00
28	SD Negeri Mapipa	1.101.293,00	116.689.600,00	12.300.000,00	77.149.293,00	28.341.600,00	117.790.893,00	0,00
29	SD Negeri Leomadamu	495.890,00	165.900.000,00	54.000.000,00	96.769.890,00	15.626.000,00	166.395.890,00	0,00
30	SD Negeri Leoge	279.560,00	212.100.000,00	63.100.000,00	123.279.560,00	26.000.000,00	212.379.560,00	0,00
31	SD Negeri 4 Seba	0,00	156.366.684,00	57.000.000,00	72.216.684,00	27.150.000,00	156.366.684,00	0,00
32	SD Inpres Delo	1.033,00	128.100.000,00	42.820.000,00	73.796.000,00	128.101.000,00	128.101.000,00	33,00
33	SD Negeri Maballa	268.589,00	133.035.000,00	65.150.000,00	64.653.589,00	3.500.000,00	133.303.589,00	0,00
34	SD Negeri Luipau	4.710.729,00	119.700.000,00	45.000.000,00	62.060.729,00	17.350.000,00	124.410.729,00	0,00
35	SD Negeri Titinalede	5.729.000,00	183.355.369,00	15.600.000,00	118.649.000,00	54.805.000,00	189.054.000,00	30.369,00
36	SD Negeri Raemude	0,00	72.765.000,00	39.300.000,00	33.465.000,00	0,00	72.765.000,00	0,00
37	SD Negeri Teriwu	287.700,00	193.200.000,00	32.650.000,00	116.287.700,00	44.550.000,00	193.487.700,00	0,00
38	SD Inpres Ledeaana	4.610,00	156.450.000,00	36.000.000,00	98.824.610,00	21.630.000,00	156.454.610,00	0,00
39	SD Negeri Raenalulu	2.295.200,00	143.654.800,00	64.180.000,00	59.684.500,00	22.085.500,00	145.950.000,00	0,00
40	SD Negeri 5 Sabu Barat	804.380,00	172.793.100,00	45.000.000,00	110.647.480,00	17.950.000,00	173.597.480,00	0,00
41	SD Negeri Ledekapak	2.474.100,00	144.666.576,00	37.100.000,00	82.288.800,00	27.561.200,00	146.950.000,00	190.676,00
42	SD Negeri Kejoboloko	847.000,00	150.150.000,00	37.700.000,00	77.527.000,00	34.770.000,00	150.997.000,00	0,00
43	SD Inpres Kujiratu	305.316,00	162.750.000,00	21.450.000,00	104.585.000,00	36.715.000,00	162.750.000,00	305.316,00
44	SD Negeri Huwaga	254,00	72.150.000,00	12.800.000,00	41.333.054,00	18.017.200,00	72.150.254,00	0,00
45	SD Negeri Keliha	332.000,00	143.838.709,00	25.850.000,00	92.104.209,00	26.216.500,00	144.170.709,00	0,00
46	SD Negeri Eilode	641.943,00	186.900.000,00	54.900.000,00	102.075.000,00	30.500.000,00	187.475.000,00	66.943,00
47	SD Negeri Padadue	2.202,00	139.454.000,00	28.800.000,00	88.696.000,00	21.958.000,00	139.454.000,00	2.202,00
48	SD Negeri Jiwuwu	253.776,00	178.154.950,00	26.300.000,00	115.444.976,00	36.608.800,00	178.353.776,00	54.950,00
49	SD Negeri Matei	135.084,00	88.200.000,00	27.650.000,00	52.730.000,00	7.820.000,00	88.200.000,00	135.084,00
50	SD Inpres Eimau	2.656.039,00	239.400.000,00	48.600.000,00	139.999.039,00	50.925.000,00	239.524.039,00	2.532.000,00
51	SD Negeri Loboaju	0,00	78.750.000,00	17.300.000,00	57.820.000,00	3.630.000,00	78.750.000,00	0,00
52	SD Negeri Tada	72.872,00	69.090.000,00	16.550.000,00	51.817.872,00	795.000,00	69.162.872,00	0,00
53	SD Inpres Daielko	61.823,00	202.650.000,00	31.990.000,00	137.541.323,00	33.180.500,00	202.711.823,00	0,00
54	SD Negeri Lobohele	3.808.242,00	222.600.000,00	48.100.000,00	117.532.000,00	60.776.000,00	226.408.000,00	242,00
55	SD Negeri Lederaga	1.659.912,00	242.250.000,00	47.212.500,00	105.892.700,00	89.424.800,00	242.530.000,00	1.379.912,00
56	SD Inpres Tanajawa	13.410.006,00	156.579.350,00	19.200.000,00	120.162.706,00	30.620.000,00	169.982.706,00	6.650,00
57	SD Inpres Molie	1.438.245,00	179.550.000,00	33.700.000,00	136.988.245,00	10.300.000,00	180.988.245,00	0,00
58	SD Inpres Pedarro	200.210,00	204.750.000,00	45.800.000,00	119.070.210,00	40.080.000,00	204.950.210,00	0,00
59	SD Negeri Lobolauw	10.336.410,00	139.569.600,00	35.934.000,00	80.917.000,00	33.055.010,00	149.906.010,00	0,00
60	SD Negeri Gelanalulu	55,00	164.850.000,00	49.050.000,00	84.181.000,00	31.619.000,00	164.850.000,00	55,00
61	SD Negeri Gurimonearu	3.084,00	184.800.000,00	45.600.000,00	77.483.800,00	61.719.284,00	184.803.084,00	0,00
62	SD Negeri Ledea	5.227.140,00	106.034.300,00	37.100.000,00	71.161.440,00	3.000.000,00	111.261.440,00	0,00
63	SD Inpres Daiiae	226.006,00	63.000.000,00	21.650.000,00	23.350.000,00	18.000.000,00	63.000.000,00	226.006,00
64	SD Negeri Deme	288.368,00	181.650.000,00	27.300.000,00	125.488.368,00	29.150.000,00	181.938.368,00	0,00
65	SD Inpres Ledeke	0,00	119.490.000,00	10.850.000,00	64.690.000,00	43.950.000,00	119.490.000,00	0,00
66	SD Inpres Eirobo	100,00	119.340.750,00	48.000.000,00	61.840.850,00	9.500.000,00	119.340.850,00	0,00
67	SD Inpres Ledemera	2.377.513,00	149.874.400,00	9.600.000,00	90.601.913,00	52.050.000,00	152.251.913,00	0,00
68	SD Negeri Dainao	310.876,00	85.050.000,00	26.300.000,00	47.643.000,00	11.417.000,00	85.360.000,00	876,00
69	SD Negeri Ledeke 1	61.768.989,00	109.710.000,00	31.050.000,00	116.683.000,00	23.712.600,00	171.445.600,00	33.389,00
70	SD Negeri Lokajuli	8.741,00	181.650.000,00	41.400.000,00	115.353.741,00	24.905.000,00	181.658.741,00	0,00
71	SD Negeri Bolua	0,00	178.500.000,00	35.600.000,00	117.525.000,00	25.375.000,00	178.500.000,00	0,00
72	SD Negeri Boko	10.753,00	106.050.000,00	35.200.000,00	59.000.000,00	11.850.000,00	106.050.000,00	10.753,00
73	SD Negeri Ledeke 2	0,00	210.000.000,00	32.150.000,00	152.800.000,00	24.050.000,00	209.000.000,00	1.000.000,00
	Total SD	132.308.314,00	7.898.781.704,00	1.856.386.500,00	4.687.215.571,00	1.481.141.394,00	8.024.743.465,00	6.346.553,00
	Grand Total	341.442.917,64	15.858.387.375,00	3.507.309.500,00	10.061.113.518,00	2.864.131.375,00	16.432.554.393,00	-232.724.100,36



PEMERINTAN KABUPATEN SABU RAIJUA
REKAPITULASI DANA BOP PAUD DAN KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama Sekolah	Pendapatan			Belanja		
		Tahap I	Tahap II	Total	Tahap I	Tahap II	Total
1	BOP PAUD	1.312.374.000,00	1.248.368.000,00	2.560.742.000,00	1.312.374.000,00	1.248.368.000,00	2.560.742.000,00
	BOP PAUD NEGERI	20.400.000,00	19.500.000,00	39.900.000,00	20.400.000,00	19.500.000,00	39.900.000,00
	BOP PAUD SWASTA	1.291.974.000,00	1.228.868.000,00	2.520.842.000,00	1.291.974.000,00	1.228.868.000,00	2.520.842.000,00
2	BOP KESETARAAN:	83.955.000,00	44.445.000,00	128.400.000,00	83.955.000,00	44.445.000,00	128.400.000,00
	BOP KESETARAAN NEGERI	31.778.000,00	16.822.000,00	48.600.000,00	31.778.000,00	16.822.000,00	48.600.000,00
	BOP KESETARAAN SWASTA	52.177.000,00	27.623.000,00	79.800.000,00	52.177.000,00	27.623.000,00	79.800.000,00
		1.396.329.000,00	1.292.813.000,00	2.689.142.000,00	1.396.329.000,00	1.292.813.000,00	2.689.142.000,00



**RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	208.857.227,00	194.932.087,00	13.925.140,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	101.839.675,00	96.823.785,00	5.015.890,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	98.017.552,00	89.108.302,00	8.909.250,00
1.2.	Pendapatan Transfer	96.763.396.217,00	89.218.056.593,00	7.545.339.624,00
1.2.1.	Dana Desa	61.458.836.000,00	54.864.755.440,00	6.594.080.560,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	794.554.217,00	430.525.271,00	364.028.946,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	34.510.006.000,00	33.922.775.882,00	587.230.118,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	194.188.316,68	104.746.335,71	89.441.980,97
1.3.6.	Bunga Bank	186.281.125,68	104.746.335,71	81.534.789,97
1.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	7.907.191,00	0,00	7.907.191,00
	JUMLAH PENDAPATAN	97.166.441.760,68	89.517.735.015,71	7.648.706.744,97
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Pegawai	20.594.904.000,00	16.882.868.000,00	3.712.036.000,00
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	2.479.250.000,00	2.051.000.000,00	428.250.000,00
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	14.921.654.000,00	12.242.268.000,00	2.679.386.000,00
2.1.4.	Tunjangan BPD	3.194.000.000,00	2.589.600.000,00	604.400.000,00
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.823.664.138,56	34.374.350.761,57	11.449.313.376,99
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.416.849.357,01	7.976.464.352,57	3.440.385.004,44
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.636.060.331,00	7.410.648.187,00	3.225.412.144,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	664.404.052,00	348.349.355,00	316.054.697,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	323.763.432,00	267.972.920,00	55.790.512,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.563.933.806,00	5.599.413.250,00	964.520.556,00
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	448.485.418,55	140.539.782,00	307.945.636,55
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	15.770.167.742,00	12.630.962.915,00	3.139.204.827,00
2.3.	Belanja Modal	17.996.418.471,64	12.469.034.581,00	5.527.383.890,64
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	2.440.102.940,00	1.901.462.449,00	538.640.491,00
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.364.111.715,64	5.758.685.730,00	2.605.425.985,64
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	4.187.473.089,00	2.922.573.609,00	1.264.899.480,00
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	259.690.180,00	154.714.180,00	104.976.000,00
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	1.889.863.700,00	1.234.615.700,00	655.248.000,00
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	289.640.652,00	127.006.100,00	162.634.552,00
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	535.286.195,00	339.726.813,00	195.559.382,00
2.4.	Belanja Tidak Terduga	19.333.979.647,00	16.229.648.750,00	3.104.330.897,00
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	19.333.979.647,00	16.229.648.750,00	3.104.330.897,00
	JUMLAH BELANJA	103.748.966.257,20	79.955.902.092,57	23.793.064.164,63

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.582.524.496,52)	9.561.832.923,14	16.144.357.419,66
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.202.666.156,52	3.942.602.358,04	3.260.063.798,48
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.142.666.156,52	3.882.602.358,04	3.260.063.798,48
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	7.152.666.156,52	3.942.602.358,04	3.210.063.798,48
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	570.141.660,00	13.504.435.281,18	(12.934.293.621,18)

